



Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia



Copyright © International Labour Organization 2012
ILO Country Office Jakarta
Menara Thamrin, 22nd Floor
Jalan MH Thamrin Kav. 3
Jakarta
10250
Indonesia

First published 2012

Publications of the International Labour Office enjoy copyright under Protocol 2 of the Universal Copyright Convention. Nevertheless, short excerpts from them may be reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. For rights of reproduction or translation, application should be made to ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. The International Labour Office welcomes such applications. Libraries, institutions and other users registered with reproduction rights organizations may make copies in accordance with the licences issued to them for this purpose. Visit www.ifro.org to find the reproduction rights organization in your country.

The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers.

The responsibility for opinions expressed in signed articles, studies and other contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an endorsement by the International Labour Office of the opinions expressed in them. Reference to names of firms and commercial products and processes does not imply their endorsement by the International Labour Office, and any failure to mention a particular firm, commercial product or process is not a sign of disapproval. ILO publications and electronic products can be obtained through major booksellers or ILO local offices in many countries, or direct from ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Catalogues or lists of new publications are available free of charge from the above address, or by email: pubvente@ilo.org
Visit our website: www.ilo.org/publns

Graphic design in Indonesia
Photocomposed in Indonesia
Printed in Indonesia

Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia

**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia**

**bekerjasama dengan
International Labour Organization**



Kata Pengantar

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Republik Indonesia

Pariwisata dan ekonomi kreatif memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia. Hal ini dapat dilihat antara lain dari kontribusinya terhadap PDB dan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Secara bersamaan, pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi 11,8% terhadap PDB Indonesia dan 14,66% terhadap total lapangan kerja.

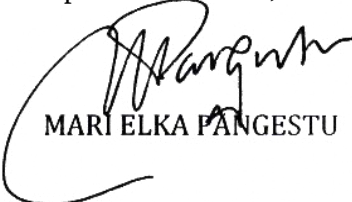
Dalam mengembangkan sektor ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan visi yaitu "terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, melalui pariwisata dan ekonomi kreatif". Keberlanjutan jelas merupakan kunci dalam pencapaian visi ini, karena kualitas hidup tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa keberlanjutan.

Sejalan dengan latar belakang tersebut di atas, saya sangat mendukung upaya ILO yang didukung oleh Pemerintah Australia (Ausaid) untuk mengembangkan Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak dan Ramah Lingkungan (Green Jobs) untuk Indonesia. Rencana strategis yang menggambarkan kerangka kerja untuk perencanaan pariwisata yang berkelanjutan, dan menawarkan sejumlah strategi kunci serta strategi pelaksanaannya ini dapat menjadi acuan penting untuk mencapai keberlanjutan dan penyediaan lapangan kerja yang layak dan ramah lingkungan dalam sektor pariwisata. Dengan menggunakan rencana strategis ini, kami berharap bahwa keberlanjutan dan lapangan kerja yang layak dan ramah lingkungan dapat diarusutamakan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan di Indonesia

Saya sungguh berterima kasih kepada ILO dan Pemerintah Australia untuk upaya ini, dan berharap bahwa kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut untuk waktu yang akan datang.

Jakarta, 10 September 2012

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia,



MARI ELKA PANGESTU



Kata Pengantar

Sebagai Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) kami menganggap pariwisata sebagai sektor penting, di mana prioritas pembangunan nasional yang pro-poor, pro-growth, pro-environment dan pro-jobs menjadi satu.

Bergerak menuju ekonomi yang hijau dan iklim pariwisata yang tangguh semakin penting untuk memastikan jalur pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia, tidak hanya dalam jangka panjang, tetapi juga dalam jangka pendek. Praktik ramah lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan iklim bukan merupakan pilihan lagi.

Tindakan telah diambil oleh Pemerintah, pengusaha, perusahaan, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bergerak ke arah pola yang lebih berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata. Akibatnya, pergeseran di pasar tenaga kerja pariwisata, permintaan baru untuk keterampilan yang ramah lingkungan (hijau) dan re-skilling program, profil pekerjaan yang baru dan disesuaikan dan juga keterampilan serta langkah-langkah khusus untuk membantu pekerja, pengusaha dan perusahaan beradaptasi dengan perubahan merupakan bagian penting dalam transisi ini. Dengan adanya perubahan yang akan dilakukan dalam sektor pariwisata untuk menyesuaikan terhadap pola kerja yang berkelanjutan, kebijakan untuk memanfaatkan potensi pekerjaan yang ramah lingkungan dan menghidupkan pekerjaan yang ada di sektor pariwisata akan lebih diminati.

Rencana Strategis untuk pariwisata yang berkelanjutan dan Green Jobs dalam hal ini merupakan sebuah terobosan dalam pembuatan kebijakan yang inovatif, kerjasama dan koordinasi menangani isu-isu secara keseluruhan dengan maksud untuk menciptakan kerangka kebijakan untuk pelaksanaan pariwisata yang berkelanjutan dengan green jobs untuk Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, pekerja dan pengusaha, dan masyarakat yang sejahtera secara keseluruhan. Rencana Strategis, dengan ini, mendukung kebijakan pemerintah yang ada, menekankan potensi dan perlu untuk praktik yang ramah lingkungan, memperkenalkan pendekatan terpadu untuk promosi industri pariwisata berkelanjutan yang banyak kesempatan kerjanya dengan menyajikan strategi kunci yang menunjukkan arah ke depan.

Saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada konstituen ILO, dan khususnya kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan ILO dalam mengembangkan dokumen penting ini. Saya juga ingin berterima kasih khususnya kepada Ibu Myra Gunawan sebagai penulis utama dan Bapak Oliver Ortis sebagai penulis serta semua pakar nasional dan internasional, yang telah berpartisipasi dalam proses konsultasi persiapan dokumen ini..

Keterlibatan beragam mitra nasional dalam dialog tingkat tinggi untuk pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan bagi Indonesia dengan Green Jobs mengarah kepada persiapan dokumen ini dapat dianggap sebagai sebuah contoh luar biasa bagaimana kerjasama dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Saya optimis bahwa dengan komitmen yang kuat dari kita semua dan dengan adanya rencana strategis ini untuk membimbing kita, pariwisata berkelanjutan di Indonesia satu langkah lebih dekat.



Peter van Rooij
Direktur
ILO Indonesia dan Timor-Leste

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam pengembangan Rencana Strategis ini yang kami tidak mungkin menyebutkan semua kontributor yang telah berpartisipasi dalam pengembangan rencana strategis ini, tetapi kami pastikan semua masukan telah kami rangkum ke dalam dokumen kebijakan ini. Terima kasih yang sebesar besarnya kami ucapkan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Apindo, Serikat Pekerja dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan lebih dari 250 pejabat nasional antara lain Bapak Wardiyatmo, Bapak Firmansyah Rahim, Bapak Henky Hermantoro, Ibu Ni Wayan Giri Adnyani, Bapak Abdul Wahab Bangkono, Bapak Guntur Wicaksono dan Ibu Nora Ekaliana atas sumbang sarannya, khususnya, kepada Yang Terhormat: Ibu Menteri Dr. Mari Elka Pangestu SE, Msc dan Bapak Menteri Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar yang telah berperan mengarahkan pengembangan Rencana Strategis ini.

Berikutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada BAPPEDA Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur yang telah menyelenggarakan diskusi dan konsultasi Rencana Strategis.

Dalam hal ini ILO berperan sebagai fasilitator memberikan bantuan teknis dan koordinasi dalam persiapan pembuatan Rencana Strategis. Staff ahli yang terlibat dalam ini adalah Mr. Vincent Jugault, Mr. Peter van Rooij, Mr. Matthew Hengesbaugh, Mr. Muce Mochtar, and Mr. Steve Noakes (konsultan).

Terakhir, para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Wolfgang Weinz (ILO), Mr. Stefanos Fotiou (UNEP), Ms. Zorits Urosevic (UNWTO), and Ms. Adrienne Stork (UNCTAD) yang telah bersedia untuk mengulas dokumen ini.

Para Penulis

Myra Gunawan

Oliver Ortis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang Indonesia, Visi Pembangunan Pariwisata Nasional dan Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengandung kesamaan prospek, yang menunjuk kepada pentingnya pembangunan berkelanjutan dan khususnya tentang kesejahteraan rakyat, kesatuan dan identitas nasional kualitas hidup, nilai tambah, pelestarian sumberdaya budaya dan seni, dan kerjasama internasional sebagai sasaran kunci yang akan dicapai, dipelihara dan diperluas.

Bagaimana pariwisata dapat berperan dalam memaknai kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup merupakan pertanyaan yang dicoba dijawab dalam Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Pekerjaan yang Layak Lingkungan ini, yang digagas oleh ILO bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ditempatkan dalam payung Proyek ILO tentang Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan di Asia, untuk Indonesia.

Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan di Indonesia bertujuan mengajak-serta berbagai mitra nasional dalam bertukar pandangan dan membangun konsensus untuk membangun industri kepariwisataan yang kuat di Indonesia yang menciptakan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan. Penyiapan Rencana Strategis dimaksudkan untuk membantu Pemerintah, berbagai mitra sosial dan masyarakat luas umumnya untuk mengenal penting dan strategisnya kepariwisataan berkelanjutan dalam pembangunan Indonesia dan menemukan langkah langkah menuju ke arah itu melalui serangkaian strategi kunci yang dapat didukung pada tingkat nasional, provinsi dan lokal. Rencana Strategis ini dirancang berdasarkan pada proses konsultasi yang melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan kunci dari semua tingkat pemerintahan, berbagai komunitas, industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, mitra sosial dan masyarakat umum, mengidentifikasi “ramuan”/unsur-unsur yang hilang untuk dapat memperoleh kemauan politis yang sudah nyata melembaga kuat dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Dengan sumberdaya alam dan budaya yang melimpah serta potensi pasar domestik dan internasional yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan tentang bagaimana menggunakan semua aset ini agar lebih bermanfaat bagi negara dan rakyatnya. Pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan dalam kerangka hukum, namun implementasi praktisnya belum konsisten dilakukan.

Sementara dukungan politis yang kuat untuk pariwisata berkelanjutan dan peluang pertumbuhan pasartetap berlanjut, orientasi sektor publik dan swasta terhadap manfaat ekonomi jangka pendek dalam pembangunan pariwisata merupakan ancaman besar. Di samping itu, sumberdaya manusia dalam pariwisata dan hospitality merupakan isu strategis yang akan menentukan kualitas pencapaian sasaran pembangunan nasional dan juga dalam meningkatkan daya saing global Indonesia. Meskipun demikian perencanaan pariwisata dan administrasi, memperlihatkan kondisinya yang lemah sumberdaya, kekurangan kepakaran khusus dalam kebijakan

publik untuk perencanaan dan pengelolaan pariwisata dan tidak terkoordinasi antar berbagai kementerian dan unit pemerintah yang berbeda.

Karena berbagai kendala tersebut di atas, berbagai upaya pembangunan yang lalu telah menimbulkan ketidakseimbangan dalam sektor dan juga distribusi manfaat yang tidak merata. Lebih lanjut, perlindungan terhadap lingkungan alami dan juga budaya dalam prakteknya masih kurang, banyak permasalahan lingkungan terkait pariwisata yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan isu-isu lingkungan membahayakan keberlanjutan banyak sumberdaya pariwisata dan menjadi ancaman untuk destinasi dan kemakmuran komunitas tuan rumah. Demikian juga dengan ekonomi informal, yang meskipun kontribusi dan perannya dalam pengurangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja untuk mereka yang tidak terlatih signifikan, merupakan isu yang tidak terselesaikan dalam sektor pariwisata terkait dengan berbagai isu tentang pekerjaan layak yang ramah lingkungan, jaminan sosial dan keselamatan serta keberlanjutan jangka panjang.

Pariwisata berkelanjutan jika direncanakan dan dikelola dengan baik dapat secara langsung dan positif berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia, termasuk pengurangan kemiskinan, pembangunan perdesaan, pelestarian budaya dan masyarakat, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim dan memperlihatkan dampak yang bermanfaat terhadap mitigasi perubahan iklim. Agar supaya beroleh manfaat dari berbagai keterkaitan positif ini, diperlukan transisi ekonomi yang berkeadilan menuju pembangunan yang rendah karbon, yang tak berpengaruh mengubah iklim (*climate resilient*), dan ramah lingkungan di Indonesia dengan pandangan kepada Pekerjaan Layak yang ramah lingkungan, termasuk pendidikan dan kesadaran para pemberi kerja/majikan, pekerja, komunitas tuan rumah dan wisatawan, dengan pemerintah daerah berada di garis depan. Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu di antara berbagai pilar kunci transisi semacam itu, dan penciptaan pekerjaan layak yang layak lingkungan mempunyai potensi besar dalam sektor pariwisata melalui berbagai produk ramah lingkungan, jasa ramah lingkungan, pekerjaan publik (*ke-PU-an*) dan bangunan yang ramah lingkungan. Investasi yang dinamis dalam Ekonomi Ramah Lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Efektivitas berbagai kebijakan harus didukung oleh struktur yang memungkinkan terjadinya koordinasi antara para pemangku kepentingan, dan pemberlakuan berbagai campuran perangkat yang berimbang, termasuk instrumen ekonomi dan hukum. Dengan penetapan pembangunan berkelanjutan dalam UU Kepariwisata, pemerintah juga secara khusus telah menyerukan pembangunan dengan berbagai kebijakan yang pro orang miskin, pro penciptaan lapangan pekerjaan dan pro lingkungan, di samping pro pertumbuhan, di seputar mana para pemangku kepentingan kepariwisataan perlu menemukan jalan menuju ke masa depan yang lebih baik.

Untuk melengkapi kerangka kebijakan yang ada, Rencana Strategis ini telah mengidentifikasi berbagai dimensi kebijakan baru untuk diletakkan sebagai elemen-elemen kunci dalam kebijakan pembangunan pariwisata:

- Bersesuaian dengan arahan pro-orang miskin dalam agenda pembangunan nasional, pariwisata diharapkan memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan, khususnya di kawasan sekitar tempat kunjungan wisata
- Pemahaman tentang dan komitmen terhadap Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan yang mendukung transisi pekerja dan pemberi kerja (para majikan) menuju pembangunan yang rendah karbon, mengurangi kecepatan perubahan iklim, ramah lingkungan, dan ramah sosial di Indonesia merupakan bagian penting strategi pariwisata berkelanjutan dan hendaknya menjadi arus utama kebijakan.
- Pencapaian Pekerjaan layak yang ramah lingkungan merupakan bagian penting dari pariwisata berkelanjutan dan agenda pro-orang miskin dan pro -lapangan kerja.
- **Pemuda** sebagai pelaku perjalanan yang potensial, sumberdaya manusia yang terdidik dan terlatih untuk masa sekarang dan masa depan serta sebagai penggiat pembangunan pariwisata berkelanjutan haruslah didorong.
- **Pengarusutamaan Jender dan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak-anak** merupakan dua tujuan yang harus ditekankan lebih lanjut dalam agenda pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
- Agar supaya jalur pembangunan dapat tercapai secara ajeg/konsisten, berbagai standar untuk pariwisata berkelanjutan harus dikembangkan dan diterapkan sebagai panduan.

Terkait dengan perencanaan, perencanaan pembangunan sumberdaya manusia yang komprehensif merupakan dasar untuk keberhasilan industri yang berbasis ilmu pengetahuan dan pondasi untuk pembangunan berkelanjutan dan harus dilakukan. Pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan kepariwisataan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Milenium, RPJPN, perundang-undangan kepariwisataan, dan arah kebijakan kunci dari pemerintah mensyaratkan agar manfaat ekonomi yang berjalan diimbangi dengan pelestarian sumberdaya alam dan budaya serta kesejahteraan komunitas. Indonesia juga perlu mendudukan (kembali) dirinya dalam komunitas ASEAN untuk pembangunan kepariwisataan dan mencapai saling kunjung yang lebih berimbang di antara negara negara anggota. Kerjasama internasional dalam ASEAN dapat tercapai dengan mengintegrasikan dan menyinergikan berbagai elemen yang berbeda dari negara negara anggota untuk dapat meraih daya saing yang lebih baik dalam pasar yang lebih luas.

Berdasarkan dimensi kebijakan dan pendekatan perencanaan yang diusulkan, kerangka strategis untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan mempunyai empat strategi :

- Strategi Kunci 1: Perubahan Pola Pikir semua pemangku kepentingan.
- Strategi Kunci 2: Pengembangan Indikator Pariwisata Berkelanjutan, penyesuaian dan pemberlakuan
- Strategi Kunci 3: Pembiasaan diri terhadap Pola Pikir Baru tentang Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan dan Pariwisata Berkelanjutan.
- Strategi Kunci 4: Memperkenalkan berbagai Mekanisme pengelolaan strategis dan Penegakannya

Setelah Kerangka Strategis, diusulkan 10 strategi implementasi untuk melaksanakan dimensi kebijakan baru, yaitu:

- Strategi Implementasi 1: Mengarusutamakan dan Memromosikan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan melalui Pariwisata Berkelanjutan.
- Strategi Implementasi 2: Memprioritaskan Pengurangan Kemiskinan dalam Kepariwisata.
- Strategi Implementasi 3: Memperkuat Peluang Lapangan Kerja bagi Pemuda dalam Sektor Kepariwisata dan Pariwisata (untuk) Anak Muda.
- Strategi Implementasi 4: Mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberantas Isu-isu terkait Jender dan Perlindungan terhadap Anak.
- Strategi Implementasi 5: Menerapkan Sistem dengan berbagai Aturan/Standar Sukarela untuk Pariwisata Berkelanjutan.
- Strategi Implementasi 6: Menetapkan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian terkait pariwisata sebagai prioritas dalam Agenda Pendidikan dan Penelitian Nasional.
- Strategi Implementasi 7: Identifikasi Mitra Lokal (daerah) yang potensial dan mempunyai komitmen.
- Strategi Implementasi 8: Melakukan Pemasaran yang Selektif dan Kreatif.
- Strategi Implementasi 9: Menerapkan Pendekatan Berkelanjutan dalam Perencanaan Kepariwisata
- Strategi Implementasi 10: Membentuk satu Badan Koordinasi Tunggal untuk Pembangunan Kepariwisata yang Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan bukanlah hal yang dapat dicapai dalam jangka pendek, atau dicapai secara parsial. Semua pemangku kepentingan perlu bergerak bersama secara konsisten dalam program JANGKA PANJANG menuju visi dan tujuan BERSAMA. Untuk hal ini sedang dikembangkan satu agenda dan dikelompokkan ke dalam empat bagian, secara konsisten mengikuti lingkungan pembangunan pariwisata sebagaimana diindikasikan dalam UU no 9-2010 tentang Kepariwisata.

- Agenda 1: Bergerak Menuju Destinasi yang Berkelanjutan
- Agenda 2: Mendorong Industri Kepariwisata yang Sinergetik dan Berkembang (viable)
- Agenda 3: Memperkenalkan Pemasaran untuk Destinasi Ramah Lingkungan secara Efektif
- Agenda 4: Membangun Kelembagaan yang mendukung (Sumberdaya insani, Organisasi dan Regulasi)

Secara ringkas dapatlah disebutkan bahwa meskipun arahnya tampak jelas, tetapi jalannya rumit. Kepemimpinan yang kuat mutlak diperlukan dalam melaksanakan Rencana Strategis dan Visi Nasional, bergerak menuju pariwisata berkelanjutan, Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan dan pengembangan kualitas. Strategi ini harus didukung oleh sikap yang tepat, kewenangan, dan sumberdaya yang memadai, dan yang paling penting adalah komitmen dan etika untuk melaksanakannya lebih lanjut. Untuk ini, Kantor Wakil Presiden diusulkan untuk mengemban fungsi koordinasi yang mengikutsertakan banyak kementerian dan menerapkan berbagai undang-undang

dan peraturan terkait dengan pariwisata berkelanjutan. Cakupannya meliputi pengembangan (sumberdaya) manusia, penataan ruang, pengembangan daya saing bisnis dan industri dan juga pengelolaan sumberdaya alam dan budaya untuk kemanfaatan negara dan rakyatnya. Suatu Rencana Pembangunan Sumberdaya Manusia untuk menunjang pembangunan pariwisata dengan kualitas sebagaimana diharapkan seyogyanya tidak terbatas pada tingkat pusat saja melainkan harus diperluas ke semua tingkat dari provinsi sampai ke daerah Kabupaten/Kota dan juga sektor swasta, tanpa menghiraukan skala usahanya yang bermacam-macam.

Dengan sektor publik yang berada di garis depan, transisi yang berkeadilan perlu digagas. Perubahan pola pikir dan pendekatan dalam menata/menangani pembangunan daerah masing-masing dan destinasi yang potensial oleh pemerintah serta menyediakan kerangka legislatif pekerjaan layak yang ramah lingkungan dan berkeadilan untuk para majikan/pemberi kerja.

Akhirnya, Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan, perlindungan sosial, hak saat bekerja, dialog sosial dan ekonomi informal, disamping berbagai syarat ramah lingkungan budaya dan alam yang sudah dipahami, adalah sebagian dari berbagai isu yang sangat penting untuk diangkat.

Selanjutnya, Pedoman dan Rencana Aksi yang melengkapi dalam Proses Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dan disusun berdasarkan Rencana Strategis harus segera disiapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA....	I
KATA PENGANTAR ILO	II
UCAPAN TERIMA KASIH	III
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	IV
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	XI
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	XII
PENDAHULUAN	1
1. INDONESIA MENUJU PARIWISATA BERKELANJUTAN DAN PEKERJAAN LAYAK YANG RAMAH LINGKUNGAN....	1
2. MAKSUD RENCANA STRATEGIS DAN PROSES PERUMUSANNYA	7
BAB 1 GAMBARAN MASA KINI SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA	10
1.1 PENTINGNYA PARIWISATA UNTUK INDONESIA	10
1.1.1 Kedatangan Wisatawan, Perjalanan Domestik dan Indikator Terkait	10
1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi dari Pariwisata.....	13
1.1.3 Lingkungan Usaha	14
1.2 LAPANGAN KERJA.....	15
1.2.1 Kontribusi Pariwisata terhadap Lapangan Kerja dan Pekerjaan untuk Angkatan Muda	15
1.2.2 Keadilan Sosial	16
1.3 BEBERAPA ISU MUTAKHIR	17
1.3.1 Pendidikan Pariwisata dan Pengembangan Sumberdaya Insani	17
1.3.2 Pariwisata dan Pembangunan Perdesaan	18
1.3.3 Ekonomi Informal	19
1.3.4 Administrasi	20
1.3.5 Kerangka Hukum	23
1.3.6 Lingkungan	26
BAB 2 PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN UNTUK INDONESIA	29
2.1 KONSEP PARIWISATA BERKELANJUTAN	29
2.1.1 Dasar Dasar Pariwisata Berkelanjutan.....	29
2.1.2 Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).....	31
2.1.3 Pengurangan Kemiskinan dan Pembangunan Perdesaan	31
2.1.4 Masyarakat dan Kebudayaan	34
2.1.5 Kesenjangan Gender	35
2.1.6 Peralihan ke Berbagai Praktek Berkelanjutan	36
2.1.7 Menciptakan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan.....	37
2.1.8 Mendefinisikan Kriteria Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan untuk Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia	40
2.1.9 Kontribusi Pariwisata Berkelanjutan pada Mitigasi Perubahan Iklim.....	42
2.1.10 Membangun Industri Kepariwisataan yang Lentur terhadap Bencana Alam dan Buatan Manusia	44
2.1.11 Mengelola Dampak Pariwisata yang Merugikan	46
2.1.12 Pembelajaran dari Pengalaman dan Praktek yang baik dan benar.	46

2.2 ANALISIS SWOT UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA	48
2.2.1 Kekuatan	48
2.2.2 Kelemahan	50
2.2.3 Peluang	53
2.2.4 Ancaman	56
BAB 3 VISI DAN KERANGKA KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN	60
3.1 VISI PARIWISATA BERKELANJUTAN INDONESIA	60
3.2 DIMENSI BARU DALAM KEBIJAKAN KUNCI	64
3.2.1 Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan dalam Pariwisata	64
3.2.2 Pengurangan Kemiskinan	66
3.2.3 Partisipasi Pemuda dan Lapangan Kerja	66
3.2.4 Pengarusutamaan Jender dan Perlindungan Anak	67
3.2.5 Sistem Aturan Sukarela/ Standar Pariwisata Berkelanjutan	68
3.3 PERENCANAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN	70
3.3.1 Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Insani	70
3.3.2 Pendekatan Berkelanjutan dan Komprehensif dalam Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Pariwisata	71
3.3.3 Pariwisata Berkelanjutan dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	72
3.3.4 Pendekatan Wilayah (ASEAN) untuk Mengimplementasikan Prakarsa Dunia dalam Pariwisata Berkelanjutan	73
BAB 4 KERANGKA STRATEGIS	76
4.1 KERANGKA STRATEGIS UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN INDONESIA	76
4.1.1 Strategi Kunci 1: Perubahan Pola pikir	78
4.1.2 Strategi Kunci 2: Adaptasi dan Adopsi Indikator Pariwisata Berkelanjutan	80
4.1.3 Strategi Kunci 3: Pembiasaan Pola Pikir Baru dalam Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan dan Pariwisata Berkelanjutan	81
4.1.4 Strategi Kunci 4: Memperkenalkan dan Menegakkan Mekanisme Pengelolaan	83
4.2 STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN	84
BAB 5 AGENDA IMPLEMENTASI	95
5.1 AGENDA 1: MENUJU DESTINASI BERKELANJUTAN	95
5.2 AGENDA 2: DUKUNG TERCIPTANYA INDUSTRI KEPARIWISATAAN YANG SINERJIK DAN RAMAH LINGKUNGAN (ALAM DAN BUDAYA)	100
5.3 AGENDA 3: MEMPERKENALKAN PEMASARAN YANG EFEKTIF BAGI DESTINASI YANG RAMAH LINGKUNGAN ..	102
5.4 AGENDA 4: BANGUN LEMBAGA PENDUKUNG (SUMBERDAYA MANUSIA, ORGANISASI, REGULASI)	104
BAB 6 CATATAN PENUTUP DAN HARAPAN	108
BIBLIOGRAFI	149

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Statistik Sektor Pariwisata	118
Lampiran 2: Studi Kasus Nasional dan Internasional	122
Lampiran 3: Petikan yang Relevan dari Deklarasi Bern.....	128
Lampiran 4 : Pembelajaran dari Berbagai Praktek Terbaik Ekowisata	129
Lampiran 5: Definisi Pariwisata Ramah Lingkungan (<i>Green Tourism</i>).....	130
Lampiran 6: Alternatif Indikator Pariwisata Berkelanjutan dari UNWTO.....	132
Lampiran 7: Undang-undang dan Peraturan terkait dengan Usaha dan Pengembangan Pariwisata	136
Lampiran 8: Kode Etik Global Pariwisata	142
Lampiran 9 : Jejaring Lingkungan (<i>Eco-Network</i>) di Indonesia.....	143
Lampiran 10 : Siklus-Hidup Tipikal Destinasi Pariwisata.....	147

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nation</i> (Asosiasi Negara Negara Asia Tenggara)
ATS	: <i>After Training Support</i> (Dukungan Setelah Pelatihan)
BAPPENAS	: Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional
BDSP	: <i>Business Development Service Providers</i> (Penyedia Jasa Pengembangan Usaha)
BIMP – EAGA	: Daerah Pertumbuhan ASEAN Timur: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Pilipina- (<i>East ASEAN Growth Area</i>)
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTDC	: <i>Bali Tourism Development Corporation</i> (Perusahaan Pembangunan Pariwisata Bali)
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CEA	: <i>Community Employment Assessment</i> (Penilaian Pekerjaan Komunitas)
CLMS	: <i>Child Labour Monitoring System</i> (Sistem Pemantauan Pekerja Anak)
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i> (Tanggungjawab Sosial Perusahaan)
DI Yogyakarta	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI Jakarta	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DMO	: <i>Destination Management Organization</i> (Organisasi Pengelolaan Destinasi)
DWCP	: <i>Decent Work Country Program</i> (Program ‘Nasional’ Pekerjaan yang Layak)
EEE	: <i>Employment Environment Economy</i> (Ekonomi Lingkungan Pekerjaan)
EU	: <i>European Union</i> (Uni Eropa)
GATS	: <i>General Agreement on Trade in Services</i> (Kesepakatan Umum dalam Jasa Perdagangan)
GCF	: <i>Governor’s Climate Forests</i>
GDI	: <i>Gender Development Index</i> (Indeks Pembangunan Jender)
GDP / PDB	: <i>Gross Domestic Product</i> (Produk Domestik Bruto)
GEM	: <i>Gender Empowerment Measure</i> (Tindakan Pemberdayaan Jender)
GEMS	: <i>Gender Empowerment Mainstreaming Strategy</i> (Strategi Pengarusutamaan Pemberdayaan Jender)
GRDP/ PDRB	: <i>Gross Regional Domestic Product</i> (Produk Domestik Regional Bruto)
HRD	: <i>Human Resource Development</i> (Pengembangan Sumberdaya Manusia)
ITC	: <i>International Trade Centre</i> (Pusat Perdagangan Internasional)
IYB	: <i>Improve Your Business</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i> (Organisasi Buruh Internasional)
IMT- GT	: <i>The Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle</i> (Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand)
KAN	: <i>National Accreditation Committee</i> (Komisi Akreditasi Nasional)
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LULUCF	: <i>Land Use, Land Use Change and Forestry</i>
MCT	: <i>Ministry of Culture and Tourism</i> (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata)

MoE	: <i>Ministry of Environment</i> (Kementerian Lingkungan Hidup)
MoHA	: <i>Ministry of Home Affairs</i> (Kementerian Dalam Negeri)
MoWEC	: <i>Ministry of Women Empowerment and Child Protection</i> (Kementerian Pember-
	: dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
MTC	: <i>Ministry of Tourism and Creative Industry</i> (Kementerian Pariwisata dan
	: Ekonomi Kreatif)
NGO	: <i>Non- Governmental Organization</i> (Lembaga Swadaya Masyarakat)
OSH	: <i>Occupational Safety and Health</i> (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
Perhutani	: Perusahaan Hutan Negara Indonesia
PGA	: <i>Participatory Gender Audit</i> (Audit Gender Partisipatif)
PHRI	: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
PKK	: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPP	: <i>Public Private Partnership</i> (Kemitraan Pemerintah dan Swasta)
PTP/PTN/	: Perusahaan Terbatas Perkebunan/ Perusahaan Negara Perkebunan/ PT
PTPN	: Perkebunan Nusantara
REDD+	: <i>Reducing Emissions from Deforestation and Degradation</i> (Pengurangan Emisi
	: dari Penebangan dan Kerusakan Hutan)
Renstra	: Rencana Strategis
REPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
Rp	: Rupiah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan jangka Panjang
RPPLH	: <i>Environment Protection and Management Plan</i> (Rencana Perlindungan dan
	: Pengelolaan Lingkungan Hidup)
SARS	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SIYB	: <i>Start and Improve Your Business</i>
SMEs (UKM)	: <i>Small and Medium Enterprises</i> (Usaha Kecil dan Menengah)
STD	: <i>Sustainable Tourism Development</i> (Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan)
SWOT	: <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i> (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan
	: Ancaman)
SYB	: <i>Start Your Business</i>
TSA	: <i>Tourism Satellite Account</i> (Neraca Satelit Pariwisata)
TTCI	: <i>Travel and Tourism Competitiveness Index</i> (Indeks Daya Saing Pariwisata dan
	: Perjalanan)
UK	: <i>United Kingdom</i>
UN	: <i>United Nations</i> (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i> (Konferensi dalam
	: Perdagangan dan Pembangunan – PBB)
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
UNPDF	: <i>United Nations Partnership for Development Framework</i> (Kemitraan PBB)

	untuk Kerangka kerja Pembangunan)
UNWTO	: <i>United Nations World Tourism Organization</i> (Organisasi Pariwisata Dunia-PBB)
US	: <i>United States</i> (Amerika Serikat)
UU	: Undang- Undang
WEF	: <i>World Economic Forum</i> (Forum Ekonomi Dunia)
Wisnus	: <i>Indonesian Domestic Tourists</i> (Wisatawan Nusantara)
WTO	: <i>World Tourism Organization</i> (lihat UNWTO) (Organisasi Pariwisata Dunia)

PENDAHULUAN

1. Indonesia Menuju Pariwisata Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan

Setelah sudah lebih dari enam dekade merdeka, Indonesia baru memulai secara strategis merencanakan pembangunan pariwisatanya sekitar 40 tahun yang lalu. Sementara pada tahap awal perkembangan tersendat selama tahun 1970-an oleh hambatan kebijakan internal, penyesuaian nilai tukar mata uang yang dipacu oleh *boom* minyak bumi, dan biaya yang tinggi bagi wisatawan mancanegara dibandingkan dengan mengunjungi destinasi di negara tetangga, pada tahun 1980 Indonesia menerima 562.000 pengunjung internasional. Tiga puluh tahun kemudian Indonesia menyambut 7 juta pengunjung internasional pada tahun 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berharap meningkatkan angka tersebut dengan target 10 juta kedatangan. Sementara permintaan pariwisata dunia mendekati capaian 1 milyar kedatangan dan pasar pariwisata domestik terus berkembang, pangsa nasional pada pasar pariwisata global dan kesempatan baru untuk melayani kelas menengah yang tumbuh dengan cepat dan kelompok wisatawan domestik potensial diharapkan dapat menjamin bahwa pariwisata tetap menjadi sektor strategis dalam agenda pembangunan nasional.

Karena pariwisata internasional dan domestik tumbuh terus, maka akan terjadi tekanan yang lebih besar pada apa yang dalam beberapa kasus sudah menjadi ancaman terhadap lingkungan alami dan budaya yang rentan. Hal ini menempatkan kebutuhan peningkatan kesadaran dan praktek pariwisata berkelanjutan oleh industri dan juga wisatawan sebagai masalah yang mendesak.

Kompetisi dunia untuk meraup dolar dari wisatawan sangat kuat. Yang akan menjadi “pemenang” adalah destinasi yang memanfaatkan kekuatan pariwisata dan dukungan ekonomi kreatif untuk berkontribusi dalam masa transisinya menuju “ekonomi ramah lingkungan yang ditandai oleh karbon rendah, perlambatan perubahan iklim, bersahabat dengan lingkungan, dan bentuk-bentuk pembangunan berkelanjutan yang ramah sosial

Sebagai anggota G20, perekonomian Indonesia sedang beralih untuk menjadi salah satu dari 10 negara ekonomi terkuat di tahun 2020. Sektor pariwisata dapat tumbuh sebagai penyumbang yang lebih signifikan terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Pariwisata juga dapat menjadi sektor ramah lingkungan terdepan untuk pengembangan yang inovatif dan menarik modal publik dan swasta agar mengalir ke jalur karbon rendah, yang efisien sumberdaya.

Lebih dari sekedar penghasil devisa yang penting, pariwisata, jika diperlakukan dengan cara yang berkelanjutan, dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan milenium yang penting melalui pengadaan pekerjaan dan lapangan kerja di wilayah perkotaan maupun perdesaan, menyebarkan pembangunan ke daerah-daerah perdesaan yang lebih miskin dan terasing, memperbaiki transportasi dan koridor telekomunikasi, menciptakan pekerjaan ramah lingkungan dengan kerja yang layak dan pelatihan keterampilan untuk perempuan dan angkatan muda yang mungkin dengan cara lain tidak mempunyai peluang tersebut..

“Pekerjaan disebut ramah lingkungan (green) apabila membantu mengurangi dampak lingkungan negatif dan akhirnya membawa ke arah perusahaan dan ekonomi yang berkelanjutan dari segi lingkungan alam, ekonomi, dan sosial. Pekerjaan ramah lingkungan adalah pekerjaan yang layak yang akan mengurangi konsumsi energi dan bahan baku, membatasi emisi rumah kaca, meminimumkan sampah dan polusi, dan melindungi serta memulihkan ekosistem”ⁱ

Lebih lanjut membangkitkan kesadaran dan sumberdaya untuk membantu perlindungan terhadap lingkungan, pencegahan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain serta meningkatkan peluang untuk pendidikan dan pelatihan merupakan tujuan kunci sektor pariwisata berkelanjutan yang dapat membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan meliniumnya.

Sebagai industri padat karya, dengan pasar domestik yang besar dan tumbuh mantap, pariwisata diharapkan berkontribusi banyak pada program penghapusan pengangguran di Indonesia. Akan tetapi, dalam beberapa kasus program pembangunan kapasitas untuk laki-laki dan perempuan yang bekerja pada industri pariwisata seringkali tidak dirancang dengan baik, tidak efisien, dan kinerja di bawah harapan. Hal ini mengakibatkan produk dan jasa pariwisata tidak memenuhi baik standar kualitas minimum maupun harapan pengunjung (pasar) domestik dan internasional. Selanjutnya, tujuan akhir pembangunan kepariwisataan – kesejahteraan bagi komunitas lokal di banyak daerah belum tercapai. Pendidikan serta pelatihan kepariwisataan dan *hospitality* perlu lebih dari mengembangkan keterampilan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa dalam industri dan pemerintahan bahwa pentingnya standar kompetensi untuk pendidikan dan kualitas pelatihan kejuruan telah terabaikan. Pemerintah setempat perlu mengembangkan visinya dalam konteks sistem pariwisata yang kompleks dan secara realistis membuat rencana demi keuntungan masyarakat.

Krisis multidimensi pada tahun 1998, telah membuktikan bahwa industri kepariwisataan berada di antara yang paling rentan dan sangat terpengaruh. Krisis telah menjadi pengalaman yang memperlihatkan bahwa pariwisata memerlukan perhatian ekstra, kebijakan yang komprehensif, strategi yang kuat, dan kerangka kelembagaan, terutama saat sulitnya kontrol terhadap tiap usaha pariwisata atau destinasi yang berakibat terjadinya dampak negatif. Dalam pernyataan kebijakan internasional yang telah diterima dan disahkan oleh UNWTO (Agenda 21 untuk Perjalanan dan Pariwisata, dan Kode Etik Pariwisata), secara berturut-turut pemerintah nasional telah mencoba untuk membangkitkan kesadaran akan kebutuhan dan keuntungan dari pembangunan pariwisata berkelanjutan. Meskipun demikian, kenyataan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap kebijakan panduan termasuk yang berkaitan dengan pekerjaan yang layak dan produktif, dalam kondisi kebebasan, adil, aman, dan bermartabat, tidak otomatis menjamin bahwa semua konsep dan prinsip tersebut telah berhasil diterapkan di seluruh negeri.

Pemerintah daerah, yaitu pemerintah kabupaten/ kota, provinsi, dan nasional masih dihadapkan pada masalah implementasi terkait dengan kapasitas sumberdaya insani dan kesiapan untuk dapat mewujudkan berbagai keinginan serta tuntutan pembangunan berkelanjutan. Otonomi daerah dan semangat demokrasi mengharuskan perubahan struktural dan budaya dalam pemerintahan, yang saat ini berada pada tahap transisi menuju ke arah praktek-praktek berkelanjutan.

Dengan perencanaan yang baik dan manajemen yang efektif, pariwisata dapat menghasilkan keuntungan yang positif dari segi ekonomi, sosial/budaya dan lingkungan alam. Sebaliknya pun bisa terjadi, menimbulkan kerugian, bila tata cara kebijakan publik dan implementasi serta sumberdaya manajemen tidak memadai. Hal ini dapat mencakup tingginya angka/nilai kebocoran ekonomi (*economic leakage*), luasnya dampak negatif sosial dan budaya dan degradasi lingkungan. Mendorong industri pariwisata berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dan sosial merupakan langkah penting yang akan memberi sumbangan terhadap pembangunan yang secara sosial inklusif dan melestarikan modal lingkungan, sehingga industri dapat bertumbuh subur dalam jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini juga akan semakin meningkatkan pemenuhan atas permintaan pasar yang kompetitif.

Konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia sudah dituangkan dalam dokumen kebijakan dan hukum, tetapi tidak perlu dilaksanakan berdasarkan standar minimum internasional yang sudah disepakati. Kenyataan bahwa berbagai isu keberlanjutan telah disebutkan dalam UU Kepariwisata yang lama, nomor 9 tahun 1990, yang kemudian diperbaharui menjadi UU nomor 10 Tahun 2009, mengindikasikan adanya kesadaran tentang konsep berkelanjutan, yang beraspek multidimensi: ramah lingkungan, secara ekonomi dapat memberi manfaat, secara sosial budaya dapat diterima, dan menempatkan masyarakat sebagai subjek inti dalam pembangunan.

Berbagai produk hukum lain, seperti UU tentang Penanaman Modal, UU tentang Ketenagakerjaan, dan lainnya juga mencanangkan komitmen pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, antara lain melalui komitmen terhadap pengarusutamaan UMKM dan dengan menghormati kesetaraan gender. Sebagai tambahan (dapat disebutkan bahwa dengan) diamanati oleh Instruksi Presiden (Inpres No.9/2000), semua kementerian/badan pada semua tingkat harus memastikan strategi bahwa pengarusutamaan kesetaraan gender masuk ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam masing-masing tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya yang dikoordinasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Baru-baru ini, tahun 2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menandatangani suatu Memorandum kerja sama (MOU) dengan KPPA dalam kesetaraan gender. Kedua kementerian tersebut menyediakan landasan tentang bagaimana pariwisata berkelanjutan, sebagai industri padat karya dan tempat berkumpulnya sebagian besar pekerja informal, harus secara hati-hati didefinisikan dan dilaksanakan untuk memastikan adanya distribusi manfaat industri pariwisata yang setara untuk laki-laki dan perempuan.

Indonesia menyusun Agenda 21 nasional pada tahun 1992, dan pada tahun 2001 menambahkan Agenda 21 Sektor; Kehutanan, Pertambangan dan Pariwisata, dibantu oleh UNDP (*United Nations Development Programme*). Agenda ini diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup, melibatkan berbagai pemangku kepentingan pariwisata dan memuat sambutan yang “ditanda-tangani” oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ketika itu. Meskipun demikian, nampaknya berbagai prinsip yang disampaikan belum menjadi acuan program-program pembangunan pariwisata nasional. Pilihan terhadap sektor pariwisata tersebut dirangsang oleh *Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry: Towards Environmental Sustainable Development*

(1996) dan juga adanya kenyataan peran strategis pariwisata untuk Indonesia yang tumbuh secara cepat selama dua dekade terakhir abad 20 yang lalu.

Pada tahun 2003 Indonesia telah menerima bantuan teknis UNWTO untuk Pembangunan Pariwisata yang Bertumpu pada Komunitas, dengan dua desa sebagai studi kasus yaitu Desa Candirejo di dekat Candi Borobudur, Jawa Tengah dan kawasan Banten Lama di dekat Mesjid Banten Lama, di bagian barat Provinsi Banten.

Sebagai anggota UNWTO, Indonesia juga telah mensosialisasikan Kode Etik Dunia (*Global Code of Ethics*) segera setelah diterbitkan, dan menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia serta melengkapinya dengan Kode Etik dari berbagai asosiasi industri terkait.

Pada tahun 2004, di Jakarta telah diselenggarakan lokakarya, yang dihadiri oleh para operator pariwisata ramah lingkungan (*ecotourism*), serta telah membuat daftar ‘praktek terbaik’ (*best practice*) dan mendokumentasikan sejumlah pengalaman pembelajaran (*lesson learned*) oleh para operator ekowisata dan pemangku kepentingan (lihat Lampiran 4).

Indonesia sudah mempunyai suatu jaringan pariwisata ramah lingkungan yang dihormati, yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, pelatihan, dan program peningkatan kesadaran untuk memperbaiki standar dan kualitas dari ‘Pengalaman Ekowisata Indonesia’.

Pada tahun 2006, UNWTO bersama dengan Pemerintah Jerman membentuk suatu Unit Konsultasi tentang Keanekaragaman Hayati dan Pariwisata untuk negara yang terkena musibah tsunami. Indonesia telah mendapat bantuan untuk melaksanakan program: Pengembangan Pariwisata yang Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati. Pemerintah Indonesia bersama UNWTO sepakat memilih Pangandaran, unggulan pariwisata Jawa Barat, yang telah diporakporandakan oleh bencana tsunami pada Juli 2006. Program yang berlangsung pada tahun 2007-2009 merupakan program pemulihan dan telah memberdayakan Kelompok Kerja Lokal untuk menyiapkan rencana dan aktivitasnya dengan bimbingan dan pengawasan. Program tersebut dilanjutkan dengan program tahap berikutnya yang sedang berlangsung dalam rangka konservasi alam dan efisiensi energi. Selain semua perbaikan yang merupakan hasil intervensi, kualitas keberlanjutan lingkungan tetap diperlukan dan pelaksanaan peraturan yang sah harus terus di dukung.

Pada tahun 2009, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Pusat Perencanaandan Pengembangan Kepariwisataan-ITB juga telah menerbitkan Pedoman Pengembangan Pariwisata Perdesaan Terpadu dan Berkelanjutan. Pedoman ini dimaksudkan sebagai arahan bagi pemerintah setempat dalam mengembangkan kepariwisataan di desa secara berkelanjutan. Meskipun demikian, tetap ada kebutuhan untuk menyebarluaskan, dan melakukan pelatihan guna menguji apakah pedoman ini dapat dilaksanakan setelah diserahkan kepada pemerintah daerah, untuk siapa pedoman ini telah disiapkan.

Destinasi pariwisata Indonesia yang dikenal secara internasional yaitu Bali, sudah mempunyai pengalaman yang panjang dalam melaksanakan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan yang

didasarkan pada kearifan budaya setempat, yaitu Tri Hita Karana – keharmonisan hubungan antara Alam, Manusia, dan Sang Pencipta. Konsep ini bahkan sudah dibawa ke tingkat internasional dan pada tahun 2002 serta telah mendapat pengakuan UNWTO dan organisasi industri regional terkemuka seperti *Pacific Asia Travel Association* (PATA). Saat ini banyak komponen industri pariwisata (hotel, rumah makan, resor) yang telah mendapat penghargaan Tri Hita Karana, sebagai wujud kepeduliannya terhadap lingkungan, budaya dan kesejahteraan masyarakat. Tri Hita Karana merupakan model yang dapat dimodifikasi dan diadaptasi dalam industri pariwisata di daerah lain di Indonesia. Hal itu juga merupakan suatu contoh kerangka praktek pariwisata berkelanjutan dan pengembangan kebijakan untuk dipelajari oleh pemerintah lokal dan provinsi yang mengeluarkan ijin-ijin.

Menanggapi seruan Presiden tahun 2007, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi, sejak 2009 telah meluncurkan program pemberdayaan pariwisata di perdesaan. Pada tahun 2009, kegiatan pemberdayaan dilaksanakan di 104 desa yang berada di 17 Provinsi; pada tahun 2010, mencakup 200 desa di 29 Provinsi, dan 2011 mencakup 569 desa di 33 provinsi. Nilai bantuan berkembang luar biasa dari Rp. 8,75 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp. 51,7 miliar pada 2011. Pada tahun 2014, dicanangkan untuk mencakupi 2000 desa di seluruh nusantara, yang secara angka, kecil jumlahnya dibanding dengan jumlah keseluruhan desa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan program pemberdayaan pariwisata di perdesaan tersebut, perlu dipantau dan dievaluasi demi kemajuan pelaksanaan program tersebut.

Dorongan yang tampak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan bersama dengan pembangunan ekonomi dan sosial, lapangan kerja dan penurunan kemiskinan sebagai pilar-pilar pembangunan berkelanjutan juga telah meletakkan dasar dukungan pada transisi ke ekonomi ramah lingkungan dengan mengalihkan lapangan kerja ke pekerjaan ramah lingkungan. Peralihan ini diharapkan mempunyai dampak yang besar terhadap lapangan pekerjaan nasional: pekerjaan tambahan akan tercipta, lapangan pekerjaan akan tergantikan, mungkin ada pekerjaan yang dihapuskan, dan pekerjaan yang sudah ada akan ditransformasikan. Permintaan akan aneka keterampilan dan program baru akan tercipta, tetapi transisi ini harus juga didukung oleh adanya perlindungan sosial dan rencana finansial yang tepat agar dapat membantu para pekerja dan pelaku bisnis dalam sektor pariwisata.

Prakarsa bersama antara Program Lingkungan PBB (*United Nations Environment Programme* /UNEP), Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*/ILO), Organisasi Pemberi Kerja Internasional (*International Organization of Employers*/IOE) dan Konfederasi Serikat Dagang Internasional (*International Trade Union Confederation* /ITUC) telah diluncurkan pada tahun 2001, untuk menilai, menganalisis, dan mendorong terciptanya pekerjaan yang layak sebagai konsekuensi dari kebijakan lingkungan yang diperlukan.

Maka dari itu, agar dapat memastikan dampak positif dan menanggapi perubahan iklim, transisi ekonomi dan pertumbuhan pekerjaan ramah lingkungan, Prakarsa Pekerjaan Ramah Lingkungan telah diperkenalkan sebagai suatu proyek nasional Indonesia oleh ILO bersama dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 di bawah naungan the *Green Jobs in Asia Initiative*.

Pekerjaan Ramah Lingkungan dapat didefinisikan sebagai:

“Pekerjaan yang dapat mengurangi dampak lingkungan perusahaan dan sektor ekonomi, yang pada akhirnya sampai pada tingkat keberlanjutan, sementara pada saat bersamaan memenuhi persyaratan pekerjaan yang layak”.

Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan (Green Jobs) = Pekerjaan yang layak + Lingkungan Berkelanjutan

Sasaran Proyek Pekerjaan Ramah Lingkungan adalah memperdalam pemahaman dan komitmen konstituen ILO dalam mempromosikan peluang pekerjaan ramah lingkungan yang sensitif gender dan menransisikan secara tepat pekerja dan majikan menuju ke pembangunan yang rendah karbon, yang menyesuaikan dengan iklim, dan yang ramah lingkungan di Indonesia. Transisi dalam pasar kerja dan kebutuhan akan model usaha yang baru dipusatkan melalui dialog sosial yang inklusif.

Sasaran Proyek Pekerjaan Ramah Lingkungan yang segera ingin dicapai adalah :

- I. Meningkatnya kapasitas konstituen ILO berperan serta dalam dialog pekerjaan ramah lingkungan melalui peningkatan akses kepada sumber data dan informasi yang terpercaya tentang pekerjaan ramah lingkungan dan pelatihan, termasuk tentang dampak lapangan kerja terhadap berbagai kebijakan terkait lingkungan dan praktek-praktek yang baik dalam pekerjaan ramah lingkungan di semua negara yang berperan serta;
- II. Mengarusutamakan pekerjaan ramah lingkungan dalam kebijakan sosial dan tenaga kerja negara yang berperan serta mendorong dimensi sosial dan lapangan kerja dalam berbagai kebijakan terkait iklim dan lingkungan;
- III. Melaksanakan program percontohan tentang pekerjaan ramah lingkungan yang menanggapi kebutuhan laki-laki maupun perempuan, yang dilaksanakan dalam berbagai sektor yang dipilih berdasarkan penelitian dan konsultasi di empat negara dimana proyek dilaksanakan.

Dalam pilar ke-3, Proyek Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO secara langsung mendukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Proyek Percontohan Organisasi Manajemen Destinasi(DMO) di Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Lombok, yang menerapkan berbagai strategi berbasis pariwisata lokal yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas, melalui pelestarian lingkungan dan budaya yang berfokus pada dua produk ramah lingkungan – Pemandu Ramah Lingkungan (*Eco-Tourguides*) dan Pondokan Ramah Lingkungan (*Green Homestays*).ⁱⁱ Pentingnya Program DMO diperoleh dari peluangnya sebagai wahana untuk ‘menghijaukan’ industri pariwisata melalui pengembangan berbagai praktek berkelanjutan terbaik yang mempunyai efek pembelajaran yang kuat untuk pengembangan destinasi di daerah lain.

2. Maksud Rencana Strategis dan Proses Perumusannya

Maksud utama dari Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Pekerjaan Ramah Lingkungan di Indonesia adalah mengajak kalangan luas mitra nasional bertukar pendapat dan membangun konsensus dalam pembangunan industri pariwisata berkelanjutan yang kokoh di Indonesia dengan pekerjaan yang layak. Penyiapan Rencana Strategis dimaksudkan untuk membantu Pemerintah, mitra sosial dan masyarakat luas agar mengakui pentingnya strategi pariwisata berkelanjutan dalam pembangunan Indonesia dan menemukan cara melangkah maju melalui serangkaian strategi kunci yang dapat didukung pada tingkat nasional, provinsi, dan lokal.

Untuk tercapainya sasaran dalam Rencana Strategis:

- (1) Dimasukkan berbagai elemen ke dalam berbagai dimensi kunci baru kebijakan pariwisata (Pekerjaan Ramah Lingkungan, Lapangan Kerja bagi Pemuda, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Standar Pariwisata Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan)
- (2) Digambarkan tantangan pembangunan manusia dalam birokrasi dan industri pariwisata serta kebutuhan akan sumberdaya yang lebih banyak untuk mengembangkan birokrasi yang kompeten untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan; dan juga tenaga kerja terlatih demi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan sektor pariwisata (termasuk kewirausahaan, keterampilan, dan akses ke keuangan).
- (3) Diangkat berbagai aspek dan pendekatan penting untuk perencanaan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan (dampak potensial pembangunan perdesaan dan pelestarian lingkungan serta budaya, mempromosikan perusahaan berkelanjutan dan ‘bekerja sendiri’ (*self employment*) secara berkelanjutan yang sesuai dengan standar nasional untuk pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, dan ekowisata yang berfokus pada keterkaitan antara lapangan kerja, lingkungan dan ekonomi.
- (4) Diperlihatkan potensi tindakan yang dirumuskan dalam strategi khusus dan satu agenda yang mendukung komitmen RENSTRA Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap pendekatan pariwisata berkelanjutan dengan kebijakan publik dan aneka praktek-industri, memasukkan berbagai indikator kinerja baru, pendidikan pariwisata (untuk mencapai ramah lingkungan), pengembangan manajemen dan mekanisme pengendalian; memadukan dan menegakkan hukum dan peraturan yang ada, serta memperkuat kelembagaan berbagai organisasi yang merupakan pemangku kepentingan kunci dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan penerapan pendekatan pariwisata berkelanjutan yang lebih berkualitas oleh industri.
- (5) Diulang-ulang pernyataan kuatnya hubungan antara pariwisata berkelanjutan dengan agenda pembangunan nasional, seperti juga dengan beragam program perlindungan lingkungan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

- (6) Disingkapkan adanya kesempatan dan tantangan baru, terkait dengan transisi ke ekonomi ramah lingkungan (*green economy*), yang memerlukan perhatian khusus (memperkuat hubungan antara pariwisata dan pengurangan emisi akibat kerusakan hutan dan degradasi (REDD+), pembangunan rendah karbon, mitigasi perubahan iklim.
- (7) Digambarkan hubungan dengan program *DMO* dan digarisbawahi betapa pentingnya sebagai wahana untuk ‘meramah-lingkungankan’ / ‘menghijaukan’ industri pariwisata dan keseluruhan kualitas destinasi.
- (8) Ditunjukkan pentingnya bisnis pariwisata dan kelembagaan publik yang bertanggungjawab untuk mengadopsi temuan dan teknologi tepat guna yang inovatif dan sarana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (seperti lahan, energi, air), menanggulangi tantangan perubahan iklim, meminimalkan emisi gas rumah kaca dan produksi sampah, sambil melindungi keanekaragaman hayati.
- (9) Diangkat berbagai isu tentang investasi besar dalam sektor pariwisata ramah lingkungan (termasuk membuat usaha kecil menengah menjadi ramah lingkungan dan meningkatkan sektor informal).
- (10) Diberikan keterangan tentang berbagai elemen lanjutan tentang strategi nasional pengembangan keterampilan ramah lingkungan bagi pariwisata berkelanjutan termasuk masyarakat umum, kemitraan pemerintah dengan swasta (PPP), pelatihan berbasis kompetensi, hubungan dalam konteks ASEAN dan peluang Indonesia untuk meningkatkan pendekatan berbasis standar demi promosi pariwisata berkelanjutan.
- (11) Disiapkan panduan strategis dan cara implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia bagi pemerintah untuk melaksanakan strategi arah pembangunan nasional (pro masyarakat miskin, pro pertumbuhan, pro lingkungan, pro pekerjaan).

Penyiapan Rencana Strategis diprakarsai oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ditempatkan dibawah payung Proyek Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO (*ILO's Green Jobs*) untuk Asia khususnya Indonesia. Rencana untuk mempersiapkan Rencana Strategis ini pertama kali dipaparkan pada bulan Februari 2011, kemudian pada bulan Mei 2011 dibentuk satu satuan tugas yang terdiri dari konsultan nasional dan internasional. Persiapan untuk pengembangan Rencana Strategis juga dimulai pada bulan Mei 2011. Sejak dari awal secara langsung semua konstituen ILO, dan terutama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Lingkungan Hidup, asosiasi pengusaha dan asosiasi pekerja juga dilibatkan.

Rencana Strategis ini dirancang berdasarkan proses konsultasi yang melibatkan para konstituen ILO seperti yang disebutkan di atas dengan kelompok kunci pemangku kepentingan lintas pemerintah di semua tingkatan, masyarakat, industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, mitra sosial

dan masyarakat umum. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memimpin dalam pengembangan Rencana Strategis. Rumusan langkah dan tindakan utama dalam perumusan Rencana Strategis dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tahap Pengenalan Proyek (Februari-April 2011)
2. Pembentukan Satuan Tugas Rencana Strategis (Mei 2011)
3. Penelitian ekstensif kepustakaan (Mei-Juli 2011)
4. Pertemuan persiapan dengan pemangku kepentingan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Apindo, Serikat Dagang (Mei-Desember 2011)
5. Lokakarya Konsultasi Daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan (Februari-April 2012)
6. Lokakarya Konsultasi Nasional (Januari-Juli 2012)
7. Penyelesaian dan pengesahan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup.
8. Peresmian (September 2012)

Rencana Strategis menetapkan suatu kerangka kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan Pekerjaan Ramah Lingkungan dalam sektor pariwisata di Indonesia. Kemudian akan diikuti dengan dokumen panduan bagi para aktor kunci, memuat Rencana Tindak guna mendukung pelaksanaan strategi dengan usulan langkah nyata. Hal ini merupakan permintaan yang kuat selama konsultasi dan juga disarankan selama tinjauan mendalam (*peer reviews*) dalam rangka mendukung pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan serta para aktor kunci kepariwisataan. Direncanakan bahwa Panduan dan pelaksanaan Rencana Tindak akan dipersiapkan melalui kerjasama erat antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses konsultasi selanjutnya atas dasar konsep pembangunan dalam Rencana Strategis. Upaya ini diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dan tampak ada dukungan yang sangat kuat. Usulan Panduan dan Rencana Tindak pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Pekerjaan Ramah Lingkungan di Indonesia telah dimasukkan ke dalam nota konsep Proyek Pekerjaan Ramah Lingkungan Tahap II di Indonesia.

BAB 1

Gambaran Masa Kini Sektor Pariwisata di Indonesia

Ikhtisar Bab

Bab ini menguraikan kondisi sektor pariwisata Indonesia saat ini, berdasarkan indikator makro-ekonomi kuantitatif dan juga analisis kualitatif, pentingnya sektor pariwisata bagi Indonesia, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan penciptaan pekerjaan, keterlibatan masyarakat, dan berbagai isu mutakhir lainnya.

1.1 Pentingnya Pariwisata untuk Indonesia

1.1.1 Kedatangan Wisatawan, Perjalanan Domestik dan Indikator Terkait

Berdasarkan indikator yang lazim digunakan, kinerja sektor pariwisata Indonesia naik turun sepanjang waktu. Dulu, kinerja pariwisata terutama ditengarai melalui jumlah kedatangan dan perjalanan domestik, dan juga melalui jumlah hotel serta fasilitas lain yang dibangun, jumlah agen perjalanan, meningkatnya aksesibilitas yang ditengarai oleh frekuensi dan kapasitas penerbangan, kereta api, dan juga bus serta frekuensi dan kapasitas alat transportasi wisatawan lainnya.

Pada tahap awal pembangunan, Indonesia mengalami pertumbuhan kedatangan internasional dua digit, dan merupakan yang tertinggi di wilayah Asia-Pasifik. Meskipun demikian, karena Indonesia memulainya terlambat, maka dalam konteks ASEAN volume wisatawan mancanegara (wisman) yang tertarik ke Indonesia menghadapi kompetisi kuat dari wilayah tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Ekspansi destinasi untuk wisatawan internasional di Vietnam dan Kamboja yang cepat pada dekade yang lalu menambah ancaman terhadap daya saing Indonesia sebagai suatu destinasi ASEAN dalam dekade ke depan ini.

Pada saat yang sama, menguatnya tingkat kesejahteraan dalam arti daya beli, akses terhadap jaminan sosial dan jaminan kesehatan serta infrastruktur dan bertumbuhnya keinginan kelas menengah Indonesia untuk melakukan perjalanan, pada tingkat tertentu, telah menyelamatkan industri pariwisata pada masa yang paling sulit. Wisatawan domestik yang lazim disebut dengan

istilah *wisatawan nusantara (wisnus)* telah bertumbuh. Di luar perjalanan domestik yang dilakukan oleh orang asing yang menetap di Indonesia, jumlah perjalanan mencapai lebih dari 234 juta pada tahun 2010. Dengan skala penduduk nasional yang ada, Indonesia dengan sendirinya menempati posisi yang diinginkan untuk tidak bergantung semata mata pada wisman, sementara perjalanan domestik potensial di Indonesia melampaui skala negaranegara tetangga. Selama dekade yang lalu juga telah menunjukkan pertumbuhan yang mantap 20% (2001-2010). Apabila wisnus ini diperhitungkan, Indonesia berada di peringkat 10 terbesar destinasi pariwisata dunia^{iiiv}, karena itu potensi untuk mengembangkan peluang pariwisata domestik perlu mendapat lebih banyak perhatian dan ditunjang oleh kebijakan.

Dalam hal sumberdaya alami dan budaya untuk pariwisata, Indonesia mempunyai potensi luar biasa untuk ditawarkan, akan tetapi kekurangan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang mampu mengelola dampak yang berasal dari penduduk setempat dan pengunjung pada banyak sumberdaya kunci baik alami maupun budaya. Beberapa kelemahan ini pada akhirnya memengaruhi indeks daya saing pariwisata dan perjalanan dari Forum Ekonomi Dunia (*the World Economic Forum (WEF) Travel and Tourism Competitiveness Index*) tahun 2010, yang menilai Indonesia sebagai yang terlemah dalam (i) kebijakan dan regulasi, (ii) pariwisata berkelanjutan, (iii) keselamatan dan keamanan, (iv) kesehatan, and (v) teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam hal infrastruktur, fasilitas yang ada dan yang sudah diperbaiki sebagai hasil dari upaya pembangunan pada tahun 1990-an yang lalu, tidak mampu mengisi potensi sebenarnya karena Indonesia mengalami penurunan tajam kedatangan wisatawan pada masa terjadinya kekacauan politik, penyakit, dan terorisme pada akhir tahun 1990-an dan pada tahun awal abad ke-21. Setelah penurunan wisatawan yang terjadi pasca tahun 1998, sektor ini selanjutnya terganggu oleh adanya serangan terorisme, dan perlu waktu sekitar satu dekade untuk kembali ke tingkat pra-krisis, meskipun, atau mungkin hanya karena, banyak dana dan daya ditanamkan dalam sektor ini oleh para pemangku kepentingan pariwisata.

Bila kinerja pariwisata dulu hanya ditengarai melalui kriteria tersebut di atas, sekarang dengan Laporan Satelit Pariwisata (*Tourism Satellite Account /TSA*) mampu melihat secara lebih baik dampak pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB; *Gross Domestic Product /GDP*), lapangan kerja, pajak tak langsung, upah dan gaji. TSA nasional dan juga TSA provinsi telah mengukur seluruh dampak pengeluaran pariwisata selama dekade terakhir ini, juga memastikan posisi pariwisata domestik terkait dengan kontribusinya terhadap PDB nasional dan juga penciptaan lapangan kerja. Banyak studi khusus tentang pariwisata domestik juga menunjukkan bahwa pengeluaran wisatawan dapat mencapai lapisan komunitas terbawah.

Kinerja pariwisata Indonesia, dengan menggunakan indikator yang biasa dipakai, berfluktuasi dari waktu ke waktu. Semula kinerja pariwisata terutama diukur dari jumlah kedatangan wisatawan mancanegara, dan perjalanan domestik, juga dari jumlah hotel dan sarana lain yang dibangun, jumlah agen perjalanan, meningkatnya aksesibilitas yang ditunjukkan melalui frekuensi dan kapasitas penerbangan.

Pada tahap awal pembangunan, Indonesia mengalami pertumbuhan dua digit dalam jumlah kedatangan wisatawan mancanegara. Dan menjadi yang terpesat di wilayah Asia Pasifik. Namun demikian, sementara Indonesia merupakan negara yang baru mulai belakangan dan dalam konteks ASEAN, kunjungan wisatawan mancanegara menghadapi persaingan ketat dengan tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Perkembangan Vietnam dan Kamboja yang pesat juga merupakan ancaman tambahan bagi daya saing Indonesia sebagai destinasi ASEAN pada dekade yang akan datang.

Pada saat yang bersamaan, peningkatan kesejahteraan, dalam arti kemampuan membeli, akses ke kesehatan dan keinginan masyarakat kelompok menengah Indonesia untuk bepergian yang tumbuh telah sampai batas tertentu menyelamatkan industri kepariwisataan pada masa-masa sulit. Pariwisata domestik yang dimaksud dan disebut sebagai pariwisata nusantara merupakan sesuatu yang sedang meningkat. Tanpa menghitung jumlah perjalanan domestik oleh penduduk asing yang tinggal di Indonesia, jumlah perjalanan melampaui 234 juta pada tahun 2010. Mengingat jumlah penduduknya, Indonesia berada dalam posisi yang beruntung untuk tidak tergantung hanya kepada wisatawan mancanegara karena potensi wisatawan nusantara melampaui negara-negara tetangga. Dalam dekade yang terakhir (2001-2010), pertumbuhannya mantap (20%).^v Bilamana perjalanan domestik ini diperhitungkan, Indonesia termasuk dalam 10 besar dalam destinasi pariwisata dunia,^{vi} oleh karena itu potensi untuk mengembangkan pariwisata nusantara lebih lanjut perlu untuk mendapat lebih banyak perhatian dan dukungan politik.

Dalam hal sumberdaya alam dan budaya untuk pariwisata, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, namun masih kekurangan dalam infrastruktur dan sumberdaya insani untuk mengelola dampak kegiatan masyarakat dan wisatawan terhadap sumberdaya alam dan budaya yang utama, lingkungan alam dan budaya. Kelemahan ini telah memengaruhi penilaian World Economic Forum (WEF) Travel and Tourism Competitiveness Index 2010, yang menilai bahwa kelemahan utama Indonesia adalah dalam (i) kebijakan dan peraturan, (ii) pariwisata berkelanjutan, (iii) keamanan dan keselamatan, (iv) kesehatan, serta (v) teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam hal prasarana, berbagai fasilitas yang tersedia yang merupakan hasil pembangunan sebelumnya pada tahun 1990-an, tidak menjadi efektif penuh saat Indonesia mengalami penurunan kunjungan yang drastis karena krisis politik, wabah penyakit, terorisme dan lainnya pada akhir 1990-an dan awal abad ke 21. Setelah penurunan kunjungan internasional pasca 1998, pariwisata Indonesia mengalami masalah lanjutan yang disebabkan oleh terorisme, dan membutuhkan waktu hampir satu dekade untuk kembali ke kondisi sebelum krisis, meskipun atau hanya karena banyak dana dan daya dikerahkan oleh para pemangku kepentingan.

Sementara pada waktu yang lalu kinerja kepariwisataan hanya diindikasikan oleh berbagai kriteria yang disebut diatas, sekarang Neraca Satelit Pariwisata Nasional memungkinkan kita memperoleh gambaran yang lebih baik tentang dampak terhadap PDB, lapangan kerja, pajak tak langsung, upah dan gaji. Neraca Satelit Pariwisata Nasional dan Daerah mengukur dampak menyeluruh dari pengeluaran wisatawan maupun pemerintah selama dekade ini juga memastikan posisi pariwisata nusantara dalam berkontribusi terhadap PDB dan lapangan kerja. Banyak studi

husus tentang pariwisata nusantara juga mengindikasikan bahwa pengeluaran mereka akan mencapai masyarakat kelompok bawah.

1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi dari Pariwisata

Bab ini membahas kasus khusus Indonesia. Berdasarkan metodologi prakirakan kontribusi langsung ekonomidari Perjalanan dan Pariwisata yang sepenuhnya sesuai dengan Laporan Satelit Pariwisata yang disetujui Divisi Statistik PBB, 2008: Usulan Kerangka Metodologi (TSA: RMF 2008), “Perjalanan dan Dampak Ekonomi Pariwisata” (2011) yang dilaporkan oleh Badan Perjalanan dan Pariwisata Dunia (*World Travel and Tourism Council*), bagian Asia Tenggara; menyediakan himpunan informasi tentang Indonesia dalam berbagai indikator.

PDB (GDP)

Sumbangan Langsung: Kontribusi langsung dari Perjalanan dan Pariwisata pada PDB diharapkan menjadi USD86.9 milyar (4.2% dari total PDB) pada tahun 2011, meningkat 6.4% p.a.ke USD161.7 milyar (4.4%) di tahun 2021 (dalam harga tetap 2011): 6.4%.

Sumbangan Keseluruhan: Kontribusi keseluruhan dari perjalanan dan Pariwisata terhadap PDB, termasuk dampak ekonomi yang lebih luas, diperkirakan meningkat 6.1% p.a.dari USD223.5 milyar (10.9% PDB) pada tahun 2011 menjadi USD405.9 milyar (11.4%) pada tahun 2021: 6.1%

Devisa dari pengeluaran pariwisata mancanegara dan pengeluaran wisatawan nusantara

Perolehan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara telah menghasilkan USD76,1milyar (5.6% dari ekspor keseluruhan pada tahun 2011, tumbuh dengan 8.2% per tahun (secara nominal) menjadi USD148.8 milyar (5.4%) pada tahun 2021 (6.9%).

Investasi

Pada tahun 1980-an pemerintah mempermudah pembebasan lahan, permohonan kredit dan juga perizinan yang perlu diterbitkan untuk investasi terkait pariwisata, yang menyebabkan investasi di sektor pariwisata bertumbuh secara signifikan. Hal ini menunjang pembangunan pariwisata di beberapa lokasi tertentu di satu pihak, akan tetapi di lain pihak memperlihatkan kegagalan kebijakan dengan meningkatnya spekulasi lahan sebagai akibat kebijakan tersebut. Investasi juga sangat terkonsentrasi dalam industri perhotelan dan secara geografis di Jawa (Jakarta) dan Bali, dan mengakibatkan pembangunan infrastruktur resor pariwisata skala besar yang kurang berhasil, seperti misalnya dekat Manado, Sulawesi Utara.

Pola semacam itu masih terlihat hingga hari ini. Sebagian besar investasi asing dalam industri perhotelan ditanamkan di Bali, Jakarta dan selebihnya di beberapa kota besar lain. Perlu dicatat bahwa beberapa provinsi di luar Jawa dan Bali, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Riau, telah mengambil kesempatan menjadi tuan rumah beberapa peristiwa olahraga untuk memicu dukungan pemerintah pusat dan investasi. Sumatera Selatan misalnya telah membangun infrastruktur olahraga berstandar internasional untuk menyelenggarakan SEA GAMES pada tahun 2011, dan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2004. Kalimantan Timur menjadi tuan rumah PON pada tahun 2008 dan kemudian Riau akan menjadi tuan rumah PON pada tahun 2012. Berbagai bentuk peristiwa dan olahraga pembangkit pariwisata ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi pariwisata baru dan pasar ke suatu daerah yang sebelumnya merupakan destinasi pinggir di Indonesia.

Investasi Perjalanan dan Pariwisata ini diperkirakan mencapai USD 45.4 milyar atau 8.2% dari investasi keseluruhan pada tahun 2011. Diharapkan investasi ini akan meningkat 7.8% per tahun mencapai USD 95,0 milyar (or 8.4%) dari investasi total pada tahun 2021.

1.1.3 Lingkungan Usaha

Pada akhir 2010, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat ke-121 di antara 183 negarayang dinilai daya tariknya terhadap kegiatan bisnis. Pada 2010 Indonesia masih berada diperingkat ke-115. Bahkan dengan perbaikan indikator ‘memulai usaha’, akses terhadap kredit di Indonesia dinilai sebagai yang terburuk. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada diperingkat di bawah Singapura (1), Thailand (19), Malaysia (21), Vietnam (78), dan Brunei (112).^{vii}Evaluasi didasarkan pada 9 indikator: memulai usaha, izin mendirikan bangunan, memperoleh properti, akses terhadap kredit, perlindungan terhadap investor, perpajakan, perdagangan lintas batas, pelaksanaan kontrak dan penutupan usaha. Evaluasi dilihat dari sudut pandang investor internasional, yang berlaku bagi investor bisnis besar, menengah atau kecil dari luar negeri. Dilihat dari sudut pandang berbeda, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa melakukan bisnis di Indonesia terlalu mudah untuk semua jenis ekonomi informal yang dapat tumbuh dimana saja dan kapan pun, yang menghasilkan situasi tidak nyaman dan meningkatkan risiko terkait standar yang rendah, meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan dan keamanan, higienitas, masalah lalu lintas, dan sebagainya pada masyarakat umumnya dan juga mendatangkan keluhan dari ekonomi formal. Usaha mikro dan usaha kecil juga mengeluhkan biaya sertifikasi produk, yang tidak terjangkau oleh usaha yang modalnya sangat terbatas.

1.2 Lapangan Kerja

1.2.1 Kontribusi Pariwisata terhadap Lapangan Kerja dan Pekerjaan untuk Angkatan Muda

Dari perspektif global, sebagai industri yang menyumbang 30% jasa ekspor dunia, sektor pariwisata menyumbang lebih dari 235 juta pekerjaan, yaitu sekitar 8% dari seluruh pekerjaan (langsung dan tidak langsung) atau satu dari setiap 12,3 pekerjaan pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 sektor perdagangan, hotel dan restoran bersama sama menyerap angkatan kerja, nomor dua setelah pertanian. Dalam Nesparnas (Neraca Satelit Pariwisata Nasional) yang disiapkan secara tahunan sejak tahun 2000 oleh Biro Pusat Statistik (BPS), disebutkan bahwa pariwisata memberi sumbangan terhadap penciptaan lapangan kerja secara signifikan, akan tetapi berfluktuasi. Pada tahun 2001 kontribusinya mencapai 8,57% dan pada tahun 2004 mencapai 9,06%. Tahun 2006 merupakan tahun terburuk, sumbangan sektor pariwisata hanya 4,65%, kemudian membaik kembali menjadi 6,84% pada tahun 2008, dan 6,87% pada tahun 2010. Angka tersebut termasuk mereka yang secara langsung dan tak langsung bekerja dalam sektor pariwisata. Data ini mengungkapkan bahwa dalam periode 2000-2008 kontribusi sektor pariwisata terhadap pekerjaan menurun sebagaimana tampak pada Lampiran Tabel 1.4

Pada waktu yang bersamaan terdapat indikasi bahwa lapangan kerja yang diciptakan tidak mengutamakan keinginan pekerja, khususnya pada lapisan terbawah. Upah yang rendah, jam kerja yang panjang-termasuk bekerja selama masa liburan, lapangan kerja yang tidak stabil dan pekerja lepas, dan pendapatan yang kurang layak merupakan beberapa isu yang menarik perhatian para pembuat kebijakan. Pariwisata adalah industri padat karya yang memerlukan rentang keterampilan profesional yang lebar. Sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, yang dapat dianggap sebagai suatu hal yang positif dilihat dari sudut pengadaaan kesempatan kerja jangka pendek, tetapi akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan industri dalam jangka panjang dan inisiatif kebijakan terhadap pekerjaan yang layak. Pekerja lapisan terbawah mungkin akan memengaruhi kualitas produk dan jasa yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk mencapai keberlanjutan dan agar berdaya saing. Karena itu, keterkaitan antara lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata dari sektor publik maupun swasta dan industri pariwisata perlu difasilitasi secara efektif. Identifikasi dan pengembangan standar kompetensi khusus seharusnya dipromosikan dan dilaksanakan.

Tidak hanya karena sifat pekerjaannya, akan tetapi karena sifat musimannya dan permintaan akan tenaga kerja yang tinggi selama masa liburan, pariwisata secara tradisional telah menjadi sektor yang menarik tenaga kerja usia muda. Selama masa liburan – musim puncak – mungkin tersedia pekerjaan paruh waktu untuk mahasiswa dan memberikan pengalaman serta untuk menghabiskan waktu produktif pada angkatan muda. Karena 38,6% dari perjalanan domestik dilakukan oleh

kelompok usia muda (< 24 tahun), angkatan muda juga memberikan kontribusi secara signifikan terhadap industri kepariwisataan sebagai konsumen.

Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan pendatang mungkin berada dalam kondisi kerja yang tidak menguntungkan, ilegal, atau tidak etis. Perempuan dan pekerja muda mendominasi tenaga kerja dalam sektor pariwisata, tetapi perlu ditekankan bahwa ada kesempatan, tantangan dan resiko terkait dengan situasi ini pada saat yang sama.

Sektor ini relatif mudah menawarkan akses terhadap dunia kerja akan tetapi karena isu jender, pengalaman kerja yang rendah, lemahnya keberadaan serikat kerja, pekerjaan/kontrak yang tidak terjamin, sektor ini juga terbuka terhadap kondisi kerja yang buruk dan berbahaya maupunkurangnya perspektif karir dan penerimaan terhadap terenuhinya hal hal terkait hak azasi mereka seperti upah yang adil untuk pekerjaan yang setara, perlindungan terhadap kehamilan, jaminan sosial dan cuti. Terlebih pula isu seperti itu akan menghasilkan tingkat pergantian yang tinggi dan dampak negatif terhadap kualitas jasa. Aneka tantangan ini harus diangkat dan diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan di sektor ini. Etika perlakuan kerja terhadap pekerja perempuan dan pekerja muda seharusnya dikembangkan sejalan dengan hukum nasional dan internasional untuk menjaga dan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka.

1.2.2 Keadilan Sosial

Kondisi keadilan sosial dalam hal ini dilihat dari perbedaan antara pekerja di daerah perkotaan dan perdesaan, lelaki – perempuan dan juga antara pekerja tetap dan pekerja lepas. Survei tentang Situasi Buruh oleh BPS (2010) mencatat perdagangan dan pariwisata ke dalam satukelompok bersama dan memperlihatkan statistik sebagai berikut:

- Prosentasi dari mereka yang bekerja dalam perdagangan dan pariwisata dengan pendapatan kurang dari Rp 1 juta, cukup besar. 52,86% di daerah perkotaan dan bahkan di daerah perdesaan angkanya lebih signifikan yaitu 76,23% berupah kurang dari Rp 1 juta per bulan. Pekerja dengan upah di bawah Rp 600.000 mencapai 21,59% di daerah perkotaan, dan 44,33% di daerah perdesaan.
- Pekerja perempuan dengan upah atau gaji kurang dari Rp 1 juta berjumlah lebih dari 65% dan lebih dari 52% untuk pekerja lelaki
- Kesenjangan upah atau gaji di daerah perkotaan dan perdesaan dan antara pekerja lepas dan tetap cukup signifikan.

Mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap upah dan gaji nasional antara tahun 2000 dan 2010, terlihat ada penurunan yang signifikan lebih dari setengahnya dalam hitungan prosentase. Sebagai catatan upah dan gaji rata-rata per orang dalam sektor pariwisata yang lebih tinggi sekitar 20% dari rata-rata nasional pada tahun 2000, telah menurun sampai sekitar 30% kurang dari rata-rata

nasional pada tahun 2010. Kenyataan bahwa lebih banyak pekerjaan pada tingkat upah yang lebih rendah perlu diteliti secara intensif.

Pemerintah perlu memberlakukan standar upah minimum untuk lelaki dan perempuan, khususnya bila pasokan buruh melebihi kapasitas penyerapannya, karena posisi tawar pekerja sangat lemah. Sistem kontrak untuk pekerja lepas dan paruh waktu merupakan hal yang lazim dalam sektor pariwisata sebagai akibat sifat industri yang musiman.

1.3 Beberapa Isu Mutakhir

1.3.1 Pendidikan Pariwisata dan Pengembangan Sumberdaya

Insani

Hakikatnya Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia bertanggungjawab atas semua institusi pendidikan, termasuk sekolah pariwisata, baik sekolah kejuruan maupun sekolah lanjutan. Walau demikian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengelola 4 lembaga pendidikan kepariwisataan: Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, Sekolah Tinggi Pariwisata Makassar dan Sekolah Tinggi Pariwisata Medan.^{viii}

Jumlah lembaga pendidikan yang mempunyai program pariwisata merupakan petunjuk adanya kecenderungan positif semakin banyaknya universitas, negeri maupun swasta, meningkat minatnya untuk menyelenggarakan program pariwisata dan *hospitality*. Kini, selain empat lembaga pendidikan tersebut di atas, terdapat 17 universitas negeri dan swasta yang menyelenggarakan program pariwisata, termasuk program pasca sarjana. Meskipun begitu, diperlukan pemantauan untuk menilai kualitasnya dan apakah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan ini menyediakan akses, peluang, dan nilai yang adil dalam penerimaan siswa perempuan dan lelaki. 75% penyelenggara pendidikan tinggi dalam pariwisata dan *hospitality* berlokasi di Jawa dan Bali, khususnya di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, dan secara terbatas terdapat di Surabaya dan Semarang, sedangkan pendidikan menengah terkait *hospitality* lebih tersebar di seluruh negeri.^{ix}

Di seluruh dunia, patokan (*voluntary benchmarking*) yang bersifat sukarela dan sistem sertifikasi atas penyelenggara pendidikan kepariwisataan dan *hospitality* telah tumbuh pada dekade yang lalu dan sedang menjadi satu komponen yang semakin penting dalam standar pendidikan kepariwisataan dan daya saing internasional. Walau begitu, lembaga pendidikan kepariwisataan Indonesia yang terakreditasi sesuai standar yang mengacu pada lembaga serupa di wilayah Asia Pasifik, seperti badan independen akreditasi internasional yang mengkhususkan diri dalam pariwisata, *hospitality*, seni kuliner dan pendidikan penyelenggara acara/peristiwa (*event organizers*), seperti *the International Centre for Excellence in Tourism and Hospitality Education*^x nor *the UNWTO TedQual Accreditation System*^{xi} masih sangat terbatas. Mereka praktis/pelaku terbaik

internasional yang dapat memandu dan memberi tahu tentang sistem kualitas internal Indonesia untuk pendidikan dan pelatihan pariwisata dan *hospitality*.

Ketika perdagangan, jasa dan tenaga kerja diharapkan mengalir bebas pada tahun 2015 dengan pembentukan komunitas ASEAN, maka sektor pariwisata juga akan terimbas. Indonesia telah menerapkan kurikulum pendidikan pariwisata berbasis pada Standar Kompetensi Umum ASEAN untuk Profesional Pariwisata (*ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP)*), yang akan mendukung mobilitas jabatan pekerja pada tahun 2015. Dengan target meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara dari 7 juta orang pada tahun 2010 menjadi menjadi 10 juta pada tahun 2014, ditambah antisipasi pertumbuhan pasar pariwisata nusantara, maka akan ada kenaikan permintaan akan peringkat keterampilan tenaga kerja sektor pariwisata lokal. Demikian juga akan ada tekanan tambahan terhadap sumberdaya yang ada untuk mengurangi “kebocoran sumberdaya manusia” atau “hijrah keahlian (*brain drain*)” ke destinasi ASEAN lain dan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga pendidik dan kelembagaan pariwisata.^{xii}

Saat lembaga pendidikan menghasilkan lebih banyak lulusan dalam berbagai bidang terkait kepariwisataan, terutama *hospitality*, mereka mempunyai kesempatan untuk memasukkan pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulumnya. Untuk itu akan diperlukan pelatihan pengembangan profesi dalam rancangan kurikulum pariwisata berkelanjutan dan implementasinya untuk staf pengajar lembaga pendidikan menengah dan tinggi dan juga tenaga pengajar masa depan di sektor ini. Juga akan diperlukan pelatihan untuk pejabat pemerintah dan kalangan industri daripada tingkat nasional, provinsi dan lokal.

Agar dapat menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas dan agar investasi dalam pelatihan memberi hasil, strategi sumberdaya manusia yang komprehensif merupakan hal yang penting untuk sektor pariwisata yang menghadapi tingkat pergantian staf yang tinggi. Pemagangan dan program pelatihan kerja berorientasi karir kurang berkembang dan perlu inisiatif dari sektor swasta.^{xiii}

1.3.2 Pariwisata dan Pembangunan Perdesaan

Salah satu isu utama pembangunan Indonesia adalah tingkat kecepatan urbanisasi, sebagai akibat dari semakin lebarnya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kebijakan pembangunan yang lalu telah menghasilkan kondisi pembangunan sekarang yang bias ke perkotaan. Sekarang ini, telah banyak upaya dijalankan untuk mengurangi kesenjangan, akan tetapi ketidakseimbangan antara Jawa dan pulau-pulau di luarnya, barat dan timur, di samping kesenjangan perkotaan-perdesaan tetap merupakan tantangan untuk para pembuat kebijakan dan perencanaan.

Kebanyakan infrastruktur kepariwisataan terkonsentrasi di kotakota besar dan pusat pariwisata utama, khususnya hotel dan restoran berkelas. Juga ada kecenderungan mengembangkan kawasan sub-urban sekitar metropolitan untuk pariwisata rekreasi termasuk hotel, taman bertema

(*thematic parks*) sebagai bagian dari area perbelanjaan. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena distribusi penduduk, melainkan juga oleh faktor sosio-ekonomi lain, gaya hidup dan kekuatan budaya. Penduduk perkotaan mempunyai lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan gaya hidup untuk melakukan lebih banyak perjalanan daripada penduduk perdesaan, sehingga telah menciptakan pasar domestik yang lebih kuat. Peningkatan perjalanan perkotaan – perdesaan dapat menyeimbangkan perjalanan—antar kota yang saat ini menonjol , yang juga—mendukung pengembangan destinasi perdesaan.

Daerah perdesaan yang berkontribusi dalam produksi makanan dan sektor primer lainnya, selain kurang berkembang, juga rentan terhadap degradasi lingkungan dan masalah sosial. Kebakaran hutan dan pembalakan kayu tidak hanya terjadi di sejumlah pulau besar di luar Jawa tetapi juga di P. Jawa. Kompetisi sumberdaya dan perubahan tata guna lahan berlangsung secara dramatis: lahan pertanian, daerah tangkapan air, tepian sungai, daerah pesisir berubah menjadi permukiman, atau kawasan industri termasuk pariwisata. Infrastruktur yang telah dibangun pada masa lalu untuk mendukung pertanian mengalami degradasi padahal penting untuk produksi pangan nasional. Pariwisata perdesaan seringkali dibangun salah arah dengan mengubah lansekap perdesaan menjadi lansekap perkotaan, padahal bilamana dipahami secara tepat, pariwisata ‘niche’ dalam bentuk ekowisata, pariwisata berbasis pertanian, pariwisata petualangan dan bentuk pariwisata minat khusus lainnya dapat memberikan alternatif penghidupan bagi komunitas perdesaan dengan menciptakan pekerjaan non-pertanian dan nilai tambah tanpa menghapuskan fungsi pertaniannya.

Di pihak lain meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa karena pariwisata mengakibatkan biaya hidup setempat meningkat secara signifikan, meningkatkan harga lahan, rumah, barang kebutuhan pokok dan jasa, menarik tenaga kerja dari sektor pertanian sehingga menghabiskan tenaga kerja untuk sektor tradisional lainnya. Efek kumulatifnya berakibat pada berkurangnya secara relatif daya beli. Perlu dilakukan perencanaan kebijakan publik secara hati-hati agar diperoleh manfaat, dan untuk mengelola dampak negatif pariwisata sebagai suatu strategi pembangunan perdesaan.

1.3.3 Ekonomi Informal

Sektor informal telah dianggap sebagai suatu jaring pengaman sosial untuk pasar tenaga kerja nasional. Juga dalam pariwisata, ekonomi bayangan ini memainkan peran yang signifikan, di beberapa tempat bahkan mendominasi industri pariwisata. Pariwisata, melalui potensinya untuk aktivitas usaha mikro merupakan alat untuk mengurangi kemiskinan dengan menawarkan usaha yang luwes dan peluang lapangan kerja berupah rendah. Sektor informal menawarkan banyak dan bermacam barang dan jasa untuk wisatawan, secara langsung dan tak langsung. Destinasi merupakan pusat/simpul (*hub*) untuk pedagang, pemasok informal, yang menawarkan usahanya dalam berbagai kesempatan, secara musiman atau permanen. Keuntungan dari usaha kecil informal adalah

fleksibilitasnya dalam menutup dan membuka usahanya di mana saja dan kapan saja. Selama masa liburan (liburan sekolah, Idul Fitri dan liburan lainnya) usaha baru atau usaha musiman bermunculan.

Beberapa di antaranya mungkin menjadi usaha yang permanen sifatnya. Informal atau formal, semua pengusaha pastilah memerlukan pemberdayaan supaya lebih memahami seluk beluk kegiatan usaha, termasuk pembangunan usaha pariwisata berkelanjutan. Rencana komprehensif pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat menunjang pembangunan kapasitas seperti itu, termasuk juga untuk sektor informal. Pembangunan kapasitas yang sesuai untuk komunitas lokal, perempuan dan laki-laki, tentang kewirausahaan di sekitar kawasan pariwisata perlu dilaksanakan sebagai alat untuk mempercepat peluang ekonomi aktivitas pariwisata. Pemerintah juga mempunyai kepentingan untuk menggerakkan usaha mikro dan kecil dari informal menjadi ekonomi formal.

Sungguhpun peluang usaha dan lapangan kerja dapat meningkat, tetapi juga perlu diperhatikan kelemahannya. Karena status usahanya tidak terdaftar, pemerintah kehilangan pajak pendapatan, standar dan pemenuhan berbagai isu seperti misalnya keselamatan di tempat kerja, eksploitasi tenaga kerja, kesehatan masyarakat, kualitas produk, pengamatan perjanjian hak cipta internasional tidak dapat dipantau atau dikendalikan. Bila pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak dapat menghapus usaha informal ini, maka perlu dicari jalan keluar dan mendidik sektor informal dalam pariwisata melalui peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas dengan tujuan jangka panjang mengintegrasikannya ke dalam sektor formal.

Singkatnya, isu mengenai sektor pariwisata mempunyai dua sisi: (1) belum ditera secara resmi dan karena itu kurang /tidak cukup mendapat dukungan, dan (2) meremehkan potensi justru memandangnya lebihsebagai persoalan ketimbang sebagai potensi.

1.3.4 Administrasi

Tantangan birokrasi yang ekstensif lintastingkat pemerintahan yang berbeda menimbulkan persoalan kerjasama antarorganisasi serta efisiensi, dan bagaimana membagi tanggungjawab secara jelas dan dalam implementasi kegiatannya. Untuk negara sebesar Indonesia dengan keberagamannya, berbagai lembaga sub-nasional memainkan peran yang penting dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif. Bukan hanya luasan geografisnya yang jadi masalah, melainkan juga konteks khusus regional dan lokal memerlukan perhatian. Karakteristik wilayah berbeda-beda, tidak hanya secara alami tetapi juga sosio-ekonomi dan budaya, dengan berbagai norma dan nilaiyang harus diakomodasi.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memegang posisi sentral dalam pengembangan kebijakan pembangunan kepariwisataan pada tingkat nasional, pariwisata juga dipengaruhi oleh berbagai unit fungsional pemerintah lainnya, kementerian, dan berbagai lembaga lain. Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup menangani berbagai isu kebijakan dan pengelolaan pariwisata dalam wilayah tanggungjawabnya masing-masing.

Pemerintah telah membentuk beberapa unit khusus untuk mengurus pariwisata seperti *BTDC (Bali Tourism Development Cooperation)* di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Direktorat Pariwisata Alam di Kementerian Kehutanan. Hal ini tidak hanya menyulitkan kohesivitas peran pemerintah secara menyeluruh, bahkan juga dapat mengarah kepada pertentangan kepentingan antara para pemangku kepentingan yang berbeda. Konsekuensinya dapat berbentuk kesenjangan, tumpang-tindih atau bahkan perbedaan arah kegiatan oleh berbagai lembaga yang berbeda. Di bawah ini dicoba memetakan peraturan dan regulasi yang ada dikelompokkan sedemikian rupa supaya diperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang siapa yang berbuat apa.

- A. Dalam kebijakan, peraturan dan regulasi mengenai **penataan ruang**, pariwisata diperlakukan sebagai aktivitas pengguna lahan yang harus diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Terdapat beberapa dokumen hukum terkait dengan kebijakan tata ruang, seperti misalnya Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten. Rencana yang sudah disahkan menjadi Undang-undang di tingkat Nasional (Undang-undang no 26 tahun 2007) dan regulasi di tingkat provinsi/kabupaten (Peraturan Daerah/Perda. Banyak Kementerian yang berbeda mempunyai kewenangan terhadap bagian tertentu dari “ruang nasional”, tempat kegiatan pariwisata mungkin diselenggarakan. Kementerian Kehutanan memegang kewenangan terhadap Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa dan Cagar Alam, semuanya berada dalam status kawasan lindung. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan di laut dan samudra, tempat pariwisata berbasis kelautan berada, termasuk berbagai tempat untuk olahraga menyelam, memancing atau olahraga air lainnya. Aktivitas pariwisata ini mungkin konflik dengan banyak aktivitas lainnya, seperti misalnya transportasi dan usaha perikanan komersial. Masih ada bentuk lain “kewenangan” melalui aktivitas sektoral, seperti misalnya otoritas dari Kementerian Pertanian terhadap pengembangan produktivitas pertanian, untuk pasokan makanan dan juga untuk komoditi ekspor. Agrowisata berada di daerah atau ruang pertanian, atau mengambil sebagian ruang yang dialokasikan untuk pertanian. Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mungkin juga mempunyai kebijakan di beberapa provinsi tertentu, yang mempunyai potensi pariwisata, seperti kasus Nusa Tenggara Timur yang dikenal dunia melalui Komodo-nya.
- B. Sejumlah kebijakan terkait dengan **industri pariwisata** mungkin dikeluarkan oleh kementerian yang berbeda. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berwenang atas industri transportasi milik pemerintah (kapal udara, kapal laut, kereta api), dan akomodasi. *BTDC (Bali Tourism Development Corporation)* juga ditempatkan di bawah kementerian ini. Kementerian lain yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pembangunan industri terkait pariwisata adalah: Kementerian Industri, Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (dan Daerah)-dan Kementerian Perdagangan bisa juga mempunyai pengaruh terhadap pariwisata terkait dengan perdagangan.
- C. **Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan:** paling sedikit terdapat tiga kementerian yang terlibat dalam pembangunan sumberdaya insani: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pendidikan Tinggi Pariwisata di

Bandung, Bali, Medan dan Makassar. Lembaga pendidikan ini dulunya merupakan Pusat Pelatihan (*in house training*) yang kemudian dikembangkan dan menerima jumlah mahasiswa untuk berbagai program, melayani kebutuhan industri dan juga sektor publik. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan mengawasi dan mengendalikan pelatihan pengembangan tenaga kerja, termasuk dalam bidang pariwisata.

- D. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian yang mengkoordinasikan kesetaraan gender, akan memainkan peran penting dalam penyediaan bantuan teknis dalam memajukan kesetaraan gender dalam pendidikan dan pelatihan.
- E. **Dampak Pariwisata** – pariwisata bisa menimbulkan dampak lingkungan yang diatur melalui Undang-undang No. 32 – 2009 tentang Perlindungan terhadap Lingkungan. Kementerian Lingkungan bertugas membuat kebijakan mengenai keberlanjutan lingkungan. Penjabaran undang-undang menjadi peraturan – antara lain peraturan pemerintah mengenai analisis dampak lingkungan, yang menjadi persyaratan untuk proyek/konstruksi/aktivitas skala besar –karenakemungkinannya akan berdampak penting dalam arti jumlah orang yang akan terkena.
- F. **Koordinasi Pariwisata** – Pariwisata dan Industri Kreatif diharapkan menjadi **pembangkit ekonomi** utama yang menyebabkan pariwisata berada dibawah Koordinasi Menko Perekonomian dan juga diharapkan memainkan peran penting dalam memperbaiki kesejahteraan komunitas dengan kemungkinan adanya dampak sosial yang tidak diinginkan, yang dikoordinasikan melalui Menko Kesejahteraan Rakyat.

Dengan kebijakan desentralisasi, didukung oleh Undang-Undang Otonomi Daerah, peran pemerintah pusat telah bergeser menjadi lebih sebagai pengarah melalui kerangka kebijakan, koordinasi dan pengendalian selain pemberdayaan. Karena itu peran administrasi sub-nasional akan menjadi lebih penting. Situasi telah menciptakan suatu kondisi yang memerlukan koordinasi dan pemahaman tingkat tinggi. Kesenjangan dan tumpang tindih terjadi karena dalam kenyataannya kepemimpinan yang kuat koordinasinya dan komitmennya masih langka.

Koordinasi telah menjadi isu; ketika pemerintah setempat, meskipun tidak “punya bekal” untuk memimpin pembangunan pariwisata, tetapi menggunakan haknya untuk mengelola teritori mereka sendiri. Persepektif yang berbeda dengan pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah nasional mungkin terjadi dan pengendalian pembangunan masih tetap merupakan isu yang perlu mendapat perhatian penuh.

Pada tingkat provinsi, tanggung-jawab koordinasi pariwisata antar Kabupaten/Kota masih lemah dan telah memburuk sejak era otonomi daerah diberlakukan. Tanggung-jawab beralih ke pemerintah daerah, akan tetapi mereka seringkali tidak siap menjalankan perannya dan tetap masih

mengharapkan pengarahan dari pemerintah pusat. Pada umumnya, dapat ditunjukkan bahwa kelemahan utama administrasi kepariwisataan di Indonesia terletak pada kurangnya koordinasi/sinergi dalam dan antar tingkat pemerintahan dan ketersediaan sumberdaya agar tanggung-jawab di antara mitra berjalan secara efisien dan efektif.

Administrasi pemerintahan provinsi terbiasa mengikuti organisasi nasional, tetapi terdapat banyak variasi. Pariwisata merupakan pilihan dalam birokrasi/administrasi sub-nasional dan sangat bergantung pada tingkat kepentingannya dalam ekonomi regional. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat Dinas Pariwisata yang bertanggungjawab atas administrasi pariwisata. Beberapa dari DINAS ini telah mengelola kontribusi pariwisata secara signifikan terhadap pendapatan provinsi dan daerah setempat dan menjadi Dinas Pariwisata. Tetapi ada juga beberapa kasus yang menempatkan pengelolaan pariwisata dalam satu portofolio dengan bagian lain, seperti misalnya Kantor /DINAS Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga.

1.3.5 Kerangka Hukum

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan pariwisata Indonesia dan industri kreatif berbasis pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal, yang melampaui batas wilayah dan negara. Banyak diantara prinsip dan nilai yang dapat dijumpai dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Deklarasi Dunia tentang Hak Azasi Manusia. Dalam Deklarasi Dunia tentang Hak Azasi Manusia, pasal 23 mengenai lapangan kerja, Pasal 24 mengatur istirahat, bersantai dan liburan (*rest, leisure and holidays*)¹. Yang penting juga adalah Konvensi ILO No. 172 tentang Kondisi Kerja (Hotel dan Restoran) yang menetapkan bahwa semua pemangku kepentingan hendaknya bekerjasama untuk memperbaiki regulasi tentang lapangan kerja dan kondisi kerja dalam industri pariwisata, sejalan dengan agenda Lapangan Kerja dan Pekerjaan yang Layak. Para pemangku kepentingan hendaknya menjamin keselamatan, kesetaraan, dan martabat manusia serta juga tingkat pemberian upah yang cukup dalam lapangan kerja pariwisata.

¹Pasal 23:(1) Setiap orang mempunyai hak atas pekerjaan, memilih lapangan kerja secara bebas, kondisi kerja yang adil dan baik dan dilindungi terhadap pengangguran. (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, mempunyai hak atas upah, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. (3) Setiap orang yang bekerja mempunyai hak mendapat upah yang adil dan baik yang menjamin keberadaan dirinya dan keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan mendapat tambahan jika diperlukan, dengan berbagai alat perlindungan sosial. (4) Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24: Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat cuti dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja yang pantas dan liburan berkala yang dibayar.

Mengenai realisasi dalam sistem hukum Indonesia, penggantian UU No. 9, 1990 dengan UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dapat dipandang sebagai suatu kemajuan yang signifikan. Terlihat banyak perubahan fokus dari semata-mata mengenai pengelolaan industri dan usaha pariwisata, ke undang-undang yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai pasal terkait dengan etika, pembangunan berkelanjutan, kebutuhan akan adanya tingkat perencanaan yang berbeda dan juga lingkup pembangunan pariwisata yang mencakup destinasi, industri, pasar dan pembangunan kelembagaan.

Sejalan dengan banyaknya kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, terdapat juga banyak undang-undang dan regulasi yang ‘membingkai’ pembangunan kepariwisataan Indonesia dari berbagai sudut yang berbeda; sistem perencanaan, perencanaan dan pengelolaan tata ruang, tenaga kerja/lapangan kerja, aspek lingkungan dan sosial dan juga mitigasi bencana (lihat Lampiran 9 tentang daftar undang-undang dan peraturan terkait dengan kepariwisataan)

Dokumen kebijakan inti tentang kepariwisataan Indonesia adalah UU Republik Indonesia No 10 tahun 2009, tertanggal 16 Januari, 2009. Tanpa menggunakan istilah spesifik secara eksplisit, lembar perundang-undangan ini merangkul konsep yang sudah diterima dunia tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan dan Kode Etik-Global yang diterbitkan oleh UNWTO. Secara khusus yang terkait dengan potensi Karya Ramah Lingkungan dalam sektor pariwisata dan proses Organisasi Pengelolaan Destinasi dari Kementerian Pariwisata, UU ini menyebutkan referensi khusus tentang

- Zona Strategis Pariwisata (yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan tentang Ekowisata No 36/2010 dan Peraturan Menteri tentang Aktivitas Ekowisata yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan No P48/Menhut-II/2010).
- Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota (tercermin dalam proses dan penataan oleh DMO). Pembangunan Ekowisata diatur oleh Kementerian Dalam Negeri No 33/2010).
- Kompetensi – keterampilan, profesionalisme kerja (pengembangan kompetensi dan standar industri juga diatur melalui peraturan tentang lembaga sertifikasi pariwisata yang diterbitkan oleh Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 135/ 2004)
- Sertifikasi – untuk meningkatkan “kualitas produk pariwisata, jasa dan pengelolaan”.
- Pertumbuhan Ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan, pengangguran, pelestarian lingkungan, pembinaan budaya, citra nasional, cinta/harga diri/kesatuan untuk bumi pertiwi.
- Pelatihan Sumberdaya Insani, Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja (Bab 26). Khususnya, untuk menunjukkan bahwa masing-masing majikan dalam sektor terkait kepariwisataan bertanggungjawab melestarikan dan menghargai agama, budaya dan nilai setempat; menyediakan informasi yang akurat dan bertanggungjawab, pelayanan yang tidak

diskriminatif, menciptakan kenyamanan, keramahan, dan aman bagi wisatawan; mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro lokal dan koperasi yang berbasis kepada prinsip saling menguntungkan; memprioritaskan produk lokal dan peluang pekerjaan bagi penduduk lokal; secara aktif terlibat dalam pelatihan dan pendidikan keterampilan; pemberdayaan komunitas; menjaga lingkungan -alam dan budaya tetap bersih, hijau dan aman; dan memberlakukan standar usaha dan kompetensi berdasarkan peraturan. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.17/2007 menjelaskan secara rinci pelatihan dan pemberdayaan komunitas perdesaan.

Dokumen hukum lain yang juga penting diperhatikan sebagai indikator kemauan politik untuk membangun pariwisata yang menguat, adalah Instruksi Presiden No 16, 2005 yang menjadi alat untuk ‘menggerakkan’ semua kementerian yang terlibat, dan juga lembaga lainnya serta para gubernur agar—menunjang pembangunan kepariwisataan. Instruksi tersebut menekankan pada perbaikan jasa dan fasilitasi pariwisata nusantara maupun internasional; mengambil langkah nyata mengoptimalkan budaya dan pembangunan kepariwisataan nasional untuk kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, menghapuskan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan, secara pro aktif melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya alam dan juga budaya untuk pembangunan pariwisata dan budaya, dan dengan menggunakan tema: “Indonesia *ultimate in diversity*” untuk promosi internasional dan “Kenali negerimu, cintai negerimu, jelajahilah Nusantara” untuk pariwisata nusantara^{xiv}. Sayangnya, instruksi tersebut belum menyebut siapa yang akan melakukan koordinasi, dan sejauh ini efektivitasnya belum pernah dipantau.

Pada tingkat provinsi, Jawa Timur mempunyai program pariwisata terpadu (Peraturan Gubernur No 52/2010 tentang Rencana Aksi 2011) Disebutkan bahwa pariwisata hendaknya mengarusutamakan strategi pro-orang miskin dan strategi pro lingkungan. Sebagai bagian dari Rencana Aksi revitalisasi hasil panen dan program ketahanan pangan, pariwisata perdesaan seharusnya menunjang jaminan atas pangan dan menghemat energi . Walau demikian, berkenaan dengan akses bagi pariwisata, belum ada keterpaduan fokus. Transportasi, informasi dan kebijakan kepariwisataan belum tertata dengan baik, terutama pada tingkat kabupaten dan antar kabupaten dan tingkat pemerintahan lain. Misalnya, Jawa Timur mempunyai Peraturan Daerah No 38/2000 dari Dinas Mineral dan Energi yang menguraikan tugas pokok dan fungsi dalam bidang energi dan perlistrikan. Disebutkan bahwa bagian ini bertanggung-jawab atas energi alternatif, tetapi tidak ditunjukkan pentingnya energi alternatif dikaitkan dengan unit (Dinas)lain seperti pariwisata dan transportasi, dan bagaimana koordinasi kebijakan dan tindakan akan diwujudkan.

Sebagai contoh kurangnya keterpaduan perencanaan antara tingkat nasional dan provinsi, ada di Sumatera Utara. Pemerintah nasional melalui RPJM menargetkan 40% dari lahan di Sumatera Utara harus dijaga sebagai kawasan hutan. Pada tahun 2005, Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri No SK 44/Menhut-II/2005 yang memutuskan untuk mengubah kurang lebih 3.742.120 ha di Sumatera Utara. Peraturan ini mencakup komunitas di daerah dekat Danau Toba, yang menyatakan tidak pernah dikonsultasi terlebih dahulu. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tanah adat komunitas dapat dikonversi menjadi hutan nasional, dan bagaimana aktivitas komunitas di atas lahannya sendiri menjadi sesuai dengan hukum/legal. Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 33/2009 memberikan kerangka koordinasi kepariwisataan inter- dan antar kabupaten yang lebih baik, akan tetapi setiap kabupaten mungkin mempunyai situasi sendiri yang berbeda dan mungkin tidak menempatkan pariwisata sebagai sektor yang diprioritaskan. Karena itu, sebuah percontohan di beberapa kabupaten terpilih dekat dengan lokasi program DMO dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan pendekatan yang tepat untuk mendorong koordinasi yang lebih baik dalam pembangunan kepariwisataan.

Pada tingkat wilayah yang lebih luas (*super-regional*), Indonesia telah sepakat terhadap sejumlah kebijakan sektor kepariwisataan melalui lembaga regional seperti misalnya ASEAN, APEC, Daerah Pertumbuhan Asia Timur (BIMP-EAGA) dan Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand (IMT-GT). Kesepakatan seperti itu menggambarkan kepentingan keberlanjutan bersama dalam instrumen kebijakan yang menjadi panduannya. Terdapat beberapa satuan tugas seperti misalnya Tim Komunikasi Pariwisata ASEAN, Satuan Tugas Investasi Pariwisata ASEAN, Satuan Tugas Tenaga Kerja Pariwisata ASEAN yang bekerja untuk menyiapkan berbagai kebijakan ini, yang juga mangkus (*relevant*) untuk penyusunan kebijakan pariwisata nasional.

Penting untuk diketahui bahwa kebanyakan peraturan dalam kepariwisataan dan ekowisata relatif baru, dan pengembangan standar serta panduan, masih sedang digarap atau belum dikembangkan sama sekali.

1.3.6 Lingkungan

Lingkungan alami Indonesia merupakan inti dari keseluruhan daya tarik pariwisata. Meskipun demikian, dari sudut pandang lingkungan, kondisinya jauh dari ideal. Eksploitasi ekosistem Indonesia yang kaya dan beraneka-ragam secara berlebihan sudah dikenal luas dalam berbagai dokumen termasuk laporan-laporan resmi Pemerintah Indonesia, Laporan tentang Kondisi Lingkungan ASEAN dan sejumlah laporan antar pemerintah dan sejumlah perwakilan internasional lainnya. Merujuk pada evaluasi dari *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)*, yang mencakup kinerja pariwisata dalam keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya alami, Forum Ekonomi Dunia memperingkat Indonesia hanya di posisi 130 di antara 133 negara yang dievaluasi (WEF, 2009). Meskipun dapat dibuktikan bahwa kondisi di beberapa wilayah lebih baik dan di beberapa lagi lebih buruk, titik kuncinya adalah bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan suatu isu di semua tingkat pemerintahan di Indonesia.

Konsumsi energi dan air serta juga produksi sampah, misalnya, yang berasal dari wisatawan nyaris dua kali lipat ketimbang yang berasal dari penduduk pada umumnya. Wisatawan mengkonsumsi air dan energi lebih daripada konsumsi di rumahnya sendiri. Mereka juga memproduksi lebih banyak sampah yang ditinggalkan di destinasi yang mereka kunjungi.

Hotel dan restoran pada berbagai skala operasi yang berbeda, mengkonsumsi bahan kimia dan bahan yang tak teruraikan yang mempunyai efek pencemaran. Sementara di seluruh dunia

jaringan hotel utama dan banyak penyedia akomodasi yang dimiliki secara independen telah memenuhi standar operasi ramah lingkungan, masih banyak hal yang perlu dikerjakan pada tingkat global, dan di Indonesia khususnya memperbaiki kinerja lingkungan sektor akomodasi komersial. Pada umumnya, khususnya di tingkat terbawah penyedia akomodasi, dampak lingkungan belum menjadi perhatian utama. Di sepanjang jalan di banyak daerah wisata di Indonesia, dapat dijumpai begitu berbagai warung makan dan beberapa sarana akomodasi yang dikelola tanpa pengetahuan yang memadai, khususnya menyangkut dampak lingkungan.

Destinasi padat kunjungan, khususnya kunjungan domestik dalam jumlah besar dengan kendaraan pribadi, menyebabkan pencemaran udara yang menjadi tanggungan penduduk lokal dan menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. Misalnya Bandung sebagai destinasi wisata perkotaan yang populer dengan sarana perbelanjaan dan kuliner sebagai daya tarik utamanya. Orang-orang menghabiskan waktu beberapa hari atau akhir pekan yang menyebabkan kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi, terutama di pintu gerbang tol yang membuat antrian kendaraan bisa mencapai 10 km. Terdapat laporan bahwa selama akhir pekan, sebanyak 200 ribu kendaraan memasuki kota. Lalu lintas yang padat dan kehidupan malam di kota dapat menyebabkan pencemaran suara, perusakan terhadap keaneka-ragaman hayati dan gangguan terhadap spesies di daratan dan di pesisir dapat terjadi karena lemahnya pengelolaan waktu kunjungan, dan perusakan terhadap berbagai lokasi di bawah permukaan air karena pengambilan karang yang ilegal telah berlangsung di beberapa destinasi pantai yang terkenal, merupakan isu lain yang perlu diperhatikan.

Wisatawan juga dapat menciptakan dampak yang tidak disadari ketika mereka mengunjungi tempat atau daya tarik dengan lingkungan alam dan budaya yang sensitif. Karena itu perlu dikembangkan kampanye kesadaran pengunjung tentang kemungkinan dampak yang dapat merakitimbulkan, khususnya dengan menggunakan tetenger (*signage*) dan syarat-syarat yang dapat diinterpretasikan dalam berbagai bahasa, ditempatkan pada gerbang masukke berbagai lokasi daya tarik budayaatau alam tertentu.

Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata akan menimbulkan tekanan terhadap sumberdaya di lingkungan alami. Motivasi beroleh keuntungan jangka pendek akan dapat mengesampingkan hilangnya sistem alami yang bersih, sehat dan tahan lama. Eksistensi Industri kepariwisataan bergantung kepada “kesehatan” laut Indonesia dan lingkungan teresterialnya, sehingga pariwisata harus selalu menjadi mitra alami untuk konservasi keaneka-ragaman hayati di Indonesia. Keseimbangan antara manusia, bumi dan keuntungan melalui pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk Indonesia dapat terwujud.

Pesan Kunci Bab 1

- Meskipun kunjungan internasional dan pengeluaran wisatawan mancanegara mengalami pertumbuhan, perjalanan domestik dan pengeluaran wisatawan nusantara telah memberikan sumbangan terhadap ekonomi nasional dan juga penciptaan lapangan kerja. Yang jauh lebih signifikan, pertumbuhan dan pentingnya pariwisata nusantara hendaknya tidak diabaikan dan diremehkan dalam sudut pandang rencana strategis.
- Perencanaan dan administrasi kepariwisataan telah terbukti kekurangan sumberdaya, kekurangan kepakaran husus dalam kebijakan publik untuk perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan dan kurangnya koordinasi di antara berbagai kementerian dan berbagai unit pemerintah yang berbeda. Pada tingkat lokal, bila direncanakan dengan layak, pembangunan kepariwisataan akan memperkuat pembangunan ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan dan urbanisasi. Kebijakan yang efektif perlu diperkuat dengan menata struktur yang memungkinkan koordinasi semua pemangku kepentingan, dan meramu secara seimbang berbagai piranti, termasuk berbagai instrumen ekonomi dan legislasi.
- Sumberdaya manusia merupakan isu yang strategis, yang akan menentukan kualitas pencapaian tujuan pembangunan nasional dan juga memperbaiki daya saing Indonesia dalam memperoleh pangsa yang lebih baik dalam investasi dan kunjungan, dan juga dalam menciptakan produk berkualitas untuk wisatawan nusantara dan mancanegara
- Secara geografis, investasi perlu diseimbangkan, juga antara berbagai jenis industri pariwisata terkait (tidak hanya dalam sektor akomodasi) agar diperoleh struktur industri kepariwisataan yang lebih baik.
- Pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan dalam kerangka hukum, akan tetapi, tanpa implementasi praktisnya, termasuk dalam sektor pariwisata. Pemerintah (lokal) perlu berada di garis depan dalam promosi dan pelatihan pariwisata berkelanjutan dalam bingkai administrasi dan industri kepariwisataan.
- Pada prakteknya, perlindungan terhadap lingkungan alami maupun budaya masih kurang, berbagai isu lingkungan yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pariwisata mengancam keberlanjutan berbagai sumberdaya pariwisata dan menjadi ancaman terhadap destinasi dan kesejahteraan komunitas tuan rumah.
- Meskipun kontribusi dan perannya dalam pengurangan kemiskinan serta pengadaan lapangan kerja untuk mereka yang paling tidak terlatih cukup signifikan, ekonomi informal dalam sektor kepariwisataan mempunyai isu yang belum terselesaikan terkait dengan pekerjaan yang layak, jaminan sosial dan isu keselamatan serta keberlanjutan jangka panjang.

BAB 2

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan untuk INDONESIA

Ikhtisar Bab

Bab ini menguraikan dasar-dasar pariwisata berkelanjutan. Dalam bab ini diperlihatkan keterkaitan antara pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan potensinya untuk menghasilkan berbagai efek yang positif di berbagai daerah. Hubungan seperti itu dapat dilihat pada pengurangan kemiskinan, pembangunan perdesaan, Tujuan Pembangunan Milenium, penciptaan peluang berbagai usaha baru dan pekerjaan layak yang ramah lingkungan dan sebagai kontribusi penting terhadap komitmen Indonesia dalam pengurangan perubahan iklim yang memperkuat emisi. Selain daripada itu, Analisis SWOT memperlihatkan kebutuhan dan berbagai bidang khusus (yang memberikan) peluang untuk penguatan keberlanjutan dalam pariwisata di Indonesia dengan dari segi ekonomi, lingkungan, khususnya kesejahteraan sosial, termasuk identifikasi potensi dan tantangan utama untuk dengan kuat mendorong pariwisata ramah lingkungan di Indonesia.

2.1 Konsep Pariwisata Berkelanjutan

2.1.1 Dasar Dasar Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan didefinisikan oleh UNWTO sebagai:

"Pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas tuan rumah".^{xv}

Mengapa pariwisata berkelanjutan begitu penting bagi Indonesia, negara dengan ribuan pulau dengan berbagai ukuran, kaya akan sumberdaya alami dan juga budaya, terbentang sepanjang khatulistiwa. Hingga sekarang ini, hanya sebagian kecil penduduk yang mampu menikmati potensi manfaat pariwisata, karena kendala multi dimensi, ekonomi maupun budaya. Kebanyakan wisatawan mengunjungi destinasi terkenal dan hanya sedikit saja yang telah menjelajahi nusantara di luar jalur yang populer, dan yang sekaligus menyebarkan kontribusi ekonomi yang berasal dari pengeluaran pengunjung secara lebih luas. Beberapa komunitas tuan

rumah telah mendorong berbagai bentuk pengembangan kepariwisataan dan mendapat manfaat ekonomi melalui pekerjaan, peluang pendidikan baru dan peningkatan kualitas hidup. Banyak yang tidak mempunyai peluang terlibat dalam sektor pariwisata seperti itu karena sejumlah alasan politis, geografis, sosial, budaya atau bisnis. Beberapa komunitas tuan rumah pembangunan kepariwisataan tidak menikmati hak untuk mendapatkan manfaat dari model pembangunan kepariwisataan yang bersifat ‘tertutup’ (enclave) di daerahnya.

Praktek pariwisata berkelanjutan tidak hanya berarti mengkonsumsi sumberdaya alami dan budaya saja, melainkan juga mengonservasikannya juga; tidak hanya bermanfaat bagi sedikit orang, akan tetapi bertujuan mendistribusikan keuntungan secara lebih luas di antara para pemangku kepentingan dan komunitas. Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang komprehensif, dimaksudkan untuk segala macam usaha pariwisata: baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan, skala besar dan kecil, swasta maupun pemerintah. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan merupakan suatu agenda publik yang penting untuk semua pemangku kepentingan di semua tingkat.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DARI PARIWISATA (UNWTO)

Pedoman dan Praktek Pengelolaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dapat diterapkan pada semua bentuk pariwisata dalam semua jenis destinasi, termasuk pariwisata massal dan berbagai macam segmen ‘niche’. Prinsip-prinsip keberlanjutan mengacu kepada aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosio-budaya dalam pembangunan kepariwisataan, dan keseimbangan yang sesuai harus dibentuk antara ketiga dimensi tersebut untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang. Jadi, pariwisata berkelanjutan hendaknya:

1. Memanfaatkan sumberdaya lingkungan yang menjadi elemen kunci dalam pembangunan kepariwisataan secara optimal, menjaga proses ekologi penting dan membantu mengkonservasikan pusaka alam dan keaneka-ragaman hayati.

2. Menghormati keotentikan sosio-budaya dan komunitas tuan rumah, melestarikan pusaka buatan dan kehidupan budaya masa kini, nilai-nilai tradisional, dan berkontribusi terhadap pemahaman antar budaya dan toleransi.

3. Memastikan berlangsungnya operasi jangka panjang, yang memberikan manfaat sosio-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara berkeadilan, termasuk lapangan kerja yang stabil dan peluang komunitas tuan rumah untuk beroleh pendapatan dan pelayanan sosial, serta berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan **partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang mendapat informasi,** dan juga **kepemimpinan politis yang kuat** untuk menjamin adanya partisipasi yang luas dan terbangunnya konsensus. Mencapai pariwisata berkelanjutan merupakan **proses yang berkesinambungan** dan hal itu memerlukan pemantauan dampak secara konstan, mengenalkan tindakan pencegahan dan/atau tindakan korektif bila diperlukan. Pariwisata berkelanjutan juga harus menjaga **tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi** dan menjamin pengalaman yang penuh makna bagi wisatawan, menumbuhkan kesadaran tentang isu-isu keberlanjutan dan mempromosikan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan di antara mereka.^{xvi}

2.1.2 Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)

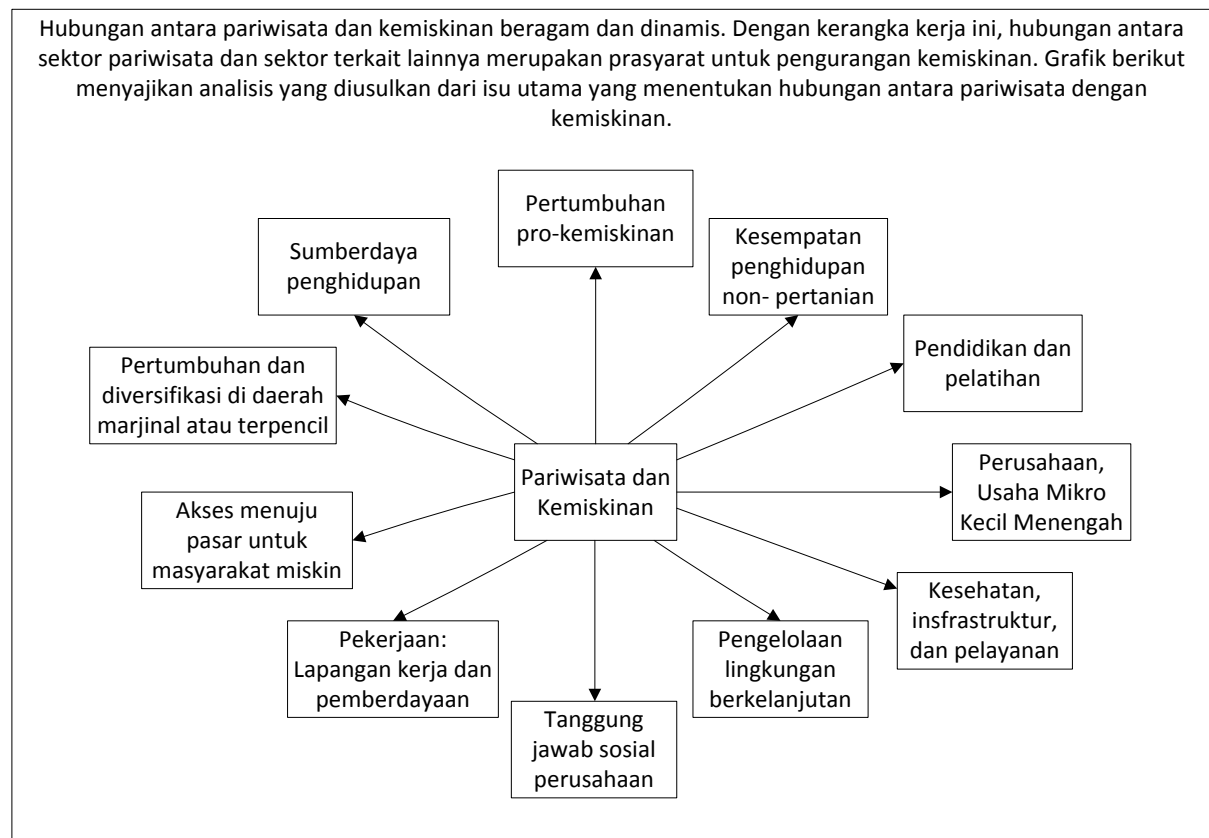
Pariwisata berkelanjutan haruslah mempunyai dampak langsung dan positif bagi pencapaian sasaran MDG Indonesia. Sementara kebanyakan inisiatif pariwisata “pro masyarakat miskin” di seluruh dunia terfokus pada MDG no 1,3,7 dan 8 (penghapusan kemiskinan, kesetaraan jender, pembangunan berkelanjutan dan kemitraan global), beberapa intervensi positif dalam pariwisata dapat dilakukan agar memberi kontribusi lebih besar kepada berbagai tujuan MDGs yang lainnya.

Kode Etik Pariwisata Dunia memberikan kerangka kebijakan untuk pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dalam konteks MDGs. Indonesia mempunyai sejarah dukungan kebijakan nasional yang kuat terhadap Kode Etik tersebut, dan telah memasukkan rujukan tentang hal itu dalam situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah judul “Peraturan”. Kode Etik Pariwisata Dunia mencakup hak hak pekerja dan pengusaha dalam industri kepariwisataan (pasal 9).^{xvii} Kesepakatan Kerjasama antara UNWTO dan ILO, 2008, mengarah pada pengembangan aktivitas bersama dalam HIV/ AIDS, pekerja anak, pekerja pendatang dan sektor lain serta isu-isu terkait tempat kerja. Konsep ILO tentang “**Pekerjaan Layak**” merupakan komponen dasar dalam pariwisata berkelanjutan. Inti Kode Etik Global telah tertuang dalam UU no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

2.1.3 Pengurangan Kemiskinan dan Pembangunan Perdesaan

Hubungan antara pariwisata berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan bersifat multi dimensi sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini. Kehadiran pariwisata di suatu lokasi, tidak otomatis mengurangi kemiskinan, juga bukan hubungan belas kasihan kepada masyarakat miskin setempat baik oleh industri kepariwisataan maupun oleh wisatawan. Pengurangan kemiskinan tidak hanya terbatas meningkatkan pendapatan moneter, tetapi juga harga diri dalam aspek sosio-budaya dan lingkungan hidup.

GAMBAR 2.1: PARIWISATA DAN KEMISKINAN



Sumber: ILO Toolkit on Poverty Reduction through tourism (2011: 11)

Masyarakat miskin dapat secara langsung dan tak langsung mendapat manfaat dengan berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Partisipasi langsung terjadi bilamana masyarakat miskin menyediakan barang dan jasa bagi wisatawan. Mereka dapat berinteraksi secara langsung melalui pekerjaan di “rumah tamu” (*guest house*) perdesaan, hotel atau kafe dan restoran setempat, menjual barang kerajinan di kaki lima atau menjalankan berbagai jenis bentuk transportasi. Partisipasi tak langsung diperoleh melalui peluang masyarakat miskin yang bekerja dalam usaha mikro yang memasok pada penyedia jasa pariwisata langsung, seperti misalnya bertani sayuran atau buah-buahan yang dihidangkan di hotel hotel, *guest house*, kafe, restoran, dan sebagainya atau bekerja pada usaha manufaktur yang membuat pakaian/tekstil atau perlengkapan yang dikonsumsi oleh wisatawan dan hotel hotel.

Di tempat-tempat yang distribusi sumberdaya dan kekuasaan mengalami distorsi, penduduk setempat mungkin tidak mendapat bagian dalam aktivitas ekonomi yang bertumbuh dari pariwisata. Sebaliknya, kondisi ekonominya akan bertambah buruk dengan meningkatnya biaya hidup, kemampuan memiliki/menyewa rumah, perpindahan pekerja keluarga yang diperlukan di sektor pertanian ke sektor pariwisata, dan penggunaan barang serta jasa yang diimpor. Mereka juga mungkin mengalami kerugian oleh biaya modal yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan promosi pariwisata yang seyogyanya dapat dipakai untuk biaya berbagai pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat dan tersisihkannya lahan serta air dari penggunaan untuk masyarakat umum yang beralih menjadi pemenuhan kebutuhan untuk kepariwisataan.^{xviii}

Pariwisata berkelanjutan dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, dengan menghormati keotentikan sosial-budaya, dan penggunaan sumberdaya lingkungan secara bertanggung-jawab, dan tidak hanya mendorong melainkan juga memfasilitasi serta melakukan pemberdayaan terhadap komunitas agar mereka mampu berperan serta dalam proses produksi serta mendapat berbagai manfaat bersih (net) dari kegiatan tersebut.

Meskipun orang miskin juga terdapat di daerah perkotaan, fokus akan dilakukan di daerah perdesaan, dengan asumsi bahwa jika penduduk perdesaan menjadi lebih baik, migrasi desa – kota akan menurun dan membantu menurunkan tingkat urbanisasi yang menghasilkan permasalahan lain.

Pariwisata perdesaan berkelanjutan merupakan elemen kunci terhadap pengurangan kemiskinan di seluruh Indonesia melalui penciptaan aktivitas dan pekerjaan non pertanian. Dengan pariwisata juga akan tersedia infrastruktur yang lebih baik untuk penduduk setempat, mendukung pelestarian alam dan warisan budaya, mencegah perubahan guna lahan pertanian dan bahkan menciptakan nilai tambah. Disamping itu, pariwisata juga menyediakan peluang untuk pemuda perkotaan supaya dapat memahami secara lebih baik tentang kehidupan perdesaan. Pariwisata tidak dimaksudkan untuk mengubah lansekap perdesaan menjadi pemandangan dengan rekreasi gaya perkotaan.

Kebijakan yang lebih tegas dan komitmen praktis terhadap pariwisata berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Indonesia sekarang ini dan kualitas pembangunan kepariwisataan di masa depan, agar supaya tidak hanya memuaskan para wisatawan tetapi memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi bangsa Indonesia dan khususnya untuk komunitas lokal. Juga diharapkan bahwa pendekatan pariwisata berkelanjutan akan memperbaiki kinerja pariwisata dalam kontribusinya terhadap pembangunan nasional, tidak hanya dalam arti kontribusi terhadap PDB, tetapi juga dapat berperan lebih baik dalam penghapusan kemiskinan, menciptakan pekerjaan, melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Secara detil, sumber sumber keuntungan meliputi:

Peluang usaha lokal baru dan penguatan ekonomi

Penciptaan peluang usaha baru seperti misalnya ekowisata, akomodasi, transportasi dan enersi ramah lingkungan, efisiensi energi dan air serta pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, pusat pembelajaran dan budaya, penguatan pendapatan untuk ekonomi setempat, agar menjadi lebih swa sembada, mengurangi kebocoran dan memperkuat mata rantai produksi setempat.

Penciptaan pekerjaan yang layak.

Terciptanya berbagai tempat kerja yang berkualitas karena pekerjaan layak yang ramah lingkungan (*green jobs*) akan meningkatkan kemakmuran dan daya beli penduduk, membantu mengurangi kemiskinan dan sebagai konsumsi akan masuk kembali ke dalam ekonomi lokal. Hal ini bertentangan dengan skema pekerjaan yang biasa dilakukan, yang seringkali cenderung menargetkan keuntungan maksimal dan upah minimal, yang membuat para pekerja tidak akan

mampu memperbaiki kehidupannya atau berkontribusi terhadap ekonomi lokal dengan meningkatkan konsumsi. Permintaan akan tenaga kerja juga membuka peluang untuk pelatihan tingkat lokal dan fasilitas untuk pengembangan kapasitas.

Daya tarik wisata dan penciptaan pasar

Ada permintaan yang besar terhadap destinasi pariwisata yang dikelola secara lebih baik dan berkelanjutan dapat menarik wisatawan yang lebih berkualitas dan juga akan mampu menjangkau kelompok sasaran dari berbagai sumber pasar, di manapraaktek industrinya tidak mengganggu masyarakat dan lingkungannya, melainkan lebih berkontribusi kepada keberlanjutan. Tidak hanya menghasilkan keuntungan kompetitif bagi destinasi, tetapi pada kenyataannya di'tuntut' oleh banyak mitra utama dalam saluran distribusi produk utama.

Daya tarik investasi terkendali

Konservasi sumberdaya jangka panjang, pembangunan komunitas dan infrastruktur yang baik, menjamin lingkungan usaha yang baik untuk sekarang dan untuk masa mendatang, yang akan membuat destinasi menjadi lebih menarik lagi bagi investor, dan dalam waktu yang bersamaan membantu mengonservasi kekayaan pusaka komunitas.

Jejaring Usaha

Efek berganda yang kuat dapat terlihat dalam sektor pariwisata melalui pengeluaran wisatawan untuk berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi, seperti pemandu wisata, restoran, toko kerajinan, transportasi lokal dan barang-barang serta jasa lainnya baik dalam sektor ekonomi formal maupun informal.

Pajak Pendapatan

Usaha yang syah dan terdaftar yang memenuhi kewajiban fiskal dan hukum merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah, yang selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan. Dalam hal ini, penggunaan (*yang dikhususkan*) untuk pembangunan dari bagian pajak pendapatan usaha yang berkelanjutan dapat merupakan suatu cara insentif dari pemerintah.

2.1.4 Masyarakat dan Kebudayaan

Dampak pariwisata terhadap situasi sosial dan budaya komunitas tuan rumah tidak boleh diabaikan. Dampak dapat bersifat positif, dan dapat bersifat negatif pula. Pendekatan pariwisata berkelanjutan dirancang untuk mendorong terjadinya dampak positif pembangunan pariwisata terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat, dan mengenali serta mengelola setiap dampak negatifnya. Pembangunan pariwisata mungkin akan meningkatkan degradasi budaya dan mengundang timbulnya kriminalitas, terutama terkait dengan obat-obatan terlarang dan prostitusi. Permasalahan juga mungkin timbul, bila masyarakat setempat harus memperjuangkan sumberdayanya sendiri dan terasing dari kenyamanan yang dinikmati wisatawan dan juga oleh kelakuan wisatawan tak sesuai dengan nilai-nilai setempat. Pendekatan berkelanjutan dalam

pembangunan pariwisata menawarkan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan menempatkan budaya lokal sebagai bagian atau bahkan menjadi inti produk pariwisata. Dengan menambahkan pendekatan keberlanjutan dalam pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan komunitas melalui pendidikan, komunikasi, penguatan toleransi dan rasa hormat, pertukaran budaya, kerjasama dan kedamaian dapat tercapai. Pada saat yang sama juga mungkin akan diperoleh kebanggaan yang lebih kuat terhadap budaya lokal dan juga revitalisasi tradisi. Ketika masyarakat diperkuat toleransinya dan rasa hormatnya terhadap tamu tamu mereka, tidak kurang pula pentingnya pendidikan bagi wisatawan yang ditujukan agar mereka menghormati budaya lokal tuan rumah dan semua atributnya

Pariwisata berkelanjutan berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan lokal dengan memaksimalkan kontribusi pariwisata bagi kemakmuran destinasi dan komunitasnya. Akan ada pengaruh terhadap kepedulian komunitas terhadap lingkungannya dan mungkin memperkuat aktivitas budaya yang selanjutnya akan kembali berdampak positif baik kepada penduduk lokal maupun wisatawannya. Implementasi pariwisata berkelanjutan bukanlah suatu yang sederhana untuk dilakukan, akan diperlukan pemberdayaan komunitas **yang berkesinambungan** melalui pendidikan, komunikasi, dan persuasi yang positif agar supaya terjadi penguatan toleransi dan rasa hormat, pertukaran sosial budaya, kerjasama dan perdamaian dapat tercapai. Pada saat yang sama **kebanggaan yang lebih kuat dalam budaya lokal** dan juga **revitalisasi tradisi** mungkin dapat digalakkan.

2.1.5 Kesetaraan Jender

Sebagai bagian penting dalam pekerjaan yang layak dan juga Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), kesetaraan jender dapat ditingkatkan melalui manajemen pariwisata berkelanjutan. Pada umumnya perempuan bekerja dalam bidang pariwisata sudah merupakan hal yang biasa, akan tetapi tetap menghadapi banyak kendala dan permasalahan dalam industri termasuk upah yang rendah, pekerjaan berkualitas rendah, kekurangan akses terhadap pendidikan, kekerasan dalam pekerjaan, tekanan (*stress*), pelecehan seksual, atau perlakuan kasar. Di sisi lain, banyak jasa terkait pariwisata membuka peluang kepada perempuan. Menurut Laporan Dunia tentang Perempuan dan Pariwisata (*Global Report on Women in Tourism*), 2011^{xix}, *perempuan hampir dua kali lipat kemungkinannya menjadi pekerja di pariwisata dibanding dengan sektor lainnya*. Meskipun demikian, laporan tersebut menyatakan bahwa perempuan seringkali “terkonsentrasi di keterampilan rendah, upah rendah dan pekerjaan yang berbahaya”, umumnya berpendapatan 10% sampai 15% kurang dari mitra laki-laki, dan cenderung mengisi pekerjaan memasak, membersihkan dan *hospitality*.

Ada 5 area yang perlu menjadi fokus agar pariwisata dapat memberikan manfaat kepada perempuan – pekerjaan, kewirausahaan, pendidikan, kepemimpinan, dan komunitas. Peranan perempuan di tingkat komunitas strategis sifatnya. Disamping peran reproduktifnya dan tanggung-jawabnya dalam pengelolaan rumah tangga, perempuan memberi kontribusi terhadap pemeliharaan dan pelestarian pusaka budaya dan berbagai tradisi. Misalnya seperti bekerja di

dapur, restoran, kafe dan hotel tradisional di Indonesia, juga di toko eceran, serta jasa lain yang berhasil dimasuki oleh perempuan. Cukup banyak banyak pekerja perempuan yang telah mencapai posisi profesional dalam berbagai peran pengelolaan, termasuk pemasaran dan pengembangan sumberdaya insani sebagai pelatih. Peluang yang berkeadilan berkaitan dengan penggajian yang adil membantu meningkatkan status sosial mereka, juga keselamatan dan keamanan finansial para perempuan dan anak-anak yang menjadi tanggungannya.

Kesetaraan gender juga harus dilihat dari sisi permintaan pariwisata. Perempuan yang melakukan perjalanan sendirian atau dengan anak-anak, akan memerlukan pertimbangan khusus dalam perencanaan pariwisatanya. Contoh yang sederhana misalnya adalah perempuan membutuhkan lebih banyak toilet umum per orang dibandingkan dengan laki-laki. Pelaku perjalanan perempuan juga memerlukan keamanan ekstra agar merasa aman bepergian sendiri, dalam transportasi umum, dalam akomodasi dan juga bila mereka sedang berada di ruang publik.

Perempuan dan pekerja muda merupakan mayoritas pekerja dalam sektor pariwisata dan pariwisata berkelanjutan dapat memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan secara politis, sosial, dan ekonomi. Hal tersebut dapat membantu para pembuat kebijakan publik dan kalangan industri dalam mengembangkan kebijakan yang lebih peka gender, memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai angkatan kerja pariwisata dan menyediakan pelatihan serta lebih banyak peluang untuk mengembangkan usahanya. Ke depan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti penyelenggara program CSR dalam industri kepariwisataan juga harus mengatasi tantangan mendorong industri kepariwisataan berkelanjutan secara nyata. Mendorong komitmen oleh semua pemangku kepentingan dalam memperbaiki kondisi kerja perempuan dan komponen pekerjaan yang layak, akan memberikan manfaat juga bagi industri kepariwisataan. Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi untuk perempuan dan pekerja usia muda dan rantai produksi pariwisata dapat dipersiapkan secara sistematis, memberi kemampuan bagi lebih banyak perempuan dan pekerja muda yang lebih berkualitas memasuki sektor pariwisata.

2.1.6 Peralihan ke Berbagai Praktek Berkelanjutan

Dalam industri kepariwisataan diperlukan suatu peralihan yang adil menuju ke praktek yang berkelanjutan. Sektor ini harus membiasakan diri untuk menangani permasalahan lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh (kegiatan) pariwisata. Investasi yang sistematis dan tindakan-tindakan yang tepat diperlukan untuk menunjang upaya perlindungan lingkungan, sosial dan keberlanjutan budaya sambil membangun sektor ekonomi yang kokoh. Para majikan, pekerja, komunitas dan juga wisatawan haruslah mengikatkan diri terhadap perubahan menuju berbagai praktek yang lebih berkelanjutan.

Meskipun beberapa pendukung industri mendorong pariwisata sebagai industri ramah lingkungan, industri pariwisata itu sendiri dan juga perilaku wisatawannya tidak selalu 'ramah lingkungan'.

Pariwisata berkelanjutan merupakan suatu konsep yang perlu digalakkan, tidak hanya kepada penyedia layanan pariwisata, tetapi juga kepada wisatawan serta komunitas tuan rumah dan pemerintah setempat.

Perilaku wisatawan merupakan satu variabel penting dalam pariwisata berkelanjutan. Mereka perlu diberi informasi dan dididik sedemikian rupa agar mengerti dan bertindak secara bertanggungjawab terhadap lingkungan, budaya setempat dan komunitas. Mereka perlu disadarkan bahwa mereka seharusnya menikmati sumberdaya alam dan budaya tanpa merusak, menyokong prinsip:

“Ambil hanya fotonya saja, tinggalkan jejaknya saja”

Kesadaran komunitas dan juga wisatawan dalam isu lingkungan serta budaya merupakan hal yang penting untuk pariwisata berkelanjutan pada masa depan. Sementara wisatawan perlu dididik agar bertanggungjawab terhadap destinasi yang mereka kunjungi dan sumberdaya yang mereka nikmati selama liburan, demikian pula komunitas perlu dukungan untuk mengenal apa yang menarik wisatawan datang ke destinasinya dan menjamin agar berbagai atribut itu yang mereka jaga tidak hilang.

Diperlukan upaya untuk mendukung peralihan yang tepat ke arah model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan yang lebih berkeadilan dengan penekanan pada pekerjaan layak yang ramah lingkungan, yang akan membantu mengurangi sampah, penggunaan air dan enersi dan juga akan mencegah kerusakan sumberdaya alami dan budaya. Perhatian lebih lanjut perlu diberikan untuk melakukan pendekatan menjawab berbagai isu terkait dimensi sosial perubahan iklim dan persyaratan untuk meningkatkan keuletan komunitas.

2.1.7 Menciptakan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan

Komponen penting dalam peralihan ke industri kepariwisataan yang lebih berkelanjutan adalah beralihnya peluang lapangan kerja ke dalam pekerjaan layak yang ramah lingkungan. Upaya untuk meningkatkan keberlanjutan sektor kepariwisataan, dari kedua sudut pandang – sisi lingkungan dan sisi sosial – dapat dicapai melalui pendekatan *multi-level*, menjamin tepatnya kebijakan pemerintah, instrumen dan insentif ditempatkan secara tepat untuk menciptakan pekerjaan produktif yang mencakup akses untuk peningkatan keterampilan para pekerja, informasi dan pengembangan kapasitas untuk para pemangku kepentingan utama.

Terciptanya pekerjaan layak yang ramah lingkungan dalam komunitas pariwisata dapat dirangsang melalui berbagai produk, pelayanan dan prasarana ke-PU-an yang ramah lingkungan. Selain dari pada itu, sektor konstruksi yang ramah lingkungan atau membuat bangunan yang sudah ada menjadi ramah lingkungan dengan penekanan pada usaha mendapatkan (pekerjaan

ramah lingkungan juga menawarkan potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan dalam ekonomi terkait kepariwisataan. Pada dasarnya, sektor pariwisata berpotensi besar untuk produk dan jasa pariwisata ramah lingkungan yang dapat dikembangkan, diproduksi dan dipasarkan oleh komunitas lokal dan pemuda. Produk-produk ini bisa cocok untuk semua destinasi, atau hanya untuk destinasi yang sangat khusus saja, dan harus ditemui kenali secara tepat. Begitu teridentifikasi, perlu segera dibuat rekomendasi untuk melakukan penilaian yang menyeluruh tentang keterampilan yang diperlukan, kompetensi dan modul pelatihan serta sertifikasi. Selain pelatihan keterampilan, pelatihan lain seperti misalnya pelatihan kewirausahaan (usaha ramah lingkungan bagi pemuda) akan bermanfaat bagi komunitas setempat. Akan tetapi, sikap ramah lingkungan pertama-tama perlu didorong dan dikembangkan. Pengembangan keterampilan ramah lingkungan merupakan komponen penting untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Hal itu akan memperkuat kapasitas pekerja dan para majikan/pengusaha dalam industri kepariwisataan dan pemangku kepentingan yang terlibat lainnya, untuk mengerti dan secara efektif memberi tanggapan secara efektif terhadap tantangan global mengenai perubahan iklim di berbagai destinasi pariwisata. Pengembangan keterampilan harus fokus kepada kedua aspek, yaitu aspek teknis dan keterampilan kewirausahaan usaha kecil.

Mengidentifikasi lembaga/program finansial yang potensial dapat mendukung usaha lokal yang ramah lingkungan juga penting agar pengembangan berbagai produk dan jasa ramah lingkungan dimungkinkan terselenggara.

Investasi yang sistematis ke industri kepariwisataan yang ramah lingkungan diperlukan untuk pengembangan destinasi yang berkelanjutan.

Tak hanya akses pada keuangan, akan tetapi juga diperlukan investasi yang sistematis ke dalam industri kepariwisataan ramah lingkungan untuk mengalihkan destinasi yang ada sekarang ini dan juga pembangunan destinasi baru.

Dengan pandangan tersebut di atas, ILO telah mengembangkan sebuah Model Penciptaan Lapangan kerja, yang ditujukan untuk mendorong pekerjaan dan mata pencaharian ramah lingkungan dalam kepariwisataan berkelanjutan. Kegiatan tersebut menata kondisi teknis dan normatif untuk menciptakan pekerjaan dan mata pencaharian di Indonesia dalam skala besar yang terkait dengan produk dan jasa ramah lingkungan tertentu yang akan dipromosikan. Dalam proyek ini berlangsung, produk-produk tersebut merujuk pada ekotwisata dan rumah inap (*homestay*) ramah lingkungan menurut Standar Pariwisata ASEAN. Dengan maksud mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja layak yang ramah lingkungan, model tersebut mengusulkan kemitraan yang inovatif yang bekerja dalam kelembagaan nasional dan daerah, pengembangan keterampilan, kewirausahaan dan pelatihan keuangan untuk memperbaiki kondisi kerja dan khususnya menciptakan pekerjaan produktif di tingkat lokal. Pekerjaan pekerjaan ramah lingkungan kini diintegrasikan ke dalam program Organisasi Pengelolaan Destinasi (*Destination Management Organisation / DMO*) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 15 destinasi di Indonesia dan dalam prosesnya mencakup pelibatan komunitas lokal. Model Penciptaan Lapangan Kerja tersebut sudah diuji di berbagai

destinasi: Gunung Bromo, Jawa Timur, Danau Toba di Sumatra Utara, Gunung Rinjani di Lombok dan Tanjung Puting di Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan. Berbagai aktivitas setempat mencakup berbagai intervensi yang luas. Di berbagai daerah percontohan, diorganisir sesi pelatihan yang ditemukeni, termasuk pelatihan untuk pemandu *eco-tour*, pelatihan untuk usahawan ramah lingkungan, pendidikan keuangan dan pelatihan koperasi, pelatihan tentang *homestay* ramah lingkungan menurut standar industri dan kompetensi yang baru dikembangkan. Di samping itu, untuk mendukung proses pengembangan ekonomi lokal untuk komunitas, proyek telah menyerahkan aktivitas pasca pelatihan penunjang tambahan di berbagai area seperti misalnya kuliner, produksi cinderamata, dan produksi briket sebagai sumber energi yang diperbaharui. (Untuk rincian, lihat Lampiran 10).

Produk dan jasa yang ramah lingkungan dapat didukung dan dipromosikan melalui pelabelan “Ramah Lingkungan” (*Green*) atau “*Eco*” dan Sertifikasi. Di Indonesia terdapat 25 *Eco-Label* yang terus bertambah. Dua puluh dua di antaranya label internasional dan 3 lainnya dari Indonesia, yang satu dikeluarkan oleh pemerintah, dan dua lainnya oleh LSM. Berbagai label tersebut dapat diterapkan untuk beberapa industri dan banyak yang dapat terkait dengan produk pariwisata. Dua di antaranya langsung mencakup pariwisata dan perjalanan (Sertifikasi *Earthcheck* dan *Green Globe*), pangan dan produksi makanan, pengembangan/pematangan tanah (*land development*), pengelolaan hutan, dan selebihnya mencakup produk umum atau tidak terkait dengan pariwisata.^{xx} Perjalanan Internasional yang Berkelanjutan, yang merupakan lembaga *non-profit* juga masuk ke sektor pariwisata Indonesia dengan sejumlah *ecolabel* untuk sektor ini.

Dalam hal pelabelan ramah lingkungan yang sangat khas Indonesia, pada tahun 2004 Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Badan Standardisasi Nasional mengambil prakarsa Program *Eco-Label* Indonesia “Ramah Lingkungan” untuk produk produk Indonesia. *Eco-Label* ini didaftarkan dengan Jejaring Pelabelan Dunia (*the Global Ecolabelling Network*). Sertifikasi dilakukan oleh 5 lembaga akreditasi, yang telah mendapat akreditasi dari Komisi Akreditasi Nasional (KAN). *Eco-label* ini masih terbatas untuk produk kertas cetakan, akan tetapi diharapkan diperluas sampai ke produk tekstil, deterjen, dan produk kulit. *Eco-label* Indonesia yang kedua disebut M-Brio dan mencakup makanan organik. M-Brio diakreditasi oleh Federasi Internasional Gerakan Pertanian Organik (*International Federation of Organic Agriculture Movements*). *Eco-label* Indonesia yang ketiga oleh Lembaga Indonesia Ekolabel, LSM, yang mencakup pengelolaan sumber hutan dan menyediakan 4 jenis sertifikasi: (1) Sertifikasi Hutan Alami, (2) Sertifikasi Hutan Perkebunan, (3) Sertifikasi Hutan Masyarakat, (4) Rantai/jaringan penjagaan. Label label tertentu ini sangat berarti untuk pengelolaan hutan yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Pada saat ini, belum ada Label Pariwisata Ramah lingkungan Indonesia yang spesifik dan menimbulkan banyak kebingungan dalam industri dan di kalangan pasar tentang keotentikan banyak ‘*ecolabel*’ dan praktek praktek “*greenwash*” dimana kinerja lingkungan yang diklaim oleh usaha yang termasuk ke dalam industri pariwisata yang tidak dapat divalidasi. Dalam area ini ada keharusan yang mendesak untuk melakukan suatu tindakan, karena itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang dalam proses mengembangkan standar industri dan sistem sertifikasi untuk produk dan jasa pariwisata dengan pandangan pada lingkungan, budaya dan sosial yang berkelanjutan.

2.1.8 Mendefinisikan Kriteria Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan untuk Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Merujuk pada UU No. 10, 2009 tentang Kepariwisata, kinerja pembangunan pariwisata seharusnya tidak hanya dievaluasi berdasarkan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga atas kontribusinya terhadap **peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, pengembangan budaya, perbaikan atas citra bangsa, cinta tanah air, identitas nasional dan kesatuan dan persahabatan internasional.**

Kriteria Pariwisata Berkelanjutan Dunia (*Global Sustainable Tourism Criteria*)^{xxi} mencerminkan bagiandari tanggapan komunitas pariwisata terhadap tantangan global dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Penghapusan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan – termasuk perubahan iklim – merupakan isu-isu yang lintas silang (*cross cutting*) yang disebut dalam kriteria ini.

Sebagaimana dinasehatkan oleh Badan Pariwisata Berkelanjutan Dunia (*Global Sustainable Tourism Council*), kriteria merupakan upaya untuk mencapai pengertian bersama tentang pariwisata berkelanjutan, dan menjadi persyaratanminimum yang setiap usaha pariwisata seharusnya bercita-cita untuk mencapainya. Kriteria tersebut, dikelompokkan atas 4 tema utama: (i) perencanaan keberlanjutan yang efektif; (ii) memaksimalkan keuntungan sosial dan ekonomi untuk komunitas lokal; (iii) memperkuat pusaka budaya; dan (iv) mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun kriteria tersebut awalnya ditujukan untuk digunakan oleh sektor akomodasi dan operasi perjalanan (*tour operation*), kriteria itu dapat diterapkan untuk keseluruhan industri kepariwisataan atau destinasi.^{2xxii}

Penggunaan kriteria mencakup:

- penggunaan sebagai pedoman dasar untuk semua skala usaha agar menjadi lebih berkelanjutan, dan membantu usaha dalam memilih program pariwisata berkelanjutan yang dapat memenuhi kriteria global ini;
- Penggunaan sebagai pedoman untuk agen perjalanan dalam memilih pemasok dan program pariwisata yang berkelanjutan;
- Membantu konsumen mengidentifikasi program pariwisata berkelanjutan dan usaha yang sehat;
- Penggunaan sebagai suatu sebutan umum untuk media informasi mengenai penyedia pariwisata berkelanjutan;
- Membantu sertifikasi dan program sukarela lainnya untuk menjamin bahwa standarnya memenuhi garisdasar yang secara luas sudah diterima;

²Kriteria Destinasi GSTC sekarang ini sedang dikembangkan dengan program “*Early Adopters*” melibatkan destinasi berikut: Fjord Norway; Teton County, Wyoming USA; Mt. Huangshan in China and St. Kitts & Nevis in the Caribbean.

- Menawarkan suatu titik awal untuk mengembangkan persyaratan pariwisata berkelanjutan dalam program-program sektoral pemerintah, non pemerintah dan sektor swasta,;
- Digunakan sebagai pedoman dasar untuk badan-badan pendidikan dan pelatihan, seperti sekolah perhotelan dan universitas.

Penting untuk diperhatikan, bahwa kriteria menunjukkan **apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana mengerjakannya atau apakah tujuan sudah tercapai**. Peran ini dilaksanakan oleh indikator kinerja seperti misalnya contoh-contoh dari UNWTO yang diberikan di Lampiran 8, dan juga material pendidikan terkait, serta akses ke wahana implementasi, semuanya merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari Kriteria Pariwisata Berkelanjutan Dunia.

Publikasi UNWTO yang ada tentang Indikator untuk Pariwisata Berkelanjutan menawarkan sejumlah daftar indikator yang bermanfaat, yang paling penting diantaranya dapat dilihat di bawah ini, yang dapat digunakan sebagai panduan perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan, operasi dan evaluasinya.

Dalam kaitan dengan memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial pariwisata berkelanjutan bagi komunitas lokal dan meminimumkan dampaknya, kriteria GST menetapkan standar minimum terkait dengan pekerjaan yang layak dalam sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

B.2. Penduduk setempat dipekerjakan, termasuk pada kedudukan manajemen. Pelatihan ditawarkan sesuai kebutuhan.

B.7. Perusahaan mempekerjakan perempuan dan golongan minoritas setempat, termasuk pada kedudukan manajemen secara berkeadilan, sementara pekerja anak ditolak.

B.8. Perlindungan hukum nasional atau internasional para pekerja dihormati, dan para pekerja dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup.

Prakarsa lain yang mangkus (relevan) untuk mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon dan inklusif yang ramah lingkungan adalah Kemitraan Global untuk Kepariwisata Berkelanjutan. Misi dari Kemitraan Global ini adalah mendorong kemitraan untuk memajukan berbagai prinsip kepariwisataan berkelanjutan pada berbagai daerah destinasi melalui pemberlakuan kebijakan yang jelas, proyek yang inovatif dan transformatif serta berbagi pengetahuan dan pengalaman, dengan tujuan untuk menciptakan kemitraan yang efektif. Dikembangkan pula portofolio proyek, alat-alat dan proses untuk memandu industri kepariwisataan, para konsumennya dan sektor publik ke arah kinerja yang berkelanjutan, sesuai dengan **Rekomendasi Kebijakan** dari Satuan Tugas Internasional untuk Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan (2009).

Bekerja sama dengan Badan Pariwisata Berkelanjutan Global (*Global Sustainable Tourism Council-GSTC*), Kemitraan Global telah mengembangkan suatu saringan dan proses evaluasi untuk meninjau usulan proyek dalam kelayakan dan keberlanjutannya.

Dalam hubungannya dengan penciptaan pekerjaan dalam kepariwisataan berkelanjutan, Kemitraan Global menentukan kriteria berikut ini:

- Proyek menjamin akses pasar yang efektif untuk orang miskin dapat menjual barang dan jasa pada usaha pariwisata dan/atau wisatawan;
- Proyek menstimulasi penciptaan lapangan kerja di daerah miskin, dan mendorong perbaikan kondisi kerja;
- Proyek mendukung Usaha Kecil dan Menengah untuk memproduksi barang lokal dan jasa secara berkelanjutan.
- Proyek memberlakukan berbagai praktek baik dalam mengarusutamakan keberlanjutan ke dalam investasi dan pembiayaan kepariwisataan;
- Proyek memperbaiki akses pada investasi dan sumberdaya finansial untuk UKM setempat
- Proyek itu secara ekonomi dapat berjalan layak dalam jangka panjang dengan manfaat yang dapat diukur bagi destinasi sasaran.

2.1.9 Kontribusi Pariwisata Berkelanjutan pada Mitigasi

Perubahan Iklim.

Pariwisata merupakan korban tapi juga penyumbang pemanasan global. Perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan air laut yang menimbulkan dampak pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penggundulan hutan berefek pada berbagai ekosistem yang rentan dan mengurangi penyerap karbon (*carbon sink*) dunia, juga mengurangi permintaan wisatawan terhadap destinasi semacam itu. Pemanasan global berpotensi mengganggu ekonomi pariwisata Indonesia.

Dalam menanggapi isu perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Rencana Aksi Nasional, 2007, yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dokumen ini merupakan instrumen kebijakan yang bersifat dinamis yang perlu dimutakhirkan sesuai dengan keadaan dan menjadi komponen penting dalam pariwisata berkelanjutan. Pada langkah kedua dokumen tersebut juga perlu tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP dan RPJM). Untuk masa mendatang, dokumen itu juga perlu dirujuk dalam praktek praktek yang dilakukan oleh berbagai lembaga terkait pada tingkat nasional maupun daerah, dalam pelaksanaan berbagai regulasi dan kebijakan yang ada sekarang, dan dalam merancang rencana pembangunan yang akan datang. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, untuk memberikan sumbangan kepada gerakan dunia dalam mencegah, mitigasi dan penyesuaian terhadap perubahan iklim.

Rencana Aksi Nasional menyatakan 4 prinsip dalam pengelolaan pembangunan nasional, yaitu:

- i. **Sinkronisasikan semua instrumen kebijakan dan regulasi** dengan cara sedemikian sehingga pembangunan ekonomi dan daya saing didasarkan kepada persyaratan kelayakan sosio-ekologis (keselamatan manusia dan alam, produktivitas dan keberlanjutan jasa lingkungan).
- ii. Instrumen utama untuk mencapai ketaatan terhadap prinsip pertama adalah **sinkronisasikan dan integrasikan penggunaan ruang dan keterkaitannya pada sumberdaya publik, menghapuskan ‘tradisi’ ego sektoral**.
- iii. Pencapaian tujuan sosio-ekologi perlu dilakukan **melalui adaptasi pola konsumsi dan produksi berkelanjutan** semua agen perubahan.
- iv. Keterpaduan harus diwujudkan melalui **persiapan dan rekayasa sosial** berbasis pada **konteks komunitas dan lingkungan setempat**.

Semua rencana aksi tersebut tidak hanya dapat diterapkan pada pembangunan kepariwisataan akan tetapi juga sejalan dengan berkembangnya isu-isu tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan.^{xxiii}

Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (*United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC*) memprakarsai Program REDD⁺ dalam pengurangan emisi akibat penebangan hutan dan kerusakan hutan merupakan upaya penting selain upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Satuan tugas untuk mempersiapkan organisasi REDD⁺ telah dibentuk oleh Presiden Indonesia dan draft strategi nasional untuk REDD⁺ telah tersedia untuk mendapat masukan dari masyarakat umum pada tahun 2011 yang lalu.

Mekanisme global REDD⁺ merupakan peluang bagi Indonesia untuk masuk ke dalam transisi ekonomi rendah karbon dan merealisasikan komitmen sukarela Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi 26% sampai 40% dari biasanya pada tahun 2020. Emisi dari Pemanfaatan Tanah, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan (Land Use, Land Use Change and Forestry-LULUCF) Indonesia yang berasal dari penebangan hutan dan kerusakan hutan serta tanah lumut. Oleh karena itu, strategi implementasi REDD⁺ fokus pada pemulihan hutan dan pengelolaan tanah lumut. Lingkup REDD⁺ Indonesia mencakup:

- i. Mengurangi kecepatan penebangan hutan;
- ii. Mengurangi kerusakan hutan;
- iii. Meningkatkan / memperbaiki pelestarian;
- iv. Meningkatkan cadangan karbon melalui hutan berkelanjutan dan pengayaan cadangan karbon

Strateginya mencakup berbagai kelembagaan dan proses, kerangka hukum dan regulasi, implementasi program strategis, perubahan paradigma dan etos kerja serta keterlibatan semua pemangku kepentingan. Implementasi REDD⁺ ditujukan pada perbaikan kesejahteraan komunitas yang pendapatannya bergantung pada hutan dan untuk memperbaiki pelestarian keanekaragaman dalam ekosistem kehutanan. Mitigasi emisi melalui REDD⁺ memerlukan penataan ruang yang jelas dengan sistem kepemilikan yang jelas dan hak atas tanah untuk sekitar 70 juta penduduk yang hidupnya bergantung pada hutan.

Dalam konteks ini, pariwisata berkelanjutan, terutama ekowisata merupakan aktivitas potensial yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu pilihan untuk ekonomi lokal berbasis hutan. Beberapa pihak yang berwewenang dalam kehutanan di tingkat lokal yang dihadapkan kepada tantangan menciptakan mata pencaharian alternatif dari pembalakan hutan, telah memperlihatkan minat yang besar untuk mendorong pariwisata, khususnya usaha (ventura) dalam ekowisata, asalkan direncanakan dan dikelola secara tepat dan bertanggungjawab. Implementasi program strategis yang peka jender fokus pada **keberlanjutan lansekap**, suatu sistem ekonomi berbasis sumberdaya alam, konservasi dan rehabilitasi. Ketiga program strategis akan menjadi dasar untuk peralihan ekonomi rendah karbon dan pada waktu yang sama juga menjamin hak tradisional dan hak komunitas lokal lainnya untuk memanfaatkan sumberdaya alam. Dalam konteks ini, pariwisata berkelanjutan dalam bentuk pengalaman ekowisata dapat memberi sumbangan yang berguna terhadap program implementasi REDD⁺ dan dapat dipromosikan di beberapa daerah, sebagai alternatif mata pencaharian yang memungkinkan bagi kelompok lokal. Semua provinsi yang mempunyai area hutan akan mendapat dukungan sebagian dari REDD⁺ berupa bantuan teknis dan juga finansial untuk koordinasi dan dokumentasi. Pada saat yang sama, tidak tampak bukti bahwa ekowisata telah secara nyata dipromosikan dan diimplementasikan dalam konteks strategi nasional REDD⁺ sebagai alternatif mata pencaharian dan untuk pengelolaan keberlanjutan sumberdaya yang rentan. Bagaimana pun, ekowisata akan sesuai benar dengan pilar ketiga Strategi REDD⁺ tentang pembuatan program pertumbuhan alternatif. Ekowisata juga akan cocok dibawah pilar keempat Strategi REDD⁺ tentang promosi dan pemberian hadiah/imbal jasa pada aktivitas aktivitas ramah lingkungan. Ini merupakan kesenjangan yang perlu ditanggapi melalui penguatan kolaborasi antara kedua program nasional, REDD⁺ dan DMO (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) . Misalnya, pariwisata berkelanjutan dapat berkontribusi pada konservasi hutan untuk meningkatkan kesadaran nasional dan dunia dalam permasalahan yang dihadapi dan peluang ekonomi, lingkungan dan sosial yang tersedia. Ini mencakup promosi ekowisata, pariwisata kehidupan liar (*wildlife tourism*), pariwisata berbasis komunitas, pariwisata perdesaan dan berbagai bentuk produk produk pariwisata berkelanjutan. Insentif finansial untuk merangsang berbagai praktek pariwisata berkelanjutan dapat membantu pengurangan emisi gas rumah kaca. Peran para *interpreter*, audio visual dan barang cetakan tentang apa yang harus dilakukan dan dilarang dilakukan, yang perlu dipelajari dalam berbagai kunjungan harus dibuat dan disediakan. Selain dari pada itu, daerah alami yang banyak dikunjungi juga perlu dikendalikan melalui bentuk rencana pengelolaan pengunjung yang tepat.

2.1.10 Membangun Industri Kepariwisata yang Lentur terhadap Bencana Alam dan Buatan Manusia

Indonesia adalah negara yang berisiko sangat tinggi terhadap bencana alam: gempa bumi, tsunami, banjir atau letusan gunung berapi. Pada tahun 2004 tsunami di Aceh telah menimbulkan banyak korban dan kerusakan pada area yang luas. Gempa bumi pada tahun 2005 menimpa Pulau Nias di Sumatra Utara dan Yogyakarta mengalaminya pada tahun 2006. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Vulkanologi mencatat bahwa terdapat 28 daerah di negeri ini yang rawan gempa bumi dan tsunami, terbentang di seluruh negeri termasuk destinasi pariwisata seperti Bali

dan Nusa Tenggara. Negeri ini dikelilingi oleh garis patahan tektonik dunia dengan 500 gunung berapi, yang menempatkan Indonesia sebagai pemilik gunung api dengan jumlah terbesar, dan 129 di antaranya aktif. Intensitas dampak letusan gunung berapi pada korban bencana bergantung pada sifat letusannya, kondisi lingkungan sekitarnya dan kesiapan komunitas menghadapi situasi. Kepadatan penduduk adalah salah satu faktor yang menentukan. Beberapa gunung berapi Indonesia berlokasi dekat dengan daerah padat penduduk dan destinasi pariwisata, seperti Galunggung di Jawa Barat, Merapi di Jawa Tengah, Bromo di Jawa Timur dan lain lainnya di luar Jawa. Bencana lain dapat dipertalikan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan, seperti misalnya penebangan hutan yang menyebabkan lahan longsor, pengikisan, penggurunan, kebakaran hutan, dan pengelolaan sampah yang buruk yang menumpahkan bahan kimia, pencemaran sungai/ jalur air, laut dan air tanah.

Disamping bahaya alam, jenis bencana lain yang perlu diperhatikan adalah kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan penyakit.^{xxiv} Kegagalan teknologi mempunyai potensi menimbulkan bahaya pada kehidupan, merusak bangunan, infrastruktur, dan lingkungan. Bahaya seperti itu mungkin meluas menjadi bencana bila penerima tidak siap menghadapi situasi dan kapasitasnya tidak memadai untuk dapat menanggapi. Kapasitas atau kelemahan untuk menanggapi dipengaruhi oleh berbagai faktor multi dimensi: fisik, lingkungan dan juga sosio-ekonomi, budaya dan kelembagaan.^{xxv} Kegagalan modernisasi mungkin terjadi ketika mesin atau peralatan baru menyebabkan kecelakaan kerja atau menimbulkan permasalahan lain. Pariwisata mungkin mengalami kasus kasus kegagalan teknologi atau modernisasi seperti itu, seperti misalnya kecelakaan transportasi atau kegagalan sistem teknologi modern dalam infrastruktur rekreasi. Mungkin juga terdapat dampak yang tidak terlalu kelihatan seperti pencemaran pada air tanah karena buangan kimia. Epidemik dan penyakit di destinasi mungkin akan menular ke wisatawan atau menyebar ke penduduk setempat. Penduduk setempat, pekerja dan wisatawan mungkin menjadi korban.

Terakhir tapi bukan yang penghabisan, bencana sosial yang disebabkan oleh suatu acara atau serangkaian acara yang diciptakan oleh manusia harus dipikirkan, seperti misalnya konflik sosial antara kelompok-kelompok sosial atau antar komunitas maupun terorisme.^{xxvi} Bencana sosial mungkin terjadi dalam komunitas, menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan bagi wisatawan, atau mungkin terjadi antara wisatawan dan komunitas atau antar wisatawan. Tempat penyelenggaraan peristiwa penting/acara besar atau destinasi populer mungkin menjadi sasaran bencana sosial dan politik. Banyak bencana dengan dampak pariwisata yang berbeda telah terjadi di Indonesia seperti terorisme di Bali dan Jakarta, perang sipil di Aceh, Timor L'Este, kerusakan sosial di Maluku dan Papua, dan lain sebagainya.

Setiap jenis bencana dan bahaya mempunyai dampak langsung dan juga tak langsung kepada pariwisata. Tsunami dan terorisme telah menyebabkan kematian penduduk setempat dan juga wisatawan di destinasi. Peristiwa semacam itu seringkali diikuti oleh peringatan (*travel warnings*) dari negara lain dan menyebabkan wisatawan menunda atau membatalkan kunjungannya dan memilih destinasi yang lebih aman. Keamanan dan keselamatan menjadi pertimbangan pertama wisatawan dalam memilih suatu destinasi.

Pariwisata berkelanjutan menganjurkan untuk bersiap menghadapi kemungkinan bermacam-macam krisis yang banyak dan berbeda-beda yang disebabkan oleh alasan alasan yang berbeda.

Hal ini memerlukan ketaatan terhadap prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan, seawal mungkin sejak proses perencanaan dimulai, pada saat pelaksanaan dan juga sepanjang aktivitas operasional berlangsung. Bilamana memungkinkan, perlu disiapkan antisipasi, faktor-faktor penyebab krisis harus diidentifikasi dan dihindari, serta dikembangkan rencana strategis dan taktik untuk menanggapinya.

2.1.11 Mengelola Dampak Pariwisata yang Merugikan

Meskipun manfaat ekonomi mendorong provinsi, kabupaten dan kota dan juga investor mengembangkan berbagai usaha kepariwisataan, dampak pariwisata harus ditangani dengan penuh perhatian. Ini mencakup dampak lingkungan dan sosio-budaya, dengan penekanan pada isu jender, dan juga dampak nyata terhadap ekonomi, termasuk biaya eksternal.

Dinamisnya pertumbuhan industri pariwisata telah menjadi pilihan usaha yang menarik bagi para investor yang mengincar lokasi lokasi strategis dengan sumberdaya alam dan budaya untuk mendukung bisnisnya. Teknologi informasi mendukung akses ke hampir semua jenis informasi yang diperlukan oleh para pelancong, merangsang orang untuk berkunjung, melihat, berkeliling dan menikmati berbagai tempat yang sebelumnya ‘tidak dikenal’nya, untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Fenomena alam, sumberdaya bawah air, pulau kecil, hutan tropis, sungai dan arusnya sangat menarik bagi wisatawan.

Pengelolaan dampak lingkungan mungkin dilakukan dengan melaksanakan rencana pengelolaan destinasi yang efektif yang secara konsisten memegang teguh berbagai prinsip pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan destinasi, dalam hal ini, mungkin mencakup pemantauan atas indikator alam dan budaya yang penting untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tataguna lahan biasanya tidak menjadi perhatian para pejabat pariwisata pada umumnya, yang lebih merasa berkepentingan dengan turun naiknya jumlah kunjungan.

2.1.12 Pembelajaran dari Pengalaman dan Praktek yang baik dan benar.

Praktek yang baik dan benar dari Indonesia dan dunia internasional yang memperlihatkan pelaksanaan yang benar dan hasil (*outcome*) yang positif dari praktek pariwisata berkelanjutan, dapat digunakan sebagai panduan untuk pembangunan destinasi di masa depan. Harus diperjelas,

bahwa kasus pembangunan destinasi tidak dapat direplikasi dari satu tempat ke tempat lainnya, akan tetapi aspek aspek tertentu dapat digunakan sebagai pembelajaran dan penunjuk ke arah yang benar.

Contoh 1: Ekowisata di Bogor

Contoh ini diambil dari usaha kecil, yang menjalankan rumah inap (*homestay*). Rumah inap ini memulai usahanya pertama tama dengan melibatkan komunitas setempat, melatih dan melibatkannya dalam kegiatan. Mereka juga mengembangkan produk kreatif, melibatkan masyarakat dan kerbaunya dalam paket wisata dan kemudian menarik para wisatawan internasional maupun domestik. Mereka memfasilitasi komunitas lokal melalui tarian tardisional yang masuk ke dalam paket/produk wisata rancangannya. Rumah inap ini telah sering dikunjungi siswa dari jakarta dan tempat lainnya, termasuk dari berbagai sekolah internasional. Kepemimpinan, konsistensi, dan bekerja dengan hati merupakan faktor kunci keberhasilannya.

Contoh 2: Perencanaan Pariwisata di Bali.

Salah satu pelajaran terbaik dari negeri ini adalah pembangunan Resor Nusa Dua Bali di bawah *Bali Tourism Development Corporation (BTDC)* pada tahun 1970an. Proses perencanaan dan implementasinya memakan waktu lama yang membuat Nusa Dua menjadi salah satu resor terbaik di dunia. Secara kelembagaan, keputusan politis pada tingkat nasional, secara intensif didiskusikan dengan Pemerintah Provinsi, didukung oleh konsultan yang profesional dan bertanggung-jawab, telah membawa pembangunan kepariwisataan di Nusa Dua, Bali dilakukan secara komprehensif dan terarah baik pada tahun 1980-an. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilannya antara lain: (i) penghargaan pada budaya dan kearifan lokal dalam proses perencanaan serta melibatkan pekerja setempat selama tahap konstruksi dan operasionalnya, (ii) pembentukan lembaga pendidikan yang mendidik terutama penduduk lokal untuk memperoleh peluang menjadi tenaga kerja di resor tingkat dunia; (iii) Pemilihan tapak, lokasi yang prima tanpa mengganggu kehidupan ekonomi pada waktu itu. Lokasi kawasan Nusa Dua merupakan daerah kering, tanah gersang yang hanya bisa ditumbuhi oleh pohon kelapa, tanpa dapat menyediakan kehidupan yang layak bagi komunitasnya (tidak mengubah aktivitas produktif).

Pengembangan kapasitas dalam konsep dan praktek pariwisata berkelanjutan untuk pemerintah lokal, sektor swasta nasional, dan komunitas yang dipertaruhkan sangat penting dan perlu menjadi arusutama agenda pembangunan, dan khususnya pembangunan pariwisata berkelanjutan

Contoh 3: Rehabilitasi Berkelanjutan di Pangandaran

Seperti dialami oleh banyak daerah, pariwisata sangat sensitif terhadap bencana alam termasuk Pangandaran di Jawa Barat yang dilanda tsunami pada tahun 2006. Tragedi tersebut telah mendorong Pemerintah mempersiapkan rencana pengelolaan yang bertumpu pada komunitas, yang didukung oleh UNWTO. Meningkatnya kesadaran komunitas membawa

Pangandaran ke dalam tatanan yang baik ketika rehabilitasi dilaksanakan bersamaan dengan promosi pariwisata berkelanjutan. Dalam kondisi tertentu, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan hukum seringkali terjadi untuk memenuhi tujuan jangka pendek atau memperoleh manfaat pribadi. Meskipun pada umumnya, berbagai hal telah diarahkan ke pembangunan berkelanjutan, akan tetapi masih terdapat praktek-praktek yang kurang tepat, bahkan telah dilakukan oleh anggota kelompok kerja setempat yang seharusnya menjadi memberi contoh baik bagi yang lain. **Pemerintah setempat sangatlah perlu menjaga peraturan agar tetap konsisten dan melakukan penegakan hukum.**

Banyak cerita keberhasilan yang lain membekali kita dengan sejumlah kata kunci: Sebarluaskan konsepnya sebelum memulai satu program; dorong kesadaran dan kepekaan terhadap isu lingkungan, partisipasi aktif, penguatan semua pemangku kepentingan, pelembagaan daya dukung, memperluas jaringan dan promosi; pemantauan yang berkesinambungan dan lainnya. Rincian dari berbagai praktek terbaik dan pembelajarannya telah disusun dan disajikan pada Lampiran 5.

2.2 Analisis SWOT untuk Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Analisis SWOT di bawah ini menjadi dasar analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang relevan dengan masa depan pariwisata berkelanjutan di (dan untuk) Indonesia.

2.2.1 Kekuatan

Sosio-budaya:

Pariwisata Indonesia mendapat manfaat dari aset budaya, pusaka dan juga kehidupan budaya saat ini dengan kearifan lokalnya serta keunikan tradisinya. Semangat besar untuk mengonservasi budaya lokal telah menguat. Peningkatan kebanggaan atas budaya, revitalisasi budaya, perbaikan konservasi dan restorasi situs warisan budaya telah terbukti, antara lain diperlihatkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Program Perencanaan Kota Pusaka.

Lingkungan :

Kearifan lokal di beberapa tempat terbukti efektif dalam melindungi sumberdaya lingkungan. Kesadaran akan pentingnya pembangunan yang ramah lingkungan pun semakin menguat. Berbagai kelompok lingkungan dan aktivis pembangunan serta sikap ramah lingkungan telah tumbuh di berbagai provinsi terdepan seperti Bali, Jakarta, Jawa Barat dan lainnya. Pada

tingkat destinasi lokal, Indonesia telah memperlihatkan banyak kasus dan praktek terbaik dalam ekowisata, yang di antaranya dapat dilihat ringkasannya di lampiran 5.

Keaneka-ragaman hayati dan Budaya :

Area ini sejak lama merupakan kekuatan Indonesia, dan menjadi dasar pembangunan pariwisata. Fenomena dan ciri alam seperti: gunung api dan kalderanya, gunung, danau, gua, hutan hujan tropis, padang rumput, sungai, pantai, kehidupan bawah air dan peristiwa budaya, festival, kerajinan dan juga pusaka merupakan sumberdaya pariwisata Indonesia, yang masih menunggu pengemasan menjadi berbagai paket yang kreatif dan bertanggung-jawab.

Perencanaan Destinasi:

Kebanyakan daerah telah menyadari tentang perlu dan pentingnya perencanaan pembangunan kepariwisataan. Pada tingkat nasional, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional telah mendapat pengesahan. Destinasi pariwisata terkemuka seperti Bali dan Jakarta telah mengintegrasikan rencana pembangunan pariwisatanya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Semakin banyak DMO dibentuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk rencana yang lebih baik bagi berbagai destinasi tertentu.

Dukungan Politik:

Pariwisata Indonesia didukung oleh kemauan politik yang semakin kuat, diantaranya tampak dengan diterbitkannya Instruksi Presiden no. 16-2005, dan terus bertambahnya anggaran belanja nasional untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.³

Isu Jender :

Perempuan telah tercatat mengepalai sejumlah Asosiasi Industri Perjalanan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Perhotelan, Asosiasi Usaha Pertiketan dan juga berada dalam posisi tinggi dalam administrasi sebagaimana dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekarang ini.

Pembagian kerja berdasarkan jender sangat menonjol dalam industri pariwisata. Untuk kedudukan tertentu dalam industri pariwisata perempuan lebih mudah masuk dan lebih banyak diminta. Pekerja perempuan dominan dalam perdagangan grosir maupun eceran, restoran, dan di 'garis depan' (*frontliners*) hotel serta jasa pariwisata lainnya.

³Mulai pada akhir Oktober 2011, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata beralih menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Rencana Strategis ini, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan digunakan untuk hal hal terkait sebelum peralihan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bila menunjuk pada perioda setelah Oktober 2011.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, bekerja sama dengan Kementerian lain (mis. Kementerian Pekerjaan Umum). Upaya ini diperkuat melalui peraturan Menteri Keuangan (PMK 119/ 2009) tentang pengesahan penganggaran yang responsif gender kepada semua kementerian/lembaga pada semua tingkat pemerintahan.

2.2.2 Kelemahan

Ekonomi:

Di antara berbagai indikator yang sejauh ini belum diukur adalah kebocoran ekonomi. Berdasarkan pengamatan, wawancara dan pengalaman dari negara negara berkembang lain, kebocoran dari beberapa operasi bisnis pariwisata tertentu dapat melebihi 50%. Semakin suatu negara tidak berkembang, semakin tinggi kemungkinan kebocoran terjadi. Hal ini juga berlaku pada daerah yang lebih terbelakang dalam suatu negara. Pemilikan banyak bisnis pariwisata skala besar di Bali atau destinasi baru lainnya oleh MNEs, bertumbuh dengan tidak seimbang dibandingkan dengan kepemilikan lokal. Keuntungan ekonomi di lokasi yang lebih dan paling belum berkembang diperkirakan kecil atau sangat kecil, karena lemahnya keterkaitan ekonomi ke depan mau pun ke belakang. Kontribusi pariwisata yang nyata dalam penanggulangan kemiskinan masih memerlukan pengukuran yang lebih tepat.

Dari pengamatan di sejumlah destinasi, ekonomi informal masih memperkerjakan pekerja di bawah usia 15 tahun sebagai pekerja sambilan atau pekerja keluarga yang tidak dibayar. Berdasarkan masukan yang diperoleh pada waktu konsultasi dengan Asosiasi Pengusaha Pariwisata Indonesia (Apindo, 2011), secara umum sektor informal dapat mencapai 70%-80%. Perlu diperhatikan bahwa dalam sektor informal keterlibatan perempuan dibanding dengan sektor formal adalah (75%:25%), lebih tinggi dibanding dengan laki-laki (66%:34%).

Sosio-budaya:

Kepuasan komunitas terhadap dampak pariwisata pada tingkat lokal sangat sering diabaikan. Komunitas di Bali dan Bandung misalnya telah banyak mengeluh. Manfaat ekonomi dari pariwisata mungkin tidak dengan sendirinya membawa perbaikan pada indikator sosio-budaya, malah sebaliknya seringkali erosi dari nilai-nilai budaya, pengabaian budaya lokal, dan kerusakan pada situs budaya merupakan konsekuensi yang harus ditanggung. Bali yang telah “dijaga” sebagai ikon pariwisata Indonesia terdepan masih menghadapi penyalahgunaan visa wisatawan untuk praktek ilegal terkait obat-obatan terlarang, prostitusi dan pedofilia yang mengakibatkan gangguan dan kerugian bagi penduduk lokal dalam hal keamanan, keselamatan, kesehatan dan budayanya.

Banyak kasus pembongkaran bangunan pusaka bernilai sejarah menjadi berita di media massa. Temuan arkeologi baru masih tetap menghadapi kendala terkait dengan keamanan dari perlakuan yang tidak bertanggung jawab. Pariwisata seringkali dijadikan alasan untuk membenarkan pembangunan situs pusaka, yang mungkin akan mengubah tampilan dengan rancangan yang tidak tepat. Pengelolaan pengunjung yang lemah mungkin akan membahayakan keberlanjutan situs tersebut.

Pekerjaan yang layak:

Prosentase buruh dan pekerja dalam perdagangan dan pariwisata yang bekerja dengan waktu yang panjang, yaitu lebih dari 59 jam per minggu, masih besar. Jumlahnya secara terus menerus bertambah dari 4,3 juta pada tahun 2006, menjadi 6,19 juta pada tahun 2008 dan 6,35 juta pada tahun 2010. Dibandingkan dengan total pekerja yang berumur 15 tahun ke atas, proporsinya bertambah dari 23,2% (2006) menjadi 29,9% (2008) dan 28,6% dalam tahun 2010 (BPS, tentang Kondisi Tenaga Kerja Indonesia). Standar keamanan sosial, sistem pensiun, keselamatan serta kesehatan, jaminan keamanan kerja, perspektif karir masih kurang.

Lingkungan:

Sementara telah banyak perbaikan dalam berbagai praktek pariwisata, terutama pada beberapa hotel dan resor kelas menengah ke atas, di tempat-tempat wisata utama dan di beberapa tempat ekowisata beroperasi, pada umumnya, industri yang terlibat dalam sertifikasi terkait lingkungan masih sangat rendah.

Pada tingkat lokal, terdapat banyak isu lingkungan yang mempunyai pengaruh penting pada keberlanjutan sektor pariwisatanya. Danau Toba misalnya, yang pernah menjadi destinasi internasional yang populer di Sumatra Utara, telah mengalami degradasi lingkungan dan pemanfaatan yang tidak kompatibel (perikanan dan pembangunan PLTA). Penegakan hukum dalam perlindungan lingkungan masih lemah. Permintaan konsumen merupakan tantangan besar dalam menarik investasi swasta dalam berbagai proyek kepariwisataan yang berkelanjutan di Indonesia karena kurangnya informasi yang terkonsolidasi tentang permintaan ini. Sementara beberapa studi dan data menunjukkan bahwa banyak individu mau mengeluarkan lebih banyak uang untuk produk ramah lingkungan selama melakukan perjalanan, hanya sedikit data dari kasus yang memperlihatkan persentase konsumen yang mau melakukannya atau mau mendasarkan keputusan perjalanannya menurut kriteria berkelanjutan. Harga, pengalaman, dan kenyamanan tetap menjadi faktor utama untuk wisatawan Indonesia.

Perencanaan dan Pengendalian Destinasi:

Salah satu aspek yang terlemah dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia adalah koordinasi perencanaan publik, efektivitas dan pengendalian rencana. Semua provinsi sudah mempunyai rencana induk dalam bentuk dan tingkat kualitas tertentu, dan beberapa dari 383

pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga telah mempunyai rencana atau sedang menyusunnya. Tetapi, apakah rencana tersebut telah disiapkan melalui proses pendekatan berkelanjutan, pernah atau akan menjadi pedoman pembangunan, masih perlu dipertanyakan.

Kenyataan bahwa pejabat kepariwisataan di daerah mengalami mutasi kerja tanpa jalur karir, dan bahwa banyak rencana pariwisata dipersiapkan tidak secara profesional, menyebabkan perencanaan untuk pariwisata menjadi tidak realistis atau terlalu sederhana. Hanya beberapa provinsi saja dengan pejabat yang kompeten, telah dapat mengintegrasikan pariwisata ke dalam rencana komprehensif daerahnya.

Kelemahan signifikan lain ditunjukkan oleh banyaknya kasus pelanggaran peraturan: pelanggaran atas ketinggian bangunan, izin usaha, pemanfaatan lahan, dan perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali, adalah sejumlah pelanggaran yang menjadi catatan. Sementara kebanyakan hotel terdaftar sesuai hukum yang berlaku, di pihak lain banyak bermunculan tempat menginap (*homestay*) atau akomodasi sewa lain yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Dalam industri makanan, sektor informal, terutama pedagang kaki lima yang jumlahnya besar belum terakomodasi dalam rencana apa pun.

Kapasitas Bandara Utama:

Kapasitas berbagai pintu gerbang internasional sudah terlampaui (bandara Soekarno-Hatta di Jakarta/Banten, Ngurah Rai di Bali, dan sampai taraf tertentu bandara H.Juanda di Surabaya/Jawa Timur). Rencana perluasan masih memerlukan waktu supaya menjadi efektif. Kapasitas yang sudah terlampaui sekarang ini menyebabkan menurunnya kenyamanan, baik untuk para penumpang yang bepergian dan juga untuk maskapai penerbangan.

Produk-Produk Pariwisata :

Perencanaan dan pengembangan produk ramah lingkungan masih sangat kurang ditengah cepatnya pembangunan beberapa elemen produk yang sangat terkonsentrasi di sejumlah destinasi tertentu, yang membuat ketidakseimbangan antar dan dalam daerah. Dalam kaitannya dengan akomodasi, lebih dari 70% hotel berbintang dan lebih dari 50% hotel yang non-bintang berada di Jawa dan Bali, membuat provinsi provinsi besar dan pulau lainnya tertinggal di belakang (selebihnya juga terkonsentrasi di Pulau Batam dan kota kota yang berstatus ibukota).

Keselamatan penumpang dan standar teknis sarana transportasi masih perlu didorong. Kecelakaan yang terjadi, pelanggaran oleh pilot, penundaan jadwal atau pembatalan penerbangan merupakan indikator kualitas pelayanan transportasi umum yang perlu diwaspadai.

Integrasi/Koordinasi di antara Pemangku Kepentingan/Pembuat Kebijakan Kepariwisata:

Keterpaduan program berbagai kementerian dan lembaga dalam penanganan kepariwisataan masih lemah. Masing-masing lembaga hanya merujuk kepada rencana strategis kementeriannya masing-masing untuk penyusunan programnya. Kalaupun ada, hanya sedikit program yang ditujukan sebagai program bersama antar kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya mempunyai program untuk mendukung kota-kota pusaka (yang juga merupakan destinasi wisata) dalam persiapan rencana pengelolaannya. Keterlibatan sektor lain masih terbatas pada perorangan, dan belum melembaga.

Peraturan dan Pengaturan/Regulasi;

Sementara maksud kebijakan perundang-undangan yang mengatur kepariwisataan di Indonesia sudah tepat, pelaksanaan peraturan dan regulasi dalam pariwisata masih lemah. Pernyataan ini juga didukung oleh fakta bahwa WEF menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-113 di antara 133 negara yang dievaluasi dalam hal *'rules and regulations'*.⁴

2.2.3 Peluang

Pasar pasar Baru

Pasar Asia Pasifik yang bertumbuh cepat sebagai pasar utama bagi Indonesia merupakan peluang bagi Indonesia yang secara strategis terletak di pusat wilayah ini. Timur Tengah merupakan sumber pasar lain yang potensial. Selain dari itu, pasar internasional yang bervariasi juga merupakan keuntungan bagi Indonesia yang sumberdayanya beragam.

Indonesia mungkin juga dapat berharap dari tumbuhnya pasar internasional negara berkembang lainnya. Pasar domestik sendiri tumbuh mantap, disamping pasar massal sifat, pasar *'niche'* baru untuk produk berkualitas lebih tinggi juga tumbuh. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran, didukung oleh informasi yang lebih baik dan angkutan yang murah, minat ke destinasi luar pulau juga tumbuh. Akan tetapi, belum ada prakarsa yang menargetkan peristiwa (events), konferensi atau hotel kelas ekonomi rantai pasokan yang berkelanjutan, khususnya di Indonesia.

Ekonomi:

Prospek ekonomi Indonesia, dengan tingkat pertumbuhannya tertinggi di ASEAN selama 6 tahun terakhir ini dan juga diharapkan pada tahun 2012, memberikan sinyal positif pada lebih banyaknya investasi, termasuk investasi (yang akan berubah ke) pariwisata berkelanjutan yang

⁴Evaluasi didasarkan pada indeks komposit yang menggunakan variabel, seperti: kelaziman pemilikan oleh asing, dampak regulasi pada bisnis, visa, properti, kebijakan bilateral penerbangan, transparansi proses penyusunan kebijakan Pemerintah, waktu dan biaya untuk memulai usaha.

menawarkan pekerjaan ramah lingkungan. Terdapat peluang untuk pembentukan usaha baru yang secara langsung dan tidak langsung meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Industri pariwisata berpotensi besar menyerap pekerja muda. Diperkirakan separuh dari tenaga kerja pariwisata berusia di bawah 25 tahun⁵. Perempuan juga banyak terwakili. Dalam hubungannya dengan rantai pasokan, satu pekerjaan dalam industri inti pariwisata secara tidak langsung menimbulkan 1,5 pekerjaan tambahan pada ekonomi terkait.

Sosio-budaya:

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan merupakan peluang untuk memperbaiki partisipasi UMKM dalam pelaksanaan pariwisata berkelanjutan. Perubahan gaya hidup orang Indonesia, didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan meluasnya pasar domestik, membaiknya pendidikan dan akses terhadap informasi, menyebabkan pariwisata telah semakin menjadi bagian yang tetap dalam pengeluaran keluarga dan individu dibanding sebelumnya. Bertumbuhnya kelas menengah bahkan kelas menengah-rendah, telah menempatkan pariwisata sebagai salah satu kebutuhan mereka. Ini sangat berbeda dengan situasi beberapa dekade lalu ketika pariwisata masih dipandang sebagai barang mewah untuk sejumlah kecil kelompok masyarakat yang mapan. Sekarang ini orang lebih membutuhkan rekreasi dan bersenang-senang, dalam berbagai bentuk bergantung pada kemampuan finansialnya, pendapatan yang dapat disisihkannya, dan latar belakang sosio-budayanya.

Industri berbasis budaya tumbuh sebagai bagian dari ekonomi kreatif dan relatif menjadi jenis baru daya tarik atau bagian dari mata rantai produk pariwisata berkelanjutan yang menghasilkan pekerjaan layak yang ramah lingkungan bagi penduduk lokal.

Kerangka Kelembagaan:

Pembentukan lembaga seperti misalnya Badan Nasional untuk Perubahan Iklim, REDD+ dan lembaga tingkat provinsi telah membuka peluang pada pariwisata untuk masuk ke dalam rencana aktivitas ramah lingkungan, yang dapat memberi kontribusi pada program pengurangan emisi dan konservasi dari daerah yang dilindungi misalnya melalui ekowisata.

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional menghadapi perubahan iklim, dan juga Strategi Nasional REDD+. Ini juga berisi sumber dukungan finansial yang semakin bebas melalui *Governor's Climate Forests /GCF*.⁶

⁵Berdasarkan ILO (2011): Panduan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pariwisata (*Toolkit on Poverty Reduction Through Tourism*)

⁶GCF adalah kolaborasi sub-nasional negara dan provinsi di Amerika Serikat, Brazilia, Nigeria, Peru, Mexico dan INDONESIA yang mengembangkan Program Pengurangan Emisi, Penggundulan dan Kerusakan Hutan (REDD+) dan mengaitkannya dengan ke peluang pasar dan non-pasar yang sedang bertumbuh. Provinsi di Indonesia yang menjadi anggota adalah Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua. Pertemuan Palangka Raya antara lain mencakup pendidikan dalam kebijakan REDD+ pada tingkat nasional dan provinsi, peluang baru untuk pembiayaan dan kerangka hukum, penyusunan lembaga REDD+ pada tingkat sub-nasional/ provinsi (Kompas, 26 September 2011)

Perencanaan dan Pengendalian Destinasi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengembangkan program bantuan pariwisata untuk pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) sejak tahun 2009. Semakin banyak desa di semua Provinsi dibantu untuk mengembangkan inisiatifnya. Selain dari pada itu, juga telah dijalankan program DMO, yang diarahkan untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik bagi 15 destinasi pariwisata terpilih di Indonesia. Strategi DMO memberikan peluang pada ‘pekerjaan layak yang ramah lingkungan’ baru dan pengakuan Pemerintah bahwa pariwisata berkelanjutan dapat menyumbang pada komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pariwisata juga dapat memperoleh manfaat dari program dan aktivitas terkait yang dijalankan oleh Kementerian lain: Kehutanan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kebudayaan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro; atau bahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga.⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mempunyai program terhadap perempuan dan anak-anak terkait dengan pembangunan berkelanjutan melalui kesetaraan gender dalam pariwisata dan perhatian terhadap perempuan dan anak-anak.

Ekonomi Kreatif:

Pengembangan Industri Kreatif yang sekarang berada di bawah satu atap dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (sebelumnya di bawah Kementerian Perdagangan) membuka peluang terhadap pengembangan lebih banyak produk pariwisata ramah lingkungan. Destinasi aktif seperti Kota Bandung di Jawa Barat telah disebut sebagai pusat industri kreatif yang telah mampu menarik wisatawan domestik dan internasional. Ekonomi kreatif dalam hal ini mencakup inisiatif untuk menghasilkan produk ramah lingkungan, seperti misalnya produksi kertas seni, dan berbagai benda dan barang fungsional lainnya dari sampah atau pengganti barang-barang dari plastik (tas, keranjang sampah, dll).

Pariwisata Perkotaan:

Banyak kota lain yang bertumbuh cepat seperti Pekanbaru di Riau, Palembang di Sumatra Selatan, Surabaya di Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan, Manado di Sulawesi Utara merupakan destinasi pariwisata perkotaan yang potensial. Pada masa depan destinasi perkotaan ini, terutama yang kaya dengan aset pusaka (*heritage*) nya, juga mungkin berkembang ke arah *eco-ethno tourism* dan destinasi pariwisata bisnis melalui berbagai acara-acara besar, konvensi dan ekshibisi.⁸

⁷SEA Games di Palembang telah mempercepat konstruksi tidak hanya infrastruktur olahraga melainkan juga infrastruktur pariwisata yang menguntungkan sektor pariwisata sebelum, selama dan setelah acara berlangsung.

⁸Istilah *eco-ethno tourism* adalah istilah dari penulis untuk menunjukkan suatu konsep serupa dengan ekowisata dengan lebih banyak penekanan pada warisan budaya, tanpa menghilangkan pentingnya ekologi. Ekowisata biasa diinterpretasikan lebih sebagai pariwisata alam yang bertanggung-jawab; untuk menunjukkan konsep – pelestarian, pendidikan, partisipasi dan manfaat ekonomi- dapat juga diterapkan di daerah perkotaan, maka diperkenalkan istilah *eco-ethno tourism*.

ASEAN:

Kedudukan Presiden Indonesia sebagai pemimpin negara-negara anggota ASEAN (2011) dapat mendukung semangat ASEAN dalam mengimplementasikan komitmen terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan, sebagaimana digaris-bawahi selama pertemuan antara kepala-kepala negara pada tahun 2011.

Indonesia sebaiknya berinvestasi lebih jauh dalam riset dan pendidikan pariwisata yang berkualitas pada tingkat pendidikan tinggi (*tertiary level*) dan menjadi “*ASEAN centre of excellence*” dalam ‘ekonomi pariwisata, yang berbasis pengetahuan’, mendorong riset dan pengembangan dan menggunakan acuan internasional untuk kurikulum pendidikan kepariwisataan dan *hospitality*.

2.2.4 Ancaman

Kesadaran:

Ancaman ada pada pola pikir masyarakat dan pemerintah yang tidak menyadari dampak negatif yang akan terjadi yang diakibatkan oleh kebocoran ekonomi dari investasi yang padat modal dan perubahan tataguna lahan akibat adanya investasi terkait pariwisata, kurangnya investasi publik dalam infrastruktur dan pengembangan sumberdaya insani, yang mungkin akan menurunkan kontribusi pariwisata dalam pembangunan nasional.

Ekonomi:

Investasi dan bisnis pariwisata telah ditandai dengan semakin meningkatnya liberalisasi, dalam kondisi ketidaksiapan. Di banyak daerah pariwisata, komunitas lokal telah termarjinalkan karena peralihan kepemilikan lahan. Pembelajaran dari negara berkembang lain seperti misalnya kasus Machu Picchu di Peru, dimana wisatawan kini telah dibuat tidak melewati tempat pedagang para pedagang dan pemasok lokal berjualan, setelah Pemerintah Peru memberikan konsesi jangka panjang di Warisan Dunia yang terkenal tersebut ke perusahaan swasta dan konsesi lain di komunitas yang sebelumnya memiliki sawah dan perkebunan pisang ke hanya investor asing yang potensial selama 50-60 tahun (lihat detailnya pada Lampiran 2) dan juga pernyataan deklarasi Bern yang menyebutkan:

“komitmen lebih lanjut untuk liberalisasi di bawah WTO GATS akan menjadi ANCAMAN terhadap sejumlah prakarsa pariwisata yang bertanggungjawab yang menguntungkan penduduk setempat dan membantu melindungi mata pencahariannya (lihat detailnya dalam Lampiran 3)”

Investasi untuk mengatasi kekurangan infrastruktur di destinasi tidak mencukupi, dengan ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat. Karena pariwisata melonjakkan permintaan terhadap barang-barang lokal/produk perdesaan dan lahan maka harga pun naik, nilai pendapatan mereka yang sudah terbatas menjadi relatif menurun.

Lapangan kerja:

Pariwisata kadang-kadang menerima dukungan awal dari komunitas lokal yang berharap akan tersedianya lapangan kerja. Akan tetapi, dalam banyak kasus malah sebaliknya yang terjadi, pariwisata telah menggusur mata pencaharian/pekerjaan tradisional komunitas sebelum lapangan kerja baru tercipta. Dan bahkan bila pariwisata benar-benar menciptakan lapangan kerja, komunitas lokal, termasuk perempuan, mungkin tidak memenuhi syarat untuk menduduki berbagai posisi yang ada.

Sumberdaya insani dan pendidikan kepariwisataan:

Investasi dalam pengembangan sumberdaya insani dan riset tentang subjek terkait pariwisata tidak diprioritaskan, yang diindikasikan dengan sukarnya mendapat beasiswa dan dana riset (pariwisata tidak menjadi daftar prioritas topik riset).

Pemilikan lahan yang semu:

Berbagai kasus termasuk di Bali, dimana masyarakat setempat, tanpa menyadari akibatnya, meminjamkan namanya untuk digunakan sebagai “pemilik lahan” oleh orang asing, tanpa mempunyai kewenangan sama sekali terhadap lahan tersebut. Bila beruntung, mereka hanya diizinkan untuk menanam selama ‘periode menunggu’. Kecenderungan pemilikan lahan di atas kertas -tanpa ada kesadaran terhadap bisnis-telah menyebar juga ke daerah lain. Untuk keluarga miskin yang tidak tahu apapun, ‘meminjamkan/menyewakan’ namanya merupakan cara yang mudah untuk mengatasi kemiskinan.

Marjinalisasi Usaha kecil:

Arus masuk investasi asing, termasuk dalam akomodasi sederhana dengan kualitas standard yang baik, mungkin akan memarginalkan akomodasi skala kecil yang sudah ada di tempat tersebut. Juga terdapat indikasi bila pribadi (yang tidak mempunyai izin usaha) menjadi tuan rumah wisatawan, menyaingi akomodasi komersial formal yang membayar pajak secara tidak sehat. Pengalaman lain untuk pembelajaran adalah kasus minimarket yang mendominasi usaha eceran, tidak hanya terbatas pada kota besar tetapi sudah menyebar sampai ke kota kecil, menyebabkan pasar dan toko-toko tradisional mengalami kesulitan).

Kompetisi luar:

Kompetisi dari negara negara tetangga dengan kondisi pembangunan yang lebih maju dan juga dengan pertumbuhan destinasi yang mantap merupakan tantangan besar bagi pasar internasional Indonesia karena berbagai kendala yang terkait dengan krisis yang dihadapi oleh Eropa, Amerika Serikat dan juga Jepang selama beberapa tahun yang ini. Hal itu juga telah menarik orang Indonesia bepergian ke luar negeri. Orang Indonesia yang berwisata ke luar negeri tumbuh sebesar 54% antara perioda 2004-2008 (Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010-2014), lebih cepat dari perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia (53%) pada perioda yang sama.^{xxvii}

Sosio-budaya:

Sementara pariwisata sudah menjadi bagian gaya hidup orang Indonesia, makin banyak orang melakukan perjalanan dan dengan berbagai alasan, orang Indonesia lapisan menengah atas dan kelas yang lebih atas lagi nampaknya lebih suka bepergian ke luar negeri. Jumlah wisatawan yang ke luar negeri tumbuh dari 3,5 juta menjadi 5,4 juta (Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2010-2014). Juga perlu digaris-bawahi bahwa perjalanan untuk tujuan pengobatan (pariwisata kesehatan) oleh orang Indonesia ke Singapura dan Malaysia bertumbuh secara mantap dengan total jumlah pengeluaran yang diperkirakan luar biasa besarnya.

Perencanaan destinasi dan pengendalian lingkungan.

Sementara pemerintah melakukan upaya besar dalam perlindungan lingkungan terkait kehutanan, kerusakan lingkungan tetap berlangsung di daerah yang seharusnya mendapat perlindungan dan juga terjadi di luar hutan, khususnya di daerah perdesaan dan perkotaan yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak terkendali. Pada destinasi lokal, seringkali kapasitas daya dukung dan rencana pengelolaan pengunjung kurang mendapat perhatian. Selain daripada itu, pemberian hak atas tanah seringkali tidak menghormati hak hak masyarakat asli/adat setempat. Hampir tidak ada atau hanya sedikit saja rencana yang benar benar peduli terhadap daya dukung lingkungan. Pada semua tingkatan pemerintahan, fokusnya lebih tertuju pada perolehan pendapatan melalui perizinan. Meskipun pemberdayaan komunitas melalui PNPM Mandiri dan program DMO⁹ programs telah diperluas dari waktu ke waktu, tetapi kebutuhan komunitas sasaran akan fasilitator yang pada kenyataannya sukar untuk dipenuhi karena terbatasnya sumberdaya insani, mungkin akan mengancam tujuan yang menjadi hak mereka. Perencanaan yang tidak efektif pada akhirnya mungkin akan menjadi ancaman, kecuali ada koreksi terhadap tindakan yang dilakukan melalui perencanaan dan kepemimpinan yang lebih baik. Pengendalian pembangunan merupakan tantangan lain yang dihadapi oleh pembangunan pariwisata. Di antara aspek yang paling penting yang perlu dipantau adalah daya dukung destinasi dan ketaatan terhadap regulasi yang ada. Memantau perilaku wisatawan merupakan pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk mitigasi dampak terhadap lingkungan alam dan budaya.

⁹PNPM Mandiri = Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Program DMO (*Destination Management Organization*)=program pendukung peningkatan destinasi

Pesan Kunci Bab 2

- Pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai: **“Pariwisata yang secara penuh memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sekarang dan masa depan, tanggap terhadap kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan komunitas”(UNWTO).**
- Pariwisata berkelanjutan secara langsung dan positif terkait dengan Tujuan Pembangunan Milenium, pengurangan kemiskinan, pembangunan perdesaan, pelestarian budaya dan masyarakat, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim dan memperlihatkan dampak yang bermanfaat terhadap mitigasi perubahan iklim.
- Diperlukan peralihan ekonomi yang tepat ke praktek berkelanjutan dengan pandangan ke pekerjaan ramah lingkungan, termasuk pendidikan dan kesadaran majikan, pekerja, komunitas tuan rumah dan wisatawan, dengan pemerintah setempat berada di garis depan.
- Pekerjaan ramah lingkungan dengan pekerjaan yang layak dapat diciptakan melalui pembangunan dan promosi produk ramah lingkungan, pelayanan/ jasa ramah lingkungan, pekerjaan umum ramah lingkungan. Label dan program sertifikasi ramah lingkungan menunjang produk dan jasa ini, akan tetapi masih terbatas dikembangkan di pasar Indonesia:
- Indikator alternatif memperhitungkan kriteria lingkungan, sosial dan ekonomi, berdasarkan pada tawaran UNWTO tentang cara baru mengukur kinerja:
- Contoh praktek yang baik dalam pariwisata berkelanjutan dapat digunakan tidak untuk replikasi, akan tetapi sebagai pembelajaran dan panduan untuk proyek pembangunan destinasi baru. Konteks lokal dan kapasitas sumberdaya manusia adalah yang terpenting;
- Analisis SWOT dalam sektor pariwisata Indonesia memperlihatkan:
 - Kekuatan utama: Keanekaragaman hayati dan budaya, dukungan politis untuk pariwisata berkelanjutan;
 - Kelemahan Utama: Kekurangan pekerjaan yang layak, degradasi lingkungan dan dampak budaya, pengendalian perencanaan destinasi;
 - Peluang Utama: Permintaan (pasar) baru terhadap pariwisata ramah lingkungan, peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan
 - Ancaman Utama: kemungkinan marginalisasi akibat hilangnya kepemilikan lahan dan pola pikir berorientasi jangka pendek

BAB 3

Visi dan kerangka kebijakan pariwisata berkelanjutan

Ikhtisar Bab

Dalam bab ini dibahas visi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, ditunjukkan bagaimana berbagai kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia di kembangkan garis besar dimensi kebijakan yang penting. Pilar yang paling penting dari beberapa kebijakan tersebut dielaborasi, berbagai sasaran kunci diperjelas, serta sarana dan tolok ukur keberhasilan dalam implementasi dibahas dengan pendekatan terpadu. Juga digambarkan beraneka unsur perencanaan keberlanjutan termasuk pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3.1 Visi Pariwisata Berkelanjutan Indonesia

Visi pembangunan pariwisata dirumuskan berdasarkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Indonesia: untuk **kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran** Indonesia dan arah pembangunan yang berpihak pada-masyarakat miskin, pertumbuhan, penciptaan pekerjaan dan lingkungan.

Pariwisata berkelanjutan dapat secara nyata memberi sumbangan terhadap tercapainya visi pembangunan nasional tahun 2025 dan berjalan sesuai dengan sasaran pembangunan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat memberdayakan komunitas di destinasi menjadi mampu memanfaatkan peluang usaha dan pekerjaan sehingga mereka mendapat manfaat sosio-ekonomi dari pariwisata.

Penggunaan lingkungan secara optimal, dengan mempertimbangkan daya dukung alam, ekologi, sosial, dan infrastruktur destinasi, akan menciptakan kenyamanan tidak hanya bagi wisatawan akan tetapi juga bagi komunitas setempat. Pariwisata berkelanjutan bermakna lebih dari pelestarian lingkungan alami, memasuki ranah kesejahteraan nyata dan memakmurkan komunitas Indonesia, dengan lingkungan alam dan budaya dalam keseimbangan yang dinamis, untuk kepentingan komunitas, wisatawan dan pengunjung.

Tahap pertama Agenda Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 sudah selesai (2005-2009), dan sekarang ini sedang berada pada tahap kedua (2010-2014), dengan visi : mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang demokratis dan merata.

Peraturan Pemerintah No. 50-2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional yang relatif baru memuat visi kepariwisataan yang berlaku untuk berbagai kementerian terkait sebagai berikut:

“Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang berdaya saing dan berkelanjutan yang mampu mendorong pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat

Visi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Kementerian yang mengemban tugas utama dalam pembangunan kepariwisataan, dan didukung oleh kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, telah disebutkan dalam RENSTRA Lima Tahunan Kementerian sebagai berikut:

2005-2009: “terwujudnya jati diri bangsa, persatuan, dan kesatuan dalam kerangka multi kultural, kesejahteraan rakyat dan persahabatan antarbangsa”

2010-2014: “terwujudnya bangsa Indonesia yang mampu memperkuat jati diri dan karakter bangsa serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat”

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang efektif sejak Oktober 2011, telah menyiapkan modifikasi rencana strategis 2010-2014, disesuaikan dengan portofolio yang sekarang, dan telah merumuskan visinya sebagai berikut:

“terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif”

Tercapainya kesejahteraan sesuai dengan indikator kualitas hidup: pendapatan yang layak dan akses pada pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan dan juga hak untuk bersantai (*leisure*) serta kesejahteraan sosial.

Lebih jauh dalam misinya, pernyataan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan sebagai berikut:

1. **“Kepariwisata sebagai penggerak pembangunan nasional, pelestarian sumber daya alam dan budaya, keutuhan nasional dan hubungan internasional”** (2005-2009, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata).
2. **“Pengembangan sumber daya, pelestarian nilai, keaneka-ragaman dan kekayaan budaya, yang terkait dengan jati diri, industri yang berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan, pemasaran yang bertanggung jawab”**(2010-2014,Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata)
3. **“Membangun daya saing dan pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah; pendekatan kualitas dalam mengembangkan sumberdaya kepariwisataan dan ekonomi kreatif; menciptakan nilai tambah melalui industri kreatif, pengembangan seni dan budaya serta maju menuju pemerintahan (*‘governance’*) yang akuntabel, transparan dan cepat tanggap.** (2010-2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Jelaslah bahwa pariwisata berkelanjutan telah tercakup dalam agenda Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang lalu dan juga dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah pula menekankan pada pendekatan kualitas dalam pengembangan sumberdaya di bawah pemerintahan (*'governance'*) yang tanggap.

Terdapat tambahan peluang yang dapat dipertimbangkan sebagai Misi Kementerian, yaitu:

- Memimpin dalam mendorong 'promosi yang bertanggung-jawab', menunjang kepemimpinan Kementerian dalam pembangunan dan promosi Kode Etik Pariwisata Dunia karena hal itu berhubungan dengan kejujuran tentang destinasi dan pemasaran produk
- Memasukkan konsep keberkelanjutan ke dalam semua bentuk pembangunan kepariwisataan (ke semua pemangku kepentingan pada semua tingkat)

Istilah kemandirian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) mempunyai arti penting khusus dalam sejarah dan konteks Indonesia. Era globalisasi menyebabkan saling ketergantungan yang bertambah tinggi di antara semua negara di dunia. Seperti halnya negara merdeka lain, dalam menentukan arah pembangunan nasionalnya Indonesia ingin bebas dari intervensi yang berlebihan dari luar. Meskipun Indonesia harus tetap mengikuti dinamika banyak negara lain di dunia, beberapa nilai inti tertentu tetap harus dipegang teguh, yaitu rasa kebangsaan kesatuan, dan semangat yang telah ditunjukkan oleh rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan.

Dalam hal kepariwisataan, pasar internasional dilihat sebagai potensi yang telah dipilih oleh Indonesia untuk dimanfaatkan, dengan berbagai cara yang paling memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Indonesia mempunyai pasar domestik yang besar dan dinamis dengan permintaan elastis terhadap beraneka produk kepariwisataan. Indonesia perlu menyadari arah pembangunan kepariwisataannya, dalam arti siapa yang akan memimpin dalam pembangunan destinasi pariwisata dan industri kepariwisataan dan dalam upaya penyesuaian dengan pasar potensial. Indonesia perlu mempunyai kemandirian dalam arti **mampu menjadi aktor utama dalam pembangunan kepariwisataan di negeri ini, mendapat manfaat utama dari sumberdaya yang dimiliki dengan berbagai cara yang bertanggungjawab, sebagai tuan rumah dan wisatawan di rumah/negara sendiri**. Agar kepariwisataan dapat dibangun bagi kesejahteraan dan kepuasan rakyat, pertama-tama, hak dan kewajiban dan juga pengendalian terhadap investasi asing haruslah dipertimbangkan dan dilakukan secara seksama.

Pengalaman nyata dari bagian dunia lain dapat digunakan sebagai pelajaran bagi Indonesia agar berhati-hati terhadap mengorbankan apa yang kita mungkin anggap sebagai kepentingan bangsa atas nama keuntungan pariwisata jangka pendek dan kepuasan wisatawan (lihat Lampiran 2 tentang **studi kasus nasional dan internasional** dan Lampiran 3 tentang **Deklarasi Bern**). Indonesia seharusnya berkepentingan untuk secara penuh memperhatikan kepemilikan berbagai tempat yang mempunyai nilai sumberdaya alam dan budaya tinggi. Selain itu, bagaimana pariwisata mungkin memengaruhi perempuan dan laki-laki perlu dipertimbangkan secara berhati-hati. Bagi perempuan, sebagaimana disebutkan dalam temuan awal dalam Laporan

Dunia tentang Perempuan dan Pariwisata (2010, UNWOMEN & UNWTO), terdapat lima bidang yang perlu menjadi fokus perhatian, yaitu **lapangan kerja, kewira-usahaan, pendidikan, kepemimpinan, dan komunitas**.

Pertanyaan paling sukar dijawab adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan/keadilan dan kesejahteraan dalam mimpi Indonesia menjadi negara maju dan cara /sarana yang dapat membuat kepariwisataan berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Indikator komprehensif (sebagaimana tersebut dalam Bab 2 dan Lampiran 6) termasuk kesejahteraan dan manfaat untuk penduduk lokal, keberlanjutan sumberdaya alam dan budaya, kesetaraan manfaat di antara para pemangku kepentingan, dan penampilan identitas Indonesia dapat pula diperhitungkan. Pemerintah Indonesia mempunyai peluang untuk mejajagi indikator komprehensif yang paling sesuai untuk dijadikan arus utama dalam kebijakannya dan memromosikan indikator ini kepada para pemangku kepentingan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran di atas, visi pembangunan pariwisata Indonesia, sebagai panduan arah kebijakan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pariwisata, tidak terbatas hanya pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , dapat disebutkan sebagai berikut:

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang menawarkan pekerjaan yang layak dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat dan jati diri Indonesia.

Visi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang dimaksudkan tidak untuk membatasi hak generasi yang sekarang, termasuk hak untuk menjadi wisatawan di negaranya sendiri, memperoleh peluang berusaha dan pekerjaan di bidang kepariwisataan, dan berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang jenis pariwisata apa yang akan dikembangkan di destinasi sekitar tempat tinggal mereka. Sebagai suatu konsep, **pembangunan kepariwisataan DI INDONESIA dan UNTUK INDONESIA** perlu dianggap sebagai satu kesatuan, sedangkan kedua aspeknya harus tercapai – tidak hanya satu atau lainnya.

Sangatlah penting untuk menghindarkan pembangunan kepariwisataan di Indonesia tetapi negara lain yang mendapat manfaat lebih atau semua dari keuntungannya, baik sebagai penyelenggara bisnis maupun sebagai wisatawan. Hak generasi yang akan datang akan ketersediaan sumberdaya alam dan budaya yang utuh dan berkelanjutan untuk penggunaan masa depan, yang ‘dikonsumsi’ secara bertanggungjawab oleh generasi sekarang, harus diprioritaskan.

3.2 Dimensi Baru dalam Kebijakan Kunci

3.2.1 Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan dalam

Pariwisata

Pemahaman dan komitmen terhadap pekerjaan layak ramah lingkungan (*Green jobs*) untuk mendukung terjadinya transisi/ peralihan yang cukup bagi para pekerja/karyawan dan majikan menuju pembangunan yang rendah karbon, mengurangi percepatan perubahan iklim, ramah lingkungan dan ramah sosial, seyogyanya merupakan bagian yang paling penting dalam kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. **Karena itu pekerjaan layak yang ramah lingkungan perlu dipadukan pada semua kebijakan tentang lapangan kerja dan usaha dan juga mitigasi perubahan iklim yang terkait dengan kepariwisataan, dengan maksud untuk keberlanjutannya.** Konstituen ILO ikut serta berdialog membahas pekerjaan layak yang ramah lingkungan dan rencana Pemerintah Indonesia berkaitan dengan perubahan iklim di bawah kelompok kerja Mitigasi dan Adaptasi. Berkenaan dengan Rencana Aksi Perubahan Iklim, Dewan Nasional Perubahan Iklim sedang menyiapkan satuan tugas dan peta jalan kegiatan (*roadmap*) nasional tentang Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan bersamasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan juga diselaraskan dengan Kemitraan PBB untuk Kerangka Pembangunan Indonesia (*United Nations Partnership For Development Framework Indonesia/ UNPDF*), terutama menyangkut tujuan untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang efektif, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan efisiensi enersgi, serta pengelolaan ekosistem sumberdaya alami yang kritikal dan meminimumkan degradasi lingkungan.^{xxviii} **Dua pilar *Green Jobs* adalah keberlanjutan lingkungan dan pekerjaan yang layak .**

Pekerjaan yang layak didefinisikan sebagai: “Pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan dan bermartabat”.

Pekerjaan yang layak merupakan refleksi dari tujuan strategis Organisasi Buruh Sedunia (ILO), yang sudah diangkat sejak tahun 1999. Pekerjaan yang layak telah menjadi tujuan bersama yang luas, lebih dari hanya tujuan ILO. Dengan bantuan ILO, Indonesia telah berhasil maju menuju sejumlah berbagai sasaran pekerjaan yang layak melalui serangkaian program dan kegiatan. Mencapai pekerjaan yang layak secara implisit sebenarnya telah ditentukan di dalam UUD 1945. Program pertama Indonesia dikembangkan untuk periode 2002-2003 dan yang kedua untuk periode 2004-2005. Perumusan Program Nasional tentang Pekerjaan yang Layak (*Decent Work Country Program/DWCP*) periode 2006-2010 telah disiapkan melalui konsultasi dengan konstituen ILO. Pekerjaan layak yang ramah lingkungan (*green jobs*) juga merupakan bagian kunci dari DWCP (2011-2015) di bawah prioritas pertama **“penciptaaan lapangan kerja untuk pertumbuhan yang inklusif, produktif dan berkelanjutan”**. DWCP didirikan dan diselaraskan dengan kerangka kebijakan kunci ILO, sistem PBB, dan Pemerintah Indonesia.

Sektor kepariwisataan terdiri dari banyak jenis usaha yang berbeda, dari penyedia akomodasi, penyelenggara wisata dan transportasi berbasis daratan, lautan dan udara, hiburan, eceran dan jasa profesional lainnya. Dalam sub-sektor tersebut terdapat banyak contoh kondisi pekerjaan yang baik dan layak di Indonesia. Kekurangan umumnya terdapat dalam jaminan sosial dan segala jenis perlindungan untuk pekerja lepas dan sektor informal, dan hal tersebut telah memperburuk persoalan.

Pekerjaan yang layak dimaksudkan untuk mitigasi berbagai isu tersebut. Konsep pekerjaan yang layak merupakan bagian yang penting dalam pariwisata berkelanjutan, dan tujuan pembangunan pro-masyarakat miskin mencakup empat pilar:

- i. **Penciptaan Lapangan Kerja:** mekanisme sosio-ekonomi, mengarusutamakan pekerjaan yang Layak dalam kebijakan sosial dan ketenagakerjaan nasional, fasilitasi melalui mekanisme sosio-ekonomi dan penyediaan skema keuangan mikro dan juga dengan memperhitungkan kemungkinan dampak terhadap lingkungan pada setiap tahap pekerjaan.
- ii. **Hak selama bekerja:** hak pekerja atas upah/gaji minimum, liburan yang dibayar, jam istirahat/jam kerja, cuti tahunan dan jenis cuti lainnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- iii. **Perlindungan sosial:** yang mencakup keselamatan kerja dan kesehatan, jaminan sosial, asuransi dan skema pensiun. Perlindungan sosial ini terkait dengan panjangnya waktu kerja dan giliran kerja malam (untuk perempuan), dan kenyataan bahwa jumlah pekerja terkait pariwisata yang signifikan adalah pekerja lepas yang mungkin tidak mempunyai jaminan atau mempunyai hak untuk pensiun. Perlindungan sosial bagi sektor informal juga perlu diperhatikan.
- iv. **Dialog Sosial:** tawar-menawar kolektif (*collective bargaining*) dan mekanisme dialog sosial tripartite tentang berbagai sektor dalam mata rantai pasokan/produksi pariwisata harus diperkuat dalam berbagai pernyataan kebijakan. Sementara berbagai kasus sosial mungkin tidaklah seburuk seperti apa yang terjadi dalam sektor lain, juga terdapat isu mengenai dialog sosial antara sektor informal dengan pemerintah daerah.

Di samping keempat pilar, isu lain yang perlu dipertimbangkan adalah nasib mereka yang bekerja untuk UKM dan sektor informal, yang di Indonesia diperkirakan lebih dari separuh.^{xxix} Usaha mikro dan kecil dan usaha informal yang mendominasi sektor perlu menyadari aturan dan regulasi tentang berbagai hak sosial pekerja (UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Mereka yang bekerja dalam sektor informal paling rentan terhadap ketidakamanan sosial. Mereka yang menggunakan ruang publik mungkin harus meninggalkan tempat “mereka” bekerja setiap saat, tanpa mempunyai posisi tawar, karena mereka dianggap ilegal/melanggar hukum. Industri rumahan dan UKM yang tidak terdaftar perlu diidentifikasi. Di beberapa tempat mereka juga bergabung dalam asosiasi sektor informal, dialog bipartit dengan pemerintah setempat perlu difasilitasi. Pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan komitmen atas hak azasi manusia dan pendapatan yang layak untuk semua yang tenaga dan keterampilannya digunakan keberadaan industri dan keberhasilannya.

3.2.2 Pengurangan Kemiskinan

Distribusi manfaat yang diperoleh dari kepariwisataan bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan yang berbeda di seluruh Indonesia masih menjadi pertanyaan. Dengan arahan pro-penduduk miskin dalam agenda pembangunan nasional, kepariwisataan diharapkan juga memainkan peran dalam pengurangan kemiskinan, terutama untuk komunitas di destinasi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 2, ada keterkaitan kuat antara kepariwisataan dengan pengurangan kemiskinan yang dapat menguntungkan. Destinasi potensial yang acap kali berada dekat dengan desa/permukiman tempat tinggal penduduk miskin dengan peluang terbatas dalam pembangunan berbagai sektor lain, dengan peluang daya tarik atau aktivitas guna memenuhi kebutuhan pasar pariwisata, harus lebih diperhatikan atau diberi prioritas. Penting untuk diperhatikan, bahwa pariwisata bukanlah obat mujarab untuk mengurangi kemiskinan tanpa pertimbangan yang cermat dari kegiatan usahanya. Wirausahawan, baik yang mikro maupun yang lebih besar perlu memiliki kemampuan menemukannya peluang pasar, menjajagi resiko dan berkomitmen terhadap usaha baru.

Bila penentu kebijakan dan komunitas mempunyai perhatian terhadap investor besar yang datang dan menjalankan aktivitas kepariwisataan yang dapat menciptakan kemiskinan lebih lanjut sebagai akibat dari pengalihan kepemilikan lahan, dan mengusulkan untuk memperkenalkan **pariwisata berbasis komunitas**, maka perlu untuk mempertimbangkan secara objektif apakah terdapat berbagai atribut destinasi yang cukup untuk menarik minat sasaran pasar dan menyiapkan komunitas melalui pengembangan kegiatan usaha dan kapasitas dalam menerima kunjungan. Terlalu sering, pariwisata berbasis masyarakat diprogramkan dengan maksud baik, tetapi dilaksanakan secara buruk dan tidak berkelanjutan dan hanya menghasilkan impian yang tidak realistis yang berdampak pada komunitas, pada budaya dan lingkungan. Hal ini dapat menghasilkan lebih banyak gangguan ketimbang manfaat. Pariwisata berbasis komunitas tampaknya dipakai untuk membenarkan pembangunan kepariwisataan dengan menempatkan (menjanjikan untuk) komunitas sebagai alat untuk mencapai tujuan pariwisata. Bukan tanpa alasan atau bukti bahwa destinasi yang populer dan kaya perlu mempertimbangkan pembangunan kepariwisataan berbasis komunitas dari pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) dan juga dari alokasi sumber daya publik yang diperoleh dari pariwisata demi kesejahteraan komunitas yang lebih baik.

Penting untuk disebutkan bahwa pekerjaan yang layak dapat berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan dan juga menunjang MDGs lain melalui peluang lapangan kerja baru, penghasilan yang cukup dan pekerjaan produktif, kombinasi kerja, keluarga dan kehidupan pribadi, stabilitas dan jaminan selama bekerja dan jaminan sosial.^{xxx}

3.2.3 Partisipasi Pemuda dan Lapangan Kerja

Angkatan muda atau pemuda sebagai wisatawan mempunyai potensi besar memberi sumbangan pada pertumbuhan pariwisata domestik (nusantara). Dalam hal sebagai pelaku perjalanan domestik, kontribusi pemuda dilihat dari proporsinya cukup signifikan, yaitu

mencapai hampir 40% dari jumlah keseluruhan penduduk yang melakukan perjalanan.(BPS 2010). Meskipun pengeluaran mereka tidak sebesar penduduk dewasa/ yang lebih tua, mereka mungkin menempuh jarak lebih jauh, mengunjungi berbagai tempat sesuai dengan karakteristik psikografiknya, dan karena itu pengeluarannya lebih menyebar. Mereka juga berpotensi sebagai pasar ekowisata dan wisata petualangan, mengunjungi destinasi yang lebih susah dijangkau di seluruh pelosok nusantara, dan membawa berbagai gagasan baru yang melahirkan peluang bagi usaha kecil bagi komunitas setempat.

Pemerintah juga menempatkan generasi muda sebagai sasaran pemberdayaan yang strategis, untuk memasuki pasar tenaga kerja yang memerlukan keterampilan, pengetahuan dan sikap, dan juga kompetensi. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditugasi khusus untuk menangani urusan terkait kepemudaan, termasuk kebutuhan mereka akan peluang pekerjaan dan usaha. Lapangan kerja bagi generasi muda dalam sektor kepariwisataan populer di banyak negara, disana para pelajar bekerja selama musim liburan, akhir minggu dan waktu luang lain untuk membantu biaya pendidikan atau mendapat uang saku dan menabungnya untuk bepergian/berlibur. Pariwisata yang bersifat musiman biasanya selalu membutuhkan tenaga kerja tambahan selama musim puncak liburan akan cocok dengan skema tersebut. Hal tersebut bermanfaat, baik bagi produktivitas generasi muda dan juga industri kepariwisataan yang mendapat pasokan tenaga kerja musiman; yang dapat berdampak lebih luas. Dengan menyediakan lapangan kerja bagi pemuda, mereka yang putus sekolah karena ketidakmampuannya, mungkin akan dapat melanjutkan pendidikannya. Kepariwisata mungkin tidak bisa memecahkan persoalan negara atas lapangan kerja bagi generasi muda akan tetapi setidaknya dapat memberikan kontribusi lebih dari apa yang sudah diperbuat sejauh ini.

Aspek penting lainnya dalam partisipasi pemuda adalah faktor pendidikan. Orang berusia muda cenderung terlibat pada berbagai macam aktivitas santai (*leisure*) di alam terbuka, olahraga dan kegiatan sosial lainnya. Gaya hidup aktif ini dapat diarahkan dengan menyediakan peluang bagi pemuda untuk mengikuti berbagai proyek lingkungan atau sosial yang nantinya dapat berkontribusi pada pariwisata berkelanjutan.¹⁰ Belajar pada usia muda akan membentuk perilaku masyarakat dan berfikir secara dewasa.

3.2.4 Pengarusutamaan Jender dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan Jender dan perlindungan terhadap pekerja anak merupakan dua isu penting dalam sektor kepariwisataan di Indonesia. Data hasil survei/peneitian sebagaimana secara rinci ditampilkan pada Tabel 1.7 dan 1.10 dalam Lampiran 1, memperlihatkan bahwa pekerja perdesaan dan perempuan memerlukan perhatian lebih jauh agar mendapat upah dan

¹⁰Sebagai satu praktek baik, proyek Peta Hijau di Jakarta dan tempat tempat lainnya telah melibatkan sukarelawan muda lokal ikut memproduksi peta yang dapat digunakan tidak hanya sebagai panduan wisata akan tetapi juga mendidik pemuda untuk memahami lingkungan tempat mereka tinggal, membangun sikap ramah lingkungan. Peta ramah lingkungan merupakan jejaring internasional yang bermarkas di New York.

Pemerintah Yogyakarta, didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum, REKOMPAK dan Dana Rekonstruksi Jawa telah menerbitkan serial tentang Cerita Pendidikan Pusaka untuk anak-anak, yang disiapkan oleh para pemuda di bawah pengawasan akademisi dan pakar terkait.

kondisi kerja yang lebih baik, memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang membuatnya mampu mendapat kondisi pekerjaan yang lebih baik.

Sebagaimana disebutkan di atas, kesetaraan gender dalam industri kepariwisataan dan administrasi pemerintahan terkait masih jauh dari harapan. Sebagai bagian penting dari pariwisata berkelanjutan, maka hal tersebut harus didorong dan didukung. Meskipun perempuan dan pekerja muda merupakan mayoritas pekerja dalam sektor kepariwisataan, situasi mereka ditandai oleh tantangan berat sebagaimana dijelaskan pada Bab 1. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, pada masa mendatang mereka akan menjadi tanggungan sektor ini. Semua pemangku kepentingan perlu mempersiapkan dan mengembangkan kebijakan strategis untuk mengatasi berbagai tantangan dan mendorong peluang yang.

Perlindungan anak harus mutlak menjadi prioritas dalam sektor ini. Di banyak tempat (spot) wisata sangat jelas terlihat anak-anak berlalu sebagai penjual aneka barang kecil kerajinan dan cenderamata lainnya. Pengembangan kebijakan tentang penghapusan anak-anak pekerja dalam berbagai sektor yang menjadi mata rantai pasokan pariwisata pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota juga merupakan keharusan untuk dapat mencapai tujuan penghapusan tuntas pekerja anak dalam sektor kepariwisataan. Pada saat yang bersamaan, perlindungan anak dari pelecehan seksual harus dialihkan menjadi fokus perhatian dalam pembuatan kebijakan.

Demi perlindungan anak, industri kepariwisataan perlu mengacu pada hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Bab 1 dan Lampiran 7, sehingga sektor kepariwisataan akan mendukung isu perlindungan anak seperti: menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menetapkan batas umur minimum untuk izin masuk menjadi pekerja pariwisata, dan menghapuskan bermacam bentuk terburuk pekerja anak.

3.2.5 Sistem Aturan Sukarela/ Standar Pariwisata Berkelanjutan

i. Penerapan Kode Etik

Jasa pariwisata melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan interaksi antarwisatawan, pengusaha, berbagai unit sektor publik, antara wisatawan dan penyedia jasa, komunitas di tempat yang dikunjungi, media masa, dan penyelenggara pendidikan, riset serta pelatihan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Pariwisata Dunia yang diterbitkan oleh UNWTO sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk diseminasi lebih jauh dan pada umumnya sudah dimasukkan ke dalam UU Kepariwisata Indonesia, akan tetapi implementasi dan pemahaman oleh para pemangku kepentingan masih perlu dipacu lebih lanjut.

ii. Penerapan berbagai standar

Agar supaya jalur pembangunan yang konsisten tercapai, berbagai standar panduan pariwisata berkelanjutan harus disusun dan dilaksanakan. Berbagai standar semacam itu sudah

ada di beberapa negara dan untuk jenis operasi pariwisata yang spesifik. Standar yang secara internasional sudah dikenal dan juga standar yang spesifik di suatu negara juga sudah ada di luar Indonesia, dan meskipun beberapa standar tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia, masih dapat digunakan sebagai dasar bagi pengembangan standar Indonesia dalam konteks lokal Indonesia.

Sudah terdapat berbagai jenis standar yang dikembangkan di Indonesia, dan Kementerian terkait terus mengembangkan lebih lanjut, terutama untuk kompetensi profesi. Standar untuk produk, jasa, dan proses pariwisata masih terbatas. Standar semacam itu dapat mencakup keseluruhan proses produksi dan rantai produksi. Misalnya dalam penyiapan makanan, dapat mencakup sifat atau kualitas bahan baku, cara bahan diangkut, disimpan, dan dimasak. Pemantauan sukar dan seringkali kurang dilakukan. Sejauh ini kualifikasi lebih ditujukan terhadap kualitas dan kenyamanan fasilitas. Standar yang berkenaan dengan isu lingkungan dan kepekaan sosio-budaya umumnya masih kurang.

iii. Pengembangan program sertifikasi

Sudah terdapat ribuan label ramah lingkungan (*eco-label*) terkait kepariwisataan di seluruh dunia. Lebih dari seratus *eco-label* semacam itu menyebut pariwisata berkelanjutan. Program sertifikasi serupa sudah dimulai dan dapat dikembangkan lebih lanjut langkah demi langkah, secara lokal dan nasional di Indonesia. Sistem yang dikehendaki, tidak hanya mengakui komitmen dan praktek pariwisata berkelanjutan melalui sertifikasi, akan tetapi juga membantu unit usaha untuk mencapai tujuannya melalui ‘konsultasi’(*help desks*) atau pelatihan dan mengajarkan pada mereka apa yang wajib dilakukan. Salah satu standar lokal yang sudah dikenal dan diakui oleh dunia internasional adalah Tri Hita Karana yang didasarkan pada filosofi Bali. Yayasan Tri Hita Karana menganugerahkan sertifikat pada pemilik/pengelola penginapan bermutu, restoran dan kemudian juga pada berbagai kegiatan/bangunan lain di Bali yang secara sukarela dikelola dengan menerapkan cara ramah lingkungan dan budaya. Sertifikasi produk di Indonesia sedang berkembang, seperti sertifikasi makanan halal dan organik, berbagai macam produk dari bahan daur ulang dan *upcycled*¹¹ juga menjadi populer. Mengingat banyaknya elemen produk dan unit usaha kepariwisataan, dengan tingkat berkelanjutan yang beragam, maka perlu dilakukan ‘sertifikasi berjenjang’ dan penerapan standar yang diperlukan selangkah demi selangkah. Standarisasi yang dilanjutkan dengan sertifikasi akan menuntun konsumen dalam memilih produk ramah lingkungan, yang berlangsung melalui proses produksi yang bertanggungjawab.

¹¹ Penggunaan bahan daur ulang menjadi sesuatu dengan nilai lebih tinggi.

3.3 Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan

3.3.1 Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Insani

Keberhasilan pariwisata sebagai industri berbasis pengetahuan sangat bergantung pada sumberdaya insani yang berada di belakang kemudi

Sumberdaya insani untuk pembangunan pariwisata mencakup mereka yang merumuskan berbagai arah kebijakan pembangunan dan investasi, perencana yang merencanakan realisasi kondisi masa depan yang diharapkan, dan tentu saja para pelaksana dan operator, yang menanggung resiko modalnya pengelola dan pengawas, pengelola menengah, yang bekerja di belakang layar dan juga mereka yang berada di baris depan yang perlu bertatap muka dengan wisatawan.

Sekarang ini, sistem pendidikan dan pelatihan berada di bawah tiga Kementerian yang berbeda: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, masing-masing mempunyai program pendidikan atau pelatihan pariwisata “sendiri”. Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Manusia untuk Pariwisata yang sudah ada sejak tahun 1980an, belum pernah disempurnakan sampai sekarang. Program pendidikan, sekolah kejuruan, dan juga pelatihan dan program pendidikan tinggi telah mengalami pertumbuhan tanpa referensi “induk”; mereka tumbuh subur begitu saja di banyak kota besar dan kurang pengendalian pada kurikulumnya dan penyampaian programnya. Pembangunan sumberdaya insani tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan masa depan, akan tetapi juga memperbaiki angkatan/ kekuatan yang sekarang, tidak hanya tentang menyediakan ilmu pengetahuan dan keahlian/ keterampilan tetapi yang lebih penting adalah membangun sikap dalam menghadapi tantangan masa depan dan memenuhi standar internasional di satu sisi dan konteks budaya lokal di sisi lainnya. Wawasan yang komprehensif perlu dipertimbangkan untuk mencakup penelitian lintas berbagai kebijakan terkait pariwisata, perencanaan dan pembangunan kepariwisataan, dan pengembangan teknologi pendidikan.

Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pariwisata berkelanjutan harus didukung oleh pengembangan sumberdaya manusia yang terencana dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan juga untuk memperbaiki pasokan sumberdaya manusia yang sekarang dalam bidang kepariwisataan dan *hospitality*. Pendidikan dan Pelatihan harus melampaui capaian interpretasi tentang kepariwisataan dan *hospitality* yang sempit dan mencakup , perencanaan makro, komprehensif, antardisiplin, manajemen, pengembangan kebijakan dan berbagai studi khusus dalam berbagai bidang terkait.

Singkatnya, untuk memperoleh pandangan dan arahan yang jelas dalam pembangunan sumberdaya insani, strategi pembangunan sumberdaya insani yang komprehensif diperlukan, yang mencakup tidak hanya pendidikan kejuruan yang lebih baik, melibatkan mitra sosial, dan menjawab berbagai isu berkaitan dengan mobilitas internasional para pekerja, akan tetapi juga

mencakup program eksekutif untuk pengembangan kapasitas pemerintah daerah, pendidikan tinggi dalam analisis kebijakan, perencanaan, manajemen, dan bidang terkait lain yang merupakan kombinasi baik dari perumusan kebijakan, perencanaan, dan implementasinya, dan juga penyelenggaraan operasionalnya.

3.3.2 Pendekatan Berkelanjutan dan Komprehensif dalam Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Pariwisata

Pariwisata berkelanjutan dalam konteks Rencana Strategis ini mencerminkan suatu pendekatan yang dapat diterapkan pada semua jenis pariwisata, di semua destinasi dengan mempertimbangkan semua tujuan MDGs, RPJPN dan peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan dan arah kebijakan kunci Pemerintah Republik Indonesia.

Keberkelanjutan menuntut manfaat ekonomi yang seimbang dengan konservasi sumberdaya alam dan budaya dan berbagai isu terkait kesejahteraan komunitas. Manfaat ekonomi hendaknya tidak dilihat hanya secara kuantitatif dari pendapatan bruto yang dilihat dari pengeluaran/ belanja wisatawan, akan tetapi juga dari manfaat ekonomi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, secara langsung dan tidak langsung melalui perolehan devisa, retribusi, pendapatan penduduk sebagai pelaku usaha, dan pekerja di berbagai usaha yang berbeda di bawah kondisi pekerjaan yang layak. Kesejahteraan rakyat juga terkait dengan indikator lain seperti misalnya peluang terhadap infrastruktur dan utilisasi fasilitas yang barangkali tidak akan tersedia kalau pariwisata tidak dikembangkan juga menjaga martabat sebagai tuan rumah.

Pendekatan berkelanjutan harus menempatkan komunitas dan masyarakat sebagai subjek kunci pembangunan yang bertujuan **kepuasan komunitas tuan rumah** yang berinteraksi dengan pembangunan pariwisata sebelum menawarkan kepuasan kepada wisatawan. Pembangunan daerah yang kurang berkembang, penghapusan kemiskinan, dan perbaikan kesejahteraan komunitas perlu diprioritaskan. Perencanaan pariwisata berkelanjutan perlu memperhitungkan semangat pembangunan pro-penduduk miskin, pro-pertumbuhan, pro-pekerjaan, dan pro-lingkungan yang dicanangkan pemerintah.

Pariwisata mungkin tidak akan tumbuh tanpa dukungan komunitas dan sektor lain yang sudah siap/dipersiapkan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa **semua sektor menuju pada arah yang sama, dengan pola pikir yang sama**. Keterkaitan antar sektor merupakan kondisi penting agar pariwisata bertumbuh. Pariwisata sebagai suatu sistem harus dikembangkan secara holistik, tidak hanya dari sudut pandang industri, tetapi juga dari destinasi dengan komunitas di dalamnya dan kelembagaan yang mencakup sumberdaya insani, organisasi, dan peraturan, serta juga permintaan/potensi pasar.

Pembangunan industri kepariwisataan memerlukan keterpaduan antara berbagai kebijakan pariwisata yang disusun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan

regulasi lain yang diterbitkan oleh kementerian lain: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan tidak mengabaikan mereka yang berkaitan dengan lingkungan dan perlindungan pusaka budaya. Keterpaduan juga diperlukan di antara bermacam jenis industri (akomodasi, perjalanan dan transportasi, makanan dan minuman dan lainnya), termasuk industri kreatif tertentu untuk mencapai suatu kombinasi yang baik dari produk pariwisata secara keseluruhan. Industri hendaknya selaras dengan sifat daya tarik sebagai “inti” dari destinasi, dan tidak hanya mempertimbangkan regulasi yang tertulis, akan tetapi juga norma dan nilai lokal, serta juga menghargai kearifan lokal.

Keterpaduan juga diperlukan antara pusat-provinsi-pemerintah daerah untuk menyinergikan sumberdaya yang terbatas dan pengembangan kebijakan. Isu kelembagaan yang strategis adalah **kepemimpinan** pada semua tingkatan. Para pejabat dalam bidang kepariwisataan pada berbagai tingkatan haruslah mengerti bahwa sistem kepariwisataan adalah tentang dan bagaimana upaya profesional mereka dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional. Standar minimum kompetensi merupakan sesuatu yang krusial, tidak perlu diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan gelar keserjanaan, akan tetapi yang lebih penting adalah memiliki visi, keterampilan, dan pengetahuan tentang kondisi dan situasi di bawah yurisdiksi suatu kewenangan tertentu. Mempunyai pengetahuan tentang wilayah lain, juga suatu yang menguntungkan untuk belajar tentang dan sadar akan daya saing destinasi. Isu lain adalah manifestasi organisasi kepariwisataan di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan dalam kaitan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk koordinasi. Persoalan koordinasi mungkin kurang signifikan jika setiap orang yang terlibat dalam administrasi mengerti gambaran pariwisata secara holistik, untuk mengetahui kemana arah pembangunan, apa yang perlu dikoordinasikan, dengan siapa dan kementerian mana yang perlu diajak serta.¹²

Pada tingkat operasi, destinasi utama mempunyai kebutuhan sangat krusial akan rencana pengelolaan seperti proses DMO yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang mencakup lingkup pengelolaan komunitas, pengunjung, pengusaha dan pengelola lingkungan

3.3.3 Pariwisata Berkelanjutan dan Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Pada tingkat nasional, strategi pembangunan ekonomi dengan pendekatan koridor (MP3EI) telah menempatkan koridor Jawa- Bali – Nusa Tenggara sebagai fokus untuk pariwisata, yang berarti pencapaian pembangunan yang ada sekarang di Jawa dan Bali harus diintensifkan dan diperluas lebih jauh ke timur. Pendekatan ini berarti mempercepat pembangunan ekonomi dan pariwisata dianggap sebagai kontributor potensial. Indonesia dapat menuai pelajaran dari berbagai pengalaman pada tahun 1980-an dan 1990-an, ketika pariwisata dikembangkan dengan pendekatan “*boosterisme*”. Berdasarkan pada tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan

¹² Di tingkat provinsi dan terlebih lagi di tingkat kabupaten atau kota, unit organisasi untuk pariwisata secara administrasi sangat beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perubahan di tingkat nasional mungkin tidak diikuti oleh tingkat lokal.

internasional yang tinggi dan dihadapkan pada kebutuhan akan “mata uang keras”, pariwisata (internasional) telah diurusutamakan dan segala kemungkinan dukungan diberikan untuk meningkatkan kedatangan wisatawan. Di antara mekanisme untuk mendukung berbagai kebijakan pariwisata, pembebasan tanah untuk pariwisata telah dipermudah, akses terhadap berbagai sumber finansial (kredit) dengan tingkat bunga khusus, perizinan dan persyaratan administratif telah diperlonggar untuk mendorong lebih jauh investasi di sektor kepariwisataan. Tanpa penyiapan yang layak dan pengendalian yang konsisten, kepariwisataan telah berkembang dengan cepat, dan dalam beberapa kasus dengan cara yang dilihat oleh sejumlah pengamat sebagai tidak terkendali. Investasi dalam kepariwisataan, khususnya di industri perhotelan telah meledak, terutama terkonsentrasi di kepulauan Riau (Batam dan Bintan), Jakarta, dan Bali, dan sedikit lebih jauh ke beberapa kota besar lainnya dan destinasi yang terkenal. Akan tetapi untuk menyebarkan manfaat dan peluang ke sektor kepariwisataan yang beragam dan berimbang, industri perlu lebih daripada sekedar berbagai hotel berstandar internasional. Resor pariwisata telah direncanakan di banyak daerah dengan sekurang-kurangnya 10 terdaftar dan dikembangkan sedemikian dengan harapan ‘Nusa Dua’ yang lain akan tumbuh di berbagai tempat lain. Tak satu pun dari aspirasi itu menjadi kenyataan. “*Outcome*”-nya adalah penumpukan pariwisata yang lebih padat di Jawa dan Bali yang dalam beberapa kasus telah melebihi kapasitas daya dukung. Destinasi seperti Borobudur terbebani oleh wisatawan massal yang mencari taman rekreasi. Wilayah potensial di daerah lain negeri ini masih dan sedang dikembangkan dalam kecepatan yang jauh lebih rendah. Tergerak oleh berbagai kebijakan publik, target ekonomi telah mendorong semua pemangku kepentingan untuk mencapai targetnya atas biaya lingkungan dan sosial. Meskipun sukses mencapai tujuan ekonomi, dampak terhadap lingkungan lokal, budaya dan masyarakat meninggalkan banyak pertanyaan keberlanjutan dari pendekatan pembangunan ini. Setelah krisis nasional pada akhir abad ke-20, dampak lingkungan dan sosio-budaya menjadi lebih penting dan minat pembangunan di daerah luar koridor Jawa-Bali juga mulai bertumbuh.

Artinya bahwa pariwisata mungkin menjadi penggerak ekonomi, akan tetapi pertumbuhannya perlu dikelola secara berkelanjutan. Indonesia mempunyai atribut yang beraneka ragam di banyak lokasi, sehingga negeri ini tidak perlu menyandarkan diri pada pembangunan koridor tertentu pembangunan kepariwisataan. Sangat penting untuk dicatat bahwa bukanlah kecepatan yang menjadi masalah, melainkan kualitas pembangunanlah yang lebih penting. Paradigma baru pembangunan untuk mendukung gerakan ekonomi ramah lingkungan sebagaimana dimaksudkan oleh Rio + 20 harus diformulasikan.

3.3.4 Pendekatan Wilayah (ASEAN) untuk

Mengimplementasikan Prakarsa Dunia dalam Pariwisata Berkelanjutan

Indonesia, dengan lebih dari separuh pulau-pulau di wilayah ASEAN, dan satu per tiga dari penduduk ASEAN, menempati posisi yang kuat untuk membawa isu pembangunan pariwisata berkelanjutan ke ‘meja’ ASEAN. Malaysia, Thailand, dan Singapura, telah

mengalami pertumbuhan pertumbuhan kunjungan internasional pada jaman modern, akan tetapi masih terdapat negara lain seperti Myanmar, Vietnam, dan Laos yang juga giat mempercepat pengembangan industri kepariwisataannya. Daerah-daerah tertentu di Indonesia menghadapi tantangan yang sama: ada yang sudah berkembang dan mendapat kunjungan internasional, ada yang masih dalam tahap percepatan pengembangan. Sesungguhnya sudah ada tatanan kelembagaan untuk mengelola wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga Indonesia seperti BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Phillippines - Area Pertumbuhan Asia Timur -), dan Segitiga Pertumbuhan IMT- GT (Indonesia, Malaysia, Thailand).

Untuk perioda waktu yang panjang, Indonesia memimpin pengembangan tenaga kerja manusia di ASEAN. Telah ada dan telah dikemukakan gagasan untuk mempunyai program internasional di antara universitas terpilih dalam pendidikan pariwisata di negara ASEAN, tempat mahasiswa dimungkinkan melakukan registrasi di suatu negara dan pindah ke negara anggota lainnya untuk mendapat pengalaman internasional dan juga memupuk budaya ASEAN. Dalam melakukan hal tersebut, diharapkan bahwa kepariwisataan terkait dengan mobilitas sumberdaya manusia di lingkungan negara anggota ASEAN tidak akan menimbulkan persoalan dalam mendukung semangat ASEAN. Selain itu, para pemain usaha hendaknya berkolaborasi dalam mengembangkan paket pariwisata berkelanjutan ASEAN, mengintegrasikan dan menyinergikan berbagai elemen berbeda dari berbagai negara berbeda untuk meningkatkan daya saing pasar yang lebih luas. Kerjasama kepariwisataan ASEAN yang kuat dengan beberapa prakarsa bersama seperti: Kelompok Kerja STOM-NTOs untuk Kapal Pesiar, Program Pasar Bersama ASEAN, ASEAN sebagai “Satu Destinasi Tunggal”, Tim Komunikasi Kepariwisata ASEAN, Satuan Tugas ASEAN dalam Investasi Kepariwisata, dan Satuan Tugas ASEAN untuk Tenaga Kerja Pariwisata sudah berjalan baik

Enam isu kunci yang telah dibahas dalam Pertemuan Pejabat Senior ASEAN adalah: (1) Pemasaran Pariwisata ASEAN, (2) Standar ASEAN, (3) *ASEAN Cruise*, (4) Komunikasi ASEAN, (5) Pengembangan Sumber Daya Insani, dan (6) Investasi Pariwisata ASEAN.

Pesan Kunci Bab 3

- Kesejahteraan masyarakat, jati diri, kualitas hidup, nilai tambah dan konservasi sumberdaya seni serta budaya dan kerjasama internasional merupakan unsur-unsur kunci Visi Pariwisata Berkelanjutan Indonesia
- Dimensi Baru Kebijakan Kunci yang diperkenalkan
 - Sesuai dengan arah pro-masyarakat miskin dalam agenda pembangunan nasional, kepariwisataan diharapkan memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan, khususnya di berbagai destinasi wisata
 - Pemahaman tentang dan komitmen terhadap **Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan** yang mendukung peralihan bagi pekerja dan pemberi kerja secara memadai menuju pembangunan yang rendah karbon, memperlambat perubahan iklim, ramah lingkungan dan ramah sosial di Indonesia adalah bagian penting strategi pariwisata berkelanjutan dan seharusnya menjadi arus utama kebijakan
 - Pencapaian **Pekerjaan yang Layak** merupakan bagian penting dalam pariwisata berkelanjutan dan agenda pro-masyarakat miskin dan pro-pekerjaan
 - **Pemuda** sebagai pelaku perjalanan potensial, terdidik dan berketerampilan merupakan sumberdaya manusia sekarang dan masa depan, serta penggiat pembangunan pariwisata berkelanjutan, haruslah dibantu
 - **Pengarusutamaan Gender dan pencegahan pekerja anak** merupakan dua sasaran penting yang harus diberi tekanan dalam agenda pembangunan kepariwisataan di Indonesia
 - Untuk mencapai jalur pembangunan yang konsisten, **standar panduan** pariwisata berkelanjutan harus dikembangkan dan dilaksanakan.
- **Perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang komprehensif** merupakan basis keberhasilan industri berbasis pengetahuan dan pondasi untuk pembangunan berkelanjutan
- **Pendekatan keberkelanjutan pada pembangunan pariwisata** sejalan dengan MDGs dan RPJPN, dan peraturan perundang-undangan kepariwisataan serta arah kebijakan kunci dari Pemerintah menuntut keseimbangan antara manfaat ekonomi dengan pelestarian sumberdaya alam dan budaya serta berbagai isu terkait dengan kesejahteraan komunitas
- Kerjasama Internasional ASEAN melalui integrasi dan sinergi beberapa elemen berbeda dari negara-negara anggotanya untuk meningkatkan daya saing pasar yang lebih luas.

BAB 4

KERANGKA STRATEGIS

Ikhtisar Bab

Bagian ini menggambarkan kerangka strategis yang memungkinkan implementasi dari berbagai kebijakan pariwisata berkelanjutan yang diuraikan di bab sebelumnya dilakukan. Dimensi kebijakan dan perencanaan yang terpenting sebagaimana tercakup dalam Bab 3 dibahas pada tingkat yang strategis. Selain dari itu, juga dilakukan pengkajian terhadap struktur kelembagaan dan finansial, pendekatan perencanaan untuk pembangunan, sistem penunjang, dan juga prinsip ekonomi seperti kompetisi, analisis pasar, sumberdaya, kendala dan sebagainya. Demikian juga digambarkan hubungan untuk memadukan ke dalam strategi pembangunan nasional dan daerah. Hasil *akhir* bab ini adalah dikembangkannya strategi konkrit untuk pelaksanaan setiap sub-bagian yang dibuat khusus sesuai dengan konteks Indonesia termasuk peran masing-masing pemangku kepentingan. Strategi ini merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh pemerintah nasional/provinsi/ kabupaten/kota sebagai dasar bagi berbagai kebijakan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

4.1 Kerangka Strategis untuk Pariwisata Berkelanjutan Indonesia

Kompleksitas Indonesia yang disebabkan oleh besarnya jumlah dan keragaman penduduk dan realitas geografi menjadikan pariwisata berada dalam kedudukan yang khas. Pariwisata lebih dari sekedar penghasil devisa non minyak dan gas, melainkan penggerak ekonomi nasional yang dibangkitkan oleh permintaan domestik dan internasional. Banyak kebijakan dan dokumen hukum yang secara ajeg menyebutkan peran pariwisata mencakup kesatuan dan persatuan. Dalam hal ini, dimensi sosio-budaya menjadi lebih mangkus (relevan) dalam pembangunan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan.

Industri kepariwisataan telah bertumbuh dan berkembang sedemikian rupa, menanggapi pertumbuhan permintaan pada tingkat internasional, nasional dan daerah. Dorongan permintaan yang dibangkitkan oleh pasar yang semakin besar telah memungkinkan pariwisata padat modal dikembangkan di destinasi yang paling banyak dikunjungi. Meskipun hal ini memperlihatkan manfaat bagi pemerintah dan beberapa individu, juga menjadi ancaman bagi keberlanjutan destinasi dan dapat menjadi beban bagi mayoritas komunitas tuan rumah akibat meningkatnya

biaya hidup.¹³ Karena itu perlu untuk mengubah pemikiran –**dari pariwisata sebagai industri berbasis sumberdaya yang mungkin akan membebanisumberdaya terkait lebih jauh menuju ke pariwisata sebagai industri berbasis pengetahuan dengan nilai tambah lebih besar**– yang akan memengaruhi tentang bagaimana sumberdaya pariwisata akan dikonsumsi. Pengetahuan yang tepat guna tentang sumberdaya pariwisata diharapkan meningkatkan tanggungjawab semua pemangku kepentingan, tanpa mengurangi kesenangan dan pengalaman ketika mengunjungi suatu destinasi, tetapi membuat kunjungan lebih mempunyai makna.

Kebijakan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 1999 ketika Indonesia mencari tata pemerintahan yang lebih baik masih dalam proses pendewasaan. Sejalan dengan otonomi daerah, pendekatan dari bawah dalam pembangunan wilayah dan daerah setempat menjadi semakin penting untuk menyeimbangkan pendekatan yang bersifat *top-down*. Ukuran dan keaneka-ragaman Indonesiamemerlukan tidak hanya perspektif sebagai anggota yang bertanggungjawab dalam komunitas global, tetapi juga memerlukan pengetahuan regional dan lokal. **Berfikir global dan bertindak lokal**, dan juga **berfikir secara lokal dan bertindak secara global**, keduanya perlu diterapkan. Meskipun otonomi daerah telah berlangsung lebih dari satu dekade, kapasitas regional dan lokal dalam mengarahkan pembangunan pariwisata masih dapat dipertanyakan. Budaya lama yang mengerjakan sesuatu dengan menunggu arahan dari atas masih tetap berlangsung di beberapa daerah. Sifat pariwisata yang multi dimensional memerlukan pejabat yang mengetahui “dunia luar” dalam arti berbagai destinasi pariwisata berdaya saing lain yang ada di dalam negeri maupun di negara lain – sambil memahami bermacam situasi, potensi dan tantangan lokal. Sayangnya, bahkan pejabat tinggi sekalipun mungkin belum pernah melakukan perjalanan secara luas (tuntas) di dalam negeri¹⁴, meski mereka justru mungkin telah melakukan (banyak) perjalanan ke luar negeri. Bila pun mereka melakukan perjalanan, mereka mungkin tidak bepergian sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan pengalaman yang dibutuhkan. Kurangnya kapasitas pegawai lokal dan kurangnya pengetahuan lokal dan pemahaman pemerintah pusat mungkin telah menghasilkan kesenjangan persepsi dan kesalahan pengertian. Keragaman dan juga keunikan setiap wilayah memerlukan prakarsa pemerintah setempat untuk menemukan potensi masing-masing untuk menarik wisatawan potensial, dan juga memahami berbagai persoalan, permasalahan khusus dan peluang yang membedakan lokalitas satu dan lainnya. Berbagai praktek *me“niru”* (replikasi) destinasi yang sukses dengan harapan akan terjadi juga di daerahnya haruslah dilakukan secara cermat dan sesuai dengan konteks masing-masing. Berbagai pelajaran telah dicermati dari berbagai pengalaman masa lalu dan tetap masih tetap berlangsung sampai hari ini dimana Bali menjadi model yang ingin ditiru berbagai provinsi lainnya. Tentu kenyataannya tidak akan sesederhana itu.

Sayangnya, gerakan otonomi, dalam satu dan cara lain, telah membuyarkan sistem pengembangan data nasional yang sudah ada. Pemerintah Pusat menghadapi kesulitan untuk mendapat data dari berbagai daerah. Bahkan basis data tentang daya tarik pariwisata masih perlu untuk dimuthakhirkan dan disusun secara sistematis. Lebih banyak sumberdaya yang menjadi daya tarik pariwisata telah ditemukenal dari waktu ke waktu. Misalnya Raja Ampat, tempat *diving* di Papua Barat yang hingga akhir tahun 1990-an belum masuk ke dalam daftar. Sangatlah

¹³Wawancara informal dengan pekerja di area Nusa Dua menyebutkan pembicaraan tentang sewa kamar yang tak terjangkau yang memaksa mereka menjajdi komuter dari desanya ke tempat kerja.

¹⁴Sangat mungkin bahwa tak seorang pun di negeri ini telah melakukan perjalanan ke 383 kabupaten dan kota di 33 provinsi.

mungkin banyak sumberdaya lokal yang tidak diketahui di tingkat provinsi dan nasional karena kurangnya kapasitas untuk menemukan dan mengkomunikasikannya. Selama ini kebanyakan identifikasi diprakarsai oleh tenaga ahli dari berbagai disiplin misalnya sumberdaya kebumian yang potensial untuk menjadi *geo-park*.

Pariwisata acapkali dipasarkan sebagai **industri padat karya dan ramah lingkungan**, istilah yang sering digunakan untuk mendapat dukungan politis. Perlu diingat bahwa pada kenyataannya industri kepariwisataan mungkin bukanlah industri yang secara menyeluruh diselenggarakan seideal itu. Pekerjaan yang diciptakan dan proses produksi harus ditinjau kembali apakah pekerjaan yang layak telah untuk penduduk telah tersedia dan apakah prosesnya benar-benar ramah lingkungan dan ramah komunitas yang ada di destinasi. Dalam hal apakah praktek pariwisata ramah lingkungan atau tidak, aktivitasnya perlu dikendalikan dan dipantau.

4.1.1 Strategi Kunci 1: Perubahan Pola pikir

Perubahan pola pikir dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan merupakan strategi inti yang memainkan peran penting dalam memperkuat dan meletakkan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan Indonesia

Strategi kunci 1 mencakup promosi- mendorong perubahan pola pikir para pemangku kepentingan pariwisata dalam banyak aspek pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kerangka pemikiran mencakup halberikut ini:

- i. Pariwisata bukanlah tujuan, melainkan **‘kendaraan’ untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup;**
- ii. Dalam sistem administrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah kementerian utama dalam pengembangan kebijakankepariwisataan, akan tetapi aspek multidimensinya pengembangan tersebut menuntut **perhatian dari banyak kementerian, lain dan juga berbagai tingkat pemerintahan.**
- iii. Pembangunan pariwisata merupakan proses jangka panjang. Berbagai kebijakan dan perencanaan perlu diarahkan ke **tujuan dan sasaran jangka panjang;** dengan perencanaan jangka pendek yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang tersebut. Orientasi jangka panjang perlu didasarkan pada visi yang jelas, bukan sekedaragenda pemecahan persoalan dan bukan pulabersasaran pada pembangunan jangka pendek dan permintaan pasar.
- iv. Pariwisata adalah fenomena yang multi dimensi sifatnya, sebagaimana disebutkan dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, aspek sosio-budaya tidak kurang pentingnya. Peran pariwisata dalam pembangunan bangsa, mempersatukan

rakyat dari berbagai daerah/wilayah berbeda; melakukan perjalanan dan melihat bagian lain dari negeri ini sangatlah perlu dalam membangun pemahaman persatuan bangsa; ini berarti bahwa **pariwisata nusantara tidak kurang pentingnya dan bahkan lebih penting dari pariwisata internasional.**

- v. Paradigma pembangunan industri kepariwisataan bukan berbasis sumberdaya, melainkan industri yang **berbasis pada ilmu pengetahuan**. Industri kepariwisataan tidak hanya padat karya dan dapat menghasilkan secara cepat, kecuali investasi besar dalam infrastruktur akan perlu waktu beberapa tahun agar investasinya kembali, akan tetapi juga mengarusutamakan peluang usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sambil juga membuktikan bahwa pariwisata sebagai industri ramah lingkungan dan menyeimbangkan komposisi industri dan manfaat jangka panjang.
- vi. Otonomi **tidak hanya sekedar mengalihkan kewenangan** untuk mengambil keputusan dalam pembangunan pariwisata ke pemerintah daerah, akan tetapi juga perlu bertanggungjawab terhadap sejalanannya pembangunan dengan kebijakan nasional. Di pihak pemerintah pusat, meskipun beberapa tugas telah dialihkan, tetap diperlukan pengendalian, apakah tugas tersebut telah dijalankan secara layak/tepat.

Esensi dari strategi ini adalah agar semua pemangku kepentingan sadar bahwa berfikir keluar dari kotak (*thinking out of the box*) sangatlah penting. Tidak cukup masing-masing pihak “berkegiatan sebagaimana biasanya” (*‘business as usual’*) “tinggal nyaman di zona nyaman”, dengan pertumbuhan wisatawan internasional dan nusantara yang mantap.

Pariwisata berkelanjutan yang telah dikenal digunakan sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan baru dan mengarahkan kembali penyimpangan dalam pembangunan yang lalu, menggaris-bawahi dimensi baru yang sebelumnya tidak cukup mendapat perhatian.

Langkah-langkah strategis:

- Meningkatkan kesadaran pada semua tingkatan tentang kerangka pemikiran pariwisata berkelanjutan melalui bermacam media dan memanfaatkan TOKOH yang dihormati atau populer sebagai juru bicara
- Menyiapkan panduan/pedoman nasional untuk pariwisata berkelanjutan dan membangun konsensus tentang hal tersebut
- Manfaatkan forum antar kementerian yang sudah terbentuk atau bentuk forum yang baru disertai sistem komunikasi dengan pemerintah daerah dan komunitas di tingkat lokal
- Memberdayakan pemerintah lokal dan provinsi dalam pelaksanaan berbagai prinsip berkelanjutan termasuk kepuasan penduduk setempat
- Memromosikan, menegakkan, dan memantau praktek berkelanjutan secara ajeg/ konsisten dan lakukan sesuatu terhadap sikap pekerja pada setiap peluang
- Mengembangkan asosiasi pengusaha untuk industri rantai produksi pasokan kepariwisataan dan serikat/asosiasi karyawan pariwisata, dan kaitkan dengan KADIN atau APINDO.

4.1.2 Strategi Kunci 2: Adaptasi dan Adopsi Indikator Pariwisata Berkelanjutan

Sebagai konsekuensi perubahan pola pikir, indikator kinerja yang lazim digunakan sebelumnya menjadi tidak memadai lagi. Serangkaian indikator kinerja baru perlu dikembangkan, merujuk pada berbagai sumber yang tersedia dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Indikator kinerja untuk pembangunan pariwisata perlu diidentifikasi untuk setiap tingkatan pemerintahan— nasional, provinsi, dan daerah. Suatu indikator yang penting dan sesuai pada tingkat nasional mungkin tidak dapat diterapkan pada tingkat lokal dan sebaliknya. Meskipun pengukurannya sukar/tidak mudah dan tidak sederhana, dampak terhadap kehidupan sosio-budaya dan lingkungan haruslah tercakup. Dalam hal indikator ekonomi, tingkat kebocoran mencerminkan dan merupakan indikator penting untuk kebijakan investasi pariwisata lebih lanjut. “Indikator Pariwisata Berkelanjutan” yang disiapkan oleh UNWTO seperti yang ringkasannya dapat dilihat dalam Bab 2 dan terdapat pada Lampiran 7 dapat dirujuk dan juga Indikator Pertumbuhan Ramah Lingkungan dari OECD. Kriteria Pariwisata Berkelanjutan Global sebagai panduan universal minimum juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan model indikator. Selain dari itu, juga penting untuk memasukkan indikator yang berkaitan dengan dimensi kebijakan baru: **pengurangan kemiskinan, pekerjaan layak dan pekerjaan ramah lingkungan, lapangan kerja bagi pemuda, pengarusutamaan jender, dan perlindungan anak.**

Faktor keberhasilan yang tepat yang menunjukkan apa yang membuat keberhasilan kinerja harus pula disepakati. Kinerja pariwisata merupakan hasil dari banyak pemangku kepentingan. Integritas semua pemangku kepentingan dalam bergerak menuju pencapaian visi pariwisata, sinergi yang optimal antara sektor publik dan swasta, antara industri kecil dan besar sepanjang rantai produksi, peraturan dan regulasi yang konsisten, semuanya merupakan bagian dari pemantauan dan pengukuran untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Karena itu, indikator yang baru haruslah dikomunikasikan dan disepakati oleh para pemangku kepentingan.

Langkah-langkah strategis:

- Membentuk komisi teknknasional untuk membahas sistem indikeator.
- Menemukanali dan memilih sejumlah indikator kinerja, termasuk indikator keberhasilan sosio-budaya, indikator terkait lingkungan (alam dan juga lingkungan buatan), selain dari indikator ekonomi.
- Mengembangkan indikator khusus untuk Pekerjaan yang Layak dan Pekerjaan Ramah lingkungan dalam pariwisata berkelanjutan, mengaitkan dengan berbagai lembaga internasional seperti UNEP dan OECD, yang menjalankan program yang serupa
- Indikator khusus juga perlu ditambahkan pada evaluasi keberhasilan destinasi setempat.¹⁵

¹⁵Kasus wisatawan mengunjungi Candi Borobudur di Jawa Tengah, tetapi tinggal di Yogyakarta, yang berbeda unit administrasinya.

- Meneliti situasi saat ini dan mengevaluasi keajegan/konsistensi berbagai aturan dan regulasi dan implementasi berbagai program terkait pariwisata di berbagai kementerian yang berbeda dan juga antara sektor publik dan swasta, dan peran sektor informal

4.1.3 Strategi Kunci 3: Pembiasaan Pola Pikir Baru dalam Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan dan Pariwisata Berkelanjutan

Mengubah pola pikir bukanlah suatu proses yang sederhana. Tidak hanya cukup satu pihak pemangku kepentingan yang berubah tanpa konvergensi dengan pihak lain. Semua pihak perlu membiasakan diri, pemerintah, kalangan industri, masyarakat sebagai tuan rumah dan juga sebagai wisatawan. Pemerintah harus mengubah pola pikirnya sambil merumuskan berbagai kebijakan dan menyusun rencana implementasinya. Pemerintah harus memimpin dan asosiasi industri merupakan yang pertama yang harus membiasakan diri. Pemerintah dan asosiasi harus membangun kriteria pariwisata berkelanjutan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, dan juga pengambilan keputusan.

Karena itu, pemerintah harus menciptakan sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif dan suatu pengelolaan antarsektor yang terpadu untuk pariwisata berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga kementerian lainnya perlu mendukung tujuan pemerintah dalam pariwisata dengan pola pikir yang sama. Pemerintah pusat dan daerah berperan sebagai pemimpin yang mengarahkan dan mengelola pembangunan pariwisata berkelanjutan, dengan menggunakan indikator multidimensi yang sudah disepakati. Pemerintah pada semua tingkatan harus menegakkan peraturan dan regulasi secara efektif dan berkeadilan (tidak diskriminatif). Pemerintah daerah harus lebih peka pada kebutuhan komunitas, yang tidak dapat diagregasikan pada tingkat nasional, sebagai imbalan atas permintaan untuk menghadapi wisatawan dengan *hospitality*.

Industri kepariwisataan harus menyinkronasikan sasaran ekonomi dengan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan, nilai-nilai sosio-budaya dalam menyusun visi, misi, kebijakan dan dalam proses pengambilan keputusannya. Karena itu, industri kepariwisataan perlu membiasakan diri mereka (atau melalui asosiasinya) pada praktekpraktek keberkelanjutan. Sektor informal memerlukan lebih banyak perhatian dan bantuan.¹⁶

Para pekerja harus diberi informasi melalui penataran (*upgrading*) atau pelatihan sikap agar menyadari akan semua hak dan tanggungjawabnya dalam lingkungan kerja yang berkelanjutan. Kelompok komunitas lain yang mungkin secara langsung atau tak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata juga harus didorong untuk memelihara SAPTA

¹⁶Kasus di Surakarta/Solo misalnya membuktikan bahwa sektor informal dapat diiklala dan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan yang memperhatikan komunitas telah berhasil berkomunikasi dengan sektor informal. Diperlukan proses yang lama tapi dapat dikerjakan.

PESONA¹⁷ yang telah ditetapkan sejak tahun 1980 – tidak hanya untuk kepentingan wisatawan, akan tetapi juga untuk kenyamanan dan kebanggaan/martabat mereka.

Sepanjang mengenai wisatawan, pada dasarnya kampanye perilaku ramah lingkungan dan komunitas di tingkat nasional diperlukan untuk memengaruhi aktivitas wisatawan. Pilihan atas berbagai produk, penggunaan air dan listrik serta yang lainnya. Kampanye semacam itu mungkin juga memengaruhi pilihan wisatawan atas destinasi. Beberapa panduan yang menyampaikan sejumlah pesan untuk wisatawan di tempat menginap, restoran dan tempat lainnya tentang budaya, aturan berpakaian, makanan dan minimum dan juga berbelanja sudah tersedia¹⁸ Permintaan wisatawan akan berbagai produk ramah lingkungan akan membantu industri beralih ke produk dan jasa ramah lingkungan.

Dimensi penting lainnya dalam pendidikan kepariwisataan adalah mendorong dan mendukung wisata domestik, tidak hanya untuk orang Indonesia melainkan juga untuk wisatawan internasional meluaskan pengalamannya dan manfaat ekonominya ke seluruh negeri. Wisatawan harus diperkenalkan pada etika wisatawan. Pentingnya pariwisata domestik sebagaimana disebutkan sebelumnya terletak pada dampak bangkitan ekonominya yang terdistribusi lebih luas dan mencapai lapisan bawah sektor informal. Hal ini juga memperbaiki pengetahuan tentang negara dan bangsa Indonesia serta memainkan peran dalam mempersatukan bangsa. Pariwisata domestik dapat mempunyai bermacam-macam manfaat: (1) manfaat ekonomi dari pengeluaran wisatawan, (2) manfaat lingkungan dalam hal meningkatkan kesadaran warga kota setempat untuk melestarikan pusaka alam dan budaya Indonesia, (3) menurunkan dampak musiman dan ketidak-seimbangan pembangunan pariwisata serta mendorong pertumbuhan daerah yang kurang berkembang, (4) meningkatkan saling pengertian antara budaya yang berbeda.

Langkah-langkah strategis

- Pembangunan melalui kampanye yang sudah ada dan memperkenalkan panduan dan/atau standar tentang perilaku wisatawan yang berkelanjutan. Untuk mendukung kampanye tentang perilaku konsumen tersebut, pemerintah dan industri kepariwisataan hendaknya juga memberi insentif dan keuntungan tempat pasar (*marketplace advantages*) untuk industri agar mendukung praktek pariwisata berkelanjutan. Mengembangkan dan menyebar-luaskan aturan bagi pelaku perjalanan/konsumen pariwisata berkelanjutan seluas-luasnya.
- Memperllihatkan dengan kasus bahwa menerapkan praktek pembangunan berkelanjutan tidak akan meningkatkan (atau malahan mungkin mengurangi) modal dan pengeluaran operasional, dengan demikian mengurangi ongkos kegiatan dan meningkatkan keuntungan. Memperllihatkan bahwa konsumen menghargai berkelanjutan untuk cukup untuk dijadikan faktor dalam proses pengambilan keputusannya. Tanpa permintaan, pengembang dan penyedia (*provider*) tampaknya akan kurang berminat memilih pemberlakuan strategi pariwisata berkelanjutan.

¹⁷SAPTA PESONA adalah slogan nasional, yang diperkenalkan pada tahun 1980-an mempromosikan kesadaran masyarakat, terdiri dari 8 (sapta) prinsip agar menarik sebagai destinasi pariwisata: keindahan, kebersihan, keteraturan, keselamatan dan keamanan, keramah-tamahan, tanda kenang-kenangan (suvenir).

¹⁸Disesuaikan dari Kode/Aturan untuk Pelaku perjalanan, Sahabat Pelestarian, UK, dalam Agenda 21 Sektorial tentang Pariwisata, Agenda untuk mengembangkan Kualitas Hidup yang berkelanjutan.

- Berbagai produk pariwisata yang lebih bersifat memberi pengalaman, yang menyampaikan informasi tentang manfaat seperti ekowisata, geowisata, pariwisata perdesaan, pariwisata pusaka harus dikembangkan dan aksesnya harus disediakan.
- Melakukan kampanye pariwisata nusantara yang memromosikan kunjungan ke bagian lain nusantara katimbang melakukan perjalanan ke luar negeri, membeli produk lokal di destinasi ketimbang barang dan jasa yang diimpor. Memromosikan pariwisata nusantara ke semua provinsi, terutama ke yang paling sedikit dikunjungi. Anak muda menjadi sasaran utama.
- Mencakup isu berkelanjutan dalam kurikulum akademik untuk semua program pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

*“There is no such knowledge of the nation as comes of traveling it, of seeing eye to eye its vast extent, its various and teeming wealth, and above all its purpose-filled people”
(Stephen Meritt, 1892).*

4.1.4 Strategi Kunci 4: Memperkenalkan dan Menegakkan Mekanisme Pengelolaan

Strategi pengelolaan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran semua strategi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan selebihnya. Pola pikir yang berubah dan penetapan indikator pariwisata berkelanjutan perlu ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan nyata yang efektif. Manajemen dilakukan melalui perencanaan strategik dan pemantauan yang teratur, yang akan menunjukkan apakah tindakan korektif diperlukan. Pemantauan memerlukan pengukuran berbagai indikator. Data yang tersedia biasanya sangat terbatas, membuat pemantauan dan evaluasi menjadi sukar. Selain data sosio-ekonomi, data aspek sosio-budaya dan indikator lingkungan juga perlu dikumpulkan secara reguler dan sistematis.

Mekanisme lain yang mungkin berperan sebagai bagian dalam strategi pengelolaan adalah skema insentif dan dis-insentif. Dalam sistem ini insentif diberikan kepada merekayang memperlihatkan penguatan signifikan dalam operasinya dan juga mereka yang telah menerapkan standar untuk berbagai praktek keberlanjutan. Di pihak lain, disinsentif dapat diterapkan kepada mereka yang tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Strategi pengelolaan ditujukan untuk menegakkan indikator keberlanjutan supaya efektif

Langkah-langkah strategis;

- Mengembangkan database untuk sistem pendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan melalui pengukuran indikator berkelanjutan.
- Mendorong industri menyiapkan data terkait dengan operasi usaha untuk pemantauan dan tujuan pengendalian. Informasi yang dapat diandalkan akan diperlukan agar penyusunan kebijakan bisa tepat/layak. Kebijakan yang didasarkan pada informasi salah yang tak dapat dipercaya akan mendatangkan kerugian finansial pada industri atau mungkin merusak destinasi.

- Melembagakan mekanisme pengelolaan strategis untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Komunitas lokal mungkin berperan dalam mekanisme tersebut. (kontrol sosial)
- Mengimplemtasikan sistem insentif dan dis-insentif.
- Memperkenalkan pengelolaan dan pengendalian pengunjung, membatasi lama kunjungan dan jumlah orang dalam satuan waktu tertentu, menyediakan penerangan singkat audio visual sebelum memasuki lokasi yang sensitif.

4.2 Strategi Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Dengan perubahan pola pikir, seperangkat indikator baru, perubahan perilaku pemangku kepentingan, pengelolaan strategis dan mekanisme pengendalian, serta dilengkapi dengan panduan yang dibuat khusus, (masih) perlu diterapkan seperangkat strategi lain untuk pelaksanaannya.

Strategi Implementasi 1: Mengarusutamakan dan Memromosikan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan melalui Pariwisata Berkelanjutan.

Mengarusutamakan dan memromosikan pekerjaan layak yang ramah lingkungan melalui pariwisata berkelanjutan tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan program lain yang terkait. Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang setelah Konferensi Rio+20 akan menyelenggarakan pertemuan nasional tentang berbagi tanggungjawab di antara kementerian untuk merealisasikan agenda “Masa Depan yang Kami Inginkan” hasil konperensi tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga mengusulkan konsep “Ekonomi Biru” yang dapat diterapkan pada pariwisata bahari Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan mitra dekat dalam pengembangan sumberdaya insani untuk pariwisata berkelanjutan, sementara Kementerian Dalam Negeri dinilai sebagai mitra yang paling tepat untuk implementasi di tingkat lokal/daerah.

v. Dengan mengarusutamakan, memromosikan, dan mendukung Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan dalam pembangunan pariwisata ke dalam kebijakan kepariwisataan nasional dan juga dengan industri, sasaran pekerjaan produktif dalam kebebasan, kesetaraan, keamanan dan martabat manusia serta mengurangi dampak lingkungan negatif dalam sektor formal dan juga informal akan dapat dicapai.

Langkah-langkah strategis:

- Mengarusutamakan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan dalam kebijakan nasional ketenagakerjaan, sosial dan pariwisata dan mempromosikan keempat pilar pekerjaan yang

layak misalnya penciptaan lapangan kerja, hak atas kerja, perlindungan dan dialog sosial dalam industri kepariwisataan.

- Mengarusutamakan dan mempromosikan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan melalui Pariwisata Berkelanjutan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan asosiasi industri.
- Mendidik dan memberi informasi pada industri kepariwisataan yang ada tentang kebutuhan dan manfaat untuk memperbaiki bisnis mereka melalui kualitas “pekerjaan pariwisata yang layak dan ramah lingkungan” dan berbagai peluang untuk kelompok rentan.
- Mempromosikan kapasitas pemangku kepentingan pariwisata untuk ikut serta dalam dialog tentang Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan melalui peningkatan akses ke sumber data dan informasi yang dapat dipercaya tentang Pekerjaan Ramah Lingkungan dan pelatihan, termasuk dampak lingkungan berbagai kebijakan terkait lingkungan dan berbagai praktek baik terkait dengan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan, dan melakukan program percontohan yang menanggapi berbagai kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam sektor pariwisata.
- Mendorong lebih lanjut pemerintah daerah untuk mengembangkan informasi tentang sektor informal. Sektor informal yang menggunakan ruang publik perlu diakomodasi di tempat kerja yang tepat dengan biaya terjangkau, khususnya di destinasi utama.
- Mengembangkan pedoman, kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara penerapan pedoman perlu melalui Kementerian Dalam Negeri supaya sesuai dengan sistem administrasi.

Strategi Implementasi 2: Memprioritaskan Penurunan Kemiskinan dalam Pariwisata

Pengurangan kemiskinan melalui pariwisata berkelanjutan melengkapi Arahkan Presiden, RPJPN dan strategi untuk mencapai MDGs. Strategi pengurangan kemiskinan dalam pariwisata mencakup (1) pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan oleh pariwisata, (2) mempromosikan kepemilikan lokal dan pemanfaatan sumberdaya lokal, (3) mendukung lapangan kerja lokal formal dan lapangan kerja perdesaan (pertanian dan non pertanian terkait dengan pariwisata: ekowisata agrowisata), (4) memperkuat kolaborasi dan komunikasi, (5) mengarahkan defisit pekerjaan masa kini. Sasarannya adalah pengurangan kemiskinan komunitas lokal, perlindungan terhadap sumberdaya alam dan budaya dan cara-cara hidup .^{xxxii}

Langkah-langkah strategis:

- Memanfaatkan program PNPM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengidentifikasi daerah yang kurang beruntung yang mempunyai potensi pariwisata dan mendukung pembangunannya dengan mempromosikan pariwisata sebagai pilihan aktivitas non-pertanian bagi komunitas dan menyediakan fasilitator atau pendamping pemberdayaan
- Mempromosikan kepemilikan lokal dengan memfasilitasi akses terhadap keuangan melalui kredit dan fasilitas pinjaman bagi warga miskin, dengan maksud untuk keuntungan ekonomi yang berkeadilan dalam sumberdaya yang dikelola komunitas dengan perhatian khusus untuk menyediakan akses untuk para muda dan perempuan.

- Mendukung lapangan kerja perdesaan formal/lokal melalui pengembangan program penjangkauan pekerjaan yang lebih luas yang membantu mendidik dan memberi informasi penduduk lokal/perdesaan tentang prospek pekerjaan dalam industri kepariwisataan dan sektor terkait, dan juga tentang konsekuensi dan resiko informalitas.
- Memperkuat kolaborasi dan komunikasi antara industri kepariwisataan dan komunitas lokal/perdesaan untuk mengaitkan komunitas dengan jejaring distribusi dalam industri kepariwisataan, membantu komunitas dalam membangun kapasitasnya secara berkesinambungan untuk menyiapkan pelayanan pariwisata/*hospitality* dan memfasilitasi penyediaan pangan, barang dan jasa atau infrastruktur oleh komunitas untuk membantu mereka memahami lebih baik kebutuhan industri.
- Bekerja dengan organisasi pembangunan dan mitra industri dalam penciptaan lapangan kerja yang pro penduduk miskin untuk meningkatkan:
 - (a) **Manfaat Ekonomi:** 1. Meningkatkan lapangan kerja perdesaan/lokal dan upah, 2. Meningkatkan peluang usaha lokal/perdesaan (baik berbasis perorangan maupun kelompok), 3. Menciptakan sumber pendapatan kolektif – imbal jasa dan bagi hasil
 - (b) **Memperkuat dampak mata pencaharian non finansial:** 1. Pembangunan dan pelatihan kapasitas yang tanggap gender, 2. Mitigasi dampak lingkungan, 3. Mengarahkan persaingan pemanfaatan sumberdaya alam, 4. Memperbaiki dampak sosial dan budaya dan 5. Meningkatkan akses perdesaan/lokal terhadap prasarana dan pelayanan untuk meningkatkan kondisi mata pencaharian; dan
 - (c) **Memperkuat partisipasi dan kemitraan**¹⁹: 1. Membangun kemitraan pro-penduduk miskin dengan sektor swasta dan 2. Meningkatkan partisipasi penduduk miskin dalam pengambilan keputusan

Strategi Implementasi 3: Memperkuat Peluang Lapangan Kerja dan Berwisata bagi Pemuda

Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan mitra ideal untuk membantu pariwisata pemuda dan juga lapangan kerja pemuda dalam sektor kepariwisataan, karena kementerian ini juga mempunyai divisi khusus untuk pemberdayaan pemuda.

Mendukung potensi pemuda sebagai pelaku perjalanan dan sebagai sumberdaya manusia sektor pariwisata dan juga sebagai partisipan aktif dalam mempromosikan dan mendukung praktek-praktek berkelanjutan. Strategi dimaksudkan untuk pemuda yang berpendidikan dan berpartisipasi, yang sadar akan keberlanjutan dalam aktivitasnya sebagai pelaku perjalanan dan juga mempunyai kapasitas bergabung dalam sektor ini sebagai angkatan kerja terlatih dengan kemampuan dan sikap melaksanakan konsep berkelanjutan dalam pengelolaan dan pengoperasian serta membangun sistem kepariwisataan masa depan.

¹⁹Desa Wisata Ekologis Bali merupakan suatu panduan untuk pengelolaan bersama berbagai desa potensial di Bali untuk meningkatkan pengembangan lapangan kerja perdesaan/lokal melalui usaha mikro, melestarikan nilai-nilai budaya dan sumberdaya, penyelenggaraan ramah lingkungan dan ditujukan pada pemenuhan standar lokal serta sertifikasi untuk memperbaiki mata pencaharian penduduk.

Langkah-langkah strategis:

- Memfasilitasi lapangan kerja pemuda setelah melakukan survai pasar tenaga kerja dalam lapangan kerja pemuda dalam mata rantai pasokan kepariwisataan (misalnya mempromosikan konsultasi pasar tenaga kerja liburan untuk menjembatani industri kepariwisataan dengan mahasiswa/anak muda yang berminat bekerja)
- Mengarahkan berbagai kebijakan pada lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan yang layak/tepat yang diperlukan sebagai program reguler, termasuk program pendidikan berkesinambungan yang membuka kembali peluang bagi mereka yang putus sekolah yang disinergikan dengan kebijakan magang untuk peserta pelatihan pariwisata dan penempatan kerja.
- Mengembangkan kebijakan dalam pelatihan terpadu dan komprehensif tentang kewirausahaan (dengan menggunakan ILO-SIYB (*Start and Improve Your Business*)) untuk pengusaha muda yang potensial dan pengusaha dalam industri rantai produksi, latihan usaha, yang didukung berbagai kebijakan dalam regulasi membuka usaha setempat dan akses terhadap keuangan bagi pengusaha muda. Menawarkan insentif khusus kepada masyarakat muda usia untuk menjadi wirausaha pariwisata berkelanjutan.
- Memfasilitasi perjalanan pemuda dengan menyediakan wisma pemuda yang standar di setiap provinsi, tarif mahasiswa untuk transportasi umum antar daerah, dan informasi ramah pengguna (*user friendly*) tentang berbagai destinasi bernuansa pendidikan termasuk pertukaran pemuda antarprovinsi.

Strategi Implementasi 4: Mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemberantasan Permasalahan Gender dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan kesetaraan gender dan perlindungan anak di semua penjurus sektor kepariwisataan dan menempatkan lelaki dan perempuan dalam kedudukan setara dengan memudahkan akses untuk memperoleh keahlian dan pengetahuan yang lebih baik. Tujuannya adalah agar perempuan dapat memperoleh upah yang lebih baik, setara dengan lelaki dalam kedudukan yang sama dengan keahlian yang sama dan kondisi kerja yang lebih baik. Disamping itu, yang menjadi sasaran adalah perlindungan terhadap anak dari perempuan yang bekerja dan penghapusan secara tuntas segala macam bentuk pekerja anak-anak.

Langkah-langkah strategis:

- Menjabarkan keterkaitan antara MDGs, khususnya MDG 1b dan 3a,²⁰, termasuk pencapaian MDGs yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia, yang dapat menyediakan kerangka tambahan tentang bagaimana kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dapat dikembangkan.
- Mempromosikan dan melakukan analisis gender dalam industri kepariwisataan Indonesia, khususnya tentang bagaimana lelaki dan perempuan secara aktif ikut serta sebagai

²⁰MDG 1 b dan 3a mengamanatkan penciptaan pekerjaan produktif dan layak, terutama untuk perempuan dan pemuda, dan penghapusan ketidak-adilan gender dalam pendidikan.

sumberdaya insani dan sebagai mitra dalam pekerjaan dan keluarga. Singkatnya, dalam berbagai isu seperti akses, peluang dan nilai-nilai. Lebih jauh menjabarkan kaitannya dengan RPJMN 2010-2014.

- Menjabarkan temuan awal tentang Perempuan dan Pariwisata (UNWOMEN, UNWTO) 2011 yang akan digunakan sebagai rujukan tentang bagaimana mengembangkan kebijakan berkelanjutan untuk Indonesia tentang pariwisata berkelanjutan berkenaan dengan gender, dan menggunakan fakta bahwa delapan pokok konvensi ILO telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai rujukan untuk memperkuat sasaran pariwisata berkelanjutan, khususnya yang terkait dengan pekerjaan yang layak.
- Menegakkan hukum dalam pengarusutamaan gender dalam industri kepariwisataan dan rantai pasokannya misalnya melalui pengembangan sarana kesetaraan gender, menggunakan Strategi Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dan audit partisipatif gender (*participatory gender audit/PGA*) berdasarkan pada perangkat PGA-ILO untuk industri kepariwisataan dan sarana penghapusan pekerja anak dan Sistem Pemantauan Tenaga Kerja Anak untuk digunakan dalam berbagai Industri Kepariwisata. Menyelenggarakan pelatihan untuk semua industri kepariwisataan mengenai kesadaran penghapusan buruh anak-anak dan kerja paksa, sex anak-anak dalam pariwisata, dan perdagangan anak-anak.
- Mengembangkan kapasitas dan skema pelatihan keterampilan untuk pekerja perempuan dalam pariwisata, sambil mendorong anak-anak mereka melanjutkan sekolahnya. Menunjang hak keibuan di tempat kerja dalam industri dan juga program kesehatan anak.

Strategi Implementasi 5: Menerapkan Sistem Aturan/Standar Sukarela untuk Pariwisata Berkelanjutan

Strategi ini mempunyai tiga tujuan dan menyarankan penerapan Kode Etik, pengembangan dan penerapan standar pengembangan program sertifikasi. Sasarannya adalah terciptanya 'jalur' (arah) yang ajeg/konsisten dalam pembangunan pariwisata dengan kemudahan interaksi yang baik di antara semua pemangku kepentingan yang mengikuti standar.

Langkah-langkah strategis

- Mengembangkan panduan/standar berkelanjutan yang komprehensif, dan melembaga untuk berbagai produk, jasa, dan proses untuk pariwisata di Indonesia. Standar semacam itu harus berbentuk panduan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk sertifikasi dan pelabelan, dan dengan demikian penting untuk, dilakukan penekanan pada standar tertentu bagi isu lingkungan dan sosio-budaya, dan juga pemantauan dan evaluasi berkesinambungan untuk menjamin pemenuhannya dalam jangka panjang.
- Pengejawantahan berbagai standar tersebut dalam industri dan materi pendidikan konsumen yang mudah dibaca dan disebar-luaskan bersama dengan Kode Etik kepada pemerintah daerah dan pengusaha pariwisata. Materi pendidikan yang praktis perlu tersedia dan mudah dibaca oleh semua pemangku kepentingan.
- Mengembangkan sistem sertifikasi untuk usaha kepariwisataan berdasarkan standar dan kode etik kepariwisataan serta melakukan pemantauan dan evaluasi yang

berkesinambungan untuk menjamin pemenuhan kode etik dan standar tersebut dalam jangka panjang.

- Mendukung lembaga sentral yang didukung dengan sumberdaya dari pemerintah, yang menyediakan sertifikasi, yang menawarkan dukungan kepada penyedia pariwisata dalam mencapai tujuan sertifikasi. Terlalu banyaknya lembaga sertifikasi yang berbeda-beda menimbulkan kebingungan dan dapat menurunkan nilai masing-masing. Pilihan lain adalah menetapkan standar perusahaan sertifikasi untuk mendukung fungsi pemerintah pusat untuk mengelola pemenuhan syarat para penyedia *eco-label*— tidak perlu pemerintah yang menyediakan sertifikasi, tetapi pemerintah dapat menjamin penyedia sertifikasi/*eco-label* yang independen yang beroperasi di Indonesia
- Menciptakan label untuk sertifikasi pariwisata berkelanjutan supaya memudahkan konsumen menemukan produk dan jasa yang sesuai, dan mempromosikan label dengan menggunakan media populer dan dengan informasi langsung kepada wisatawan melalui pusat informasi pariwisata, penyedia jasa pariwisata, pemandu wisata, dan lain sebagainya.

Strategi Implementasi 6: Menetapkan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Kepariwisata sebagai Prioritas dalam Agenda Pendidikan dan Penelitian Nasional

Pariwisata berkelanjutan dan pariwisata sebagai industri berbasis ilmu pengetahuan memerlukan dukungan sumberdaya insani yang tepat dalam sektor publik maupun kalangan swasta. Pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk semua pemangku kepentingan pada semua tingkatan sangatlah diperlukan. Penelitian dengan peta jalan (*roadmap*) yang jelas sangat penting dilakukan untuk mendukung berbagai tingkat keputusan. Kecenderungan bertumbuhnya penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang didasarkan atas tumbuhnya permintaan akibat pertumbuhan penduduk usia sekolah hendaknya tidak menunjuk ketidak-sesuaian (*mis-match*) antara keluaran dengan sumberdaya insani yang diperlukan oleh sektor pariwisata.

Langkah-langkah strategis:

- Mengembangkan komisi lintas sektoral (antar kementerian, berbagai unit usaha dan asosiasi lain yang gayut) untuk mendiskusikan beberapa butir di bawah ini.
- Memantau dan mengevaluasi pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang ada dan juga penelitian dalam bidang kepariwisataan dan *hospitality*.
- Memprioritaskan pendidikan kepariwisataan dalam program pendidikan nasional dan mengembangkan satu sistem yang terpadu untuk pendidikan kepariwisataan dan *hospitality*, pelatihan dan penelitian, menampung semua hal yang dilaksanakan pada saat sekarang dan melakukan *benchmarking*.
- Mempersiapkan peta jalan (*roadmap*) penelitian yang bijaksana serta mengintegrasikannya ke dalam program penelitian perguruan tinggi.
- Mengembangkan standar kompetensi hijau untuk setiap sub-sektor pariwisata dan memadukannya ke dalam kurikulum pelatihan dan pendidikan.
- Menyediakan beasiswa bagi tenaga pengajar dan instruktur untuk pendidikan lanjutan dalam berbagai bidang terkait pariwisata dan beasiswa bagi pemuda untuk studi

pariwisata, terutama bagi mereka yang berasal dari berbagai destinasi utama, dan juga mendorong kajian di berbagai bidang yang diperlukan.

- Di destinasi harus tersedia pelayanan pendidikan dasar, dengan kurikulum bermuatan lokal terkait pariwisata. Membuka peluang untuk program pelatihan bagi pelatih (*training for trainers*) dalam berbagai bidang terkait pariwisata. Memfasilitasi hubungan universitas dan lembaga pendidikan lainnya dengan pemerintah daerah supaya terdapat kerjasama dalam pelatihan dan menjadikan pejabat pemerintah daerah sebagai mitra (*counterpart*) untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman satu sama lain.
- Menjajagi pedoman untuk mengukur diri dan sertifikasi berbagai kursus pariwisata dan hospitality.
- Memperkuat pendidikan kewira-usahaan dalam program pendidikan kepariwisataan untuk membantu berbagai usaha baru.
- Memromosikan jejaring penelitian dan sistem pendidikan pariwisata berkelanjutan ASEAN yang luas dengan berbagai program pariwisata antardaerah dan beasiswa.

Strategi Implementasi 7: Mengidentifikasi Mitra Provinsi dan Lokal yang Berpotensi dan Memiliki Komitmen

Tidaklah mungkin bagi Indonesia membangun pariwisata di semua unit administrasi pada waktu bersamaan. Indonesia terdiri dari 33 provinsi, dan 497 kabupaten serta kota dan penekanan pada pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dibuat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, kesiapan dan prioritas pembangunannya. Strategi ini dapat pula dikaitkan dengan tujuan penghapusan kemiskinan dan juga Kawasan Strategis Nasional (KSN dalam Rencana Tata Ruang Nasional) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana diidentifikasi dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional yang keduanya telah menjadi dokumen hukum. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Pembangunan Pariwisata Nasional telah mengindikasikan 50 destinasi pariwisata nasional (DPN), yang di dalamnya terdapat 212 zona, dengan 88 dirancang sebagai KSPN. Ke-88 KSPN itu berbeda-beda dalam tahap perkembangan, akses ke pasar dan jenis daya tariknya.

Langkah-langkah strategis:

- Menanggapi pemerintah daerah yang mempunyai komitmen dan bekerjasama dalam mengembangkan destinasi baru untuk pasar yang akan datang dan juga memperbaiki kualitas destinasi yang sudah ada. Keduanya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan kriteria berkelanjutan dalam mendukung tujuan untuk mewujudkan visi.
- Destinasi baru perlu menempatkan kebutuhan komunitas akan kesejahteraan sebagai tujuan utama, sementara di destinasi yang sudah ada, kinerja pariwisata harus dipantau dari perspektif apakah memberi kontribusi kepada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas
- Memperluas program DMO Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk proyek percontohan kerjasama pusat-provinsi dan daerah yang efektif dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- Menentukan prioritas dalam mengembangkan atau mendukung pembangunan KSPN dan juga zona strategis pendukung pada tingkat provinsi perlu ditetapkan. Prioritas mungkin

didasarkan kepada kepentingan nasional, tetapi meskipun demikian dukungan dan komitmen pemerintah provinsi/daerah tetap penting. Prakarsa lokal juga perlu didukung.

Strategi Implementasi 8: Melakukan Pemasaran yang Selektif dan Kreatif

Pemasaran Indonesia telah menghasilkan pertumbuhan yang mantap baik dari pariwisata nusantara maupun internasional. Sasaran Indonesia adalah pasar geografis yang luas dan juga pasar *psychographic*. Pemasaran destinasi yang kompetitif dan efektif memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar, yang perlu diatur secara bijaksana dan efektif. Dari perspektif jangka panjang, investasi yang cukup dalam penelitian pasar merupakan keharusan untuk dapat memilih strategi pemasaran yang kreatif dengan biaya yang efektif, dan juga untuk mengidentifikasi sumber pasar baru yang potensial.

Langkah-langkah strategis:

- Memberi perhatian lebih banyak pada pasar “niche”, tingkat atas yang tidak sensitif terhadap harga dan biaya untuk memperoleh produk yang bermutu. Segmen yang lebih bersifat edukatif ini juga memerlukan pengalaman yang berharga, lebih dari sekedar rekreasi massal.
- Memanfaatkan pasar internasional Indonesia yang utama, yaitu Asia dan Pasifik dengan kemungkinan besar untuk kunjungan yang berulang dan dalam waktu yang sama menciptakan produk tematik sedemikian rupa untuk memperkuat kunjungan ulang dan waktu tinggal yang lebih lama.
- Mengembangkan berbagai produk pariwisata berkelanjutan untuk pasar tradisional jarak jauh, dengan penekanan lebih pada kualitas produk dan proses berkelanjutan.
- Menata dan mengelola kunjungan dengan upaya khusus untuk mengurangi fluktuasi (seasonalitas) pariwisata dan meningkatkan produktivitas.

Strategi Implementasi 9: Menerapkan Pendekatan Berkelanjutan dalam Perencanaan Kepariwisata

Pendekatan berkelanjutan menyarankan agar komunitas dan anak negeri menjadi subjek kunci kepariwisataan, mentransformasikan indikator keberhasilan agar mencakup juga tolok ukur kualitatif. Pembangunan semacam itu dimaksudkan untuk kepuasan komunitas tuan rumah yang berinteraksi dengan pembangunan pariwisata dan pada saat yang sama juga menawarkan kepuasan kepada wisatawan. Melakukan kajian atas berbagai rencana pengembangan pariwisata daerah berkenaan dengan pendekatan berkelanjutan dan melakukan tindakan korektif adalah hal yang penting dilakukan, khususnya untuk daerah yang berada di lokasi strategis, seperti misalnya provinsi yang berbatasan dengan negara ASEAN yang mempunyai potensi pariwisata dalam berbagai aspek yang mempunyai manfaat kompetitif (*competitive advantage*) yang lebih kuat dalam konteks ASEAN. Indonesia yang mempunyai posisi yang strategis dan kuat di ASEAN seharusnya mencari manfaat maksimum dari wilayah ini. Perlu diperkuat kerjasama dengan Singapura yang telah menjadi salah satu ibukota pariwisata yang ter'horat' (*distinguished*) di Asia.

Langkah-langkah strategis:

- Menempatkan perencanaan dan pembangunan pariwisata di bawah satu unit koordinasi di tingkat administrasi regional dan lokal. Mempraktikkan tim satuan tugas dalam pariwisata ramah lingkungan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk mengembangkan “rencana aksi pariwisata ramah lingkungan” untuk masing masing daerah.
- Meninjau kembali berbagai rencana pembangunan pariwisata daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang tersedia untuk ditransformasikan ke rencana yang berkelanjutan.
- Mengembangkan berbagai destinasi secara tepat dan konsisten mengikuti rencana pembangunan pariwisata berkelanjutan dan menghindari pertumbuhan tak terkendali yang didorong oleh alasan ekonomi.
- Mengawal liberalisasi ekonomi dengan pengendalian yang ketat dan mekanisme pemantauan dan sistem peringatan dini untuk mengembalikan arah.
- Mendasarkan prioritas pada potensi destinasi dalam berkontribusi kepada tujuan pembangunan nasional: penghapusan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk Indonesia pada umumnya dan khususnya di daerah. Menggabungkan pembangunan pariwisata dengan berbagai sasaran dengan kondisi destinasi setempat.
- Mendorong investor setempat dan nasional, memberdayakan investor mini dan mikro. Membantu perkembangan daya saing yang sehat dikombinasikan dengan kemitraan yang membangun.
- Tinjau kembali (*revisit*) skema/ rencana BIMP-EAGA dan IMT-GT dan jagati lebih jauh peluang yang berkenaan dengan pariwisata berkelanjutan. .
- Secara internal melakukan konsolidasi dan pengintegrasian secara efektif sebagai bagian dari destinasi ASEAN dan mempromosikan kerjasama usaha dalam pariwisata berkelanjutan dalam wilayah ASEAN. Gunakan pariwisata berkelanjutan sebagai cara untuk mempromosikan dan memperkuat budaya ASEAN, kerjasama dan kohesi.

Strategi Implementasi 10: Membentuk Badan Koordinasi Tunggal dengan Kewenangan yang Cukup untuk Menyinergikan Program Dukungan Antarsektor dalam Pembangunan Kepariwisata

Isu utama yang dihadapi pada berbagai tingkat pemerintahan/‘*governance*’ yang berbeda adalah kurangnya kewenangan “kantor pariwisata” untuk berkoordinasi dengan sektor terkait dan yang menunjang. Dasar hukum sudah tersedia melalui Instruksi Presiden No 16-2005, implementasinya memerlukan badan koordinasi yang kuat yang menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam program yang lebih jelas dan terdefinisi. Badan koordinasi semacam itu juga diperlukan dalam administrasi di tingkat provinsi dan daerah.

Langkah-langkah strategis:

- Gunakan Instruksi Presiden yang dimaksud dengan cara sedemikian rupa untuk membantu perkembangan bantuan yang efektif dari sektor publik, dan sebagai dasar

peralihan ke pengembangan pariwisata berkelanjutan serta pelaksanaannya. Berbagai unsur baru yang belum secara khusus disebutkan mungkindapat ditambahkan.

- Kantor Wakil Presiden diusulkan sebagai pusat koordinasi untuk memantau pelaksanaan oleh semua pemangku kepentingan.
- Menambahkan ke dalam instruksi yang sudah disetujui: aksi yang berorientasi pada rencana kerja, sesuaikan dengan berbagai dimensi kebijakan, rencana dan strategi baru
- Di tingkat provinsi, kabupaten dan kota tempatkan perencanaan pariwisata berkelanjutan dalam unit yang memiliki fungsi koordinasi

Pesan Kunci Bab 4

Kerangka Strategis pembangunan pariwisata berkelanjutan terdiri atas empat strategi kunci:

- 1: Mengubah Pola Pikir Semua Pemangku Kepentingan
- 2: Mengembangkan, Menyesuaikan dan Memberlakukan Indikator Pariwisata Berkelanjutan.
- 3: Membiasakan Diri dengan Pola Pikir Baru dalam Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan dan Pariwisata Berkelanjutan.
- 4: Memperkenalkan Mekanisme Pengendalian dan Penegakannya.

Sepuluh strategi implementasi yang terkait dengan dimensi kebijakan baru adalah sebagai berikut:

- 1: Mengarusutamakan dan Memromosikan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan melalui Pariwisata Berkelanjutan.
- 2: Memprioritaskan Pengurangan Kemiskinan dalam Pariwisata
- 3: Memperkuat Peluang untuk Lapangan Kerja bagi Pemuda dalam Sektor Pariwisata dan Pariwisata bagi Pemuda.
- 4: Menunjang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memerangi Permasalahan Gender dan Perlindungan Anak
- 5: Mengimplementasikan Sistem Aturan Sukarela/Standar Pariwisata Berkelanjutan
- 6: Menempatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Kepariwisata, sebagai Prioritas dalam Agenda Pendidikan dan Penelitian Nasional.
- 7: Mengidentifikasi Mitra Setempat yang Potensial dan Berkomitmen
- 8: Melakukan Pemasaran yang Selektif dan Kreatif.
- 9: Menerapkan Pendekatan Berkelanjutan dan Perencanaan Pariwisata.
- 10: Membentuk Badan Koordinasi Tunggal untuk Pembangunan Pariwisata.

BAB 5

AGENDA IMPLEMENTASI

Ikhtisar Bab

Pariwisata berkelanjutan bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu yang singkat maupun dicapai secara parsial. Semua pemangku kepentingan perlu bergerak bersama secara konsisten dalam program **Jangka Panjang** bergerak dalam **Kesamaan** visi dan tujuan. Dalam hal ini agenda terbagi dalam empat bagian, yang secara konsisten mengikuti lingkup pembangunan pariwisata seperti yang tertuang dalam Undang-undang Pariwisata No 10-2009: pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pasar dan pengembangan kelembagaan.

5.1 Agenda 1: Menuju Destinasi Berkelanjutan

Komunitas merupakan inti dalam destinasi manapun. Pariwisata dapat diposisikan sebagai alat/kendaraan, bukan suatu tujuan – alat/kendaraan untuk mencapai kemakmuran komunitas. Setiap destinasi mempunyai karakternya sendiri, secara fisik maupun yang lebih penting adalah karakter sosio budayanya. Meskipun secara administrasi terdapat regulasi yang umum, selalu ada sistem tradisional yang mungkin memengaruhi cara bagaimana sistem kelembagaan berjalan.

(1) Pembangunan Komunitas

Pemetaan Komunitas

Sebagai suatu dasar untuk tindakan selanjutnya, pemetaan komunitas perlu dilakukan. Tujuannya untuk mencoba memahami bekerjanya dinamika sosio-ekonomi dan juga sosio-budaya dan mendapat pengetahuan dan wawasan mengenai potensi komunitas dan juga keinginannya. Pemetaan komunitas hendaknya menggali dari dalam komunitas, agar dapat dianalisis apa yang perlu ditanamkan ke komunitas.

Pembangunan Komunitas yang Bertumpu kepada Pariwisata

Diusulkan agar setiap kegiatan kepariwisataan terpusat kepada pembangunan komunitas. Pariwisata hanya akan bermanfaat bagi mereka yang mempunyai kapasitas untuk terlibat dalam proses produksi dan penyampaian/pengantaran produk pariwisata di area destinasi.

Pembangunan komunitas harus fokus pada pengembangan potensi komunitas dan bukan mendesak pada mereka apa yang dipercayai benar oleh pusat/secara umum. Ini berarti perubahan pola pikir dari semula: apa yang mereka seharusnya kerjakan menjadi: apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kapasitas mereka.

Tujuannya adalah perbaikan kesejahteraan komunitas yang dapat dilakukan melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan rekreasi dan kebutuhan sosio-budaya yang diperlukan oleh komunitas dan juga peluang ekonomi yang tersedia bagi komunitas. Pariwisata diharapkan menjadi sumber kemakmuran bagi komunitas melalui berbagai kontribusi langsung maupun tidak langsung yang meningkatkan pendapatan mereka dan peluang untuk kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan Kepariwisata yang Bertumpu pada Komunitas

Pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada komunitas dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan dukungan kepada komunitas dalam membangun bisnis terkait pariwisata melalui pelatihan dan pemberdayaan serta perbaikan akses kepada dukungan finansial dan proses produksi. Ketika suatu destinasi baru direncanakan untuk pariwisata, adalah komunitas yang perlu diberitahu dan dilibatkan, dan bersama dengan komunitas harus diidentifikasi lingkaran celah/peluang yang mungkin ada yang dapat membuat komunitas beroleh manfaat dari pembangunan. Hal ini penting untuk dapat “melawan” banyak kejadian yang memarginalkan komunitas atau mata pencahariannya hilang demi pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata berbasis komunitas berarti membangun pariwisata tetapi fokus pada komunitas.

Memacu Pemberdayaan Antar Kelompok

Pemberdayaan ekonomi bukan berarti memerintahkan masyarakat untuk melakukan apa dan menjadi apa, tetapi menggali lebih dalam apa yang menjadi aspirasi komunitas. Tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar. Kebanyakan program pemberdayaan bersifat parsial dan instrumental, dan tidak sepenuhnya efektif.

Pemberdayaan perlu distrukturkan: pada tingkat individu, tingkat kelompok dan tingkat antar kelompok. Tujuannya membantu kemampuan individu sebagai pondasi, dan juga sebuah kelompok yang bersatu pada memerlukan serangkaian kompetensi dan pemberdayaan antar kelompok akan menghubungkan satu kelompok dengan lainnya. Pemberdayaan antar kelompok ini sangat penting dalam pariwisata khususnya, mengingat bahwa produknya terdiri atas berbagai elemen yang berbeda.

Strateginya bertujuan memberi masyarakat akses kepada proses produksi dalam matrantai usaha formal secara menyeluruh dan memacu pembagian kerja. Pemberdayaan individu, kelompok, dan antar kelompok perlu diselenggarakan secara terpadu.

(2) Program Pembangunan Sumberdaya Alam dan Budaya

Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Budaya secara Berkelanjutan

Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan sumberdaya lingkungan dan budaya, tersebar di seluruh wilayah geografisnya. Hal ini membuat akses kepada sumberdaya tidak selalu mudah. Kekurangan infrastruktur merupakan isu umum dalam pemanfaatan sumberdaya pariwisata secara efektif.

Sementara sebagian sumberdaya masih terisolasi dan tidak dapat dicapai, lainnya yang dekat dengan daerah padat penduduk telah kelebihan beban atau dimanfaatkan secara berlebihan, yang menyebabkan beragam tingkat kerusakan. Agar pariwisata dapat bertahan dalam keberhasilan, sumberdaya alam dan budaya harus dalam kondisi bagus, dan terpelihara baik.

Lokasi dengan pemandangan indah untuk ditatap, tanah pertanian dan aktivitasnya, atau pekerjaan komunitas lainnya yang terkait dengan sumberdaya lingkungan, cara hidup tradisional, semuanya merupakan daya tarik pariwisata yang potensial. Akan tetapi, daya tarik saja tidaklah cukup, yang paling penting adalah sumberdaya manusia yang mampu menggunakan sumberdaya lingkungan dan budaya secara bertanggung jawab.

Pemantauan Keberlanjutan Destinasi

Suatu destinasi dengan produk pariwisata yang melekat padanya memperlihatkan proses siklus, dimulai dengan tahap eksplorasi, pembangunan awal, dan percepatan dan mungkin akhirnya mengalami penurunan setelah daya dukungnya terlampaui atau menjadi tidak ekonomis atau tidak dapat bersaing (Lihat lampiran 10)

Karena itu, pemantauan merupakan agenda penting untuk mendapat peringatan awal, menghindarkan terjadinya degradasi atau mendorong terjadinya masalah ekonomi yang tidak berkelanjutan. Tanpa mengelola daya dukung, kunjungan yang berlebih akan memberikan dampak merugikan baik bagi destinasi maupun pengalaman wisatawan.

Kapasitas infrastruktur lebih mudah diidentifikasi, seperti diindikasikan oleh kepadatan lalu lintas, tingkat penghunian akomodasi, panjang antrian untuk memperoleh tiket, kerusakan jalan, dan sebagainya. Sementara wisatawan umum mungkin memperlihatkan toleransinya, segmen wisatawan tertentu mungkin memilih untuk tidak mengunjungi tempat tersebut. Daya dukung destinasi juga harus dilihat dari pandangan tuan rumah. Kunjungan yang berlebih mungkin tidak hanya menimbulkan kekecewaan dilihat dari sudut pandang wisatawan, tetapi juga

dari sudut pandang komunitas tuan rumah yang terganggu karena kenaikan biaya hidup, persaingan penggunaan air, sampah yang berlebihan, polusi suara, estetika, dan lain-lain.

Keberlanjutan destinasi memerlukan kerjasama di antara para pemangku kepentingan agar supaya praktek yang bertanggung jawab dapat berjalan dan indikator kunci yang strategis dapat terpantau, sebagai dasar pengambilan keputusan, oleh pemerintah daerah dan juga oleh masing-masing individu.

(3) Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur, dimana dan kapan diperlukan untuk memungkinkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Infrastruktur mencakup jaringan transportasi, kebutuhan air dan listrik dan fasilitas untuk kesehatan, pendidikan, keselamatan dan keamanan. Pembangunan infrastruktur mencakup pula pelabuhan laut, bandar udara, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, juga tempat sampah dan barang-barang kecil lainnya yang menunjang amenities destinasi. Untuk infrastruktur yang terkait dengan penyediaan tempat bagi pedagang kecil dan sektor informal di satu sisi, dan di sisi lain untuk memudahkan akses kepada wisatawan, pemilihan lokasi menjadi sangat penting. Pembangunan infrastruktur merupakan senjata untuk penurunan kemiskinan, karena menyediakan akses terhadap pasar dan pekerjaan, termasuk pekerjaan yang layak dan ramah lingkungan bagi komunitas lokal yang memudahkan meningkatkan pengiriman barang dan jasa secara lebih baik dalam perekonomian yang lebih luas.

(4) Manajemen Destinasi

Manajemen destinasi mencakup semua aspek kepariwisataan di suatu destinasi. Program DMO Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah merupakan langkah yang baik.

Lingkup manajemen destinasi termasuk pengembangan basis data, kriteria spesifik yang lebih khusus (untuk taman bumi, taman laut, tempat pusaka budaya atau desa tradisional dan lain-lain), perencanaan tapak/lokasi termasuk ruang bagi mobilitas wisatawan, implementasi standar dan pengelolaan daya dukung dan lainnya yang berhubungan dengan pemasaran, serta pengembangan jejaring dengan destinasi lain, di dalam dan di luar negeri (ASEAN).

Perencanaan dan manajemen penawaran dan permintaan untuk keseimbangan antara kebutuhan dan kepuasan masyarakat dan wisatawan. Karena sifat dasar pariwisata adalah musiman, destinasi pariwisata menghadapi masalah berfluktuasinya permintaan.

Pariwisata merupakan industri yang menjual pengalaman dan kebanyakan komponen produknya harus dikonsumsi pada waktu diproduksi. Sementara pemesanan (reservasi) dapat dilakukan akan tetapi jumlah pasokan tidak dapat diakumulasi untuk waktu puncak. Oleh karena itu, manajemen pengunjung dan strategi harga juga diperlukan untuk mengendalikan fluktuasi.

Pada tingkat nasional, akan lebih baik jika permintaan yang berlebih pada waktu puncak untuk destinasi tertentu dapat 'dipindahkan' ke tempat lain. Hal ini membutuhkan pemasaran yang kreatif dan prakarsa pengembangan produk untuk memindahkan permintaan

pasar ke waktu dan lokasi lain yang cocok dengan harapan dan pengalaman yang dicari wisatawan.

Dampak negatif hendaknya diidentifikasi sedini mungkin, dan diikuti dengan tindakan koreksi. Dengan menggunakan indikator yang telah diseleksi untuk mengukur keberlanjutan (seperti disebutkan dalam butir 4.1) apa yang perlu dikoreksi atau diperbaiki akan dapat ditemukan. Dampak negatif mungkin terjadi dalam bentuk marginalisasi komunitas, degradasi lingkungan, infrastruktur yang terlampaui daya dukungnya, keluhan komunitas tuan rumah dan juga persaingan tidak sehat serta menurunnya partisipasi pemasok lokal.

(5) Multiplikasi Destinasi

Destinasi baru dapat dikembangkan dari waktu ke waktu, untuk pasar tradisional dan juga untuk menciptakan pasar baru. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, destinasi mempunyai siklus hidup dan destinasi yang ada mungkin tumbuh atau berkembang cepat, dan pada suatu waktu kemudian menjadi jenuh dan menurun. Multiplikasi destinasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu mencari produk baru di tempat baru, untuk memberi kesempatan bagi banyak orang yang memerlukan pekerjaan, untuk menyerap angkatan kerja muda. Provinsi yang memiliki potensi dan kemauan politis yang kuat dengan komitmen pemerintah Kabupaten dan Kota untuk bekerja sama dengan provinsi dan pemerintah pusat, tetapi kurang berkembang perlu mendapat prioritas dalam pengembangan destinasi.

(6) Bantu Penciptaan Lingkungan yang Kompetitif tetapi Sinergis

Kebijakan, peraturan dan regulasi yang jelas merupakan instrumen bagi sistem kepariwisataan agar dapat bekerja secara efektif. Norma dan nilai perlu dihargai, perlu diperjelas, perlu diketahui tidak hanya oleh penduduk lokal melainkan juga oleh pengunjung, termasuk mereka yang mau menanamkan modalnya, yang mungkin datang dari tempat berbeda dan dengan budaya berbeda. Situasi sosio-ekonomi suatu tempat wisata yang ada atau yang potensial ada memengaruhi “kesuburan” pertumbuhan destinasi. Kondisi perkembangan sektor lain yang baik juga akan mendukung tumbuhnya pariwisata. Bila pariwisata diharapkan sebagai pembangkit, sektor lain juga harus dikembangkan secara simultan. Pariwisata tidak harus menggantikan sektor lain kecuali bila diartikan sebagai alternatif terhadap terjadinya praktek berbahaya atau ilegal seperti halnya pembalakan kayu. Isunya adalah bagaimana fasilitasi dilakukan sedemikian rupa agar pariwisata dapat menghasilkan nilai tambah terhadap mata pencaharian yang ada. Perbaikan kualitas produk lokal atau penyesuaian lain mungkin diperlukan, akses terhadap informasi dan peluang merupakan hal yang paling penting.

5.2 Agenda 2: Dukung terciptanya Industri

Kepariwisata yang sinerjik dan Ramah Lingkungan (alam dan Budaya)

Industri kepariwisataan akan memainkan peranan yang penting dalam menuju keuntungan ekonomi. Keuntungan tersebut tergantung pada gabungan elemen-elemen industri kepariwisataan yang tepat sebagai produk agregat. Keseimbangan antara berbagai macam komponen perlu didukung dan dipertahankan untuk mengoptimalkan investasi dalam pembangunan industri kepariwisataan sebagai suatu sistem yang holistik.

(1) Menyeimbangkan Elemen-elemen Industri Kepariwisataan

Industri perhotelan telah berkembang pesat di destinasi tertentu, dibutuhkan upaya ekstra untuk pengembangan usaha-usaha lainnya, yang dianggap penting untuk didukung, menuju strukturalisasi industri dengan berbagai elemen baru yang dianggap penting.

Industri perjalanan yang langsung melayani konsumen maupun biro perjalanan diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang berbeda daripada hanya mengurus penjualan tiket. (sebagian besar usaha perjalanan hanya berkonsentrasi pada penjualan tiket) dan diharapkan dapat lebih berperan dalam pengemasan berbagai elemen produk dan jasa untuk memudahkan masuknya usaha tersebut ke dalam rantai produksi agar wisatawan dapat menikmati lebih banyak elemen-elemen sepanjang perjalanannya.

Rencana pengembangan industri tidak hanya memutuskan tentang apa, dimana, dan berapa banyak yang terkait dengan pengembangan destinasi, tetapi juga tentang jenis, sistem bisnis (tata niaga), kepemilikan dan juga pertimbangan tentang seberapa jauh partisipasi komunitas dapat direalisasikan. Dalam hal akomodasi, tidak terbatas pada berapa banyak hotel dan kamar yang harus dibangun, akan tetapi juga tentang jenis apa, dimana dan bagaimana (kebijakan tentang siapa yang akan diberi prioritas, kemitraan antara sektor swasta dan publik, dan lain-lain).

(2) Menuju Industri Pariwisata yang Ramah Lingkungan

Dalam bergerak menuju pariwisata yang berkelanjutan yang menciptakan pekerjaan layak yang ramah lingkungan, industri pariwisata yang ada sekarang harus didorong ke arah perubahan kepada praktek yang lebih/ makin ramah lingkungan. Pemerintah dan asosiasi industri perlu memfasilitasi dan mendukung upaya semacam itu.

Sertifikasi ramah lingkungan yang lebih luas perlu didorong dan didukung. Tri Hita Karana sudah diakui secara internasional dan skema sertifikasi nasional maupun lokal lainnya

seperti juga sertifikasi internasional harus dipromosikan, tidak terbatas pada usaha skala besar, tetapi juga untuk usaha kecil-mikro.

(3) Pengembangan Perusahaan yang Ramah Lingkungan

Pengembangan kewirausahaan dan kesempatan usaha

Tumbuhnya industri bukan hanya dengan memperbesar perusahaan yang ada, tetapi dari perusahaan berkelanjutan baru, yang kreatif dan inovatif. Kewirausahaan akan memainkan peran dalam mengubah wajah pariwisata Indonesia.

Mengembangkan peluang usaha dalam pariwisata ramah lingkungan mempunyai banyak sisi, misalnya dapat melibatkan produksi sayuran organik dan buah-buahan sampai kepada mendaur-ulang ke atas (*upcycling*)²¹ material yang bila tidak dilakukan akan menjadi sampah. Juga konsultasi dalam pengelolaan energi, sampah, dan air yang ramah lingkungan semuanya merupakan bidang baru yang baru sekarang ini ada.

Berbagai perusahaan kepariwisataan membutuhkan suatu rencana yang diharapkan dapat mengarahkan dan memandu untuk memaksimumkan pengembalian investasi, dan optimasi pemanfaatan kapasitas infrastruktur dan fasilitas yang tersedia dan juga tenaga kerja yang dipekerjakan oleh industri kepariwisataan.

Akses keuangan bagi wirausaha bisnis yang ramah lingkungan

Hal ini merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dan harus mendapat perhatian utama dan khususnya fasilitasi untuk usaha kecil dan mikro penduduk setempat. Sementara kebijakan merangkul berbagai usaha skala kecil, kendalanya muncul dari dalam komunitas, yaitu kurangnya kesadaran dan ketidakterbiasaan (*familiarity*) terhadap portofolio dasar yang sederhana dan terbatasnya akses ke pembiayaan.

(4) Membantu pengembangan sinergi dengan Industri Kreatif

Pariwisata dan industri kreatif sebaiknya tidak dipisahkan begitu saja. Tumpang tindih antar keduanya semakin kuat ketika saling pengaruh ditingkatkan melalui pengembangan produk pariwisata yang inovatif. Film, kerajinan, dan berbagai industri berbasis budaya lainnya serta industri kreatif berbasiskan teknologi masuk ke dalam mata rantai produk pariwisata.

²¹*Upcycling* adalah ujung dari penggunaan kembali, penambahan nilai dengan mentransformasikan atau menemukan kembali sesuatu yang kalau tidak dilakukan, maka benda itu akan menjadi sampah.

(5) Pengelolaan Mata Rantai Produk (*value chain*)

Pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan keluaran produk yang bila tidak dapat diterima pasar akan menciptakan permasalahan.

Fasilitasi sangat diperlukan untuk dapat masuk ke dalam mata rantai produk pariwisata. Untuk peningkatan kualitas “*farm to table management*” harus diperkenalkan. Pengembangan hubungan kerjasama antara masyarakat dan perusahaan adalah penting sekali.

Penanaman bahan pangan > panen > penyimpanan > transportasi > penyimpanan > pemrosesan di hotel, restoran dan rumah tangga menentukan kualitas makanan yang dihidangkan di meja.

Pertanian organik harus diperkenalkan dan dipromosikan, penanganan yang tepat pada setiap tahapnya haruslah masuk ke dalam pertimbangan.²² Hubungan kerjasama yang baik ini harus diterapkan pada berbagai produk pariwisata lain seperti misalnya kualitas kerajinan dan memasukkan desa-desa kerajinan sebagai bagian dari paket perjalanan.

5.3 Agenda 3: Memperkenalkan Pemasaran yang Efektif bagi Destinasi yang Ramah Lingkungan

(1) intelijen Pasar dan Strategi Pemasaran

Pasar domestik maupun internasional Indonesia yang beragam harus diidentifikasi dan dipahami, tidak hanya terbatas pada ujung hulunya tetapi juga mencakup ujung hilirnya. Memahami pasar sasaran sangatlah penting agar dapat mengembangkan pemasaran dan strategi distribusi yang tepat. Dengan karakteristik destinasi yang beragam, setiap destinasi mungkin dapat fokus pada segmen pasar yang paling sesuai.

Sumberdaya dan budaya yang beraneka ragam serta juga karakteristik geografisnya telah menciptakan beraneka ragam produk dan pasar yang memerlukan strategi pemasaran yang berbeda. Pengawasan terhadap pengembangan produk pada ujung yang lebih bawah haruslah dipupuk, prinsip berkelanjutan sangatlah penting pada segmen ini, khususnya yang disebabkan oleh karakter masalnya.

²²*Value chain management*, atau pengelolaan mata rantai produksi juga berlaku untuk produksi kerajinan, beberapa produk kerajinan menggunakan bahan kimia untuk menghemat tenaga dan memudahkan proses, tetapi merugikan lingkungan- sebagaimana dalam industri tekstil. Kembali kepada proses pewarnaan alami akan menambah nilai produk. Keterampilan/keahlian yang sangat teliti harus dihargai dengan meningkatkan nilai dalam proses yang ramah lingkungan, yang akan menjadikan produk tidak hanya lebih berharga, tetapi juga lebih bermakna.

(2) Bantu Kembangkan Kompetisi, Kemitraan dan Kolaborasi antar Destinasi

Sangatlah perlu dipahami bahwa suatu destinasi bukanlah suatu tempat yang berdiri sendiri. Destinasi lain yang ada atau yang sedang dikembangkan, dapat dianggap sebagai pesaing dan juga mitra yang potensial. Provinsi dan kabupaten dan juga kota haruslah disadarkan bahwa mereka sejogyanya tidak berkompetisi dengan cara yang saling merugikan, melainkan lebih baik menjalin kemitraan dalam rangka mampu bersaing secara lebih baik dengan destinasi negara tetangga untuk meningkatkan pangsa wisatawan mancanegara.

Lebih jauh untuk menciptakan suatu klaster pilihan bagi wisnus. Persaingan yang sehat di antara destinasi dapat membantu meningkatkan kualitas dan menyuburkan inovasi. Kemitraan mungkin dapat diperluas sampai ke tingkat internasional, bermitra dan berkolaborasi dengan negara tetangga untuk menarik sasaran dari bagian dunia lain (lihat 4.2.6)

(3) Komunikasi yang Efektif

Komunikasi formal diperlukan dari sudut pemerintah. Dalam banyak kasus komunikasi informal mungkin bisa lebih efektif.²³ Komunikasi harus tergantung pada situasi, isi dan penerima. Seorang juara (tokoh terkemuka) atau orang lokal yang populer mungkin dapat membantu komunikasi menjadi lebih efektif, terutama saat datangnya inovasi produk baru yang ramah lingkungan bagi kelompok sasaran. Karakter tradisional mungkin juga dapat menjadi alat yang efektif untuk komunikasi: maskot seperti “si Cepot” di Jawa Barat²⁴.

(4) Promosikan dan Hargai Produk dan Jasa Ramah Lingkungan

Sangat penting mempromosikan produk dan jasa ramah lingkungan kepada komunitas dan usaha yang ada, melalui fasilitasi, pelatihan dan juga berbagai insentif. Penghargaan pada praktek praktek ramah lingkungan mungkin dapat menjadi kebanggaan usaha atau komunitas yang memperolehnya. Inovasi produk dan jasa ramah lingkungan merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan pengetahuan (*know how*) dan pandangan yang berada di luar wawasan penduduk lokal. Produk harus berdaya tarik bagi wisatawan, secara fisik dapat diakses dan

²³Beberapa daerah di Indonesia menggunakan jalur religi untuk mengkampanyekan kebersihan, pemimpin daerah lain mengundang duduk bersama secara informal dengan kelompok sasaran untuk mendiskusikan berbagai permasalahan, sambil minum teh/kopi.

²⁴Dalam hal contoh praktek baik, Yogyakarta dapat disebutkan yang pada periode tahun 1998-2006 menggunakan berbagai bentuk komunikasi dalam menyebarkan kebijakan serta umpan balik dari masyarakat: minum kopi pagi antara administrator, pengusaha, pengamat ekonomi dan pihak lainnya yang mempunyai perhatian terhadap pengembangan Yogyakarta; program melalui televisi setempat yang dinamakan: Malioboro-Malioboro (nama yang populer di jantung kota Yogyakarta), temu press (*press meeting*), pertemuan dengan para profesional, komunikasi dengan komunitas – difasilitasi oleh LSM; melakukan pertemuan dengan kelompok khusus dalam komunitas. Dalam beberapa kasus komunikasi dilakukan dalam bahasa setempat (Bambang S. Priyohadi, 2011).

dikombinasikan dengan fasilitas serta jasa pelayanan. Ketika merancang dan mengelola produk pariwisata, siklus hidupnya yang terdiri atas (i) tahap pengenalan, (ii) tahap pertumbuhan, (iii) tahap pematangan, dan (iv) tahap kejenuhan dan penurunan, harus masuk dalam pertimbangan. Pemberian label ramah lingkungan dan sertifikasi yang sesuai perlu dikembangkan untuk mendukung industri yang ramah lingkungan dan membantu konsumen.

5.4 Agenda 4: Bangun Lembaga Pendukung (Sumberdaya Manusia, Organisasi, Regulasi)

Pariwisata merupakan satu sistem, yang dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal. Keluaran (*Output*) dari sistem akan bergantung pada masukan (*input*) masukan lingkungan dan juga input kelembagaan (*environmental and institutional inputs*). Lembaga pendukung pariwisata berkelanjutan memerlukan kepemimpinan yang kuat dan sumberdaya manusia. Pemimpin dengan karakter yang memegang nilai prinsip keberlanjutan, yang akan membawa sumberdaya manusia yang kompeten mengembangkan berbagai kebijakan, penyiapan rencana rencana, implementasi program dan mengoperasikan bisnis pariwisata. Sistem pariwisata hanya akan bekerja baik bila berbagai elemen sistem berada dalam tatanan yang baik.

(1) Memadukan Kebijakan, Peraturan dan Regulasi.

Semua kelompok kebijakan, peraturan dan regulasi terkait di bawah berbagai kementerian harus diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan – hal ini memerlukan lebih dari sekedar koordinasi di atas kertas, tetapi integrasi dalam program dan aktivitas dan berbagai sasaran umum sejauh terkait dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

(2) Penguatan Kelembagaan Tingkat Provinsi dan Lokal

Pengalihan otoritas harus bersamaan dengan program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dalam semua bidang termasuk pariwisata. Peningkatan kapasitas untuk pejabat pariwisata perlu dilakukan secara menerus dan menjadi keharusan. Pada sisi lain panduan perlu disediakan dan dipahami oleh pejabat yang bertugas dan juga pemangku kepentingan lain.

Tingkat provinsi perlu memegang koordinasi antar kabupaten dan kota. Lembaga lembaga provinsi perlu memperhatikannya dari perspektif regional.²⁵ Pariwisata diharapkan mempunyai peran dalam menyeimbangkan pembangunan dan lembaga tingkat provinsi memberi dukungan pada semua kabupaten/kota yang terlibat dalam upaya pembangunan pariwisatanya. Hal itu

²⁵Dalam kasus Jawa Barat, misalnya, salah satu permasalahan adalah ketimpangan pembangunan antara bagian Utara dan Selatan

disebutkan dalam Rencana Induk Pariwisata Provinsi dan juga dalam rencana sub-regional bagian selatan. Pembangunan seperti itu digagas oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang harus didukung oleh rencana aksi Dinas Pariwisata.

Lembaga di tingkat daerah harus lebih dekat dengan komunitas dan mereka yang mewakili harus lebih peduli dengan kemiskinan, usaha mini dan mikroserta juga sektor informal yang harus ditangani secara mendasar. Lembaga lokal sejogyanya mengelola pemantauan dan pengendalian, mengukur berbagai indikator dan mengadakan pengembangan dan pemuthakhiran (*updating*) basis data. Lembaga tersebut hendaknya merumuskan pengembangan pelatihan dan keterampilan yang diperlukan dalam memfasilitasi pendirian koperasi bagi usaha mikro dan menunjang akses finansialnya. Selanjutnya, mereka perlu memberi dukungan langsung kepada operator bisnis pariwisata dan komunitas, selalu ada, terjangkau, dapat didekati, dan terhubung dengan komunitas.

Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu memperbaiki kerangka hukum untuk mendukung pariwisata berkelanjutan dan pekerjaan layak dan ramah lingkungan di wilayah masing-masing untuk mendukung pengarusutamaan jender, pemberdayaan perempuan, pekerjaan untuk generasi muda dan wirausaha muda, dan prakarsa perlindungan anak. Produk hukum dapat berupa PERDA, Surat Keputusan Gubernur atau Bupati, Kebijakan Gubernur atau Bupati, dan sebagainya.

(3) Penegakan Hukum dan integritas lingkungan

Pengendalian melalui izin lingkungan

UU no 32 tahun 2009 secara jelas menetapkan bahwa semua aktivitas dan bisnis yang perlu mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL dan UKL), harus mengajukan izin lingkungan kepada pemerintah (nasional, provinsi atau daerah, bergantung pada skala dan intensitas dampak).

Tinjauan lingkungan dan perencanaan

Provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai aktivitas pariwisata yang bersifat sensitif perlu menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS, untuk memutuskan daya dukung destinasi terkait dan menyiapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Pemberdayaan komunitas melalui informasi dan partisipasi

Pemberdayaan Komunitas merupakan dasar dan juga salah satu tujuan penting dalam pariwisata berkelanjutan. Komunitas yang berdaya dapat memberi dukungan kuat pada industri pariwisata yang kemudian akan menunjang kesejahteraan komunitas.

Pengakuan terhadap komunitas tradisional, lingkungan dan hak atas pusakanya.

Komunitas tradisional/adat dengan kearifan lokalnya mempunyai cara cara khusus untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan budayanya.²⁶

(4) Investasi dan Instrumen Ekonomi

Menurut apa yang dipahami dari peraturan perundangan di Indonesia, investasi mencakup tidak hanya yang melibatkan usaha padat modal, tetapi semua jenis pengeluaran non konsumtif untuk memulai bisnis, menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan atau orang lain. Semua itu didefinisikan sebagai investasi. Pertanyaan pertama yang perlu didiskusikan adalah apakah memang perlu berinvestasi dalam pembangunan pariwisata, apakah pariwisata memang diinginkan.

(5) Ciptakan Sistem Penunjang yang Tepat

Data dasar yang tepat dan dapat dipercaya diperlukan untuk setiap keputusan atau penyusunan kebijakan. Pengumpulan data pada tingkat nasional bergantung pada data dari tingkat provinsi, yang bertumpu pada sistem pengumpulan data pada tingkat lokal. Bila data dari tingkat lokal tidak dapat dipercayai, maka setiap data yang didasarkan pada agregasi data ini pun tidak akan dapat dipercaya. Data dan informasi yang relevan merupakan bagian dari sistem penunjang. Dukungan strategis yang diperlukan oleh komunitas adalah tempat untuk berkonsultasi, dan atau “mitrakerja” kepada siapa mereka dapat berkonsultasi, bertanya untuk beroleh informasi tentang bagaimana memulai dan mengelola suatu bisnis, termasuk informasi tentang berbagai sumber finansial yang tersedia dan bagaimana mengaksesnya, informasi tentang permintaan pasar, bagaimana mengoperasikan dan mengikuti prinsip prinsip berkelanjutan serta

²⁶Masyarakat Kampung Naga di Jawa Barat merupakan contoh cara tradisional dalam menjaga keberlanjutan. Mereka telah menetapkan daya dukung lingkungannya sendiri, dengan tidak mengizinkan keluarga baru tinggal di kampung adatnya untuk menjaga jumlah populasi dalam keseimbangan dengan luas sawah yang tersedia, dan kapasitas produksi makanan lain (kolam ikan, peternakan ayam dan lainnya). Mereka juga menetapkan legenda tradisional agar anggota komunitas tidak merusak sumber air mereka. Kaum Tua Toraja percaya bahwa akses mereka yang terbatas merupakan alat yang baik untuk membatasi pengunjung. Seorang pimpinan komunitas pernah menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan topografi sedemikian, menandakan bahwa Toraja bukan untuk kunjungan massal, ketika dia dikonsultasi tentang bandara untuk memudahkan wisatawan mengunjungi Toraja, yang berlokasi 6 jam berkendara darat dari ibukota provinsi. Bali tidak diragukan lagi telah mempunyai banyak lembaga tradisional setempat yang mengelola keberlanjutan hubungan antara lingkungan dan budayanya, yaitu subak dan banjar. Filosofi Tri Hita Karana seperti telah disebutkan merupakan kearifan tradisional dalam melihat hubungan antara manusia, lingkungan dan Sang Pencipta.

ramah lingkungan. Komunitas juga perlu didampingi dalam menjalankan perannya sebagai tuan rumah, pekerja, dan sebagai pemangku kepentingan utama.

Pesan kunci Bab 5

- Agenda 1: Bergerak Menuju Destinasi yang Berkelanjutan
- Agenda 2: Bantu Kembangkan Industri Kepariwisata yang Sinerjis dan Dapat Berjalan
- Agenda 3: perkenalkan Pemasaran Destinasi Hijau yang Efektif
- Agenda 4: Bangun Institusi yang Mendukung yang mencakup Pengembangan SDM, Organisasi dan Regulasi

BAB 6

CATATAN PENUTUP DAN HARAPAN

Ikhtisar Bab

Bab penutup ini dimaksudkan sebagai ringkasan dari berbagai temuan yang paling penting dalam Rencana Strategis dan ditampilkan berdasarkan topik-topik utama. Analisis yang diperluas menekankan berbagai pesan kunci, menyampaikan harapan dan menjelaskan kebutuhan akan berbagai tindak lanjut pelaksanaan seperti pengembangan Panduan praktis berdasarkan pada Rencana Strategis untuk pemangku kepentingan lokal.

Isu-isu Utama berkaitan dengan Pariwisata Indonesia

Isu kunci pariwisata Indonesia adalah kurangnya kapasitas sumberdaya insani sektor publik dan swasta, yang membuat kebijakan publik tidak konsisten dengan implementasinya di berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda, kurangnya pembangunan fisik dan juga kurangnya pengendalian operasional usaha. Infrastruktur pariwisata sangat terkonsentrasinya di beberapa destinasi tertentu dan wisatawan pun terkonsentrasi di tempat tersebut sehingga menimbulkan isu tentang daya dukung di satu sisi, dan di sisi lain masih banyak daerah yang menunggu untuk dapat lebih berperan serta dalam ekonomi pariwisata. Dalam hal pariwisata berkelanjutan, ada beberapa ‘praktek terbaik’ (*best practices*) yang perlu dibantu lebih lanjut. Dengan belum adanya institusi yang secara permanen ditugasi untuk membantu, menguatkan melakukan kampanye dan mengelola pelaksanaannya maka pariwisata berkelanjutan hanya mengandalkan diri pada prakarsa/insiatif dari sedikit orang yang memiliki paemikiran yang berwawasan lingkungan dan yang peka terhadap budaya. Sebagian besar pemangku kepentingan pariwisata, termasuk sektor publik berpandangan pendek, bertujuan mendapat hasil secara cepat untuk mencapai tujuan yang bersifat kuantitatif, engan hasil yang cepat, yang nampaknya lebih merupakan politik dangkal belaka daripada berorientasi pada tujuan yang lebih bermakna dan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Berbagai kendala hanya akan teratasi di bawah kepemimpinan yang kuat yang harus diciptakan di lingkungan pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat umum. Namun, jalan yang panjang masih harus dilalui untuk hal-hal umum oleh mayoritas unsur-unsur industri kepariwisataan.

Globalisasi mungkin akan menyebabkan kebanyakan perusahaan nasional berada dalam posisi yang sukar untuk bersaing, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Mereka tidak hanya perlu diberdayakan untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dalam bidang pariwisata, tetapi juga perlu ditopang oleh kebijakan yang lebih kuat.

Destinasi yang populer, sedang dan akan terus menghadapi berbagai masalah dalam hal infrastruktur, daya dukung lingkungan atau sosio-budaya, yang mungkin pada akhirnya akan menyebabkan degradasi pengalaman wisatawan, sedangkan destinasi baru – tanpa perencanaan yang jelas dan pasti yang secara konsisten dilaksanakan - akan tumbuh secara acak/ tak tertata. Destinasi pariwisata masal yang kurang memerhatikan keberlanjutan akan mengalami degradasi dan ditinggalkan. Proses yang sama akan terjadi di tempat lain dan pengembangan destinasi baru tidaklah semudah sebagaimana yang diharapkan.

Rencana Strategi Nasional, Visi dan Kepemimpinan yang Kuat

Indonesia telah menempatkan pariwisata pada posisi yang strategis dengan perspektif jangka panjang yang penting dalam pembangunannya. Pada masa lalu dan dalam situasi tertentu sekarang, pembangunan sektor ini belum saling terjalin secara efektif di antara para pemangku kepentingan yang berbeda, bahkan di sektor publik sendiri di manapariwisata menjadi perhatian dan tanggungjawab banyak kementerian. Mekanisme pasar dan eksternalitasnya - seperti halnya bencana dan bahaya alam, terorisme dan penyakit - telah memengaruhi tidak hanya pertumbuhan sektor tetapi juga cara bagaimana sektor itu bertumbuh. Pada saat ini **Rencana Pembangunan Pariwisata Nasional telah diresmikan sebagai Peraturan Pemerintah, yang berarti bahwa harus menjadi arahan bagi pembangunan masa depan.**

Meskipun sektor ini sangat dinamis, perlu ada kesamaan visi pembangunan jangka panjang dan digunakan sebagai dasar untuk mengarahkan agenda pembangunan. Implementasi rencana tersebut memerlukan kepemimpinan yang kuat, yang bekerja secara konsisten dan gigih mengikuti arah perencanaan, dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara regular untuk mengatasi dinamika permintaan dan juga untuk situasi yang tak terantisipasi. Tanpa **kepemimpinan yang kuat** gerakan pariwisata berkelanjutan tidak akan masuk ke lingkungan mana pun baik swasta maupun publik. **Rencana Strategi dapat dimodifikasi atau diubah, akan tetapi nilai-nilai tertentu: kualitas hidup dan identitas dalam visi jangka panjang harus tetap dipertahankan.** Berdasarkan Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Pekerjaan Ramah Lingkungan, perlu dipersiapkan suatu Panduan yang mencakup berbagai peran dan tugas dari berbagai kementerian yang berbeda dan aktor kunci lainnya.

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan masih perlu dipahami dan diintegrasikan ke dalam semua tahap proses pembangunan. Pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya diaplikasikan untuk perusahaan besar yang formal saja, melainkan juga untuk UMKM dan sektor informal. **Tidak hanya sektor swasta, tetapi juga dan yang sangatlah penting adalah sektor publik, yang harus berada di garis depan dalam upaya ini.** Komunitas dan masyarakat umum harus dilibatkan secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan kebijakan pariwisata, pengambilan keputusan, perencanaan dan pengoperasian, dan penyampaian produk kepada wisatawan.

Bila direncanakan dan dikelola dengan baik, pariwisata berkelanjutan akan benar-benar memberi sumbangan langsung pada Cita-Cita Pembangunan Milenimum, penurunan kemiskinan, pembangunan pedesaan, pemeliharaan budaya dan masyarakat, kesetaraan jender, pelestarian lingkungan, mitigasi perubahan iklim dan menunjukkan dampak yang bermanfaat dalam mitigasi perubahan iklim. Suatu transisi/peralihan yang tepat bagi pekerja dan majikan dengan pekerjaan ramah lingkungan ke rendahnya karbon, iklim yang pegas, pembangunan yang ramah lingkungan di Indonesia sangatlah krusial/ penting. Transisi dalam pasar kerja dan kebutuhan akan berbagai model usaha yang baru dilakukan melalui dialog sosial yang inklusif.

Potensi pariwisata berkelanjutan di Indonesia didukung oleh adanya berbagai bentuk dan hirarki peraturan dan regulasi tingkat: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi dan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Provinsi, Keputusan Gubernur, sampai ke tingkat Kabupaten dan Kota. Pada tingkat nasional, terdapat beberapa UU yang secara eksplisit atau implisit menyatakan panduan yang harus diikuti, sesuai dengan prinsip prinsip berkelanjutan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu : UU Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009 dan UU Pariwisata No 10 tahun 2009, UU Cagar Budaya No 11 tahun 2010, UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan turunannya, akan tetapi implementasi dari peraturan dan regulasi perlu ditingkatkan.

Agenda 21 Indonesia diterbitkan pada tahun 1997 dan diikuti oleh Agenda Sektor untuk Pariwisata pada tahun 2001. Tanpa mempunyai status resmi Agenda 21 tetap tinggal sebagai dokumen, dan bahkan tidak pernah dirujuk dalam perencanaan atau pemrograman pembangunan pariwisata. Untungnya, dokumen lain yang secara umum menjadi arahan seperti **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, rencana 5 tahunan)** selalu memasukkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa misi yang disebutkan oleh Kementerian yang baru beralih menjadi **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara eksplisit menetapkan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai tujuan.**

Pariwisata secara implisit mengikuti seluruh arahan yang ditetapkan RPJP, secara eksplisit disebutkan bahwa pariwisata diarahkan agar mampu merangsang aktivitas ekonomi dan memperbaiki citra Indonesia, **memperbaiki kesejahteraan penduduk lokal, memperluas kesempatan kerja.** Pembangunan kepariwisataan akan memanfaatkan daya tarik alami yang beraneka-ragam dan potensi nasional sebagai negara maritim dengan cara yang bijaksana dan berkelanjutan, dan juga mendorong aktivitas ekonomi terkait dengan pembangunan budaya bangsa. Pada setiap tahap rencana pembangunan, kesejahteraan masyarakat selalu disebutkan secara eksplisit. **Penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin dan memperbaiki jaminan sosial telah ditempatkan dalam semua tahap RPJM.**

Pengembangan Kualitas

Pembangunan kepariwisataan untuk Indonesia mencakup sasaran untuk pertumbuhan dan juga perbaikan kualitas, sebagaimana ditekankan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Dalam misi dan visinya. Pertumbuhan diukur melalui *'turnover'*, jumlah kedatangan, jumlah orang, perjalanan, pengeluaran dan indikator kuantitatif lainnya tidak akan cukup untuk menilai kualitas dari pembangunan. Diperlukan adanya indikator yang mengikuti prinsip-prinsip berkelanjutan sebagai alat untuk mencapai pengembangan yang kualitas; **bertumbuh dan membaik!**

Dengan PDB yang bertumbuh dan IPM (Index Pembangunan Manusia) yang menurun, Indonesia merupakan contoh bagus bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjamin membaiknya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada sektor pariwisata. Pembangunan kualitas menuntut bahwa semua pemangku kepentingan harus mengerjakan **HAL YANG BENAR SECARA BENAR**. Karena semua pemangku kepentingan bekerja dalam sistem, maka kegagalan seorang anggota sistem mungkin mempunyai dampak yang luas dan merugikan pada keseluruhan hasil. **Model sistem dinamik** mungkin akan dapat mengindikasikan bagaimana berbagai unsur dalam sistem kepariwisataan saling berpengaruh satu sama lain, baik secara positif maupun negatif. Neraca Satelit Pariwisata (*Tourism Satellite Account*), di satu sisi telah digunakan secara internasional dan luas untuk mengukur dampak pariwisata yang dibangkitkan oleh pengeluaran wisatawan dan pemerintah untuk pembangunan pariwisata terhadap: output, nilai tambah, peluang pekerjaan, upah dan gaji serta perpajakan. Perhatian khusus dan penelitian lebih lanjut perlu diprakarsai saat terjadi pertumbuhan pada nilai total tetapi kontribusi upah dan gaji sektor pariwisata (dibandingkan dengan total nasional) mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan penurunan kontribusi lapangan pekerjaan.

Pembangunan kepariwisataan dan keberhasilannya tergantung kepada kondisi sosio-ekonomi umumnya di daerah, tidak hanya dari ketersediaan sumberdaya pariwisata di daerah, tetapi juga aspek sosio-budaya, khususnya bagaimana penduduk setempat melihat pariwisata dan sikapnya terhadap sektor ini menentukan 'kesuburan' daerah ini untuk pengembangan pariwisata. Pembangunan pariwisata tidak dapat dirampatkan, tetapi perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah/provinsi yang bersangkutan. **Konteks merupakan hal yang penting**. Provinsi yang berbeda akan mempunyai manfaat pariwisata yang berbeda pula; jenis investasi yang sama mungkin tidak akan menghasilkan pariwisata yang sama. **Pembangunan kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan dengan pekerjaan layak yang ramah lingkungan karenanya perlu dirancang khusus (*tailor made*) untuk Indonesia**, dan selanjutnya pada tingkat provinsi jugadirancang khusus sesuai dengan situasi dan kondisi provinsi yang bersangkutan.

Etika Pariwisata

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, Kode Etik Pariwisata Global dalam Artikel 3 menyebutkan bahwa **pariwisata merupakan faktor pembangunan berkelanjutan; untuk Indonesia, pariwisata bukan tujuan pembangunan tetapi lebih merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan**, dimana:

- i) **Semua Pemangku Kepentingan** dalam pembangunan kepariwisataan harus menjaga lingkungan alami;

- ii) Semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang kondusif untuk **menyelamatkan sumberdaya langka dan berharga, perlu mendapat prioritas dan dorongan;**
- iii) Distribusi perjalanan liburan yang lebih merata harus diupayakan untuk **mengurangi tekanan pada lingkungan dan memperkuat dampak manfaat bagi industri dan ekonomi setempat serta juga kepuasan wisatawan;**
- iv) Infrastruktur kepariwisataan hendaknya dirancang dan aktivitas pariwisata diprogram sedemikian rupa untuk **melindungi warisan alam dan budaya;**
- v) **Pariwisata alam dan ekowisata secara khusus** dikenal kondusif untuk memperkaya dan memperkuat kedudukan pariwisata, asalkan menghargai warisan alam, penduduk lokal dan **menjaga daya dukung tapak**

Promosi pariwisata berkelanjutan hendaknya menjadi program yang permanen, secara intensif dijalankan pada berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda dengan dukungan untuk tindakan korektif dan inovatif.

Kode Etik Pariwisata Global yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan kode etik dari beberapa asosiasi sudah tersedia. Lingkup program penyebarannya perlu diperluas pencakupannya dan secara berkesinambungan dilaksanakan secara terpadu dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Agar supaya subjek efektif, diperlukan berbagai upaya yang terus menerus, dengan pemantauan dan evaluasi, skema insentif dan disinsentif dan juga strategi kerja lainnya. Implementasinya tidak terbatas pada tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kode etik pariwisata tidak hanya harus dipahami sebagai suatu konsep dan sebagai masalah kesopan-santunan saja oleh para pemangku kepentingan pariwisata, tetapi dilaksanakan secara konsisten walaupun seringkali rumit karena adanya tekanan dari berbagai sisi seperti ekonomi, politik, atau budaya. Kriteria Global Pariwisata Berkelanjutan yang diresmikan oleh UNWTO, UNEP, UN Foundation dan beberapa badan sejenis lainnya belum digunakan sebagai suatu alat kunci bagi pembuat kebijakan Indonesia dan pelaku industri pariwisata. . Proses penyebarluasannya perlu selalu dilakukandari waktu ke waktu dalam jangka interval singkat, disebarkan secara lebih luas sampai ke tahap operasional, baik untuk usaha formal maupun informal.

Badan Koordinasi Tunggal

Terdapat peraturan dan regulasi yang terkait dengan (i) orang yang akan memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan menyampaikan jasa, (ii) penataan ruang, tempat pariwisata akan berlangsung, (iii) industri dan bisnis dan (iv) otoritas dalam pengelolaan sumberdaya – alam dan budaya – untuk pariwisata, dan (v) dampak pariwisata. Disamping itu terdapat banyak kementerian yang secara langsung atau tak langsung berurusan dengan pariwisata yang perlu disinergikan.

Karena terkait dengan banyak peraturan dan regulasi – yang berada di bawah tanggungjawab kementerian dan aspek pembangunan yang berbeda beda- pembangunan kepariwisataan harus merupakan usaha bersama. Beberapa kementerian yang terlibat berada di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Ekonomi dan beberapa lainnya berada di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Masyarakat. Yang terbaik adalah apabila pembangunan pariwisata dapat dikoordinasikan di bawah **satu badan koordinasi tunggal**, yang mempunyai otoritas ke semua kementerian terkait. **Diusulkan bahwa Pembangunan Kepariwisata Nasional dikoordinasikan di bawah Kantor Wakil Presiden.** Masing-masing kementerian mungkin mempunyai rencana aksi sendiri, merujuk kepada Rencana (Strategis) Pariwisata Nasional, dan melaksanakannya dilaksanakan berada di bawah kontrol badan koordinasi.

Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota rencana kepariwisataan hendaknya dikoordinasikan di bawah Bappeda untuk dipadukan ke dalam rencana pembangunan keseluruhan (RTRWP atau RTRWK), bersinergi dengan sektor potensial lainnya di masing masing provinsi /kabupaten/ kota.

Konsolidasi Internal dan Sinergi dengan Kementerian Lain.

Dengan baru dibentuknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu pertama tama melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu, untuk menyirnegikan semua program pariwisata di lingkungan kementerian, termasuk ekonomi kreatif yang sebelumnya berada di bawah kementerian lain. Ini berarti konsolidasi terhadap sumberdaya insani tersedia dan juga program kegiatannya dan masuk ke ranah berkelanjutan dengan dimensi kebijakan baru. Isu mengenai lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan dan juga isu jender masih tetap relevan. Industri kreatif dapat memperkuat sektor pariwisata dalam membangkitkan UKM baru dan membuka peluang kerja yang mungkin dapat mengyurangi kemiskinan. **Industri Kreatif juga memperlihatkan hubungan yang dekat dengan Pekerjaan Ramah Layak yang Ramah Lingkungan dan lapangan kerja bagi pemuda dan perempuan.**

Mengingat ketergantungan pariwisata yang tinggi terhadap banyak kementerian lain, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif perlu lebih pro-aktif memromosikan berbagai kebijakan dan rencananya, agar diperoleh dukungan dari kementerian lain. Di pihak lain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu memetakan semua kegiatan yang terkait pariwisata yang dilakukan oleh kementerian lain dan menyinergikannya di ranahyang berhubungan dengan program pembangunan berkelanjutan. Kementerian lain diharapkan mengorientasikan kontribusinya sesuai dengan agenda dan kepentingan nasional, sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memantau kinerja dari daftar kebutuhannya (shopping list) dan memadukan proses transisi menujuke pembangunan pariwisata berkelanjutan ke dalam rencana/skema pembangunan berkelanjutan nasional yang lebih luas.

Rencana Pengembangan Sumberdaya Insani

Keberhasilan pariwisata sebagai industri berbasis pengetahuan semata-mata tergantung kepada sumberdaya insaninya. Mengenai program pembangunan manusia (*human development*)—pemerintah maupun swasta - ada kebutuhan mendesak terhadap rencana pembangunan manusia untuk 10-20 tahun yang akan datang. Selain dari upaya untuk pengembangan standar kompetensi yang sedang berjalan, **sistem pendidikan dan pelatihan kepariwisataan terpadu** perlu dibentuk – setelah mengevaluasi situasi saat ini. Transisi sektor lapangan kerja akan menuntut sikap, keahlian dan keterampilan baru yang ramah lingkungan, yang harus diidentifikasi dan ditanggapi dengan pendidikan yang tepat, serta pelatihan dan program pengembangan kapasitas. Terutama, program kejuruan yang menduduki kunci penting dalam hal ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terlibat dalam pendidikan dan pelatihan dalam bidang *hospitality* dan pariwisata. Sementara kebanyakan pendidikan pariwisata berbentuk perguruan tinggi mono-disiplin, juga terbuka kesempatan untuk memperkaya dengan **mengintegrasikan pendidikan kepariwisataan di universitas untuk memungkinkan terjadinya pemupukan disiplin silang**.²⁷ Pendidikan berkesinambungan (*continuing education*) dalam *hospitality* dan pariwisata mungkin perlu dipertimbangkan untuk melayani pemuda putus sekolah, ibu rumah tangga atau pensiunan yang mungkin cocok bekerja dalam atau mempunyai bisnis terkait *hospitality* atau pariwisata. Pembangunan sumberdaya insani yang baik akan sangat berguna bagi pengisian lapangan kerja setempat. Kebijakan untuk mendukung beasiswa untuk mahasiswa *hospitality* dan pariwisata perlu disusun untuk mempercepat jumlah pemimpin, perencana, pengelola dan pendidik dan juga peneliti pariwisata yang berkualitas pada masa depan, yang akan menjadi landasan kokoh bagi **pembangunan kepariwisataan Indonesia**.

Apindo dan asosiasi pemerintah daerah (APKASI & APEKSI) belum menempatkan pekerjaan ramah lingkungan dalam programnya; tetapi mereka mungkin dapat menjembatani pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan (ramah lingkungan) dalam bidang *hospitality* dan pariwisata supaya sesuai dengan kebutuhan industri dan sektor publik di tingkat daerah.

Pekerjaan yang Layak, Perlindungan Sosial, Hak Selama Kerja, Dialog Sosial dan Ekonomi Informal

70% dari penduduk Indonesia bekerja di sektor ekonomi informal, langkanya tenaga kerja ahli dan rendahnya produktivitas merupakan isu-isu yang lazim dihadapi oleh para majikan; tak terkecuali dalam industri kepariwisataan. Meskipun pekerjaan terkait pariwisata ‘mudah’ untuk dimasuki, posisi tawar tenaga yang kurang terampil (*non-skilled*) lemah dan pekerja sektor informal sama sekali tidak terlindung.

Dalam hal pekerjaan layak yang ramah lingkungan, perlindungan terhadap pekerja dalam sektor pariwisata ini harus diperluas sehingga mencakup pekerja sektor informal. Hak selama bekerja, sistem perlindungan sosial telah ada dalam dokumen resmi. Perlindungan sosial tidak berarti bahwa hanya pekerja yang mempunyai hak, tetapi majikan juga mempunyai hak

27

yang berbeda untuk bertindak bila pekerja tidak memperlihatkan kinerja atau melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Seringkali dialog sosial berakhir tanpa solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Nampaknya masih terdapat persepsi berbeda antara majikan dan karyawan (seperti yang diindikasikan dalam asosiasi), keduanya berhak mempunyai persepsi berdasarkan pada kasus-kasus tertentu yang berbeda. Para majikan mengeluh soal produktifitas, etos dan etika, sementara para karyawan mengeluh kurangnya jaminan sosial dan perlindungan. Diharapkan juga asosiasi yang profesional mempunyai sistem pemantauan terhadap sikap dan tingkah laku anggotanya.

Perlindungan harus sesuai dengan ‘pendidikan’, beberapa nilai inti harus dipegang sebelum perlindungan/proteksi absah diberlakukan. Di satu sisi, perusahaan juga harus memelihara dan menggunakan tidak hanya peraturan dan regulasi, tetapi juga etika sebagai majikan. Asosiasi industri, asosiasi profesi, dan asosiasi pekerja perlu duduk bersama dan menyetujui bagaimana menggunakan sistem tersebut. Asosiasi pekerja tidak cukup hanya melakukan pelatihan keterampilan, tertentu tetapi yang lebih penting adalah menanamkan etika dan etos bekerja.

Asosiasi Pekerja mungkin terlibat tidak hanya dalam memperjuangkan upah’ gaji minimum, dan perlindungan sosial, tetapi juga standar kompetensi minimum yang diperlukan, melalui program pemberdayaan. Juga mengadvokasi CSR untuk proyek proyek komunitas, yang mungkin diadakan di tempat tempat para pekerja itu berasal. Pertanyaannya terletak pada siapa atau lembaga mana yang akan ‘memedulkan’ pekerja informal, yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua pemangku kepentingan pembangunan.

Kesetaraan gender dan penghapusan pekerja anak anak merupakan tujuan yang teramat penting. Perlu untuk dipertimbangkan adanya upaya terpadu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Asosiasi hotel kecil/ penginapan daerah/ lokal perlu suatu dorongan dan pengarahan agar para anggotanya dapat dibawa pada isu praktek praktek ramah lingkungan dan pekerjaan layak yang ramah lingkungan, dengan model peran (*role model*) dari anggotanya sendiri yang telah berhasil mempraktekkan dengan baik (*best practices*). Berbagai macam jenis industri kepariwisataan juga memerlukan dorongan dan arahan yang serupa. Usaha formal dapat didorong untuk membuka kesempatan bagi pemuda- yang mungkin tidak mampu menjadi wisatawan pada masa liburnya – untuk bekerja selama waktu puncak/masa liburannya.

Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan melalui Produk Jasa dan Pekerjaan Publik yang Ramah Lingkungan.

Penciptaan lapangan kerja yang layak merupakan salah satu tonggak terjadinya transisi ekonomi menuju praktek yang ramah lingkungan. Terdapat potensi yang sangat besar untuk pekerjaan yang ramah lingkungan dengan pekerjaan yang layak dalam industri kepariwisataan melalui pengembangan dan promosi produk-produk ramah lingkungan, pelayanan dan jasa ramah lingkungan yang dapat dikembangkan, di[produksi dan dipasarkan oleh komunitas lokal dan pemuda.. Berbagai produk ini mungkin dapat dijalankan untuk berbagai destinasi atau secara khusus dilaksanakan untuk satu destinasi tertentu. Penilaian yang menyeluruh terhadap

keterampilan, kompetensi dan modul pelatihan dan juga sertifikasi diperlukan untuk membuka potensi bagi pekerja maupun majikan. Pelatihan kewirausahaan (seperti bisnis ramah lingkungan untuk pemuda) dapat menambah manfaat bagi komunitas lokal. Dalam hal ini pengembangan keterampilan ramah lingkungan penting bagi tercapainya pariwisata berkelanjutan. Hal itu akan memperkuat kapasitas pekerja dan majikan dalam industri kepariwisataan serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat untuk mengerti dan menanggapi secara efektif berbagai tantangan global dalam perubahan iklim untuk destinasi pariwisata. Kunci bagi pengembangan produk dan jasa inovatif yang ramah lingkungan adalah menemukenali potensi berbagai lembaga/program keuangan yang dapat mendukung usaha-usaha lokal yang ramah lingkungan merupakan. Pengembangan keterampilan seyogyanya terfokus kepada aspek-aspek teknis dan kewirausahaan bagi para pengusaha kecil.

Selain itu, proyek infrastruktur publik dan sektor konstruksi swasta juga menawarkan potensi besar untuk pekerjaan layak yang ramah lingkungan dalam ekonomi pariwisata yang terhubung dengan konstruksi/bangunan ramah lingkungan dengan penekanan pada usaha yang ramah lingkungan. Singkatnya, investasi yang dinamis ke dalam ekonomi ramah lingkungan menempati tempat teratas dalam Agenda.

Catatan Kunci Bab 6

- Untuk Indonesia, pariwisata bukan tujuan pembangunan tetapi lebih sebagai alat pencapaian tujuan pembangunan: kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.
- Isu utama pariwisata Indonesia adalah pola pikir pemangku kepentingan yang berorientasi pada ekonomi jangka pendek dengan kapasitas sumberdaya manusia yang terbatas dan pembentukan kelembagaan yang terpaksa. Kinerja pariwisata dalam arti pertumbuhan kuantitatif sudah digunakan, akan tetapi kinerja kualitatif yang lebih baik harus dioptimalkan.
- Dibutuhkan kepemimpinan yang bekerja secara konsisten dan gigih mengikuti arah perencanaan pariwisata berkelanjutan, dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara reguler untuk menanggulangi dinamika permintaan dan juga mengantisipasi situasi.
- Rencana nasional pembangunan pariwisata menekankan pada nilai-nilai tertentu: kualitas hidup dan identitas harus ditempatkan dalam visi jangka panjang untuk dan sebagai dasar untuk mengarahkan agenda pembangunan. Dibutuhkan suatu Pedoman konkrit yang melengkapi Rencana Strategis untuk memandu bermacam kementerian dan aktor kunci yang terlibat dalam pembangunan pariwisata.
- Transisi/peralihan yang tepat bagi pekerja dan majikan dengan pekerjaan ramah lingkungan menuju ke rendah karbon, iklim yang berpegas, pembangunan yang ramah lingkungan di Indonesia penting sekali. Transisi dalam pasar kerja dan kebutuhan akan model usaha baru yang ditujukan melalui dialog sosial yang inklusif.
- Dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya sektor swasta, tetapi juga dan yang teramat penting adalah sektor publik yang harus menjadi pelopor dalam usaha tersebut. Dua dari sasaran utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perluasan kesempatan bekerja.
- Pengembangan kualitas harus menjadi prioritas. **Tumbuh dan Membaik** bertujuan khusus dan konteks dasar pengembangan.
- Diusulkan agar implementasi Pembangunan Pariwisata Nasional yang mencakup peran dan tugas dari kementerian yang berbeda-beda dikoordinasikan di bawah Kantor Wakil Presiden sebagai badan koordinasi tunggal.
- Rencana pembangunan sumberdaya manusia yang komprehensif untuk 10-20 tahun yang akan datang diperlukan dengan maksud untuk meramah lingkungan berbagai perspektif di semua tingkatan.
- Pekerjaan yang layak, inklusif dalam Pekerjaan Ramah Lingkungan harus menjadi arusutamanya dalam kebijakan pariwisata dan dipromosikan berbagai prakteknya. Penciptaan Pekerjaan Ramah Lingkungan mempunyai potensi besar melalui produk, jasa, pekerjaan dan konstruksi publik yang ramah lingkungan.
- Perubahan pola pikir sangat diperlukan dari yang sebelumnya berpusat pada sumberdaya dan pertumbuhan mekanisme pasar berjangka pendek ke yang berpusat pada masyarakat-pengetahuan dan pengembangan pasar untuk produk ramah lingkungan, indikator ramah lingkungan yang berkelanjutan harus ditetapkan, yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan. Permintaan ini mengarahkan baik investasi ke Ekonomi Ramah Lingkungan untuk keberlanjutan di masa mendatang.

Lampiran 1: Data Statistik Sektor Pariwisata

TABEL 1.1 KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDB DIBANDINGKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (DALAM PERSEN)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pertumbuhan ekonomi		3.83	4.38	4.72	5.03	5.69	5.50	6.35	6.01	4.63	6.20
Kontribusi pariwisata terhadap PDB	9.38	7.72	6.14	5.55	5.01	5.27	4.30	4.29	4.70	4.16	4.06

Sumber: ILO, Laporan ILO 2011, Mengukur Lapangan Kerja dalam Industri Kepariwisata lebih dari Neraca Satelit Pariwisata, Studi Kasus Indonesia, Tabel 3.1, 3.2. dan 3.3.

TABEL 1.2 BEBERAPA INDIKATOR KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PEMBANGUNAN INDONESIA (2000-2010)

	2000	2002	2004	2006	2008	2010
Total PDB (Rp)	1,368.09	1,610.01	2,273.14	3,339.50	4,951.36	6,422.92
PDB Pariwisata	128.31	98.81	113.78	143.62	232.93	261.06
% terhadap total	9.38	6.14	5.01	4.30	4.70	4.06
Total Pajak Tak langsung (triliun RP)	61.30	71.19	75.23	131.00	194.31	225.10
Pajak tak langsung Pariwisata	5.08	5.53	5.88	5.40	8.41	9.35
% terhadap total	8.29	7.77	7.81	4.12	4.32	4.16
Kesempatan kerja –total (juta)	89.84	91.65	93.72	95.46	102.55	108.21
Kesempatan kerja pariwisata	7.36	7.77	8.49	4.41	7.02	7.44
% terhadap total	8.11	8.48	9.06	4.65	6.84	6.87
Upah dan gaji (triliun Rp)	406.09	466.97	724.99	1,028.20	1,519.12	1,831.09
Upah & gaji pariwisata	40.09	29.91	33.75	45.63	75.45	84.80
% terhadap total	9.87	6.41	4.66	4.44	4.57	4.63

Sumber: Laporan ILO 2011, Mengukur Lapangan Kerja dalam Industri Kepariwisata lebih dari Neraca Satelit Pariwisata, Studi Kasus Indonesia

TABEL 1.3 KONTRIBUSI PARIWISATA MENURUT BEBERAPA INDIKATOR TERPILIH DI BEBERAPA PROVINSI

	BALI	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	BANTEN	SULAWESI TENGAH	RIAU	SUMATRA SELATAN
	2007	2009	2010	2008	2008	2007	2006
[1]	[2]	[3]	(4)	[5]	(6)	[7]	[8]
1. Keluaran (%)	51.56	6.46	3.79	2.56	6.04	2.31	1.25
2. PDB (%)	46.16	5.84	3.91	3.04	4.92	2.14	1.07
3. Pajak tak langsung (%)	66.44	8.33	3.90	3.23	7.23	4.03	1.50
4. Upah & gaji (%)	36.12	6.54	3.79	3.15	2.49	3.11	1.17
5. Kesempatan kerja (%)	40.56	9.48	3.97	4.03	2.78	5.22	1.04

Sumber: Laporan ILO 2011, Mengukur Lapangan Kerja dalam Industri Kepariwisata lebih dari Neraca Satelit Pariwisata, Studi Kasus Indonesia

TABEL 1.4 KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA 2000-2010

Indikator (1)	2000 (2)	2010 (3)	Penurunan kontribusi (2)-(3) /(2)
1. Keluaran (%)	9.27	5.06	4.21 - 45.41 %
2. PDB (%)	9.38	4.06	4.68 - 49.89 %
3.Pajak tak langsung (%)	8.29	4.16	3.97 - 47.89 %
4. Upah & gaji (%)	9.87	4.63	4.90 - 49.65 %
5. Kesempatan kerja (%)	8.11	6.87	1.27 - 15.66 %

Sumber: Laporan ILO 2011, Mengukur Lapangan Kerja dalam Industri Kepariwisata lebih dari Neraca Satelit Pariwisata, Studi Kasus Indonesia Perhitungan dari Tabel 1.3

TABEL 1.5 JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN DAN PARIWISATA (SEMINGGU SEBELUMNYA) BERDASARKAN JAM KERJA

NO	Total jam Kerja (jam)	2006	2008	2010
1	0	189,744	403,570	309,447
2	1-4	10,446	61,862	59,622
3	5-9	117,395	250,842	206,463
4	10-14	274,078	503,736	519,786
5	15-19	344,171	450,312	476,311
6	20-24	712,181	837,289	1,058,074
7	25-34	1,777,276	1,486,891	1,937,717
8	35-44	4,028,601	4,017,477	4,290,855
9	45-54	4,683,334	4,469,279	4,846,424
10	55-59	2,114,651	2,010,119	2,155,997
11	60-74	3,079,006	3,766,089	4,071,670
12	75+	1,224,174	2,426,575	2,280,518
Total		18,555,057	20,684,041	22,212,885

Sumber: Publikasi BPS, 2006,2008, 2010 Kondisi Tenaga Kerja

TABEL 1.6 KATEGORI DISTRIBUSI PENDAPATAN TENAGA KERJA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA Di TEMPAT KERJA (2010)

Kategori Pendapatan (RPs)	Perkotaan	%	Perdesaan	%
< 600,000	777,001	21.59	393,284	44.33
600,000 - 1,000,000	1,125,373	31.27	283,009	31.90
Total <1,000,000	1,902,373	52.86	676,292	76.23
>1,000,000	1696517	47.14	210,881	23.77
All Categories	3,598,891	100.00	887,174	100.00

Sumber: BPS, Situasi Tenaga Kerja di Indonesia, 2010 , Pengukuran Lapangan Kerja dalam Industri Pariwisata melalui Perhitungan Akun Satelit Pariwisata: Studi Kasus Indonesia, ILO,2011

TABEL 1.7 KATEGORI PENDAPATAN TENAGA KERJA DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA BERDASARKAN JENDER

Kategori Pendapatan (RPs)	Laki-laki	%	Perempuan	%
< 600,000	586,162	21.30	583,014	33.62
600,000 - 1,000,000	861,081	31.29	546,944	31.54
Total <1,000,000	1,447,243	52.59	1,129,958,	65.16
>1,000,000	1,304,693	47.41	604,171	34.84
All category Semua kategori	2,751,936	100.00	1,734,129	100.00

Sumber: BPS, Situasi Tenaga Kerja di Indonesia, 2010 , Pengukuran Lapangan Kerja dalam Industri Pariwisata melalui Perhitungan Akun Satelit Pariwisata: Studi Kasus Indonesia, ILO,2011

TABEL 1.8 UPAH DAN GAJI TENAGA KERJA TETAP DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA MENURUT LOKASI/DAERAH

Periode Survei (1)	Perkotaan dan Perdesaan (2)	Perkotaan (3)	Perdesaan (4)	Perbedaan Perkotaan- Perdesaan (3)-(4)/(4)
Februari 2008	948,800	1,007,161	712,414	294,747 – 41.36 %
Agustus 2008	976,640	1,034,037	719,543	314,494 – 43.71 %
Februari 2009	1,038,270	1,106,257	779,462	326,795- 41.92 %
Agustus 2009	1,103,404	1,168,558	773,047	395,511 - 49.87 %
Februari 2010	1,110,562	1,188,374	794,908	393,466 – 49.50%

Sumber: BPS, Situasi Tenaga Kerja di Indonesia, 2010 , Pengukuran Lapangan Kerja dalam Industri Pariwisata melalui Perhitungan Akun Satelit Pariwisata: Studi Kasus Indonesia, ILO,2011

TABEL 1.9 PERBEDAAN UPAH DAN GAJI ANTARA TENAGA KERJA TETAP DAN TIDAK TETAP DALAM PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

	(1) Tenaga kerja tetap (dalam 1000 Rps)	Tenaga kerja tidak tetap (2) (dalam 1000 Rps)	(1)-(2) dan persen ke (2) dalam 1000 Rps- %
Februari 2008	1,126,8	949,4	177,4 - 18.68%
Agustus 2008	1,158,1	976,9	181,2 - 18.55%
Februari 2009	1,296,1	1,071,9	224,2 - 20.92%
Agustus 2009	1,322,4	1,103,2	219,2 - 19.87%
Februari 2010	1,337,8	1,133,3	204,5 - 18.04%

Sumber: CBS, Situasi Tenaga Kerja di Indonesia, 2010 , Pengukuran Lapangan Kerja dalam Industri Pariwisata melalui Perhitungan Akun Satelit Pariwisata: Studi Kasus Indonesia, ILO,2011

TABEL 1.10: PERBEDAAN UPAH DAN GAJI TENAGA KERJA TETAP DI SEKTOR PERDAGANGAN DAN PARIWISATA MENURUT JENDER

Periode Survei (1)	Laki-laki (2) (000rps)	Perempuan (3)(000rps)	Perbedaan laki-laki-perempuan (2)-(3) /(3) (000rps -%)
Februari 2008	1,023,703	824,739	198,964 – 22.40 %
Agustus 2008	1,031,438	887,944	143,494 - 16.16 %
Februari 2009	1,116,045	912,497	203,548 – 22.30 %
Agustus 2009	1,220,893	921,612	299,281 -32.47 %
Februari 2010	1,195,497	975,776	219,721- 22.51%

Sumber: BPS, Situasi Tenaga Kerja di Indonesia, 2010 , Pengukuran Lapangan Kerja dalam Industri Pariwisata melalui Perhitungan Akun Satelit Pariwisata: Studi Kasus Indonesia, ILO,2011

Lampiran 2: Studi Kasus Nasional dan Internasional

Kasus Bali, Indonesia

Kasus Bali menyajikan suatu refleksi pendapat masyarakat Bali, yang peduli dengan pembangunan di pulau Bali dan menuliskan kepedulian mereka dalam sebuah buku berjudul *Jendela Pariwisata Indonesia: How Lucky is Bali?*

Kepariwisata untuk Bali: Sebagai sistem tradisional, Bali berdasarkan pada falsafah dan prinsip keseimbangan dan terwujud dalam sistem organisasi kemasyarakatannya, misal banjar dan subak. Perencanaan dan pembangunan kepariwisataan di Bali harus mengacu pada falsafah dan prinsip masyarakat Bali di atas. (I Gede Ardika, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Anggota Komite Kode Etik, UNWTO).

Antara Aneka Paradoks dan Budaya Hibrida: Globalisasi dan modernisme akan menyebabkan sejumlah paradox pada pariwisata di Bali: degradasi unsur budaya, kemerosotan pertanian, marginalisasi, dan terjadinya budaya hibrida. (I Wayan Geriya, Tim ahli Lembaga Pelestarian Budaya, 2005-sekarang, Universitas Indonesia)

Subak Hancur, Pariwisata Bali Hancur: Perkembangan kepariwisataan di Bali secara perlahan menghancurkan sektor pertanian (pertanian semakin terpinggirkan). Sistem tradisional lokal (subak) harus dilestarikan. Untuk itu diperlukan komitmen penyelamatan subak yang kondisinya sangat kritis secara kelembagaan dan hancur secara ekonomi. Munculnya kebijakan sertifikasi pertanahan (kepemilikan atas nama pribadi) dari pemerintah semakin membuka peluang bagi pemilik tanah untuk melakukan apa pun terhadap tanah miliknya, termasuk melakukan alih fungsi menjadi perumahan, pertokoan, hotel atau restoran. (I Wayan Windia, Ketua Badan Penjaminan Mutu, Universitas Udayana)

Pariwisata dan Pertanian di Bali: Prioritas pembangunan perekonomian di Bali mencakup 3 sektor ekonomi, yaitu: pertanian swasembada pangan, pariwisata budaya (budaya Bali dan agama Hindu), industri kecil dan kerajinan. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Bali, antara lain sebagai : sumber pendapatan masyarakat pedesaan, bahan baku bagi agro industri, devisa ekspor pertanian dan kegiatan konservasi alam. Di sektor pariwisata perlu dikembangkan: subsidi pada petani agar mempertahankan lahan pertaniannya melalui pemerintah dari pajak hotel dan restoran; eco-wisata, agro-wisata dan wisata pedesaan merupakan beberapa pilihan. (Agung Suryawan, Kepala Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata, Universitas Udayana, Ketua Yayasan Bali Greenery, Konsultan dan Agen Sertifikasi Green Tourism (EC3 Global) di Indonesia)

Perlu Roadmap Pembangunan Bali: (ini secara mutlak berarti bahwa pembangunan yang lalu tidak berdasarkan pada *roadmap*). Pertumbuhan ekonomi di Bali tidak proporsional, karena jumlah orang Bali sebagai pelaku bisnis sangat minim. Pemerintah pusat berharap besar pada pengusaha Bali: 99 persen pengusaha di Bali adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pengusaha Bali harus mendapatkan proteksi agar mampu menghadapi liberalisasi ekonomi. . Oleh karena itu diperlukan sebuah *roadmap* pembangunan Bali, seperti penegasan zona, pemetaan kekuatan pembangunan Bali menuju masyarakat sejahtera dan nilai alami

kepariwisataan. Dibutuhkan transparansi komunikasi di bawah kepemimpinan yang benar. (Gdesumarjaya Linggih, Ketua Kadin Bali 2010-2015, Anggota Komisi VI DPRRI).

Orang Bali “Tidak Menjual” Bali: Pembangunan pariwisata di Bali sudah *overbuilt*; apakah pemerintah akan membawa pariwisata Bali menjadi destinasi *mass tourism*?. Bali tumbuh dan berkembang sebagai destinasi wisata budaya dengan *niche market*-nya. Diperlukan : *masterplan* untuk pembangunan Bali ; pengembangan dan pengelolaan atraksi wisata agar bisnis pariwisata Bali semakin kompetitif. (Ida Bagus Ngurah Wijaya, *Ketua Bali Tourism Board* dan *Bali Village*; Konsulat Kehormatan swedia dan Finlandia di Bali, Operator pariwisata).

Inkonsistensi Pariwisata Budaya: Inkonsistensi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri. Pariwisata budaya tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tetapi penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Kebijakan pemerintah belum mendukung “pemupukan” (*fertilizing*) keunikan Bali, keaslian alam dan masyarakat Bali. Perhitungan PBB lahan pertanian sama besarnya dengan lahan yang diperuntukkan untuk kawasan komersial. Gianyar mempunyai *blue print* pembangunan dengan zona konservasi; zona pengembangan olah raga dan pemerintahan; zona konservasi air; zona pariwisata dan budaya; dan zona komersial. (Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati: *Bupati Kabupaten Gianyar*; *Ketua BPD-PHRI Bali*; *Wakil Ketua Bali Tourism Board*)

Jauh Ke Belakang: Posisi pariwisata Indonesia dibandingkan *country to country* masih jauh di bawah Malaysia, Singapura, Thailand dan Macau. Meskipun adanya budaya yang menarik, banyaknya pulau yang dimiliki, sebanyak 8000 pulau yang tidak terpakai tidak dimanfaatkan. Untuk perlu adanya pembenahan dengan Pemerintah sebagai pihak utama yang bertanggung jawab, dalam mempersiapkan *blue print* yang jelas tentang arah pembangunan kepariwisataan Indonesia. (Aloysius Purwa: *Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA)*; *Konsul Kehormatan Belanda wilayah Bali-NTB*)

Pengembangan pembangunan di Bali harus mampu **menyeimbangkan sektor pariwisata dengan pertanian, dan perlu melakukan penguatan pilar ekonomi**. Jenis-jenis ekonomi yang beragam akan memperkuat ekonomi regional. Bali (dan Indonesia) menarik dengan beragam budayanya, tidak perlu ada kasino di Bali (Indonesia). (Made Sidartha “Peter” Arya: *Pengusaha AryaCom Teknologi, desain pengolahan limbah dan menyediakan panel kontrol otomatis sirkuit listrik untuk beberapa properti hotel, restoran dan mall di Indonesia*)

Umumnya pertunjukan/pagelaran budaya Bali dan Indonesia tidak pernah secara sengaja diciptakan untuk tujuan pariwisata. Agar supaya berbagai pertunjukan/pagelaran pariwisata bermanfaat, untuk itu diperlukan organisator yang profesional. (I Gusti Kade Heryadi Anglilan: *Manager Inna Hotels*; aktif di BHA (Bali Hotel Association) dan IAPINDO (Ikatan Ahli Perhotelan Indonesia))

Pariwisata Bali sebagai batu loncatan untuk pencapaian tujuan pembangunan pariwisata di semua lini. Namun, potensi kepariwisataan yang ada di Bali kurang terkelola dengan baik. Perlu pendekatan yang terkoordinasi dan pemetaan kemampuan, kompetensi, peluang dan pasar. Diperlukan orang yang jujur, pintar dan profesional serta kepemimpinan tunggal dalam mengelola Bali dengan optimalisasi pengembangan, diversifikasi produk dan penerapan sistem *yield management* sehingga **mampu mengoptimalkan income kepariwisataan untuk**

masyarakat Bali. (Made Suryawan *Corporate Quality Development & Training Manager PT Grahawita Santika*)

Perlu adanya peraturan yang jelas, dan menyosialisasikan aturan tersebut melalui banjar dan kelompok subak; masyarakat berkembang lebih awal (daripada aturan pemerintah). (Anak Agung Gde Rai *Direktur The Walter Spies Foundation Bali; Ketua Himpunan Museum Bali*)

Kita boleh berpuas diri karena produk yang sudah memenuhi selera konsumen. Tetapi sebenarnya kita hanyalah menjadi salah satu penonton dalam aktivitas pariwisata dunia. Kualitas pariwisata masih kurang. Pariwisata di Bali dibentuk dari komunitas budaya, dan belum banyak proses konservasi budaya yang dilakukan Bali. **Pembangunan berbasis komunitas belum sepenuhnya ditunjang oleh sektor pariwisata seperti hotel. Pelaku pariwisata seharusnya membawa tamunya menyaksikan atraksi wisata di komunitas aslinya, bukan dengan memindahkannya ke hotel. Agar kualitas pariwisata bisa berkelanjutan, diperlukan upaya untuk mengkonservasi alam dan budaya. Budaya bukan faktor profit atau ekonomis, tetapi sesuatu yang harus dibiayai secara menyeluruh.** (I Gusti Putu Wahyudi *Angligan: Dewan Kehormatan Bali Tourism Board; Anggota Tim Pengkaji Pariwisata Bali; Dewan Pembina BARES (Bali Amateur Rescue Emergency Services)*)

Pelaku pariwisata bermodal kecil merupakan ujung tombak kepariwisataan. Namun, pendampingan bagi masyarakat kecil ini kurang mendapat perhatian. Kesiapan promosi terkesan lebih banyak untuk promosi ke luar negeri daripada mempersiapkannya untuk menerima turis. Masih banyak pelaksanaan yang bersifat ilegal (tidak sah) seperti pertukaran uang, pemandu, vila-vila ilegal. Selama pemerintah memasang target jumlah wisatawan dan bukannya melakukan pembenahan pada hal-hal yang telah disebutkan diatas , maka orang Bali hanya akan mendapatkan limbahnya. (Made Supatra Karang: *Dewan Penasehat Badan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Valuta Asing Indonesia (BPP APVA) dan BPD APVA*)

Hindari Stagnasi - Problem kepariwisataan Indonesia ada pada manajemen kepariwisataan mulai dari pemerintah pusat maupun daerah. Dalam menghadapi persaingan bebas, perlu melakukan pendekatan dari semua lini. Pengembangan kualitas SDM perlu ditingkatkan di dalam agenda untuk menghindari stagnasi. (Gusti Kade Sutawa: *Ketua Kuta Executive Club dan Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali*)

Mendesain Sendiri Model Pariwisata Bali - Perkembangan industri kepariwisataan masih mengarah ke pariwisata massal, mengeksploitasi dan mengkomoditisasikan sumberdaya komunitas (alam dan budaya). Wisata ekologi adalah pariwisata yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dengan tetap menerapkan nilai-nilai budaya lokal, dalam menjaga lingkungan dan kehidupan sosial berdasarkan kesepakatan bersama. Bali Desa Wisata Ekologi (Bali DWE) melihat **pentingnya membangun strategi mempertahankan keberadaan dan keseimbangan Bali dari kehancuran lingkungan dan nilai budayanya.** (I Putu Alit Suarsawan: *Ketua Asosiasi Bali Desa Wisata Ekologi-Bali DWE; Ketua Koperasi Anugerah Artajaya*)

Bali Overbuilt - Bali dulu dan sekarang sudah berbeda, Bali sudah *overbuilt*. Timbul kesemrawutan pembangunan karena peraturan dan rencana tata ruang belum dilaksanakan secara tegas. Ditengah-tengah perubahan, nilai dasar yang memberikan corak tertentu budaya Bali perlu

dipertahankan. Alih fungsi lahan pertanian di Bali; dalam dunia pertanian masyarakat Bali melakukan aktivitas sosial budayanya dan ini menjadi pagelaran/pertunjukan menarik kepariwisataan Bali. (Anak Agung Gede Rai: Direktur Operasi & Pemasaran PT Hotel Indonesia Internasional dan PT Natour serta PT Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC)).

Keterpinggiran Pelaku Budaya: Terpinggirnya masyarakat Bali di tengah semaraknya kepariwisataan Indonesia merupakan ancaman terberat dari persoalan Bali. Perubahan budaya telah terjadi - dari masyarakat yang ramah, sopan, penolong sekarang menjadi masyarakat yang tidak peduli, individualistik, yang disebabkan karena pengembangan pariwisata tidak terbagi dengan baik dan benar atau karena aturannya lebih banyak dilanggar. Dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian, sebagai pendukung kepariwisataan di Bali dan Indonesia. (Bagus Sudibya: - Pengusaha di bidang perhotelan, travel agent dan MICE; Koordinator Asita Wilayah Bali dan Nusa Tenggara).

(Disimpulkan dari Jendela Pariwisata Indonesia: How lucky is Bali).

Kasus Borobudur, Indonesia

Candi Borobudur di Jawa Tengah terdaftar di UNESCO sebagai Pusaka Budaya Dunia (No.592). Candi ini dibawah manajemen Taman Wisata Candi Borobudur-Prambanan, milik perusahaan Pemerintah di bawah tim manajemen profesional.

Candi ini memiliki angka kunjungan tertinggi, terutama oleh turis domestik, tetapi juga dari turis mancanegara dengan jumlah yang signifikan. Turis domestik dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,-, untuk anak remaja Rp 23.000,- per hari dan Rp 30.000,- per akhir minggu – selama masa puncak hari raya Idulfitri. Sejauh ini tidak ada pembatasan lamanya kunjungan, selama waktu kunjungan masih dibuka. Pintu masuk ditutup 30 menit sebelum waktu berkunjung habis.

Isu terakhir yang memakan waktu yang lama adalah tentang pedagang keliling dan pedagang kaki lima (PKL) yang dianggap mengganggu kenyamanan para wisatawan. Baru-baru ini mereka diberi tempat di sekitar area parkir, di bagian depan dan juga di sepanjang jalan menuju pintu masuk, yang memaksa semua pengunjung melalui jalan para pedagang tersebut. Di pintu masuk, para pengunjung di periksa – dilarang membawa barang/benda. Makanan/makanan ringan tidak diijinkan dibawa, tetapi masih ada yang membawa minuman – menghindari sampah di area pintu.

Seorang responden, kusir delman, mengatakan bahwa dia mendapatkan uang sebesar Rp 14.000,- per sekali jalan; ongkos yang dibayarkan oleh konsumen adalah Rp 30.000,-. Setiap 35 hari mereka berkumpul, hasil pendapatan tersebut dibagi rata diantara anggota kelompok. Responden tersebut mengatakan bahwa di luar area candi terdapat pasar yang menguntungkan bagi delmannya, tapi dia menjalankannya hanya setengah hari selama akhir minggu. Informan lain mengatakan bahwa keberadaan candi ini member berkah bagi komunitas.

Isu lain adalah bahwa pemerintah menanggapi tentang kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitarnya. Pada awal tahun 2000, ada LSM yang bekerja di desa Candirejo bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yang membawa desa ini pada tingkat nasional. Pada tahun 2003 desa ini menerima penghargaan dari Presiden. Mereka membentuk koperasi

untuk rumah tinggal penduduk (home-stays), memproduksi souvenir (cinderamata) dan juga mendorong pelatihan/praktek tari tradisional.

Di tahun 2011 kunjungan ke rumah tinggal penduduk tampaknya tidak ada wisatawan yang berkunjung 4 bulan terakhir, sejak Merapi meletus, gunung berapi yang letaknya dekat dengan candi. Koperasi menetapkan harga Rp 100.000,- per tempat tidur, makan pagi dan malam per orang. Pemilik rumah menerima Rp 35.000,- untuk akomodasi dan Rp 15.000,- untuk makan pagi dan makanan ringan, termasuk teh/kopi. Terdapat 25 rumah tinggal penduduk di desa ini. Kunjungan wisatawan ke desa ini mendorong penduduk lokal untuk memelihara kebun dengan bermacam-macam buah-buahan: mangga, pepaya, jeruk diantaranya meningkatkan kearah yang lebih menarik. Penemuan lain adalah keberadaan seorang artis yang tinggal di Ubud, Bali untuk waktu yang lama dan tengah mencari tempat tinggal yang baru. Dia tinggal di bantaran sungai Progo di desa Wanurejo, tidak jauh dari Candirejo. Para pemandu menamakan tempat itu sebagai Galeri SONY. Disini juga ada tempat untuk kinerja seni dan beberapa unit untuk tempat tinggal, semuanya didisain secara alami. Pemiliknya juga membantu masyarakat, tetangganya, membangun kamar-kamar untuk akomodasi wisatawan. Tempat tersebut menjadi tempat pertemuan para artis dan siapa saja yang mencari inspirasi dan ketenangan.

Pada tahun 2011 pemerintah daerah juga mendukung desa tersebut dengan memberikan program PNPM Mandiri, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Administrasi pemerintah desa membelanjakan uang tersebut untuk pembangunan rumah-rumah tinggal dan membeli sepeda yang disewakan kepada wisatawan.

Di area luar halaman dan yang lebih jauh, terdapat beberapa fasilitas: akomodasi dan restoran juga cinderamata/galeri seni yang melayani wisatawan yang datang dari jauh, wisatawan domestik dan mancanegara. Pada saat rumah tinggal kekurangan tamu beberapa akomodasi di luar, yang berkelas tinggi, tetap dipesan.

Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan segmen pasar dan perbedaan tingkat penyedia akomodasi. Masyarakat dan pedagang lokal yang berada di sekitar candi adalah penyedia pasar besar, sebagian besar wisatawan tidak tinggal sampai malam, dimana mereka cenderung membawa makanan dan minuman. Mereka juga tidak menghabiskan pengeluaran berkenaan dengan perjalanan disamping transportasi dan tiket – walaupun kecil sekalipun – pengeluaran mereka sangat berarti bagi pedagang kecil. Segmen lainnya adalah mereka yang tidak menyukai keramaian dan menyukai kunjungan yang menyenangkan, sesuai standar yang mereka bayar. Segmen yang ketiga adalah inti utama, yang giat mempelajari sesuatu, tidak terbatas hanya mengagumi, tetapi ingin lebih mengerti, mencari informasi tentang sejarah dan arti dari setiap segi yang mereka lihat di candi Borobudur. Mereka mau menetap di rumah-rumah penduduk, dalam waktu yang lama dan juga menetap di Yogyakarta atau Magelang yang jaraknya dekat dan mudah dicapai.

Ketika ketiga kelompok konsumen ini bergabung, tampaknya hanya kelompok pertama yang menikmati dan kelompok lainnya merasa terganggu dengan situasi tersebut. Penting sekali adanya survei yang mendalam tentang pasar untuk ketiga kelompok yang berbeda, meneliti tanggapan yang baik tentang isu-isu keberlanjutan. Ada anggapan yang kuat bahwa wisatawan massa mencari taman rekreasi – meskipun mereka sangat bangga dengan warisan budaya, mereka tidak bersikeras untuk mendapatkan informasi yang detail; ketiga kelompok tersebut mempunyai

arti yang berbeda tentang warisan budaya yang memerlukan pemeliharaan yang lebih baik untuk keberlanjutannya. Pembatasan waktu dalam bentuk pengelolaan pengunjung merupakan satu jalan untuk mengurangi beban.

Kunjungan yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober, 2011, dipandu oleh pemandu lokal yang berijazah. Informasi juga didapatkan melalui wawancara informal dengan kusir delman dan petugas di lapangan. Wawancara melalui telepon juga diadakan dengan pimpinan manajemen dari PT Taman Wisata Candi Borobudur-Prambanan.

Kasus Machu Picchu, Peru

Kasus Peru: Dalam upaya untuk promosi pariwisata, dalam tekanan untuk membayar kembali utangnya, Pemerintah Peru melakukan privatisasi sarana pariwisata di sekitar peninggalan yang terkenal Machu Picchu dengan memberikan konsesi jangka panjang kepada swasta. Pada tahun 1996, Peru Hotel, suatu anak perusahaan US-ORIENT EXPRESS, mendapat konsesi 30 tahun atas hotel di gunung yang sakral, di sebelah peninggalan, dan juga kereta api dari Cuzco ke Aguas Calientes, di bawah peninggalan yang dimaksud. Perusahaan yang sama juga menjalankan hotel mewah di Cuzco. Wisatawan sekarang tidak lagi menggunakan layanan pedagang dan pemasok lokal, sementara tiket masuk dan biaya perjalanan tak terjangkau bagi masyarakat lokal. Menurut UNESCO, pusaka dunia tersebut sekarang berada dalam keadaan terancam berat. Pemerintah Peru sekarang (saat itu) merencanakan untuk memasarkan Playa Hermosa dekat Tumbes, pantai berpasir yang hampir belum terjamah, di sebelah utara, dan membebaskan 100 ha lahan dari petani padi dan pisang. Konsesi akan diberikan hanya kepada investor asing yang potensial untuk periode 50-60 tahun untuk mengembangkan kawasan wisata dan sarana mewah untuk bersantai, termasuk padang golf, lapangan tenis untuk wisatawan kelas atas. Hal ini berarti pemindahan hak atas tanah dan hilangnya kehidupan bagi 10.000 petani dan nelayan. Selain itu juga direncanakan hal serupa untuk benteng Kuelap (provinsi Amazone), salah satu peninggalan arkeologis terpenting di Peru dari masa pra-INCA. Ke dua lokasi sudah dicanangkan sebagai lokasi untuk bisnis pariwisata oleh swasta dan amandemen undang-undang dilakukan, tanpa memberitahu, apalagi konsultasi kepada penduduk yang akan terkena dampak. (Sollifonds Informations Bulletin Nr 38/juni 2004)

Lampiran 3: Petikan yang Relevan dari Deklarasi Bern

Beberapa pernyataan dalam Deklarasi Bern (2005) yang ditulis oleh Marianne Hochuli (Deklarasi Bern) dan Christine Pluss (Kelompok Kerja Pariwisata dan Pembangunan) perlu menjadi perhatian pariwisata Indonesia kita:

“- ketidak-pastian masa depan: deregulasi dan liberalisasi telah membawa perubahan menyeluruh yang dramatis dalam industri kepariwisataan (hal 9);

- para pemain, struktur dan orang-orang yang bertanggung-jawab semakin lama semakin sukar mengidentifikasi masa depan yang banyak mengandung ketidak-pastian; beberapa destinasi pariwisata di negara berkembang mungkin **MENYUBSIDI** wisatawan dari negara asalnya; (hal 6)

- dalam liberalisasi ekonomi, tak ada sektor jasa lain yang mendapat banyak komitmen dari negara seperti halnya pariwisata (hal 7) (kemungkinan besar tanpa ditunjang oleh suatu study terlebih dahulu, catatan penulis);

- berbagai janji negara-negara industri pemberi bantuan pada negara berkembang untuk akses pasar dan akses **TIDAK DIPENUHI**; sementara negara-negara berkembang terbiasa menjadi kompetitif karena iklim yang menguntungkan, akses ke laut dan budaya serta keaneka-ragaman biologi, akses ke informasi internasional dan sistem reservasi on line sekarang telah menjadi faktor penting; (hal. 8)

- **MEMBATASI** hak Pemerintah Daerah/setempat untuk mengatur- artikel GATS VI menuntut agar hukum dan regulasi domestik diadministrasikan dengan cara yang layak, objektif dan tidak memihak, bahwa mereka tidak merupakan penghalang yang tak perlu pada perdagangan dalam jasa (pasal VI.4) bila ada kasus konflik, harus diserahkan ke sistem penyelesaian perselisihan WTO (World Trade Organization) untuk dinilai apakah tindakan itu layak, objektif dan tidak memihak, ini akan secara signifikan mengurangi kemungkinan pemerintah secara cukup mengatur pariwisatanya dan berbagai kebijakan investasinya pada tingkat nasional, sub-nasional dan lokal. Khususnya dalam pariwisata, yang bertumpu pada daya tarik, pemandangan yang tak terganggu dan keramahan penduduk lokal yang tulus, sangatlah penting agar prakarsa yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat diberi dukungan khusus. **pemerintah daerah harus mampu mengeluarkan peraturan yang berpihak pada pemilikan dan kedudukan lahan lokal, atau harus mampu memberi konsesi pada hotel yang mempekerjakan stafnya dengan prosentase besar berasal dari komunitas lokal, memberi preferensi pada material bangunan, pasokan makanan dan kerajinan setempat, dan mengambil pendekatan hati-hati pada pasokan air dan energi ..** (hal. 9);

- sejumlah kecil perusahaan pariwisata besar telah mendominasi sektor pariwisata internasional; khususnya dalam bidang agen perjalanan (pengecer) dan operator wisata yang oleh negara-negara industri diminta liberalisasi lebih lanjut kepada negara berkembang dalam negosiasi GATT, akan tetapi juga sektor perhotelan yang telah juga diintegrasikan.²⁸

-insentif investasi untuk memikat investasi asing, atas kerugian penduduk lokal (hal 10)

-Deklarasi Berne dan Kelompok Kerja Pariwisata dan Pembangunan berbagi kepedulian dengan banyak ahli pembangunan bahwa **komitmen lebih jauh untuk liberalisasi di bawah WTO akan merupakan ANCAMAN terhadap semakin banyaknya jumlah prakarsa untuk pariwisata yang bertanggungjawab yang menguntungkan penduduk lokal dan membantumelindungi mata pencaharian mereka (hal 14) .**

²⁸ Negara-negara berkembang khawatir bahwa pembukaan pasar yang lebih luas akan menghasilkan oligopoli oleh perusahaan besar yang sedikit jumlahnya; yang akan menambah tekanan pada perusahaan lokal dan mengurangi peluang pendapatan mereka; (hal 9);

Lampiran 4 : Pembelajaran dari Berbagai Praktek Terbaik Ekowisata

YAYASAN	STRATEGI	PEMBELAJARAN
PUSAT PENDIDIKAN KONSERVASI ALAM BODOGOL alami@prima.ney.id	. Ekowisata :jumlah sedikit, nilai tinggi . pendidikan melalui partisipasi : interpreter dan modul-modul . Inventarisasi potensi dan pemantauan . Pengembangan Koperasi, . Menggunakan sistem reservasi dan melakukan evaluasi teratur, . konsorsium untuk pengelolaan wilayah yang dilindungi (TN Gede Pangrango), Yayasan Alam Mitra Indonesia dan <i>Conservation International</i>, . bermitra dengan LSM dan komunitas, lembaga pendidikan? universitas dan operator perjalanan,	* Mencapai VISI dan Misi bersama antar anggota konsorsium * Partisipasi aktif komunitas pada setiap tahap dalam proses pembangunan, * Program penyebarnya secara intensif * system pemagangan dalam pemahaman konsep oleh pengelola kawasan dan operator * keuntungan lokasi terhadap apar
YAYASAN EKOWISATA HALIMUN bcn-ni16@indo.net.id	. membangun rumah tamu di tiap zona, dimiliki oleh masyarakat, . kenaggoatan terbuka bagi masyarakat di sekitar lokasi, . pelatihan untuk semua tingkatan: manajer, pemandu sampai penjaga/ porter . pembagian kerja : manajer untuk tiap rumah tamu, ada staff promosi yang berkantor di Bogor	* pentingnya menentukan kapasitas daya dukung yang dilembagakan : jumlah pengunjung secara formal diatur dan dikendalikan * pemantauan secara menerus * fasilitator berperan dalam menjembatani hubungan antara komunitas dengan masyarakat luar. * promosi kreatif untuk meningkatkan kunjungan
TANGKAHAN Tourism Institute, North Sumatera Namo Sialang village, Batang Serangan sugenkd@yahoo.com	. DISEMINASI KONSEP EKOWISATA . Perencanaan kawasan /zonasi : kawasan penelitian, pendidikan dan rekreasi . pengenalan PAKET: melakukan observasi: burung, kupu-kupu, arung jeram, paket penelitian dan sebagainya . Manajemen rumah inap yang ramah lingkungan	* konsep perlu disosialisasikan kepada komunitas sebelum memulai program * semua pihak yang berkepentingan mendapatkan penguatan, * jejaring menjadi makin luas
WALLACEA FOUNDATION JlPulauSaelusII, Gang Kenanga No 17 Bali	. Pemantauan oleh masyarakat, kerjasama dengan lembaga atau yayasan yang bertugas di lokasi, . Pemantauan dilakukan oleh masyarakat , bekerjasama dengan staf Yayasan yang bertugas di lokasi . Mengendalikan penebangan pohon, menghitung populasi burung dan menemukan kerusakan hutan . pengendalian penggunaan dinamit dalam penangkapan ikan . memosisikan komunitas sebagai aktor utama dalam ekowisata	* jangan mudah menjajikan apapun * diseminasi program sebelum mulai * kepekaan tinggi terhadap lingkungan, keserandian niat baik, peduli lingkungan sosial.

Lampiran 5: Definisi Pariwisata Ramah Lingkungan (*Green Tourism*)

Istilah ‘pariwisata ramah lingkungan’ semakin banyak digunakan dalam berbagai diskusi yang mencakup segitiga mendasar (ekonomi, lingkungan, sosial) sebagai ciri-ciri ‘pariwisata berkelanjutan’. Istilah ‘pariwisata ramah lingkungan’ ini sudah terdapat dalam literatur pariwisata sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, dengan adaptasi merujuk pada gerakan dari perdesaan ke pariwisata ‘ramah lingkungan’ di Eropa dan, di Jepang, Kementerian Pertanian (1992) mendefinisikan pariwisata ramah lingkungan sebagai “aktivitas bersenang-senang jenis tinggal (*‘staying type’*) untuk menikmati alam dan budaya dari destinasi dan berinteraksi dengan penduduk lokal di daerah yang kaya dengan lanskap alamnya’ (Kementerian Pertanian, 1992, dalam Hong et al 1992) perdesaan dan pegunungan .

Pada umumnya, konsep ‘pariwisata ramah lingkungan’ dapat ‘dikaitkan’ dengan ‘konsumerisme ramah lingkungan’, yang dapat didefinisikan sebagai ‘individu-individu yang mencari perlindungan diri mereka sendiri dan dunianya melalui kekuatan keputusan belinya. Dalam usahanya untuk melindungi dirinya sendiri dan dunianya, mereka meneliti dengan cermat berbagai produk untuk keselamatan lingkungan (Ottman, 1992:3)

‘Wisatawan ramah lingkungan’ akan lebih suka membeli berbagai produk perjalanan yang menurut persepsinya tidak merusak lingkungan. Isu lainnya adalah apakah mereka benar mempraktekan (a) pada rute ke suatu destinasi atas kebaikan dari penerbangan internasional muatan jarak jauh dengan emisi gas rumah kaca, menghabiskan sumberdaya enersi terbatas, polusi suara di bandara yang tidak mempunyai praktek pengurangan kebisingan seperti jam tengah malam/ dinihari dalam memperebutkan area tempat tinggal dsb.nya, dan (b) dalam destinasi ketika digunakan transportasi yang digerakkan oleh minyak fossil, makan malam dengan makanan dan minuman impor, menggunakan ac yang dinyalakan hampir di sepanjang hari, tidak mematikan listrik, tv, ac dan sebagainya selama waktu mereka tidak menggunakan ruangan, dan seterusnya

Konsep yang lebih kontemporer dari ‘pariwisata ramah lingkungan’ adalah menyertakan kapasitas industri untuk berkontribusi pada masa depan yang ekonomis yang memperlambat perubahan iklim, rendah karbon, sumberdaya yang efisien, ramah lingkungan dan ramah sosial.

Untuk tujuan dari Rencana Strategis ini, definisi ILO tentang ‘pariwisata ramah lingkungan’ diturunkan dari laporan UNEP ‘Menuju ekonomi ramah lingkungan’ (2011) yang mencakup satu Bab dalam kolaborasi dengan UNWTO berjudul ‘*Investing in **energy** and resource efficiency*’. Disebutkan: **Pariwisata ramah lingkungan** mempunyai potensi menciptakan bermacam pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan.

Perjalanan dan pariwisata adalah kegiatan yang padat sumberdaya insani, mempekerjakan secara langsung dan tak langsung 8% dari tenaga kerja global. Membuat pariwisata ramah lingkungan, yang menyertakan perbaikan efisiensi dalam enersi, air, dan sistem persampahan, diharapkan akan memperkuat potensi lapangan kerja sektor ini dengan meningkatnya persewaan

dan pemanfaatan sumber lokal serta peluang yang signifikan dalam pariwisata berorientasi pada budaya lokal dan lingkungan alam.

Lampiran 6: Alternatif Indikator Pariwisata Berkelanjutan dari UNWTO

Indikator Ekonomi :

- i. **Pendapatan dari pariwisata**, pendapatan dari pengeluaran wisman sangat penting sebagai pemasukan devisa, dan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran, dibandingkan dengan pengeluaran oleh orang Indonesia di luar negeri (*outbound*). Pengeluaran wisnus juga penting, secara keseluruhan lebih banyak daripada pengeluaran semua wisman, juga dilihat dari sudut distribusinya yang lebih ekstensif. Pajak dan retribusi merupakan indikator yang lebih baik daripada hanya pengeluaran total dari wisatawan.
- ii. **Sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan**, meningkatkan pendapatan penduduk lokal – penanggulangan kemiskinan telah menjadi tujuan dan juga komitmen Pemerintah, sebagaimana diperlihatkan dalam berbagai dokumen hukum. Akan tetapi, masih harus dilaksanakan. Juga kenyataan bahwa banyak daya tarik pariwisata berlokasi di atau dekat dengan daerah miskin, merupakan hal yang perlu dicatat. Indikator hendaknya dinilai terhadap (1) pertumbuhan pro penduduk miskin (*pro poor*), (2) peluang penghidupan non pertanian, (3) pengembangan usaha atau SMEs dalam mata rantai produk pariwisata, (4) pengelolaan lingkungan berkelanjutan, (5) hubungan dengan CSR (*Corporate Social Responsibilities*), (6) lapangan kerja dan pemberdayaan, (7) pertumbuhan dan diverifikasi, (8) akses ke pasar, dan (9) sumber mata pencaharian; Juga dampak langsung terhadap masyarakat miskin (penghasilan dan perbaikan pendapatan; pengembangan ekonomi lokal/pedesaan dan mata pencaharian penduduk; serta dampak baik terhadap lingkungan alami tempat masyarakat tinggal).
- iii. **Nilai uang (*value for money*)** untuk produk pariwisata; salah satu indikator yang telah memperbaiki Index Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Indonesia: WEF menyebutkan peringkat nilai uang Indonesia sebagai sangat berdaya saing
- iv. **Kebocoran ekonomi**, komitmen Pemerintah Indonesia dalam liberalisasi ekonomi, telah menciptakan ruang kebocoran yang besar. Bahkan industri pariwisata kecil pun tidak terbebas dari kebocoran, mengurangi manfaat ekonomi bagi negara.
- v. **Prosentase pendapatan dari pariwisata yang dianggarkan untuk konservasi** – konservasi sumberdaya alami dan budaya diperlukan untuk keberlanjutan pariwisata dan sumber pendanaan dapat secara langsung disumbangkan oleh pariwisata.
- vi. **Investasi bisnis, investasi komunitas dan pengeluaran Pemerintah** – pariwisata tidak akan pernah terjadi tanpa investasi oleh sektor swasta dan sektor publik; komunitas juga perlu melakukan investasi agar pariwisata lebih dapat berkelanjutan; investasi hendaknya membuka peluang untuk menunjang penciptaan lapangan kerja dan kewira-usahaan angkatan muda dalam rantai sektor suplai, dan juga menciptakan pekerjaan yang ramah lingkungan.
- vii. **Struktur Industri**, pariwisata berkelanjutan akan tergantung kepada kombinasi yang seimbang di antara berbagai jenis bisnis dan distribusinya.

Indikator Sosio budaya berkelanjutan

- i. **Kesejahteraan Komunitas tuan rumah**, pemerintah berkomitmen sebagai diindikasikan di dalam undang undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden dan dokumen lainnya dan juga peraturan pemerintah daerah.
- ii. **Aset budaya yang berlanjut**, tak akan ada pariwisata tanpa budaya, bahkan pariwisata alam pun, implisit mencakup budaya. Asset budaya sering menjadi target kapitalistik untuk dimiliki atau dikelola secara modern. Asset budaya selalu perlu melekat pada komunitas, termasuk nilai, dan budaya dalam bentuk makanan, pakaian dan lainnya – lebih dari sekedar budaya panggung.
- iii. **Partisipasi komunitas**, agar diperoleh tingkat tertentu kesejahteraan, komunitas perlu dilibatkan, tidak hanya terbatas sebagai pekerja, tetapi juga dalam memutuskan arah, perencanaan, dan sebagai penyedia jasa juga sebagai tuan rumah yang dihormati di daerahnya sendiri;
- iv. **Kepuasan atau tidak-kepuasan lokal**, sebagaimana diindikasikan dari sikap dan reaksi. Pariwisata yang memberikan manfaat pada komunitas akan diterima secara positif, ketidak-puasan akan membawa pada konflik atau sikap negatif terhadap bisnis, pemerintah, sesama penduduk, dan juga wisatawan
- v. **Pengaruh pariwisata terhadap komunitas**, sikap, manfaat sosial, perubahan gaya hidup, perumahan dan kependudukan.
- vi. **Akses oleh penduduk setempat pada aset aset kunci**, akses ke tapak tapak yang penting, halangan ekonomi, kepuasan terhadap tingkat akses
- vii. **Kesetaraan jender**, tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja formal dan informal berada di bawah partisipasi laki-laki, meskipun akomodasi, restoran, dan jasa perorangan merupakan subsektor yang lebih mudah dimasuki oleh angkatan pekerja perempuan, semua sektor hendaknya terbuka kepada perempuan dan laki-laki dan menawarkan upah dan kondisi kerja yang setara; akan tetapi, perhatian khusus perlu diberikan kepada jenis pekerjaan jender dalam pariwisata seperti akomodasi, restoran, dan jasa perorangan
- viii. **Pariwisata sex**, terkait dengan sex anak-anak dan prostitusi; pemantauan, pengawasan, pembangunan, membantu/ memberi pertolongan kepada korban/ orang yang teribat; (*wakil*) indikator harus pula dikembangkan dengan mempertimbangkan pencegahan dan mekanisme rujukan / *referral*
- ix. **Pekerja anak**, perlu ditanggapi dan dipantau di destinasi pariwisata, karena kenyataannya mereka adalah pekerja yang tidak dibayar, khususnya di sektor informal; disamping itu juga perdagangan anak perlu dipantau.
- x. **Konservasi/pusaka terbangun**, tapak tapak budaya, monumen, penandaan (tetenger), sistem reservasi, kerusakan, pemeliharaan
- xi. **Konservasi nilai nilai budaya**, kehidupan tradisional, makanan/ memasak, aturan berpakaian, peristiwa budaya, kerajinan, dll.

Indikator Lingkungan :

- i. Perlindungan pada sumberdaya alami berharga.**
 - a. Perlindungan terhadap ekosistem yang kritis: tapak yang rentan, spesies yang terancam
 - b. Kualitas air laut: kontaminasi, persepsi tentang kualitas air
 - c. Promosi dan pemeliharaan industri pariwisata ramah lingkungan
- ii. Pengelolaan sumberdaya alami langka.**
 - a. Pengelolaan Enersi: penghematan, efisiensi, enersi diperbaharui.
 - b. Perubahan Iklim dan Pariwisata: mitigasi, adaptasi, kejadian iklim ekstrim, resiko, dampak terhadap destinasi, emisi rumah kaca, transpor dan penggunaan enersi.
 - c. Ketersediaan air dan konservasi: pasokan air, tarif air, daur ulang, kelangkaan.
- iii. Pembatasan dampak aktivitas pariwisata.**
 - a. Pengolahan limbah cair: air kotor, perluasan sistem, efektivitas, pengurangan kontaminasi
 - b. Pengelolaan sampah padat: sampah, pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, deposit, pengumpulan, bahan berbahaya.
 - c. Pencemaran udara: kualitas, kesehatan, pencemaran dari pariwisata, persepsi wisatawan
 - d. Pengendalian tingkat kebisingan; pengukuran, persepsi.
- iv. Pengelolaan dampak visual dari fasilitas pariwisata dan infrastruktur: rona lingkungan, konstruksi, rancangan, bentang alam.**
- v. Promosi pariwisata berkelanjutan untuk memastikan kepuasan konsumen, agenda pekerjaan yang layak, keuntungan bisnis pariwisata, melalui 3 pilar:**
 - a. Keadilan sosial /sosio-budaya (monumen, pusaka budaya, kelompok etnis, budaya hidup (*living culture*) , kelompok penduduk asli (*indigenous*).
 - b. Pembangunan ekonomi (pembangunan ekonomi nasional dan lokal, penciptaan lapangan kerja, dan kondisi kerja yang lebih baik)
 - c. Integritas lingkungan (ekologi yang baik, lingkungan yang baik dan sumberdaya alam yang baik)
- vi. Kesehatan dan Keselamatan**
 - a. Kesehatan: kesehatan masyarakat, kesehatan komunitas, keamanan makanan, kesehatan dan keselamatan pekerja yang mempertimbangkan kebutuhan khusus pekerja perempuan dan laki-laki sesuai dengan latar belakang pekerjaannya
 - b. Mekanisme penanggulangan epidemi dan penyakit transmisi internasional seperti TB, flu burung, HIV/AIDS pada semua tingkat dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan; fasilitasi, perencanaan keadaan darurat, dampak pada pariwisata
 - c. Keamanan wisatawan, keamanan resiko, perselisihan/ kerusakan sipil, terorisme, bencana alam, pengelolaan perencanaan tanggap darurat, fasilitasi

vii. Pengendalian tingkat aktivitas wisatawan

- a. Pengendalian intensitas penggunaan: tekanan di tapak dan sistem, jumlah wisatawan, kesesakan (*crowding*)
- b. Pengelolaan kegiatan (*event*): olahraga, pameran, pengendalian kesesakan/ kerumunan

Indikator Pengendalian Destinasi dan Perencanaan

- i. **Pengintegrasian pariwisata ke dalam perencanaan lokal/regional:** informasi untuk perencana, evaluasi rencana, hasil implementasi
- ii. **Pengawasan pembangunan:** prosedur pengawasan, pemanfaatan lahan, pengelolaan properti, pelaksanaan.
- iii. **Transpor terkait pariwisata:** pola mobilitas, keamanan, sistem transportasi, efisiensi, transportasi di dalam destinasi, transpor dari/ke destinasi, transportasi udara: respons terhadap perubahan pola dan akses
- iv. **Perancangan Produk dan Jasa**
 - a. Penciptaan rute dan sirkuit perjalanan
 - b. Penyiapkan jasa yang beraneka-ragam
 - c. Pemasaran untuk pariwisata berkelanjutan: pemasaran ramah lingkungan, produk dan pengalaman yang menekankan pada keberlanjutan, penetrasi pasar, respons wisatawan, efektivitas pemasaran
 - d. Citra destinasi
- v. **Keberlanjutan operasi dan jasa pariwisata**
 - (1) Menciptakan rute dan sirkuit trip
 - (2) Menyiapkan jasa yang beraneka-ragam
 - (3) Pemasaran untuk pariwisata berkelanjutan: pemasaran ramah lingkungan, produk dan pengalaman yang menekankan pada keberlanjutan, penetrasi pasar, respons wisatawan, efektivitas pemasaran
 - (4) Perlindungan citra destinasi: merk (*branding*), visi, pemasaran strategik

Lampiran 7: Undang-undang dan Peraturan terkait dengan Usaha dan Pengembangan Pariwisata

Undang-undang No 25-2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang bertujuan membantu koordinasi, integrasi, dan sinergi, keterkaitan dan konsistensi, partisipasi komintas dan efisiensi penggunaan sumberdaya.

Undang-undang No 32-2004 dan N0 12-2008 tentang Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pembagian pemerintahan/ *governance* antara pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten/kota.

Undang-undang No. 32 – 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dengan lingkup perlindungan, pengelolaan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Undang-undang No 13-2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyangkut isu-isu ketenagakerjaan, termasuk tanggung jawab tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga komunitas mempunyai kuasa dalam pengembangan kesempatan bekerja, tidak terbatas sebagai pekerja tetapi juga penciptaan kesempatan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya.

Undang-undang No 11-2010 tentang Warisan Budaya, yang bertujuan untuk mengkonservasi warisan budaya bagi kesejahteraan rakyat, identitas nasional dan martabat serta juga memromosikannya kepada komunitas internasional.

Undang-undang No 27-2007 tentang Pengelolaan Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang mencakup isu-isu perencanaan dan juga pemanfaatan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil serta berbagai persyaratannya dalam pengelolaan lingkungan

Undang-undang No 23-2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak supaya mereka dapat bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal berdasarkan martabat manusia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pelaksanaan Penerapan Undang-undang Perlindungan Anak berdasarkan pada Pancasila dan UUD-45 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi tentang Hak Anak seperti non diskriminasi, minat/kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan, dan menghormati pandangan anak.

Undang-undang No 7-1984 tmengenai Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-undang No 20-1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 138 Mengenai Usia Minimum untuk Izin Kerja.

Undang-undang No 1-2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 182 mengenai Larangan dan Tindakan Segera terhadap Penghapusan Bentuk Terburuk Buruh Anak

Kerangka Perundangan di Indonesia (No 10-2004, Pasal 7 Ayat 1) sudah diganti oleh Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 nomor (1)**:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangan-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat);
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat Peraturan Daerah dapat mencakup sampai ke hierarki peraturan Provinsi; Peraturan Gubernur; Peraturan Daerah (kabupaten/kota); Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan Peraturan Desa

Oleh karena itu, mungkin akan ada berbagai tingkat pengaruh dan pengendalian dari berbagai kebijakan publik yang relevans dengan pembangunan pariwisata dari pemerintah yang paling senior dan pejabat resmi, sampai ke tingkat desa/ lokal

Peraturan Perundang- Undangan terkait Pariwisata

Kelompok	Jenis Regulasi	Mengenai
Dimensi Keseluruhan (Umum)	UU Nomor 11 Tahun 2010	Cagar Budaya
	UU Nomor 10 Tahun 2009	Kepariwisata
	UU No 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
	UU Nomor 23 Tahun 2002	Perlindungan Anak
	UU Nomor 39 Tahun 1999	Hak Asasi Manusia
	PP Nomor 50 Tahun 2011	Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025
	Perpres Nomor 79 Tahun 2011	Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
	Perpres Nomor 16 Tahun 2008 (Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003)	Bebas Visa Kunjungan Singkat
	Kepres Nomor 59 Tahun 2002	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
	Kepres Nomor 87 Tahun 2002	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
	Inpres Nomor 16 Tahun 2005	Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata
Investasi	UU Nomor 25 Tahun 2007	Penanaman Modal
	PP Nomor 1 Tahun 2008	Penanaman Modal Pemerintah
	PP Nomor 1 Tahun 2007	Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
	PP Nomor 83 Tahun 2001 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994)	Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
	Perpres Nomor 6 Tahun 2012	Rencana Umum Penanaman Modal
	Perpres Nomor 36 Tahun 2010	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
	Perpres Nomor 27 Tahun 2009	Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
	Perpres Nomor 76 Tahun 2007	Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
	Perpres Nomor 77 Tahun 2007	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
	Perpres Nomor 90 Tahun 2007	Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kelompok	Jenis Regulasi	Mengenai
Investasi	Perpres Nomor 16 Tahun 2006	Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN
	Kepres Nomor 29 Tahun 2004	Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap
	Kepres Nomor 48 Tahun 2004	Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China
	Inpres Nomor 3 Tahun 2006	Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
Lingkungan dan Sumberdaya	UU Nomor 32 Tahun 2009	Pengelolaan Lingkungan Hidup
	UU Nomor 45 Tahun 2009 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004)	Perikanan
	UU Nomor 7 Tahun 2004	Sumber Daya Air
	PP Nomor 3 Tahun 2008 (Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007)	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
	PP Nomor 42 Tahun 2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
	PP Nomor 60 Tahun 2007	Konservasi Sumber Daya Ikan
	PP Nomor 44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan
	PP Nomor 45 Tahun 2004	Perlindungan Hutan
	PP Nomor 34 Tahun 2002	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
	PP Nomor 4 Tahun 2001	Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
	PP Nomor 19 Tahun 1999	Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
	PP Nomor 68 Tahun 1998	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
	PP Nomor 6 Tahun 1996	Perairan Indonesia
	PP Nomor 18 Tahun 1994	Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
	Perpres Nomor 61 Tahun 2011	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)
	Perpres Nomor 12 Tahun 2008	Dewan Sumber Air
	Perpres Nomor 78 Tahun 2005	Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
	Kepres Nomor 33 Tahun 2002	Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

Kelompok	Jenis Regulasi	Mengenai
Lingkungan dan Sumberdaya	Inpres Nomor 2 Tahun 2008	Penghematan Energi Dan Air
	Inpres Nomor 4 Tahun 2005	Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
	Inpres Nomor 2 Tahun 2002	Penambangan Pasir Laut
Perencanaan	UU Nomor 26 Tahun 2007	Penataan Ruang
	UU Nomor 27 Tahun 2007	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	UU Nomor 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
	PP Nomor 50 Tahun 2011	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025
	PP Nomor 26 Tahun 2008	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
	PP Nomor 40 Tahun 2006	Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
	PP Nomor 39 Tahun 2006	Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
	Kepres Nomor 4 Tahun 2009	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
	Inpres Nomor 1 Tahun 2010	Perencanaan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
	Inpres Nomor 7 Tahun 2002	Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Transportasi	UU Nomor 1 Tahun 2009	Penerbangan
	UU Nomor 22 Tahun 2009	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	UU Nomor 17 Tahun 2008	Pelayaran
	UU Nomor 23 Tahun 2007	Perkeretaapian
	PP Nomor 37 Tahun 2002	Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan
	PP Nomor 69 Tahun 2001	Kepelabuhanan
	PP Nomor 70 Tahun 2001	Kebandarudaraan
	PP Nomor 82 Tahun 1999	Angkutan di Perairan
Industri dan Konsumen	UU Nomor 14 Tahun 2001	Paten
	UU Nomor 15 Tahun 2001	Merek
	UU Nomor 8 Tahun 1999	Perlindungan Konsumen
	PP Nomor 28 Tahun 2004	Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
	PP Nomor 58 Tahun 2001	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
	PP Nomor 59 Tahun 2001	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Industri dan Konsumen	Perpres Nomor 28 Tahun 2008	Kebijakan Industri Nasional
	Kepres Nomor 24 Tahun 2005	Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
	Kepres Nomor 127 Tahun 2001	Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang

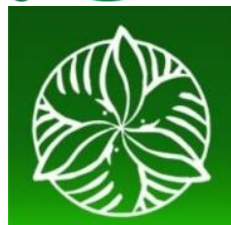
Kelompok	Jenis Regulasi	Mengenai
		Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan
	Inpres Nomor 6 Tahun 2007	Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Inpres Nomor 5 Tahun 2005	Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional
Pemerintahan	UU Nomor 32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah
	PP Nomor 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	PP Nomor 50 Tahun 2007	Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
	PP Nomor 25 Tahun 2000	Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Lampiran 8: Kode Etik Global Pariwisata

	Kontribusi pariwisata terhadap saling pengertian dan saling menghormati antara penduduk berbagai bangsa dan masyarakat
	Pariwisata sebagai kendaraan bagi kepuasan individu dan bersama
	Pariwisata, faktor pembangunan berkelanjutan
	Pariwisata, pengguna pusaka budaya umat manusia dan berkontribusi terhadap penguatannya
	Pariwisata, aktivitas yang bermanfaat bagi negara yang menjadi tuan rumah dan komunitas
	Kewajiban pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan
	Hak atas pariwisata
	Kebebasan/keleluasaan pergerakan wisatawan
	Hak pekerja dan pengusaha dalam industri kepariwisataan
	Penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Global Pariwisata

Sumber: UNWTO. Resolusi yang Disetujui oleh General Assembly. 2001

Lampiran 9 : Jejaring Lingkungan (*Eco-Network*) di Indonesia



Peta Hijau atau **Green Map Indonesia** adalah pusat organisasi nasional yang berada di Yogyakarta, Indonesia. Kami mengkonsolidir gerakan Peta Hijau, memperkenalkan Peta Hijau ke lebih banyak daerah, dan mengembangkan jejaringkerja dengan pendiri Peta Hijau lainnya, secara regional dan global <http://greenmap.or.id/>

Generasihijau Indonesia (*Greeneration Indonesia (GI)*) adalah perusahaan sosial yang menjalankan aktivitas bisnisnya tanpa melupakan komitmennya terhadap dampak sosial, mislanya meningkatkan kesadaran rakyat Indonesia terhadap isu lingkungan yang terjadi di dunia, dan mengajak mereka agar menjadikan sikap dan gaya hidup yang bersahabat dengan lingkungan sebagai fiosofo hidup. <http://greeneration.org/>

Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) adalah organisasi nir laba terletak di Jakarta, berpengalaman dan spesialisasi dalam memromosikan dan mengimplementasikan berbagai program dalam enersi diperbaharui, Mekanisme Pembangunan Bersih dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah bersahabat lingkungan yang berbasis komunitas melalui pendidikan, pembangunan kapasitas, studi kelayakan dan advokasi kebijakan dan juga akses pada keuangan mikro dan mengaitkan usaha kecil dan menengah ke akses teknologi, pasar dan finansial. <http://ybul.or.id/>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (*Walhi*) adalah organisasi lingkungan nir laba terbesar di Indonesia. Visi kami adalah merealisasikan tatanan sosialm ekonomi dan politik yang adil dan demokratis dan dapat menjamin hak hak rakayt pada berbagai sumber penghidupannya dan lingkungan yang sehat, <http://www.walhi.or.id/>

Pengawas Hutan Indonesia (*Forest Watch Indonesia (FWI)*) adalah jejaring pemantau hutan yang independen yang menggabungkan individu dan organisasia yang berkomitmen membantu sistem pengelolaan data dan informasi kehutanan yang transparan yang dapat menjamin pengelolaan hutan yang tepat dan berkelanjutan. <http://fwi.or.id>

LEI-Lembaga Ekolabel Indonesia adalah organisasi berbasis konstituen nir laba yang mengembangkan sistem sertifikasi kehutanan yang memromosikan misi kami: pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan tepat di Indonesia. <http://www.lei.or.id>

Yayasan Pengembangan Biosains & Bioteknologi (YPBB) adalah organisasi non-pemerintah tidak untuk laba yang mengabdikan diri untuk mendidik masyarakat melalui contoh dan proses formal, mendidik mereka dan mentransfer keahlian yang diperlukan untuk memberdayakan mereka agar hidup dengan harmonis dan meningkatkan keanekaragaman hayai. <http://ypbbblog.blogspot.com/>

TUNAS HIJAU (*TH*) adalah organisasi lingkungan nir laba, oleh anak-anak dan anak muda yang melakukan aksi untuk bumi yang lebih baik, berada di Surabaya, yang konsisten dalam upayanya untuk membantu agar lingkungan menjadi lebih baik secara berkesinambungan, nyata dan sederhana. <http://tunashijau.org/>



Indonesia Hijau adalah organisasi yang bertujuan mengembalikan fungsi hutan dan konservasi bumi sebagai satu planet untuk kehidupan. <http://indonesiahijau.or.id/>

www.indonesiaorganic.com (CV Dunia dan Gaya) adalah situs yang fokus pada organik yang menyampaikan manfaat pokok yang sama, dan juga menghubungkan orang-orang yang ingin hidup sehat dari ekosistem yang seimbang baik dan mengkonservasi sumberdaya bumi untuk generasi yang akan datang, khususnya mereka di Indonesia yang bersandar pada rahmat alam dalam penghidupannya hari ke hari. <http://www.indonesiaorganic.com/>

Yayasan IDEP (Indonesian Development of Education and Permeaculture: Pendidikan dan Pengembangan dan Permeakultur) adalah LSM lokal Indonesia yang mengembangkan dan menyelenggarakan program pelatihan, komunitas dan media terkait dengan pembangunan berkelanjutan melalui Permakultur, dan Pengelolaan Bencana berbasis Komunitas. <http://www.idepfoundation.org/>

KEHATI adalah lembaga pemberi bantuan independen, yang bekerja dengan semua mitra untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati dan secara tidak mengenal lelah mendukung berbagai upaya konservasi keanekaragaman biologi dan pemanfaatan berkelanjutan untuk keanekaragaman hayati, termasuk partisipasi komunitas, kelompok kepentingan dan berbagai usaha yang mempengaruhi konservasi keanekaragaman hayati. <http://www.kehati.or.id>

Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) adalah jejaring organisasi yang didirikan pada Januari 1992, dengan keanggotaan terdiri dari 12 LSM dari 4 provinsi di Sumatra (Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Bengkulu dan Jambi), yang fokusnya adalah konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan komunitas. <http://www.warsi.or.id/>

Telapak adalah asosiasi aktivis LSM, praktisi usaha, akademisi, afiliasi media dan pimpinan masyarakat adat/ asli, yang bekerja dengan masyarakat adat/ asli, nelayan, dan petani Indonesia menuju ke keberlanjutan, kedaulatan dan integritas. <http://www.telapak.org>

Ecolabel Indonesia. Ecolabel ini digunakan untuk barang-barang eceran/ ritel di Indonesia. Kriteria didasarkan pada studi teknik ilmiah dari seluruh siklus hidup aspek lingkungan dari produk. <http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/ecolabel-indonesia>

Pelangi Indonesia adalah lembaga riset independen dengan reputasi nasional dan internasional yang menjadi rujukan dan pelopor melalui berbagai studi dan advokasinya tentang berbagai isu strategis. <http://www.pelangi.or.id>

Indecon adalah organisasi nirlaba yang memfokuskan aktivitasnya dalam pengembangan dan promosi ekoturisme di Indonesia. Didirikan pada tahun 1995, Indecon telah memfasilitasi bermacam pemangku kepentingan ekoturisme dalam pembangunan ekoturisme di Indonesia. <http://www.indecon.or.id>

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi dari 3 organisasi lingkungan di Riau, Sumatera, Indonesia: Program Tesso Nilo WWF Indonesia, Jikalahari ("Jejaring Penyelamat Hutan Riau") dan Walhi Riau (Sahabat Bumi Indonesia). <http://www.eyesontheforest.or.id>



Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) adalah organisasi jejaring yang diprakarsai oleh beberapa organisasi non pemerintah, organisasi komunitas adat, penelitian individu yang peduli pada isu kekayaan sumberdaya alami, khususnya hutan di Indonesia. <http://kpshk.org/>



Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) adalah organisasi nir laba yang menciptakan komunitas yang sejahtera dan mandiri melalui pendekatan kolaboratif yang adil dan berkelanjutan sumberdaya alam dan sumberdaya alam. <http://www.latin.or.id>



Peduli Konservasi Alam Indonesia (PEKA Indonesia) Foundation adalah lembaga yang mempunyai 4 program utama dalam Riset, Konservasi, Pendidikan dan Pembangunan Komunitas, kami mempromosikan Kesehatan Ekosistem di Indonesia. <http://www.peka-indonesia.org>



Sources of Indonesia (SoI) or (Sumber daya-sumber daya Indonesia) adalah organisasi lokal nir laba yang melibatkan masyarakat setempat dalam setiap implementasi dari programnya. <http://www.soindonesia.org>



Greenomics Indonesia adalah lembaga pengembangan kebijakan yang mengabdikan diri untuk memperkenalkan pendekatan kebijakan, finansial dan ekonomi berbasis empirik dan lapangan inovatif, dengan tujuan untuk mendukung gerakan menuju *governance* bersumberdaya alam yang baik. <http://www.greenomics.org>



PT. Greenliving Indonesia adalah perusahaan yang melibatkan diri dalam manufaktur berbagai produk yang ramah lingkungan yang bisnis intinya adalah mengembangkan produk hutan rakyat yang dikelola secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. <http://greenlivingindonesia.com>



Sumatran Orangutan Society (SOS) mengabdikan diri pada konservasi orangutan Sumatra dan rumah hutannya melalui peningkatan kesadaran atas ancaman yang dihadapi orangutan liar, dan melalui aktivitas pencaharian dana untuk mendukung proyek konservasi akar rumput di Sumatra. <http://www.orangutans-sos.org/>



Global Green (Indonesian Ecosystem Restoration: Restorasi Ekosistem Indonesia) Global Green adalah perusahaan swasta nasional yang fokus pada restorasi ekosistem. Tujuan kami adalah untuk memaksimalkan fungsi hutan sebagai kesatuan ekosistem dengan melakukan perlindungan hutan, memperkaya penanaman, memperkenalkan kembali flora dan fauna asli, revegetasi dan repopulasi dan pengelolaan habitat. <http://www.globalgreen.co.id/>



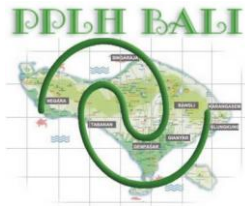
Global Green Indonesia Global Green Indonesia adalah perusahaan independen, inovatif, berdaya saing tinggi, perhatian pada lingkungan dan secara menerus melakukan berbagai usaha untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global yang didukung oleh sumberdaya profesional. <http://www.globalgreenindonesia.co.cc/>



Green Radio adalah satu satunya stasiun radio di Indonesia yang menyiarkan program berfokus pada berbagai isu lingkungan. <http://www.greenradio.fm/>



Asosiasi Organik Bali didirikan dengan dasar mengembalikan Bali ke Pulau Organik yang mengembangkan berbagai upaya yang memungkinkan mereka mampu membantu berbagai teknologi pertanian organik untuk nilai tambah dan memperbaiki kualitas hidup petani sambil merawat lingkungan alami Bali <http://baliorganicassociation.wordpress.com>



FORUMHIJAUBDG

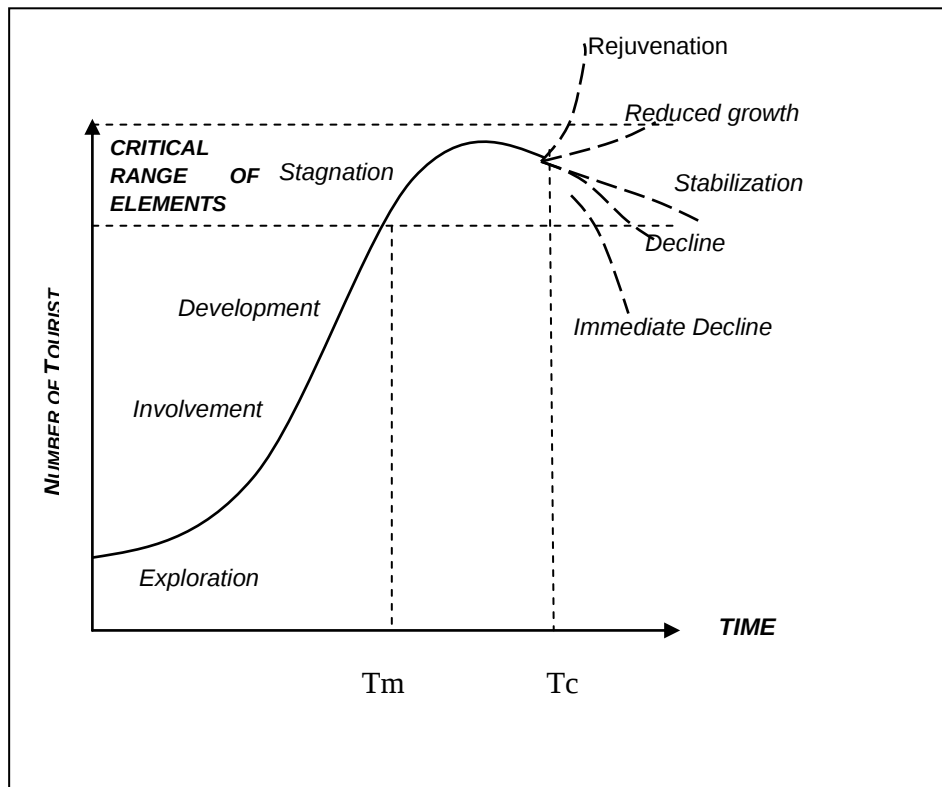
Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali adalah Organisasi non Pemerintah yang didirikan pada tahun 1997 yang mengkonsentrasikan diri pada mengatasi permasalahan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kelompok menjalankan berbagai program pendidikan dan penyadaran lingkungan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan alami kita.

<http://www.pplhbali.or.id/>

Forum Hijau Bandung (FHB) adalah organisasi publik yang memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk plestarian lingkungan di kota Bandung.

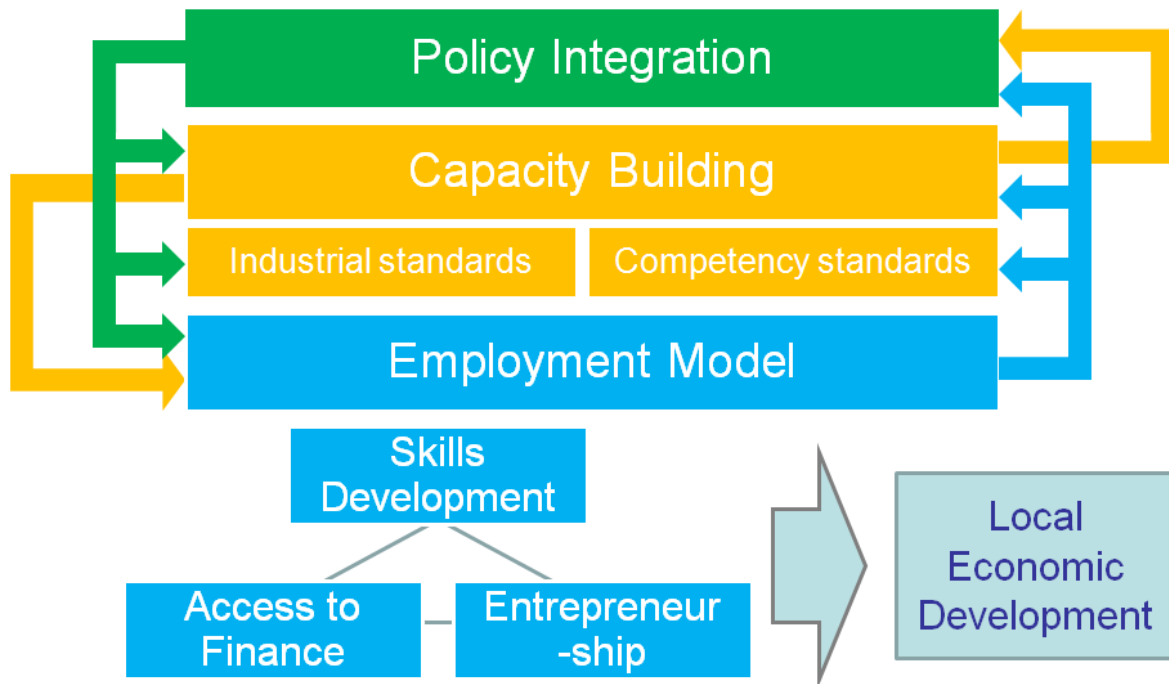
<http://forumhijaubandung.wordpress.com/>

Lampiran 10 : Siklus-Hidup Tipikal Destinasi Pariwisata

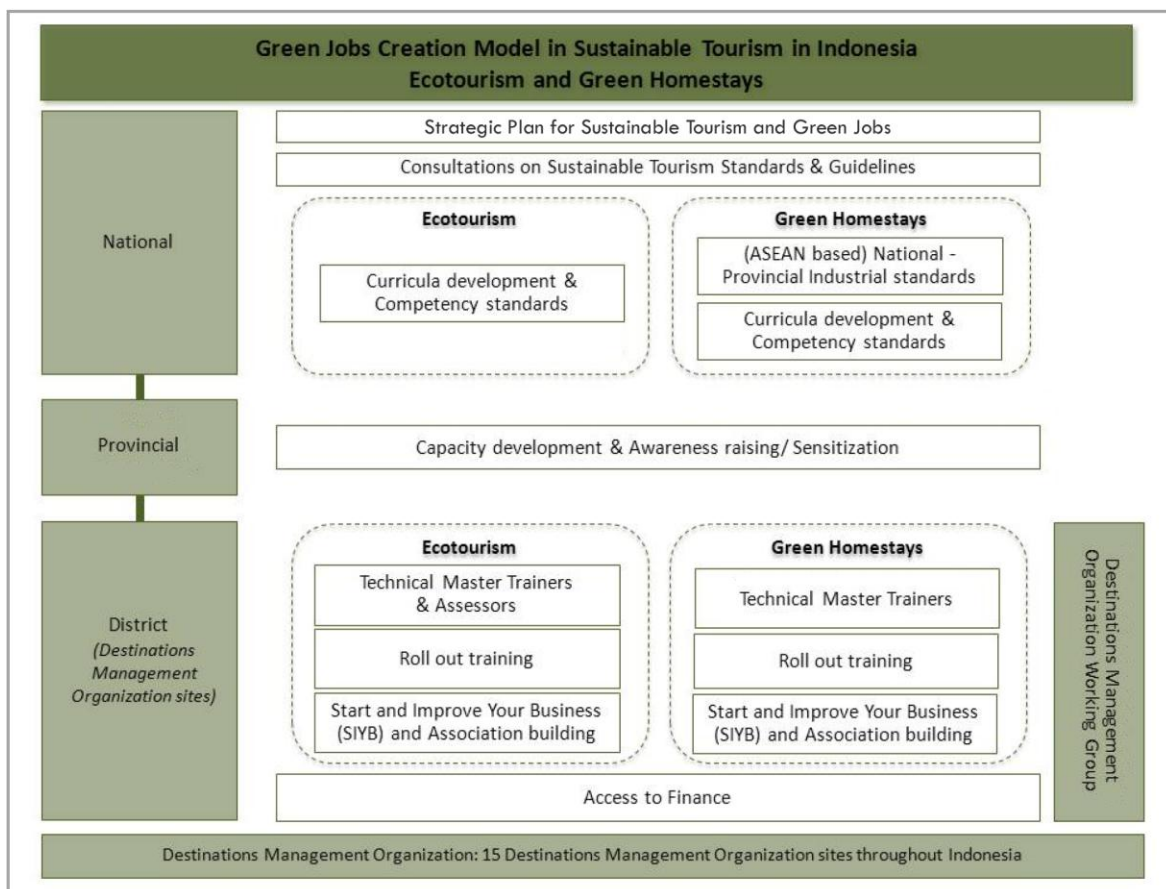


Sumber: Butler (1980)

Lampiran 11 : Green Jobs Strategic Model



Source: ILO (2012)



Source: ILO (2012)

BIBLIOGRAFI

ⁱILO (2011a): Green Jobs in Asia Brochure.

ⁱⁱILO (Mar. 2012): Green Jobs in Asia Project-Project Status Brief.

ⁱⁱⁱEijgelaar (2010)

^{iv}CBS (2010): Traveling Population Survey 2010.

^vCBS (2011): Traveling Population Survey 2010.

^{vi}Eijgelaar (2010)

^{vii}World Ban (2011): Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs

^{viii}UNWTO (2009): The Policy on Development of Tourism Human Resources in Indonesia.
<http://statistics.unwto.org/sites/all/files/pdf/laksaguna.pdf>

^{ix}Hildiktipari (2012): <http://www.hildiktipari.org/>.

^xTHE-ICE (2012): <http://www.the-ice.org/>

^{xi}UNWTO (2012): Certification System TedQual.
http://dtxqt4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/tqcertificacion-en_0.pdf

^{xii} The further development of the human resources to meet anticipated tourism growth in Indonesia and for the workforce to experience competitive work conditions and remuneration include the core components of the ILO definition of 'decent work', namely:

... opportunities for women and men to obtain decent and productive work in conditions of freedom, equity, security and human dignity

... aspirations of people in their working lives – for opportunity and income; rights, voice and recognition; for family stability and personal development; for fairness and gender equality

... dimensions of decent work that underpin peace in communities and society

... poverty reduction - for achieving equitable, inclusive and sustainable development.

^{xiii}ILO (2011): Toolkit on Poverty Reduction Through Tourism. Geneva

^{xiv}The instruction is addressed to the coordinating Minister for Politics, Legal and Security, Minister for National Education, Minister of Home Affairs, Minister for Communication and Information, Ministry of Finance, Minister of Legal and Human Rights, Minister for Foreign Affairs, Minister of Marine and Fishery, Minister of Industry, Minister of Trade, Minister of Public Works, Minister of Health, Minister of Energy and Mineral Resources, Minister of Forestry, Minister of Transportation, Minister for State Enterprises, Head of National Land Authority, Head of Investment Coordinating Board, Head of the Police Department, all Governors, Bupati-s and Mayors, and specifically Minister for Culture and Tourism to prepare complete information, improve cooperation with provincial and local governments, as well as international partners to support

promotional activities, support development of prime destination and improve awareness of the conservation of cultural and tourism attractions.

^{xv}UNWTO (2012): Definition of Sustainable Tourism.
<http://sdt.unwto.org/en/content/about-us-5> Accessed 5 March 2012)

^{xvi}UNWTO (n.a.) Definition of Sustainable Tourism.
Source: <http://sdt.unwto.org/en/content/about-us-5>

^{xvii}UNWTO (1999): Global Code of Ethics for Tourism.

^{xviii}Holden in Jafari (2000)

^{xix} UN-WOMEN (2011): Tourism a Vehicle for Gender Equality and Women's Empowerment.
<http://www.unwomen.org/2011/03/tourism-a-vehicle-for-gender-equality-and-womens-empowerment/>

^{xx}Ecolabel Index (2012): All Ecolables in Indonesia.
<http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=country,id>

^{xxi}GSTC (2011): GSCT Criteria.
<http://new.gstcouncil.org/resource-center/gstc-criteria>

^{xxii}Global Sustainable Tourism Council 2012

^{xxiii}In 2011, the Ministry of Tourism and Creative Economy commissioned the report, "A Green Growth 2050 Road-Map for Bali Tourism". The report is at completed draft stage and will be shortly submitted to the Minister for consideration and subsequent actions. While 'Bali specific', it may include recommendations relevant and adaptable to other destinations within Indonesia.

^{xxiv} Law No 24, 2007 on Disaster Mitigation, par 1

^{xxv} Nawangsidi (2008)

^{xxvi} Law No 24-2007

^{xxvii} MoTCE (2011)

^{xxviii} ILO (Apr 2012): Mainstreaming Green jobs into National Policies.

^{xxix} Apindo (2011)

^{xxx} ILO (2011): Toolkit on Poverty Reduction Through Tourism. Geneva

^{xxxi} ILO (2011): Toolkit on Poverty Reduction Through Tourism. Geneva